

PROSIDING KONFERENSI NASIONAL SEJARAH X

7 - 10 NOVEMBER 2016

“BUDAYA BAHARI DAN DINAMIKA KEHIDUPAN
BANGSA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH”

JILID VII

SUBTEMA VII

PEMIKIRAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN SEJARAH



KONFERENSI NASIONAL SEJARAH X
JAKARTA, 7 - 10 NOVEMBER 2016

DIREKTORAT SEJARAH
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROSIDING KONFERENSI NASIONAL SEJARAH X

Budaya Bahari dan Dinamika Kehidupan Bangsa dalam Persepektif Sejarah

Jakarta, 7 – 10 November 2016

Pengarah

Hilmar Farid (Direktur Jenderal Kebudayaan)

Triana Wulandari (Direktur Sejarah)

Penanggung Jawab

Amurwani Dwi Lestariningsih

Penyusun

Tirmizi

Isak Purba

Esti Warastika

Budi Harjo Sayoga

Pengelola Tata Letak

Haryanto

Bariyo

Maemunah

Dwi Artiningsih

Desain Sampul

Dirga Fawakih

Gambar Sampul

KITLV (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde)

Diterbitkan oleh

Direktorat Sejarah

Direktorat Jenderal Kebudayaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tahun 2016

ISBN

KATA PENGANTAR

Puji Syukur *Alhamdulillah* Kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memudahkan kami dalam menghimpun makalah-makalah yang disajikan dalam Konferensi Nasional Sejarah X yang diselenggarakan oleh Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bekerja sama dengan Masyarakat Sejarawan Indonesia di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Indonesia pada tanggal 7-10 November 2016.

Makalah-makalah tersebut berasal dari 60 Pemakalah yang telah lolos seleksi abstrak dan 40 pemakalah ditunjuk oleh panitia pengarah. Makalah merupakan hasil penelitian ilmiah yang orisinal dan belum pernah dipublikasikan. Selain mempertemukan para sejarawan dan berbagai yang menaruh minat dalam kesejarahan, Konferensi menjadi forum diskusi yang dinamis di antara mereka untuk mempertajam dan menyempurnakan konsep, metode dan metodologi.

Himpunan makalah berisi 7 subtema: Jaringan Pelayaran Nusantara; Sistem Pengetahuan dan Tradisi Bahari; Laut dalam Dinamika Kekuasaan; Laut dalam Historiografi Sastra dan Seni; Berita Asing tentang Alam Nusantara dalam Peralihan Zaman; Dinamika Antardaerah dan Negara; dan Pemikiran Pendidikan dan Pengajaran Sejarah. Subtema-Subtema ini disatukan dalam tema besar konferensi, yaitu “*Budaya Bahari dan Dinamika Kehidupan Bangsa dalam Perspektif Sejarah*”.

Karena keterbatasan teknis, himpunan makalah ini jauh dari lengkap. Untuk itu, kami mohon maaf. Pada akhirnya dengan dihimpunnya makalah hasil Konferensi Nasional Sejarah X ini diharapkan dapat mendorong upaya melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap berbagai aspek kesejarahan dan penulisan sejarah nasional baik dalam kaitannya dengan pembangunan karakter bangsa maupun dalam pengembangan ilmu sejarah itu sendiri dan mencermati perkembangan pengajaran sejarah

Jakarta, Desember 2016

Panitia Konferensi Nasional Sejarah X



LAPORAN KEGIATAN

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Konferensi Nasional Sejarah X Jakarta, 7 November 2016

Yth. Ibu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
Yang Kami hormati Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
Yang Kami hormati Prof. Dr. Taufik Abdullah, sejarawan senior Indonesia;
Yang Kami hormati Dr. Hasjim Djalal, diplomat senior kita;
Yang Kami hormati Prof. Dr. Anthony Reid;
Yang Kami hormati Prof. Dr. Leonard Y. Andaya;
Yang Kami hormati Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia, Dr. Muklis PaEni;
Yang Kami hormat Persatuan Sejarawan Malaysia;
Yang Kami hormati Historian of Philipine;
Yang Kami hormat Direktorat Jenderal Kebudayaan;
Para sejarawan dari seluruh Indonesia dan para undangan yang berbahagia.

*Assalamualaikum Warahmatullah hiwabarokatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om suastiastu
Salom...*

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan barokah-Nya, kita dapat bertemu dalam suasana yang berbahagia ini, dalam Konferensi Nasional Sejarah X.

Ibu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang kami muliakan,

Kami sampaikan, bahwa setiap lima tahun sekali Konferensi Nasional Sejarah diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Masyarakat Sejarawan Indonesia. Konferensi Nasional Sejarah ini diikuti dari berbagai kalangan profesi. Baik dari kalangan dosen-dosen sejarah, guru-guru sejarah, komunitas pengiatan sejarah, maupun mereka yang mempunyai minat dan tertarik untuk mengembangkan sejarah itu sendiri.

Konferensi yang diikuti dari berbagai ragam kalangan ini mencerminkan dari tujuan diselenggarakan kegiatan ini, yaitu ingin mendekatkan sejarah bukan saja sebagai sebuah ilmu yang jauh di masa lampau, akan tetapi sejarah juga merupakan titik tolak pendidikan karakter bagi generasi mendatang.

Bapak/Ibu hadir yang berbahagia,

Pada tahun ini Konferensi Sejarah Nasional X mengambil tema “***Budaya Bahari dan Dinamika Kehidupan Bangsa dalam Prespektif sejarah***”. Sebagai bangsa yang mempunyai lautan dengan bertaburan pulau-pulau, sudah waktunya kita kembali melihat laut sebagai penghubung diantara pulau-pulau itu. Bukti-bukti telah menunjukkan betapa bangsa kita pernah berjaya di laut. Apakah kita hanya ingin mengenang romantisme itu sebagai sebuah kenangan lama saja? Kita punya modal sejarah yang dapat mencermati dan memaknai “masa lalu” itu, modal sejarah inilah yang perlu kita gunakan sebagai titik tolak membangun kembali sebagai “bangsa yang jaya di laut”. Peran pendidikan amatlah relevan untuk mendekatkan pada seluruh masyarakat pentingnya budaya bahari dan negara maritim. Baik itu melalui pendidikan formal maupun non formal. Untuk itu dinamika pemikiran dan model-model pembelajaran sejarah mempunyai peran sangat penting dalam rangka mewujudkan bangsa yang kuat di bidang maritim. Kita juga berharap peran serta masyarakat juga penting untuk memberikan pemahaman tentang laut sebagai masa depan. Penguatan karakter bangsa melalui pendidikan sejarah perlu terus didorong agar pemahaman visi kelautan dapat dipahami generasi muda.

Bapak/Ibu hadirin yang berbahagia,

Kali ini konferensi mengangkat tujuh subtema, yaitu 1) Jaringan Pelayaran Nusantara; 2) Sistem Pengetahuan dan Tradisi Bahari; 3) Laut Dalam Dinamika Kekuasaan; 4) Laut Dalam Historiografi Tradisional, Sastra, dan Seni; 5) Berita Asing tentang Alam Nusantara dalam Peralihan Zaman; 6) Dinamika Antardaerah dan Negara; 7) Pemikiran Pendidikan dan Pengajaran Sejarah.

Untuk itu kami mohon kepada Ibu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, berkenan untuk membuka konferensi ini.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh

Om Santi---Santi ---Santi Om

Salom

**Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Muhadjir Effendi**



SAMBUTAN PEMBUKAAN

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Dalam Konferensi Nasional Sejarah X Jakarta, 7 November 2016

Yth. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
Yang Kami hormati Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
Yang Kami hormati Prof. Dr. Taufik Abdullah, sejarawan senior Indonesia;
Yang Kami hormati Dr. Hasjim Djalal, diplomat senior kita;
Yang Kami hormati Prof. Dr. Anthony Reid;
Yang Kami hormati Prof. Dr. Leonard Y. Andaya;
Yang Kami hormati Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia, Dr. Muklis PaEni;
Yang Kami hormat Persatuan Sejarawan Malaysia;
Yang Kami hormati Historian of Philipine;
Yang Kami hormat Direktur Jenderal Kebudayaan;
Para sejarawan dari seluruh Indonesia dan para undangan yang berbahagia.

*Assalamualaikum Warahmatullah hiwabarokatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om suastiastu
Salom...*

1. Pertama-tama izinkanlah saya memanjatkan puji syukur kepada Tuhan YME atas segala rahmat dan hidayahnya kita senantiasa diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu dalam Konferensi Sejarah Nasional X. Injinkanlah pula saya dalam kesempatan ini mengucapkan selamat kepada para sejarawan dari seluruh Indonesia atas terselenggaranya acara ini.
2. Dalam kehidupan kita sehari-hari sejarah adalah sesuatu yang penting, tidak saja untuk mengenang masa lalu, tetapi sejarah juga untuk mengingat peristiwa yang dapat memupuk rasa persatuan dan mempertajam visi kedepan.

-
3. Walaupun saya bukan seorang sejarawan, tetapi saya tahu juga kenangan-kenangan yang masih hidup pada bangsa kita. Orang Aceh membanggakan hasil pujangganya seperti Hamzah Fanzuri, Abdullah Al-singkili, maupun Araniri. Pujangga-pujangga itu tidak saja mengembangkan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Indonesia, tetapi juga pengetahuan tentang agama, filsafat, juga sejarah.
 4. Di satu saat, ketika Kesultanan Malaka menjadi pusat perdagangan kedua terbesar setelah Konstanstinopel banyak orang-orang Jawa, Sumatera berdagangan di negeri ini. Ketika Kesultanan Malaka jatuh, maka muncullah kerajaan-kerajaan baru. Kesultanan Aceh berdiri, disusul kemudian Kesultanan Demak, serta kerajaan-kerajaan lain di sepanjang pantai utara Jawa. Perluasan pengaruh juga oleh tentara-tentara Kesultanan Pantai Utara Jawa. Pada abad ke-18, kita hidup dalam naungan Negara maritim.
 5. Bila kita bicara sastra klasik itu, saya juga akan diingatkan pada karya-karya sastra Jawa yang diajarkan oleh guru sejarah saya dulu, yaitu tentang Negara Kartagama—tentang Majapahit yang menguasai lautan dan pengaruhnya yang luas dari Sumatera hingga Papua, yang menambah keakraban kita.
 6. Satu karya klasik yang sempat saya baca dan masih saya ingat adalah naskah klasik Tufat Hanafis. Naskah ini juga sangat menarik bercerita tentang berdirinya Kesultanan Melayu Riau. Aliansi Melayu dengan Bugis di Kepulauan Riau. Bagi saya naskah ini sangat menarik, dari naskah ini pula saya mengerti kehebatan Raja Haji pada pertengahan abad ke-18 dapat mengalahkan armada Belanda dan dua kapal besar Belanda ditenggelamkan. Kemudian Raja Haji menyerbu Malaka pada waktu bersamaan Raja Belanda datang. Diceritakan dalam kitab Raja Haji, bahwa saat itu Raja Haji memegang keris di tangan kanan dan kitab agama di tangan kiri. Pada saat itulah Raja Haji tertembak saat diserang oleh Belanda dan gugur dalam serangan itu. Maka diberilah gelar Raja Haji dengan “**Raja Haji Fisabilillah**”. Saat ini Raja Haji telah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional.
 7. Bukan saja masa lampau kita yang ditandai dengan kebesaran-kebesaran Negara Maritim, tetapi kita juga diingatkan pada kehidupan suatu bangsa yang tradisi kesehariannya tidak lepas dari dunia bahari. Suatu tradisi kemaritiman yang saat itu masih memandang laut sebagai pemisah. Bila sudah begini saya jadi teringat, bahwa laut bukan saja sebagai pemisah bagi kita, akan tetapi laut juga merupakan pemersatuan antara satu pulau dengan pulau yang lainnya.
 8. Kalau kita mengunjungi daerah di pulau-pulau di Indonesia, saya teringat seorang sejarawan kita dengan “**Jaringan Memori Kolektif**”. Orang Bugis – Makasar akan diingatkan dengan Gowa-Tallo-Makasar. Orang Banjar diingatkan dengan Demak, bahkan orang Minangkabau mendapat kedalaman Islamnya dari Aceh. Orang Ternate--Maluku akan diingatkan dengan Tuban. Orang-orang Bima diingatkan oleh Riau. Orang Papua diingatkan oleh Ternate. Jaringan memori kolektif ini dibangun dengan tradisi maritim yang kuat. Hubungan antara guru-murid, ulama-umarah, dan jaringan

perkawinan yang sulit untuk lupakan. Jaringan memori kolektif inilah yang telah lama membangun hubungan antarpulau di Nusantara.

9. Pada awal abad ke-19, kehidupan maritim kita mulai merosot. Pada saat itulah kita memulai babak baru. Kita mulai berpindah menjadi Negara yang berorientasi pada dunia pertanian, sebagai Negara Agraris. Suatu kehidupan Negara bertumpu pada budaya darat.
10. Sudah waktunya kita memahami perjalanan kita, modal sejarah kita setidaknya dapat kita maknai sebagai titik tolak untuk membangun visi kedepan kita sebagai bangsa bahari yang tangguh. Laut sebagai penghubung adalah modal dasar untuk memperkuat jaringan ekonomi, budaya, politik, dan sosial bangsa Indonesia sebagai Negara Maritim yang disegani oleh Negara-negara tetangga dan dunia di masa-masa mendatang.
11. Akhirnya saya mengucapkan selamat menjalankan Konferensi Nasional Sejarah. Saya menunggu hasil kongkrit Konferensi ini sebagai sebuah kerja nyata dalam membangun budaya bahari dan negara maritim baik di bidang budaya, pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh

Om Santi---Santi ---Santi Om

Salom

**Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Puan Maharani**

RUMUSAN KONFERENSI NASIONAL SEJARAH KE-10
HOTEL GRAND SAHID, JAKARTA
7-10 NOVEMBER 2016

Konferensi Nasional Sejarah ke-10 dengan tema : “*Budaya Bahari dan Dinamika Kehidupan Bangsa dalam Perspektif Sejarah*”, berlangsung dari tanggal 7-10 November 2016, bertempat di Hotel Grand Sahid. Konferensi ini diikuti 300 orang peserta yang berasal mulai dari Aceh hingga Papua. Ikut juga sebagai bentuk utusan Persatuan Sejarawan Malaysia (PSM) dan *Philippine Historical Association* (PHA), dan sejumlah pengamat dari kalangan penggiat kajian sejarah. Konferensi membahas 100 makalah tentang berbagai aspek dari dinamika budaya bahari, sejak masa silam, sampai sekarang. Berbagai wacana yang diharapkan untuk masa depan juga disampaikan.

Salah satu daya tarik akademis Konferensi Nasional Sejarah ini ialah empat *keynote addres* yang disampaikan oleh tiga ilmuwan terkemuka di dunia akademis internasional. Setelah mengikuti acara dengan cermat dan seksama, serta sambutan dari Presiden Republik Indonesia, yang diwakili oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta wacana yang berkembang dalam diskusi, maka Konferensi Nasional Sejarah ke-10 menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sejarah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang memberikan gambaran peristiwa dan kejadian dalam perjalanan waktu. Sejarah bukanlah sekedar romantisme masa lalu, tetapi wawasan yang bisa juga memberikan perspektif ke depan dengan lebih arif tanpa harus mengulang kesalahan yang pernah terjadi.
2. Tema utama Konferensi Nasional Sejarah disesuaikan dengan cita-cita pembangunan kembali budaya maritim bangsa sebagaimana yang ditekankan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, tonggak utama kebijakan bangsa menempatkan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang terkemuka.
3. Dalam wawasan dunia kemaritiman tanah dan laut adalah satu kesatuan. Adaptasi kehidupan manusia yang bijaksana dalam lingkungan kemaritiman akan menciptakan masyarakat maritim di satu kawasan yang dikenal dengan “sistem laut” atau “mikro region” yang saling terhubung dalam membentuk jaringan yang saling bertautan.
4. Negara maritim dan pemupukan budaya bahari adalah wawasan bangsa yang melestarikan dan mengembangkan nilai dan semangat yang menempatkan laut sebagai basis perjuangan bangsa. Dengan semangat merdeka inilah etos kebaharian dari berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia harus selalu sekayuh.
5. Menekankan pentingnya peningkatan peran sejarah dalam penguatan karakter bangsa Indonesia melalui pemikiran pembelajaran sejarah yang dapat mendorong daya aktifitas, kritis dan kemampuan dalam mengelola resiko. Pengajaran sejarah dilakukan dengan mengajak siswa bermain peran lebih efektif dibandingkan mendengar ceramah tentang sejarah. Dengan begini anak-anak dapat menghayati,

meresapi berbagai macam kejadian sejarah baik dalam konteks sejarah nasional Indonesia maupun dalam konteks mengisi perjuangan di era sekarang.

6. Dalam jalur pelayaran dunia yang menghubungkan Timur dan Barat, muncul pusat-pusat pertumbuhan sosial, ekonomi, kebudayaan dan politik yang mempertautkan lautan dan daratan melalui pelabuhan dan perkembangan kota-kotanya. Dinamika kehidupan masyarakat pun menjadi lebih kompleks dengan berbagai aspek dan karakter yang terbentuk sehingga mewujudkan peradaban baru di kota-kota pelabuhan. Karena itulah bisa dikatakan juga betapa pentingnya memahami aspek geografis untuk menguasai pelayaran dan perdagangan. Dalam sejarah pelayaran dan perdagangan, masa keemasan atau "kurun niaga" berlangsung selama abad 15 – 18 Masehi memposisikan Indonesia dalam "Poros Maritim Dunia", di mana rempah-rempah menjadi daya tarik utama.
7. Sistem pengetahuan dan tradisi kebaharian yang dimiliki bangsa Indonesia seperti ilmu astronomi sebagai penunjuk arah, teknologi perkapalan, organisasi pelabuhan, sistem budaya, kepercayaan kelembagaan bahari, tradisi lisan, lembaga budaya serta sistem-sistem budaya dengan kepercayaan masyarakat bahari yang menjadi khazanah kearifan lokal pengetahuan tradisi bahari perlu ditumbuh kembangkan.
8. Laut adalah ajang pergulatan nasib manusia demi peningkatan harkat kemanusiaan melalui pergumulan di laut sepanjang abad dengan berbagai motif dan kepentingannya.
9. Laut adalah pula sumber inspirasi, tidak hanya dalam bidang ekonomi dan sosial-politik, akan tetapi juga dalam corak dan dinamika pemikiran intelektual menjadikan pedoman bagi kehidupan masyarakat bahari, seperti yang termuat dalam historiografi tradisional, sastra dan seni.
10. Berita asing tentang alam Nusantara dalam peralihan zaman yang dibawa oleh para pelawat dari berbagai belahan dunia-pusat-pusat perdagangan, kekuasaan dan penyebaran agama serta kekuasaan menjadi sumber penting dalam rekonstruksi sejarah, khususnya sejarah maritime Indonesia. Karena itulah pemerintah diharapkan dapat memberi perhatian terhadap perlunya sebuah program khusus menyangkut sumber-sumber informasi asing tersebut.
11. Salah satu ciri penting dari dinamika pelayaran laut adalah cairnya wilayah kekuasaan, yang ditunjukkan dalam jaringan Islam Nusantara. Adanya jaringan memori kolektif ditunjukkan oleh hubungan guru dengan murid, di antaranya para ulama yang menyatukan Nusantara. Integrasi ranah peradaban Nusantara dimungkinkan terutama karena ranah ini adalah sebuah 'benua maritim' yang cair dan mengalir sehingga mendekatkan dan mengintegrasikan tradisi Islam lokal daerah menjadi Islam Nusantara yang distingtif.
12. Budaya maritim dan negara maritim hanya bisa dipahami oleh seluruh masyarakat jika melibatkan institusi pendidikan baik melalui pendidikan formal maupun informal. Untuk itu perlu dilakukan perubahan kurikulum, yang berbasis pada karakter bidang maritim.

Rekomendasi:

1. Perlunya pembangunan budaya bahari sebagai landasan dari sebuah Negara maritim yang telah menyatakan laut sebagai pemersatu bangsa.
2. Perlunya paradigma baru dalam merumuskan visi kelautan Indonesia untuk pembangunan manusia. Dinamika laut tidak hanya pada permukaannya tetapi juga kekayaan yang terdapat di dalamnya.
3. Perlunya pemupukan tradisi historiografi Indonesia yang melihat laut sebagai dimensi baru dalam dinamika pembangunan.
4. Perlunya penguatan pendidikan karakter bangsa melalui perubahan dalam proses dalam pembelajaran sejarah dengan menampilkan drama, film dokumenter dan dalam bentuk-bentuk lainnya
5. Perlunya melakukan ‘revolusi mental’ bangsa melalui kebijakan penataan kembali sistem pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan sejarah, seperti rekonstruksi kreatif sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, serta semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
6. Perlunya strategi kebudayaan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara poros maritim.
7. Menghidupkan kembali kegiatan nyata untuk menumbuhkan kembangkan semangat dan cinta laut seperti Arung Sejarah Bahari (AJARI) yang diikuti generasi muda khususnya mahasiswa dari seluruh Indonesia.

Tim Perumus:**Ketua**

- Prof. Dr. Taufk Abdullah

Sekretaris

- Dr. Restu Gunawan

Anggota

- Hilmar Farid, Ph. D
- Dra. Triana Wulandari, M.Si
- Dr. Mukhlis PaEni
- Dr. Anhar Gonggong
- Prof. Dr. Azyumardi Azra, M.A
- Dr. Saleh As’ad Djamhari
- Dr. Mohammad Iskandar
- Prof. Dr. Said Hamid Hasan

-
- Prof. Dr. Susanto Zuhdi
 - Prof. Dr. Oman Fathurahman
 - Drs. Agus Santoso, M.Hum
 - Dr. Didik Pradjoko
 - Nurni Wahyu Wuryandari, Ph. D
 - Dr. Achmad Syahid
 - Amurwani Dwi Lestariningsih, M.Hum

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Laporan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Sambutan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Rumusan Konferensi Nasional Sejarah X

Subtema 7: Pemikiran Pendidikan dan Pengajaran Sejarah

1. *Pendidikan Sejarah Maritim*
2. *Rethinking Education: Anomali Peradaban dalam Dunia Pendidikan Guru Kita*
3. *Integrasi Tradisi Lisan Komunitas Bahari dalam Pembelajaran Sejarah di Sekolah dalam Rangka Pengembangan Karakter Siswa*
4. *Sejarah Maritim dalam Kurikulum Pendidikan di Sekolah (Implementasi Visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia)*
5. *Model Lacak Jejak Berbasis Narasi Imajinatif: Upaya Membangun Higher Order Thinking Skill dalam Pembelajaran Sejarah*
6. *Konstruksi Nilai-Nilai Karakter Melalui Paradigma Pedagogi Reflektif (PPR) dalam Materi Sejarah Maritim untuk SMA*
7. *Menguatkan Visi Kemaritiman dalam Pembelajaran di Wilayah Pedalaman*
8. *Museum: Sumber Pengajaran Sejarah dan Budaya Bahari*
9. *Wawasan Nusantara sebagai Strategi Pembangunan Maritim Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia*
10. *Persepsi Maritim dan Implikasinya terhadap Kedaulatan Negara dalam Konteks Kesejarahan*
11. *Optimalisasi Fungsi Museum Maritim Indonesia sebagai Upaya Membangkitkan Budaya Maritim dan Wawasan Nusantara*



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Konferensi Nasional Sejarah X

Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta
7-10 November 2016

Subtema 7: Pemikiran Pendidikan dan Pengajaran Sejarah



KONFERENSI NASIONAL SEJARAH X



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Konferensi Nasional Sejarah X

Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta
7-10 November 2016

Pendidikan Sejarah Maritim

Prof. Dr. S. Hamid Hasan



KONFERENSI NASIONAL SEJARAH X

PENDIDIKAN SEJARAH MARITIM

S. HAMID HASAN¹

Universitas Pendidikan Indonesia

ABSTRAK

Pendidikan Sejarah Maritim menghendaki suatu pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pendidikan sejarah intelektual. Artinya, Pendidikan Sejarah Maritim tidak hanya membahas fakta sejarah politik dan narasi sejarah politik. Pendidikan Sejarah Maritim perlu membahas aspek-aspek ilmu dan teknologi serta sistem perdagangan yang menjadi konstruksi dasar dalam narasi Sejarah Maritim. Konsep-konsep seperti kerajaan, sistem navigasi, perdagangan, teknologi perkapalan, teknologi makanan, pemasaran, komunikasi, pengetahuan pelayaran, dan kewirausahaan merupakan konsep penting dalam pemahaman suatu kerajaan maritim. Sikap menyenangkan kelautan sebagai suatu sumber kehidupan yang tak terhingga perlu ditumbuhkembangkan untuk mengembangkan orientasi kehidupan maritim. Orientasi ini menyebabkan pendidikan Sejarah Maritim tidak saja merupakan perluasan pengetahuan dari sejarah politik tetapi juga merupakan suatu materi pendidikan yang merupakan *entity* tersendiri.

Permasalahan lain dari Pendidikan Sejarah Maritim adalah upaya untuk membuat pembelajaran Sejarah Maritim tidak terbatas pada wilayah pendidikan yang dekat atau pewaris kerajaan maritim. Pendidikan Sejarah Maritim harus menusantara dan ini merupakan karakteristik lain dari Pendidikan Sejarah Maritim. Siswa yang belajar sejarah politik dapat dikatakan bersifat tidak perlu dibedakan antara siswa yang tinggal di daerah pantai dan di daerah pedalaman yang agraris. Sebaliknya, Pendidikan Sejarah Maritim perlu memperhatikan perbedaan latar belakang siswa berdasarkan wilayah tempat tinggal mereka karena yang tinggal dekat pantai memiliki visi yang berbeda tentang laut dibandingkan mereka yang di daerah pedalaman.

Kenyataan seperti itu menyebabkan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar Pendidikan Sejarah Maritim memiliki kekhasan. Makalah ini membahas aspek-aspek yang terkait dengan komponen pembelajaran yang bersifat khas sebagaimana dikemukakan di dua alinea terdahulu.

¹ Guru Besar Pendidikan Sejarah, Universitas Pendidikan Indonesia. Anggota Dewan pakar MSI, Ketua Umum APPS. Dikemukakan pada Seminar MSI: Budaya Bahari dan Dinamika Kehidupan Bangsa Dalam Perspektif Sejarah. Jakarta 7-10 November 2016

PENDAHULUAN

Bagi sebagian besar bangsa Indonesia laut dan berlayar bukan sesuatu yang baru. Teori kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia, baik bangsa Melanesoid dan Melayu, selalu dikaitkan dengan pelayaran. Perahu cadik yang masih digunakan nelayan di wilayah tertentu menjadi warisan yang sangat kental dengan pelayaran dan kehidupan laut. Kepulauan Indonesia merupakan panggung sejarah bagi sejumlah peristiwa sejarah, memberikan tantangan untuk membangun kehidupan laut. Hubungan antar pulau, perdagangan antar pulau menjadi warna kehidupan yang dominan. Bukan makanan yang diperdagangkan karena dua pola makanan utama yaitu beras dan sagu, baru berubah menjadi beras pada masa yang sangat dekat dengan kehidupan masa kini. Laut menyediakan ikan, makanan utama bagi sebagian masyarakat Indonesia dan pendamping utama bagi sebagian lain dimana nasi mau pun sagu. Ikan dan apa yang disediakan laut menjadi pendamping nasi dan sagu yang sangat disukai.

Indonesia adalah negara dengan jumlah kepulauan terbanyak di dunia, sekitar 17,508 pulau dan yang terhuni 6.000 pulau (Wikipedia). Oleh karena itu Indonesia dijuluki sebagai *the biggest archipelago republic in the world*. Posisi ini memberikan Indonesia menjadi negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Kenyataan historis ini menunjukkan bahwa Indonesia mengenal, mewarisi, dan hidup dari laut sehingga sampai saat ini, telah melahirkan komunitas nelayan dan pelaut-pelaut tangguh. Pelaut-pelaut dari Madura, Makassar/Bugis masih kuat mempertahankan kehidupan mereka sebagai pewaris pelaut besar sebagaimana wilayah lain yang juga memiliki kehidupan laut dan pelaut yang tangguh. Memang perlu disayangkan bahwa tradisi pelaut ini tidak merata diwariskan kepada banyak komunitas di Indonesia, dan yang kebanyakan menjadi pewaris sebagai nelayan. Memang angkatan laut Indonesia memiliki semboyan yang mencerminkan warisan kedigjayaan sebagai negara pelaut Jalesviva Jaya Mahe (di laut kita jaya) walau pun ALRI belum menjadi kekuatan yang diunggulkan.

Sementara itu, adalah suatu kenyataan sejarah bahwa bangsa ini pernah memiliki kerajaan-kerajaan yang digjaya di laut. Contoh yang paling sering ditunjukkan adalah kerajaan Sriwijaya dan Majapahit (PriamPrimbono, 2015d), selain kerajaan Tidore, Ternate, Aceh, Melayu, Demak, Cirebon, Banten, dan banyak lagi. Kerajaan-kerajaan ini merupakan kerajaan yang dikenal di negara-negara seperti Cina, India, bahkan sampai ke negara-negara di Eropa. Barang-barang dagang utama yang mereka perjual belikan berupa hasil tanaman,

dan lebih khusus lagi rempah-rempah. Rempah-rempah yang merupakan penyedap makanan berkenaan dengan langsung dengan salah satu kebutuhan primer manusia yaitu makan. Manusia dapat menahan diri untuk tidak memiliki benda-benda sekunder tetapi tidak mungkin tidak makan, dan rempah-rempah menjadi penyedap makanan. Oleh karena itu, walau pun Cina menjajakan hasil teknologi seperti guci, dan perlengkapan makanan, kedudukan rempah-rempah tak terkalahkan. Barang teknologi yang diperdagangkan Cina bukanlah suatu kebutuhan primer dan dapat digantikan oleh barang lain yang berfungsi sama, berbeda bahan dasar atau pun berbeda dalam kualitas tetapi memiliki fungsi yang sama.

Rempah-rempah berbeda dengan barang teknologi tersebut, tidak ada barang yang dapat menggantikan rasa yang diberikan oleh rempah-rempah, sampai hari ini. Jika pada masa kemudian dengan teknologi kimia yang canggih sehingga ada perasa yang dihasilkan tetapi rasa alami rempah-rempah yang dihasilkan dari tanaman tidak sama dengan rasa yang diberikan produk kimia tersebut. Rempah-rempah tetap menjadi bagian penyedap makanan, kebutuhan utama manusia, yang tak tergantikan.

Perdagangan rempah-rempah telah menyebabkan terjadinya perubahan besar dalam kehidupan global umat manusia. Rempah-rempah telah menyebabkan terjadinya perdagangan internasional dan keuntungan yang diberikan perdagangan telah menyebabkan terjadi persaingan kekuasaan. Bangsa-bangsa di negara yang tidak menghasilkan rempah-rempah mengembangkan kekuasaan untuk menguasai daerah lain yang menghasilkan rempah-rempah. Penguasaan laut dan jalan laut merupakan suatu keharusan mendatangi dan menguasai daerah-daerah penghasil rempah-rempah. Negara-negara Eropa berkembang menjadi negara dengan kekuatan maritim yang canggih untuk mendatangi dan menguasai daerah-daerah penghasil rempah-rempah. Kesalah-pengertian mengenai laut dan dunia kemudian menyebabkan kekuatan maritim negara Eropa menjadi modal kuat untuk mendatangi dan menguasai daerah-daerah di luar Eropa walaupun bukan penghasil rempah-rempah.

Kerajaan maritim di Indonesia memang tidak menawarkan produk teknologi seperti yang ditawarkan Cina. Rempah-rempah yang menjadi barang dagangan kerajaan maritim Indonesia justeru menjadi barang yang diperlukan di banyak negara karena langsung berkenaan dengan kebutuhan hidup yang paling utama. Orang dapat menahan diri untuk tidak memiliki barang-barang teknologi karena tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar untuk hidup yaitu makan. Ketika Marcopolo datang ke Cina bawaan yang paling berharga ke

Eropa yaitu mi yang kemudian menjadi spaghetti dan menambah variasi makanan orang Eropa yang sangat terbatas. Rempah-rempah Indonesia menjadikan makanan Eropa menjadi lebih enak karena memiliki rasa yang mengundang selera dan memberi kehangatan pada tubuh.

Suatu hal yang tak dipungkiri kalau kemudian rempah-rempah Indonesia menjadi komoditas yang sangat berharga dan memberi keuntungan yang sangat besar. Indonesia, walau pun pada waktu itu nama Hindia lebih dikenal, menjadi penggerak sejarah dunia yang sangat dahsyat melalui rempah-rempah yang dimilikinya. Perjalanan Columbus adalah perjalanan untuk menemukan pulau/kepulauan Hindia yang kaya akan rempah. Perjanjian Thordesillas dan kemudian diperbaharui dengan Saragosa adalah suatu upaya bangsa Portugis dan Spanyol untuk mendapatkan rempah-rempah. Rempah-rempah adalah barang dagangan yang sangat menguntungkan dan sudah menjadi kebutuhan utama untuk mendapatkan makanan dengan rasa yang sangat spektakuler.

Sejak awal rempah-rempah tersebut tidak dibawa bangsa Indonesia, kapal-kapal Indonesia ke Eropa, benua dimana matahari terbenam. Kapal-kapal Indonesia berdagang sampai ke India dan beberapa ke Persia. Dari India dan Persia rempah-rempah tersebut terkumpul di pusat perdagangan Constantinopel. Para pedagang Eropa membeli rempah-rempah “Hindia” di pusat perdagangan Constantinopel. Ketika Constantinopel jatuh ke bangsa Turki pada tahun 1453, bangsa Eropa mengalami kesulitan dalam mendapatkan rempah-rempah. Bangsa Turki yang Islam dan semangat perang Sabil/Salib menimbulkan berbagai masalah dalam perdagangan.

Kapal-kapal Indonesia juga berlayar inter-insuler dan laut lepas. Kapal-kapal Sriwijaya, Majapahit, Tidore, Ternate, Bugis memenuhi pelayaran inter-insuler laut-laut Indonesia. Tetapi juga kapal-kapal itu sampai ke Cina dan India, bahkan sebelum lahirnya kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Hindu-Buddha lainnya. Teori tentang arus balik masuknya pengaruh Hindu dan Buddha yang dikemukakan van Leur hanya mungkin terjadi karena adanya penguasa Indonesia yang memiliki armada laut yang membawa rempah-rempah ke India. Pada masa itu belum ada informasi bahwa rempah-rempah Indonesia sudah mencapai Eropa tetapi jelas sudah sampai Cina dan India tetapi berdasarkan studi Marbun (2014) pelayaran orang-orang Batak sudah sampai ke Amerika Tengah.

Kejatuhan Constantinopel telah menjadi penyebab pelayaran bangsa Eropa ke “Hindia” daerah rempah-rempah di timur. Bangsa Spanyol dan Portugis merupakan dua bangsa Eropa yang paling terkena dampak dalam perdagangan rempah-rempah akibat kejatuhan

Constantinople ke tangan bangsa Turki. Persaingan dalam keuntungan telah menyebabkan bangsa Eropa lain terutama Inggris dan Belanda telah pula terlibat dalam upaya mendatangi dan berdagang langsung dengan “Hindia”. Belanda dengan VOC keluar sebagai pemenang, Inggris yang kalah terpaksa memusatkan kedudukannya di India dan Malaysia, daerah yang dekat dengan Indonesia setelah mengalahkan Portugis. Spanyol harus cukup puas menguasai Filipina. Sebagai pemenang, Belanda menjadi penguasa dan penjajah utama di kepulauan Indonesia.

Kemampuan pelayaran bangsa Indonesia memang menurun ketika di bawah kekuasaan VOC dan Kolonial Belanda. Penguasaan laut di Indonesia adalah penguasa wilayah Indonesia dan oleh karena itu kekuasaan laut bangsa Indonesia harus dilumpuhkan. Perlawanan laut antara kekuasaan Indonesia dengan kekuasaan Hindia Belanda, memberi alasan yang kuat bagi pemerintahan kolonial Hindia Belanda untuk melemahkan kekuasaan bangsa Indonesia di wilayah laut. Upaya untuk melakukan kontrol terhadap barang dagang agar harga tetap memberi keuntungan tinggi memberikan alasan lain bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda melumpuhkan kekuatan laut bangsa Indonesia. Pelabuhan besar Jayakarta yang pernah menjadi pelabuhan utama di regional Asia Tenggara dan Timur, sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah Hindia Belanda dan tidak lagi menjadi pelabuhan bebas bangsa Indonesia, dengan nama baru Batavia yang memberi kesan kuat bahwa wilayah itu adalah milik Hindia Belanda.

Ketika Indonesia menyatakan dirinya merdeka dari penjajahan kolonial Belanda, perhatian terhadap kekuatan laut belum memuaskan. Indonesia belum mampu menguasai lautnya baik yang di dalam pelayaran inter insuler maupun pun dalam pelayaran internasional. Pengamanan kekayaan laut belum efektif untuk perdagangan inter insuler sementara pengembangan pengetahuan dan teknologi kelautan masih sangat belum memuaskan. Perguruan tinggi yang mengembangkan teknologi kelautan masih kalah dibandingkan jumlah perguruan tinggi yang mengembangkan teknologi lain. Sementara itu kekuatan perdagangan laut Indonesia sedemikian terbatas dan dikendalikan Singapura baik untuk ekspor barang ke mancanegara maupun pun untuk impor. Barang-barang dagang Indonesia yang akan diekspor dan barang dagang yang diimpor Indonesia harus melalui gudang-gudang Singapura untuk pemeriksaan. Singapura menikmati posisi ini dan mampu mensejahterakan masyarakatnya. Upaya Indonesia dibawah skema Habibie untuk membangun pelabuhan bebas (free port) untuk barang dagang impor Indonesia merupakan suatu narasi yang tidak memperlihatkan keunggulan Indonesia di bidang maritim.

Sementara itu arah pendidikan Indonesia tidak pula memberi perhatian yang kuat untuk mengembangkan kesadaran, kepedulian, kecintaan, dan membangkitkan peran laut sebagai unsur kehidupan dominan kebangsaan. Ratusan ribu pulau yang dimiliki tidak memberikan tantangan untuk membangun kehidupan kebangsaan maritim. Oleh karena itu sudah selayaknya, arah pengembangan pendidikan ditujukan untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam membangun kembali dan mengembangkan kejayaan maritim sehingga memunculkan nilai-nilai kebaharian sebagai karakter kehidupan kebangsaan.

Sejarah Indonesia adalah mata pelajaran wajib bagi seluruh siswa pendidikan menengah yaitu SMA, SMK, dan MA. Posisi penting ini memberikan kedudukan istimewa bagi mata pelajaran Sejarah Indonesia untuk memegang posisi penting dalam pendidikan karakter bangsa dan terutama karakter yang berwarna dominan bahari. Sudah saatnya mata pelajaran Sejarah Indonesia membangun proses pendidikan yang mampu membangkitkan kesadaran, kepedulian, kecintaan, dan membangkitkan peran laut sebagai unsur kehidupan dominan kebangsaan. Materi yang tercakup dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia memberi dasar yang kuat untuk menopang proses pembelajaran yang demikian. Oleh karena itu pengembangan proses pembelajaran Sejarah Indonesia perlu memperhatikan peran dan pesan moral bangsa tersebut.

TUJUAN DAN KOMPETENSI BELAJAR SEJARAH MARITIM INDONESIA

Pendidikan Sejarah Maritim Indonesia memiliki tujuan yang berbeda dari pembelajaran sejarah politik disebabkan oleh warna dominan gerak kehidupan maritim bangsa Indonesia di masa lalu, kehidupan bangsa Indonesia masa kini, prospek kehidupan maritim bangsa Indonesia di masa mendatang, dan fungsi pendidikan sebagai wahana untuk membangun kehidupan generasi muda bangsa di masa mendatang. Prospek kehidupan bangsa yang diarahkan untuk membangun kejayaan kehidupan maritim bangsa menjadi arah pendidikan Sejarah Maritim Indonesia dengan materi pembelajaran berupa aktivitas kehidupan maritim bangsa Indonesia. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, tujuan Pendidikan Sejarah Maritim Indonesia dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Memahami karakteristik kerajaan maritim Indonesia
2. Memahami faktor-faktor pendukung kegiatan kerajaan maritim Indonesia
3. Menganalisis keterkaitan antara kekayaan agraris dengan kegiatan kemaritiman pada masa kerajaan maritim Indonesia

4. Menganalisis fungsi kemaritiman dalam mempersatukan bangsa Indonesia
5. Mengevaluasi perubahan dan keberlanjutan kehidupan bangsa Indonesia di bidang maritim
6. Mengidentifikasi nilai-nilai kemaritiman yang masih berkembang dan nilai-nilai kemaritiman yang sudah hilang dalam kehidupan bangsa masa kini.
7. Mengembangkan rasa bangga dan kecintaan pada kehidupan maritim bangsa Indonesia
8. Mampu merumuskan dan memilih alternatif program untuk meningkatkan kehidupan maritim masyarakat Indonesia

Tujuan pendidikan Sejarah Maritim di atas dikembangkan untuk siswa SD/MI (mulai kelas 1), SMP/MTs., dan SMA/MA/SMK, disesuaikan dengan tingkat kemampuan berpikir siswa, jenjang kesulitan materi pembelajaran, dan ketersediaan sumber belajar.

Tingkat kemampuan berpikir siswa pada kelas 1-3 masih berada pada kemampuan berpikir konkrit sedangkan tingkat kemampuan berpikir siswa kelas 4 SD/MI masih sudah diambang kemampuan berpikir abstrak dan formal, tingkat kemampuan berpikir siswa kelas 5-6 sudah pada kemampuan berpikir abstrak. Kemampuan berpikir siswa kelas 4 sudah dapat memahami hal-hal yang abstrak walau pun masih terbatas pada lingkungan kehidupan di sekitarnya. Kemampuan berpikir siswa kelas 5-6 sudah dapat memahami hal-hal yang abstrak pada lingkungan yang sudah meluas sampai ke lingkungan negara Indonesia, sejalan dengan lingkup pembelajaran geografi.

Kemampuan siswa SMP/MTs lebih luas dalam lingkup (scope) dan kedalaman kajian (depth) atau tingkat kesulitan dibandingkan siswa SD/MI. Perkembangan kemampuan berpikir mereka sudah sampai pada jenjang berpikir formal lanjut, kemampuan belajar dan tingkat kematangan emosional yang sudah lebih baik. Pemahaman terhadap lingkungan sudah tidak terbatas pada lingkungan bangsa tetapi sudah sampai pada lingkungan global, dan sudah mampu melihat implikasi suatu peristiwa sejarah maritim terhadap kehidupan bangsa Indonesia.

Kemampuan siswa SMA/SMK/MA sudah pada jenjang kemampuan berpikir formal lanjutan dan dengan wawasan sudah sampai pada lingkungan global walau pun tak bersentuhan pada kehidupan kesehariannya. Informasi yang dibaca, didengar dan dilihat sudah dapat memperluas lingkaran wawasan (horizon) yang bersangkutan. Dalam hal ini, mereka yang

berada di daerah kota yang penuh dengan sentuhan informasi dari teknologi informasi dan media televisi memiliki kesempatan meluaskan lingkaran wawasannya sampai ke wilayah yang tidak terkait langsung dengan kehidupannya sebagai seorang warganegara. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah mempercepat perluasan lingkaran wawasannya secara fundamental.

Tujuan pembelajaran Sejarah Maritim merupakan perluasan dari pembelajaran Sejarah Indonesia dan oleh karenanya berbagai tujuan Sejarah Indonesia menjadi tujuan pembelajaran Sejarah Maritim Indonesia (Hasan, 2010a, 2010b)

ISI/KONTEN SEJARAH MARITIM

Isi pendidikan Sejarah Maritim mencakup berbagai bidang kehidupan yang berkenaan dengan kerajaan dan masyarakat maritime Indonesia. Cakupan tersebut meliputi politik untuk mempertahankan hegemoni dan memperluas kekuasaan, ilmu pengetahuan pelayaran dan navigasi, teknologi perkapalan, teknologi makanan, pengetahuan pemasaran, komunikasi, manajemen dan kepemimpinan, semangat bahari, kewiraswastaan, dan nilai-nilai kepahlawanan serta kepeloporan. Kehidupan maritim/bahari memerlukan sejumlah pengetahuan dan sikap yang berbeda dari tuntutan kehidupan manusia di daerah pedalaman dan pegunungan. Mobilitas kehidupan maritim dalam menghadapi suatu lingkungan dengan bentangan horizon yang tak bertepi dan resiko kehidupan yang lebih tinggi dari kehidupan darat menuntut pengetahuan, cara hidup dan wawasan kehidupan yang tidak saja berbeda tetapi dalam banyak hal harus lebih tinggi dari tuntutan kehidupan darat. Sebagai contoh, kehidupan maritim tidak menuntut teknologi bangunan rumah/istana/pemukiman tetapi teknologi perkapalan, dari ukuran kecil untuk kehidupan di dekat pantai sampai ke ukuran besar, yang diperlukan untuk jelajah samudera. Inggris baru menjadi kekuatan maritim dunia pada abad ke 17 di masa pemerintahan Ratu Elizabeth tetapi Sriwijaya, Majapahit, Demak, Makassar, Ternate, Tidore, Melayu sudah lebih dulu. Ketika kebangkitan Inggris dalam armada laut yang berhasil mengalahkan Napoleon di Trafalgar, dan berkembang sebagai kekuatan laut baru yang mengalahkan Spanyol, Portugis dan bangsa Eropa lain telah diberi julukan sebagai kekuatan laut terbaik dunia. Ungkapan *Rule Britania Rule the Wave*, telah mengesankan kekuatan laut Inggris yang *supreme*. Temuan mesin uap dan teknologi perkapalan yang terus berkembang telah menjadikan Inggris sebagai negara maritim dunia.

Sayangnya, gambaran keunggulan kerajaan maritim Indonesia tidak terbangun dalam narasi rinci yang mewakili karakteristik keunggulan kerajaan-kerajaan tersebut. Narasi yang ada, terlihat sangat sumir dan tidak menyangkut aspek-aspek teknologi yang telah dibangun seperti perkapalan. Teknologi perkapalan bukanlah teknologi sederhana ketika aspek-aspek seperti keseimbangan (balance) sebuah kapal diperbincangkan. Kapal yang diluncurkan dan mengarungi wilayah Nusantara adalah kapal dengan keseimbangan yang sempurna walaupun kemudian diberi beban muatan yang cukup banyak. Bagaimana mereka membangun struktur kapal dari kayu dan dengan jari-jari pengikat badan kapal yang demikian banyak. Pengetahuan matematika apa yang mereka gunakan untuk membangun kapal dengan keseimbangan yang sempurna. Bagaimana mereka mempersatukan bagian-bagian itu sehingga kapal-kapal tersebut kuat dalam menantang gelombang laut yang terkadang sangat ganas (Juliandabarro, 2011). Bagaimana mereka mengukur bagian-bagian sehingga terjadi penyambungan yang kuat. Bukankah itu menunjukkan penerapan matematika yang sangat tinggi: apa dasar teoritik matematika mereka dan mengapa terjadi diskontinu sehingga generasi bangsa masa kini tidak mengetahui apalagi mampu mengembangkannya.

Demikian pula dengan pengetahuan tentang bahan sehingga mereka mampu memilih dan menggunakan bahan berkualitas baik. Dengan peralatan sederhana tetapi teknik pengolahan/pengerjaan yang baik, mereka menghasilkan produk. Bagaimana mereka mengembangkan kriteria kualitas produk yang mereka hasilkan dan menjamin kualitas produk tersebut.

Untuk kapal-kapal kecil/perahu yang rentan dan mudah terbalik menghadapi gulungan ombak diciptakan model perahu bercadik. Model perahu bercadik hanya ada di Nusantara, Asia dan Pasifik. Wilayah kajian teknologi perkapalan merupakan materi pembelajaran yang tak terbatas dan menunjukkan keunggulan nenek moyang bangsa. Pemilihan bahan yang cemerlang, presisi dalam pengukuran, pengolahan bahan yang berkualitas tinggi, desain yang rinci dan efektif dalam penggunaan ruang kapal, teknologi layar dalam bentuk dan fungsi, dan kemudi memberikan bahan untuk pengetahuan dan bahan untuk mengembangkan sikap kemaritiman yang sangat kuat pada diri siswa. Pendidikan sejarah maritim Indonesia harus mampu mengembangkan pengetahuan dan sikap untuk semua generasi bangsa mampu mengembangkan pengetahuan dan teknologi tersebut.

Teknologi makanan sangat menentukan keberhasilan pelayaran. Persediaan makanan dan air yang harus cukup untuk jarak tempuh tertentu mengharuskan adanya teknik pengawetan

makanan dan penyimpanan minuman yang baik. Bagaimana mereka melakukan pengawetan makanan, dan seberapa jauh hal tersebut mempengaruhi jalan/navigasi laut yang mereka tempuh.

Selain itu pemahaman tentang laut mungkin sudah merupakan pengetahuan yang hilang. Pada tahun 1960-an, penulis mendapat pengalaman pribadi yang menunjukkan betapa pengetahuan tentang laut merupakan salah satu bagian dari kejayaan maritim yang hilang. Dalam perjalanan dari Bangka ke Jakarta dengan sebuah tugboat yang kecil, tiba-tiba kapten kapal memerintahkan penulis untuk masuk ke ruang kapten. Penulis menanyakan alasan untuk tindakan tersebut, sang kapten mengatakan dia melihat warna air laut dan malaui kajian warnna air laut itu dia mengatakan sebentar lagi akan ada badai. Tidak sampai setengah jam, apa yang dikatakan kapten tersebut terjadi dan kemudian kapal terombang-ambing oleh angin dan gelombang. Ketika penulis menanyakan tingkat bahaya yang sedang dihadapi, dengan tenang kapten mengatakan “tidak bahaya besar hanya kapal terombang-ambing miring ke kiri dan ke kanan” dan paling lama satu jam”. Kembali kapten tersebut benar karena satu jam kemudian badai reda dan kapal kembali stabil. Penulis tanyakan bagaimana sang kapten tahu, sambil tersenyum dia mengatakan warna air laut merupakan indikator wilayah laut, adanya badai, perubahan arus, dan tingkat bahaya yang dihadapi dari gejolak laut. Pengetahuan itu berdasarkan pengalaman yang panjang dia sebagai kapten. Ketika memasuki laut Jawa, kapten berkata bahwa kapal sudah masuk ke laut Jawa karena warna air laut Jawa berbeda dengan warna air laut sebelumnya yang berhubungan dengan laut Cina Selatan.

Apakah pengetahuan seperti itu yang digunakan para kapten kapal dari kerajaan besar bahari Indonesia seperti Sriwijaya, Majapahit, Demak, Melayu, Makassar, Ternate dan lain-lain. Apakah pelayaran pada waktu itu navigasinya dipandu oleh bintang-bintang sebagaimana yang dikemukakan oleh Brandes. Barangkali kita sudah kehilangan banyak dalam kemaritiman bangsa ini di masa lalu. Dengan perkataan lain, dunia pendidikan Indonesia, dan secara khusus Sejarah Indonesia, berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan untuk membangun pewarisan kejayaan masa lalu dan dikaji untuk keberlanjutannya di masa kini dan masa yang akan datang. Mungkin saja dengan teknologi modern untuk kapal-kapal yang terbuat dari besi/logam tetapi apakah tidak ada kesamaan dasar teknologi dalam membangun kapal kayu dan kapal besi?

Kalaulah kerajaan maritim selalu dikaitkan dengan perdagangan dan barang dagangan bukan hasil teknologi tetapi hasil alam seperti rempah², bagaimana prinsip *supply* dan *demand*

diterapkan. Berapa besar mangsa pasar dalam negeri (perdagangan inter insuler) dan berapa besar volume perdagangan luar negeri. Berbagai pertanyaan ekonomi dapat dikaji serta bagaimana posisi wilayah di sekitar siswa terhadap barang dagang pada waktu itu. Apakah daerah mereka menjadi penyedia (supplier) atau pemakai (market) atau penyedia dan pemakai. Suatu hal yang pasti ketika barang dagang tersebut adalah cengkeh dan pala tentu hasil dari wilayah pantai dan dekat pantai tetapi bagaimana dengan bahan rempah lainnya yang dihasilkan tidak di daerah pantai?

Isi materi Sejarah Maritim Indonesia perlu menggambarkan perkembangan peta pelayaran bangsa Indonesia sejak masa kedatangan nenek moyang baik yang melanesoid, proto dan deutro melayu yang menyebabkan adanya persamaan kosa kata dalam berbagai bahasa daerah di Indonesia. Pembahasan persamaan banyak kosa kata tersebut mungkin saja tidak dianggap sebagai materi Sejarah Konvensional atau Sejarah Politik tetapi materi ini sangat penting untuk menggambarkan perjalanan sejarah bangsa ini karena bahasan ini memberikan kesadaran yang kuat kepada generasi muda bahwa lahirnya bangsa Indonesia didukung oleh banyak aspek kehidupan yang sama di antara kelompok-kelompok bangsa yang ada.

Materi pembelajaran yang sudah banyak dikemas dalam narasi kerajaan, kekuasaan, dan perkembangan wilayah tentu saja amat berguna. Materi tersebut perlu diperkaya dengan materi lain seperti kemampuan berpikir (Husband, dkk. 20103) dikemukakan di atas sehingga pembelajaran mengenai Sejarah Maritim bukan hanya sejarah ain dari yang sudah ada tetapi memberi warna yang kental bahwa negara Indonesia adalah negara maritim. Mungkin dengan pengayaan perluasan materi yang demikian maka pernyataan Primbono (2015a) menyalahkan menyebutkan negara Indonesia sebagai negara agraris tidak seluruhnya benar. Sejarah maritim sudah sepantasnya menjadi sejarah dengan tinjauan multi dimensional kehidupan bangsa.

PENDEKATAN PEMBELAJARAN SEJARAH MARITIM

Mempertimbangan kenyataan narasi Sejarah Maritim yang ada dan lingkungan kehidupan bangsa Indonesia masa kini, pendekatan pembelajaran Sejarah Maritim perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembelajaran di daerah yang berada di pesisir pantai/sungai dan menjadi pewaris dari kerajaan maritim Indonesia berbeda dari pembelajaran di daerah pedalaman. Pembelajaran untuk mereka ini memperlihatkan bahwa kerajaan-kerajaan maritim

tersebut ada yang berskala antar wilayah dari satu pulau, antar pulau, dan internasional. Siswa yang berasal dari Jakarta, misalnya, perlu mempelajari posisi pelabuhan Jayakarta/Betawi/Jakarta sehingga sampai ke berbagai negara di Asia dan menarik perhatian bangsa-bangsa Eropa untuk membangun pusat kekuasaan mereka di Jayakarta/Betawi/Jakarta. Siswa di Ternate, Makassar, dan lainnya perlu mempelajari perkembangan pelabuhan-pelabuhan tersebut sehingga terkenal sampai ke benua Eropa dan menarik perhatian bangsa-bangsa Eropa untuk berkuasa.

2. Proses pembelajaran di daerah pesisir dan pewaris perlu memberi kesempatan kepada siswa untuk mempelajari narasi sejarah yang sudah tersedia dalam buku teks atau pun buku referensi, dan diperkaya dengan sumber pertama yang masih terdapat di wilayah tersebut. Mereka perlu mengenal warisan tersebut sebagai bukti dari kejayaan kemaritiman Indonesia dan memberi kesempatan untuk menggunakannya dalam merekonstruksi narasi sejarah mereka (her/his own history).
3. Proses pembelajaran di daerah pendalaman memiliki langkah-langkah (a) memperkenalkan laut dan kemaritiman sebagai lingkungan kehidupan bangsa, (b) memperkenalkan jalur perdagangan dan barang dagangan pada masa yang dikaji (c) mengidentifikasi barang-barang dagangan yang berasal dari daerahnya dan yang berasal dari wilayah lain yang dibawa menyeberang laut.
4. Seluruh siswa perlu menyadari bahwa adanya pelayaran laut antar nusa telah memperkenalkan satu kelompok budaya-sosial bangsa Indonesia dengan kelompok lainnya. Mereka telah pula berkomunikasi dalam bahasa yang saling dimengerti sehingga menghasilkan lingua franca yaitu bahasa Melayu dengan logat daerah masing-masing untuk membangun transaksi perdagangan. Siswa juga perlu menyadari bahwa penggunaan bahasa tersebut menjadi dasar bagi lahirnya bahasa nasional yang dinamakan Bahasa Indonesia. Isitilah bahasa Indonesia menjadi pilihan tepat karena menggambarkan warna baru dan bahasa baru walaupun kebanyakan kosa kata berasal bahasa Melayu.

PENILAIAN HASIL BELAJAR SEJARAH MARITIM

Penilaian hasil belajar Sejarah sudah terlalu lama didominasi oleh penilaian hafalan faktual peristiwa sejarah melalui instrumen Pilihan Ganda (PG). Instrumen ini sangat sesuai untuk

mengetahui daya ingat/hafalan siswa mengenai fakta sejarah (tahun, tempat, nama peristiwa, tokoh/pelaku). Melalui instrumen ini, dalam waktu relatif singkat banyak fakta sejarah yang dapat ditanyakan. Tidak dapat dipungkiri bahwa siswa perlu hafal banyak fakta sejarah penting walau pun pendidikan Sejarah bukanlah pendidikan hafalan fakta Sejarah.

Selain untuk menguji mengenai daya ingat siswa, PG memiliki kelemahan untuk menguji hasil belajar Sejarah. Hasil belajar Sejarah sebagaimana ditunjukkan dalam tujuan pendidikan Sejarah menghendaki siswa memahami suatu peristiwa sejarah, mampu menggunakan cara berpikir Sejarah, menggunakan berbagai konsep sejarah, menggunakan analisis sejarah dalam melihat makna peristiwa Sejarah bagi kehidupan masa kini. Juga, pendidikan Sejarah perlu mengembangkan sikap senang belajar masa lalu sebagai suatu bagian yang melahirkan jatidiri dirinya, masyarakat, dan bangsa. Pencapaian siswa dalam tujuan-tujuan ini tidak mampu dinilai dengan PG. Pencapaian kemampuan siswa dalam kompetensi yang dikehendaki tujuan-tujuan tersebut menghendaki instrumen lain selain PG.

Banyak instrumen penilaian seperti uraian, tugas, penilaian autentik sangat baik untuk mendapatkan informasi mengenai kemampuan siswa dalam menerapkan kemampuan berpikir sejarah. Suatu yang dapat dipastikan bahwa siswa harus terlatih dalam mengembangkan kemampuan berpikir sejarah dan merekonstruksi serta mengkaji perubahan dan keberlanjutan dalam setiap periode atau bahkan dalam setiap peristiwa sejarah.

Penilaian terhadap sikap dapat menggunakan soal tertulis, skala dan *self-report* terutama berkenaan dengan aspek pengetahuan (ngerti, knowing) dan predisposisi (ngerasa, moral feeling, valueing) tetapi tidak untuk perilaku (ngelakone, action, characterization/habit). Sikap selalu harus dilihat dalam perilaku dan perilaku yang terlihat bukan kecenderungan. Oleh karena itu observasi merupakan instrument yang handal dalam mendapatkan informasi mengenai perilaku.

PENUTUP

Pendidikan Sejarah Maritim merupakan suatu tantangan bagi dunia pendidikan terutama dalam mengembangkan materi pembelajaran. Materi pembelajaran tidak boleh terbatas pada aspek sejarah politik tetapi perlu menyangkut berbagai aspek kehidupan maritim terutama dunia ilmu, ekonomi, dan keberanian dalam mengambil resiko.

Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah pengaruh dari jalur perdagangan telah memberikan lingkaran komunikasi yang kuat di seluruh wilayah Nusantara. Materi pembelajaran ini sangat penting dalam membangun semangat kebangsaan.

Proses pembelajaran untuk Sejarah Maritim memerlukan orientasi pembelajaran yang tidak bersifat pembelajaran fakta (fact telling) tetapi lebih membangun kemampuan berpikir historis dan pemahaman yang mendalam mengenai peristiwa, arti peristiwa dan keberlanjutan unsur-unsur pengetahuan dan nilai yang masih ada di masyarakat bangsa Indonesia.

Penilaian merupakan bagian yang sangat kritis dan perlu diperkaya dengan berbagai instrumen yang lebih mampu dalam mendapatkan informasi dari siswa mengenai kemampuan berpikir, pemahaman terhadap suatu peristiwa, dan kajian terhadap perubahan dan keberlanjutan. Pemanfaatan PG sebaiknya dibatasi pada hafalan fakta Sejarah Maritim.

DAFTAR LITERATUR

- Cooper, H. (1992). *The Teaching of History: Implementing the National Curriculum*. London: David Fulton Publishers.
- Drake, F.D. and Nelson, L.R. (2005) *Engagement in Teaching History: Theory and Practices for Middle and Secondary Teachers*. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice-Hall
- Hasan, S.H. (1996) *Kurikulum dan Buku Teks Sejarah*. Keynote paper, Jakarta, Kongres MSI, Jakarta, November 13, 1996
- Hasan, S.H. (1999). Pendidikan Sejarah Untuk Membangun Manusia Baru Indonesia, *Mimbar Pendidikan*, XVIII: 2
- Hasan, S.H. (2001) Suplemen Kurikulum Sejarah, *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 2001
- Hasan, S.H. (2005) Kurikulum Sejarah dan Pendidikan Sejarah Lokal, Seminar Jurusan Pendidikan Sejarah, April 2005
- Hasan, S.H. (2010a). Pendidikan Sejarah, Kemana dan Bagaimana? Makalah, di presentasikan di Seminar Asosiasi Guru Sejarah. Jakarta, Maret 2010.
- Hasan, S.H. (2010b). The Development of Historical Thinking and Skills in the Teaching of History in the Senior Secondary School Curriculum in Indonesia, *Historia: International Journal of History Education*, XI: 2, Desember 2010
- Husband, C., Kitson, A., Pendry, A. (2003). *Understanding History Teaching: Teaching and Learning About the Past in Secondary Schools*. Maidenhead, Philadelphia: Open University Press.
- Juliandabarro (2011). *Sejarah Maritim*
- Marzano, R.J and Kendall, J.S. (2007). *The New Taxonomy of Educational Objectives*. Thousand Oaks, CA: Corwin Press - A Sage Publication Company.
- Percoco, J.A. (1993). *A Passion for the Past: Creative Teaching of U.S. History*. Portsmouth, NH: Heinemann.
- PrimPrimbono, B. (2015a). *Maritime History, Part I*. Multinews
- PrimPrimbono, B. (2015b). *Maritime History, Part II*. Multinews

PrimPrimbono, B. (2015c). *Maritime History, Part III*. Multinews

PrimPrimbono, B.(2015d). *Maritime History, Part IV*. Multinews

Quillen,D.M. (2001). Challenges and Pitfalls of Developing and Applying a Competency-based Curriculum. *Family Medicine*, Oktober 2001

Wineburg, S. (2001). *Historical Thinking and Other Unnatural Acts: Charting the Future of Teaching the Past*. Philadelphia: Temple University Press



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Konferensi Nasional Sejarah X

Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta
7-10 November 2016

Rethinking Education : Anomali
Peradaban dalam Dunia Pendidikan Guru
Kita

Mestika Zed



Masyarakat Agaraawan Indonesia



KONFERENSI NASIONAL SEJARAH X

PEMIKIRAN PENDIDIKAN DAN PERADABAN BANGSA

Rethinking Education: Anomali Peradaban dalam Dunia Pendidikan Guru Kita.

Mestika Zed

Jurusan Pendidikan Sejarah & Kepala Pusat Kajian
Sosial-Budaya & Ekonomi (PKSBE), Universitas Negeri Padang.

When all men think alike, no one thinks very much.
— Walter Lippmann (1889-1974).

ABSTRAK

KERTAS kerja ini berupaya membentangkan kritik peradaban terhadap pemikiran dan praktek pendidikan bangsa yang kian jauh dan mungkin bertentangan dengan substansi peradaban bangsa. Selama puluhan tahun kita [sebagai bangsa] telah menyesatkan diri kita secara salah kaprah, tidak hanya dalam cara kita menafsirkan pemikiran pendidikan yang sudah dirumuskan oleh para *the founding fathers* Indonesia Merdeka di masa lalu, melainkan juga dalam merumuskan kebijakan dan praktek pendidikan itu sendiri, yang semakin cenderung pragmatik dan dibajak oleh industrialis, politisi dan oleh “invisible hand” yang mengontrol hampir setiap aspek kehidupan kita sebagai bangsa. Politik pendidikan seharusnya meletakkan basis peradaban sebagai fondasi utamanya, sehingga ia memiliki dampak yang ‘mencerdaskan kehidupan bangsa’ pada setiap lini pendidikan dan para pemimpin bangsa. Justifikasi dari pandangan ini berangkat dari perspektif sejarah tentang pendidikan, khususnya pendidikan guru dalam kerangka mencermati *the state of education* yang berlaku di dekade abad ke-21 ini, dan sintesis pembelajaran untuk bekerja dan untuk hidup, baik individual maupun sosial. Pertanyaan utama dalam kertas kerja ini ialah: (i) di manakah letak peradaban dalam pendidikan nasional kita? (ii) jika terdapat pengakuan terhadap adanya semacam ‘anomali’ peradaban di dalam pendidikan kita selama ini, bagaimana ia harus dibaca dan dipahami sebagai isu kritis yang memerlukan jawaban yang tepat dan konsisten dalam menyikapi dinamika peradaban global dewasa ini; (iii) akhirnya bagaimana anomali dalam dunia pendidikan berdampak berat terhadap degradasi peran sentral guru dalam dunia pendidikan. ***

KEY WORDS: peradaban, pendidikan guru, kurikulum, dinamika peradaban global, politik pendidikan dan *invisible hand*.

PENDAHULUAN.

KERTAS kerja ini bertujuan untuk membicarakan hubungan antara pendidikan dan peradaban untuk menunjukkan bahwa dunia pendidikan kita dewasa ini dalam prakteknya sudah kian melenceng jauh dari esensi pendidikan nasional yang telah dirumuskan oleh pendiri bangsa puluhan tahun lalu. Selama puluhan tahun kita [sebagai bangsa] telah menyesatkan diri kita secara salah kaprah, tidak hanya dalam cara kita menafsirkan pemikiran pendidikan yang sudah dirumuskan oleh para *the founding fathers* Indonesia Merdeka di masa lalu, melainkan juga dalam merumuskan kebijakan dan praktek pendidikan itu sendiri. Kecenderungan ini kian jelas ketika politik pendidikan kita yang semakin cenderung pragmatik karena dibajak oleh para industrialis, politisi dan oleh “invisible hand” yang mengontrol hampir setiap aspek kehidupan kita sebagai bangsa.

Menteri pendidikan dan kebudayaan (dengan bergonta-ganti nomenklatur) silih berganti, tetapi isu utama pendidikan pada prinsipnya tetap sama: pemerataan pendidikan dan peningkatan mutu. Secara statistik jumlah peserta didik sudah meningkat drastis, begitu juga ragam lembaga pendidikan mulai dari yang paling rendah (PAUD) sampai ke perguruan tinggi. Para pemegang titel keserjanaan sampai ke tingkat tertinggi (Doktor) juga semakin banyak, tetapi apakah perkembangan pesat ini memiliki korelasi dengan substansi konsep pendidikan nasional yang dirancang oleh para pendiri negeri ini: “mencerdaskan kehidupan bangsa”? Inilah permasalahan pokok kertas kerja ini.

Suatu kajian tentang pemikiran pendidikan nasional dalam perspektif sosiologis-historis akan membantu menjelaskan banyak hal, misalnya, sejauh mana perubahan dan kontinuitas dalam perjalanan sejarah pemikiran pendidikan nasional selama lebih 70 tahun merdeka? Sejauh mana alur gagasan pemikiran pendidikan dan perkembangannya berkesinambungan serta capaian-capaian menggembirakan yang diperoleh sampai sekarang? Di manakah letak peradaban dalam capaian pendidikan nasional kita dewasa ini? Mengapa terjadi semacam ‘anomali’ peradaban di dalam pendidikan kita selama ini, bagaimana ia harus dibaca dan dipahami sebagai isu kritis yang memerlukan jawaban yang konsisten dalam menyikapi dinamika peradaban global dewasa ini?; akhirnya bagaimana anomali dalam dunia pendidikan berdampak berat terhadap degradasi peran sentral guru dalam dunia pendidikan? Pendirian yang ingin ditegakkan dalam kertas kerja ini ialah, bahwa politik pendidikan nasional kita seharusnya merupakan suatu proses *continuum* yang berjalan atas dasar paradigma peradaban yang ‘mencerdaskan kehidupan bangsa’ pada setiap lini pendidikan dan kepemimpinan bangsa.

HUBUNGAN PENDIDIKAN DAN PERADABAN.

PERBINCANGAN tentang hubungan antara pendidikan dan peradaban ibarat *aur dan tebing*, sekedar meminjam metafora Minangkabau untuk menggambarkan hubungan simbiosis mutualistik yang saling mengokohkan dalam kehidupan sehari-hari. Keduanya berkait kulindan. Yang satu bergantung pada yang lain. Jatuh satu, jatuh keduanya dan sebaliknya saling menguatkan. Pendidikan dalam pengertian umum ialah suatu tindakan atau pengalaman yang memiliki efek formatif terhadap pikiran, karakter dan kemampuan fisik (keterampilan) seseorang melakukan sesuatu. Dalam pengertian yang lebih teknis pendidikan merupakan proses menransformasikan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebagai suatu disiplin pendidikan berkenaan dengan pelbagai metode belajar-mengajar di lembaga pendidikan atau di lingkungan mirip sekolah sebagai pasangan dari pendidikan informal atau non-formal.

Transmisi pengetahuan di zaman nenek moyang berlangsung lewat mengingat dan menulis di atas kulit kayu atau tulang. Akumulasi pengetahuan dan pengalaman dari waktu ke waktu mendorong terciptanya penemuan baru (*innovation and discovery*). Penemuan baru selanjutnya menciptakan teknologi yang lebih tinggi. Teknologi sejatinya adalah alat memperlengkapi manusia untuk memperoleh pengetahuan (informasi) dan nilai secara lebih baik dan lebih sederhana. Transfer pengetahuan dan teknologi pada gilirannya juga menciptakan hubungan-hubungan sosial. Di situ komunikasi menjadi medium utama transmisi pengetahuan. Semakin intens pendayagunaan komunikasi semakin tinggi pula keterlibatan dan saling ketergantungan antara anggota masyarakat dalam dinamika perubahan budaya sebagai basis peradaban.

Pendidikan pada dasarnya menjadi kunci untuk mengangkat derajat sumber daya manusia dan kehidupan sosial budaya karena hanya dengan pendidikan manusia menransformasikan nilai-nilai kehidupan masyarakat menuju peradaban. Peradaban adalah suatu yang kompleks. Pada dasarnya ia identik dengan dan berakar pada kebudayaan, yaitu kebudayaan yang telah disuling (*refinery*). Karena itu sering dikatakan bahwa peradaban adalah wujud yang lebih tinggi dan halus daripada kebudayaan. Inti peradaban terletak pada kualitas terbaik alam fikiran (*excellent thoughts*), tatakrma dan merasa (*feeling and taste*). Maka dapat dimengerti kalau Will Durant, penulis sebelas jilid buku *The Story of Civilization* (1935-1975) — menyebut pendidikan adalah transmisi peradaban. Idealisme pendidikan modern di mana pun sejatinya mengandung pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai. Inilah yang menjadi titik perhatian utama dalam implementasi pendidikan dari satu generasi ke generasi baik lewat institusi-insitusi pendidikan formal maupun informal dan non-formal.

Dengan demikian hubungan antara pendidikan dan peradaban tak dapat dipisahkan, tetapi sebaliknya bersifat komplementer. Pendidikan merupakan medium dengan mana peradaban dipelihara dan dikembangkan. Itulah sebabnya keduanya ibarat “aur dan tebing”. Pendidikan menguatkan jalan menuju peradaban, sementara peradaban bertanggung-jawab mengejawantahkan nilai-nilai kebajikan yang terberikan oleh pendidikan dalam kehidupan. Pendidikan mengantarkan kita ke

pengetahuan, suatu pengertian tentang dunia dan bagaimana kita hidup di dalamnya. Dengan cara yang sama, peradaban merupakan kualitas kehidupan, pengetahuan dan praktek bagaimana kita sebagai 'manusia beadab' bertindak dalam masyarakat, menggunakan pikiran intelektual dan tatakrma guna menciptakan standar-standar ideal dalam kehidupan sosial-budaya bangsa dan dalam berbangsa dan bernegara dalam arti luas.

FONDASI PEMIKIRAN PENDIDIKAN NASIONAL INDONESIA.

Pentingnya hubungan pendidikan dan peradaban dalam kehidupan suatu bangsa sudah disadari oleh para *the founding fathers* kita sejak awal kemerdekaan. Dalam Pembukaan UUD 1945, dinyatakan negara mengemban misi besar untuk "mencerdaskan kehidupan bangsa". Dari pernyataan singkat dan padat itu jelas bahwa "kehidupan" lah yang harus dicerdaskan, bukan sekedar kemajuan otak atau keterampilan tingkat tinggi. Mencerdaskan kehidupan bangsa lebih merupakan konsep budaya atau peradaban ketimbang konsep biologis genetika (Sri Edi Swasono, *Kompas*, 16/8/2005).

Para pendiri negara kita sejak semula percaya bahwa pendidikan yang "mencerdaskan kehidupan bangsa" merupakan prasyarat (*conditio sine qua non*) bagi mencapai kemerdekaan sejati. Itulah kata kunci paradigma pendidikan nasional yang telah diletakkan dasa-dasarnya oleh para pendiri bangsa ini di masa lalu. Agaknya tidak banyak di antara kita yang menyadari bahwa Indonesia adalah satu-satunya bangsa terjajah, yang sewaktu masih dijajah berani mendirikan sekolah bersistem nasional *vis-a-vis* sistem pendidikan kolonial Belanda. Karena itu, pemahaman yang lebih baik tentang konsep pendidikan nasional sebagaimana yang kita kenal dewasa ini hanya bisa dihayati dengan menyelami pemikiran dan praktek pendidikan nasional yang telah dirintis jauh sebelum proklamasi kemerdekaan. Dua tokoh pemikir dan praktisi pendidikan bangsa paling terkemuka ialah Ki Hadjar Dewantara (1889-1959) dari Jawa dan Engku Muhamad Sajfei (1893-1969) dari Sumatera Barat. Tentu saja tidak boleh dilupakan sumbangan penting dari lembaga pendidikan Islam, khususnya yang dikembangkan lewat pesantren dan/atau madrasah.

Ki Hadjar dan M. Syafei khususnya dianggap sebagai peletak dasar pendidikan nasional sebagai alternatif terhadap pendidikan Barat yang diperkenalkan pemerintah kolonial Belanda. Ki Hadjar dikenal sebagai pendiri *Tamansiswa* di Yogyakarta tahun 1922, mirip dengan dan sedikit banyak dipengaruhi oleh gagasan pendidikan *Shanti Niketan* Rabindranath Tagore di India. Selain filosofi pendidikan yang kental dengan gagasan nasionalisme, Tamansiswa terkenal dengan konsep sistem *among* dalam proses belajar-mengajar siswa. Sementara M. Syafei dikenal sebagai pendiri INS Kayutanam (INS singkatan dari *Indonesische-Nederlandsch School* (1926) — kemudian berubah menjadi *Indonesisch Nationaal School*), dengan konsep "ruang pendidikan INS". Meskipun terdapat beberapa nuansa perbedaan dalam gagasan dan praktek pendidikan antara Ki Hadjar dan M. Syafei, keduanya dianggap peletak dasar

pendidikan nasional yang kita kenal dewasa ini. Keduanya pernah menjabat Menetri Pendidikan di zaman perjuangan kemerdekaan. Sejak tahun 1920-an mereka telah merumuskan dan memperjuangkan pemikiran dan praktek pendidikan nasional, yang kita kenal dewasa ini. Perkenankan saya memetik beberapa tesis pendidikan nasional yang dikemukakan kedua-dua pemikir pendidikan nasional tersebut.

- *Pertama*, pendidikan adalah sebuah *perjuangan*, perjuangan membebaskan diri dari belenggu kolonial. Dalam kata-kata Ki Hadjar sendiri disebutkan “pendidikan sebagai sjarat oentoek menghidoepkan dan menggerakkan kekoeatan lahir dan batin dari anak hingga bisa hidoep merdeka” (Ki Hadjar, 1961: 8). Kemerdekaan hanya mungkin jika dimulai lewat pengenalan diri. Di situ melekat konsepsi tentang siapa manusia, yaitu manusia yang memiliki jiwa, daya cipta, karsa dan karya. Sejalan dengan Ki Hadjar, pemikir pendidikan dari Amerika Selatan, Paulo Freire, menyebut ‘pendidikan sebagai pembebasan’. Dalam adagium patriotik Bung Hatta disebut “menjadi tuan di negeri sendiri”. Seseorang atau suatu bangsa tidak mungkin menentukan sikap atau mengambil keputusan manakala dalam dirinya tidak ada kemerdekaan.
- Konsep pendidikan yang benar (*true education*) bukan terbatas hanya pada pengajaran (*onderwijs*), melainkan juga mendidik atau ‘mengamong’ (*opvoeding*). Antara keduanya berbeda, tetapi memiliki hubungan fungsional. Yang pertama lebih berorientasi pada *transfer of knowledge*, yang kedua mencakup “transfer of knowledge” dan “transfer of values”. Yang pertama memerdekakan manusia dari ketidaktahuan menjadi tahu; jadi aspek hidup lahiriah (kemiskinan dan keterbelakangan dalam budaya material). Sedangkan yang kedua memerdekakan manusia dari aspek hidup batin (otonomi berpikir dan mengambil keputusan, martabat, mentalitas demokratik). Dengan demikian mendidik dalam arti yang sesungguhnya adalah proses memanusiakan manusia (humanisasi), yakni mengangkat harkat dan martabat manusia Indonesia ke taraf yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Erat kaitannya dengan butir pertama di atas, di dalam pendidikan terkandung semangat perjuangan, yakni perjuangan memerdekakan diri dari belenggu *mentaliteit* pejahahan.
- Pendidikan tidak akan lengkap tanpa mengenali akar kebudayaan sendiri. Pendidikan nasional yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini tidak terlepas dari kebudayaan. Pendidikan bertanggung jawab membangun nilai-nilai kehidupan bagi anak-anak sejak dini. Pendidikan Barat yang diperkenalkan Belanda (baca: pendidikan kolonial), menginstal nilai-nilai yang keliru pada anak-anak. Penguasa kolonial rupanya sangat sadar bahwa kebudayaan merupakan senjata yang sangat ampuh untuk menjauhkan anak-anak dari sejarah dan budaya mereka sendiri. Pendidikan kolonial membuat murid-murid menjadi asing dan bahkan merendahkan budaya sendiri, sehingga mereka tidak mengenal lagi prinsip kreatif dari budaya masyarakat di mana mereka hidup. Dalam metafora Minangkabau disebut “*maangok kalua badan*” (bernafas dengan nafas orang lain).

- Tujuan pendidikan, sejalan dengan tujuan bernegara dan berbangsa ialah "mencerdaskan kehidupan bangsa", sehingga mereka yang telah dicerdaskan oleh pendidikan (baik secara intelektual maupun moral), harus mampu menolong diri sendiri dan masyarakat bangsa dalam arti luas. Selaku demikian pendidikan harus mampu mendorong tumbuhnya spirit kesamaan (demokratis) dan kebersamaan (koperatif dan kolektifitas), bahkan antara guru dan murid harus menyatu. Konsep 'sistem among' yang berbunyi: *ing ngarsa sung tulada; ing madya mangun karsa; tut wuri handayani* sesungguhnya ditujukan untuk melawan semangat persaingan individualistik (atau mungkin lebih tepat egosentrisme) yang memompakan perasaan eksklusif (*sense of separateness*) dalam pendidikan kolonial. Untuk menunjukkan kesungguhannya Ki Hadjar bersedia menanggalkan gelar kebangswanan sebagai simbol elitis agar lebih dekat bersama rakyat kebanyakan. Sistem *among*, bagaimana pun juga bertentangan dengan model *student centered learning* karena kodrat anak juga harus diamong atau dibimbing dan guru tetap menjadi pusat teladan dalam mencerdaskan kehidupan peserta didik.
- Pendidikan tidak mesti terjadi dalam ruang kelas. Istilah "taman-siswa" (kebun bunga atau lapangan) tempat anak-anak belajar sambil bermain menisyratkan bahwa tempat belajar tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga di ruang terbuka. M. Sjafei menyebutnya "ruangan pendidikan" yang menekan anak-anak juga dapat belajar dari alam dan dari masyarakat luas.

Gagasan pendidikan nasional yang digagas kedua tokoh pendidikan di atas lahir dalam iklim intelektual (*zeitgeist*) kolonial. Konsep pendidikan nasional, karenanya, juga merupakan anti-tesis terhadap pendidikan kolonial itu sendiri. Meskipun demikian, keliru mengatakan bahwa pendidikan kolonial tidak memiliki kontribusi yang penting terhadap pertumbuhan intelektual generasi muda pada masanya. Umumnya menghasilkan apa yang disebut "pemuda salon", yaitu mereka yang tercerahkan dalam pendidikan kolonial dengan orientasi 'suka hidup senang' dalam gaya hidup budaya kolonial. Kebanyakan mereka adalah generasi yang tercerabut dari sejarah dan akar budaya masyarakat pribumi. Hanya sedikit di antara mereka yang tetap menganggap penting dan meneguk warisan terbaik dari kearifan lokal dalam budaya nenek moyang. Dalam teori peradaban Toynbee mereka termasuk kelompok "creative minority" yang tidak kehilangan *élan vital* dalam memperjuangkan peradaban Indonesia baru yang dilukiskan sebagai "jembatan emas" menuju kemerdekaan. Mereka inilah yang kemudian berperan sebagai *the founding fathers* Indonesia Merdeka.

Namun anomali peradaban dalam pendidikan Indonesia dewasa ini tidak sepenuhnya ciptaan kuasa kolonial di masa lalu. Ia juga produk sejarah sejak awal kemerdekaan. Sementara gagasan "mencerdaskan kehidupan bangsa" dalam Pembukaan UUD 1945 itu jelas merupakan saripati dari gagasan dan praktik pendidikan nasional yang telah dikembangkan oleh kedua tokoh pendidikan bangsa itu, lembaga pendidikan yang "dinegerikan" sebagai sekolah resmi pemerintah itu adalah warisan kolonial semuanya. Mengapa, misalnya, tidak Tamansiswa dan/ atau INS Kayutanam serta

sekolah-sekolah agama yang tersebar di Nusantara waktu itu, yang “dinegrikan” sebagai sekolah pemerintah. Secara etis mestinya merekalah sesungguhnya yang lebih berhak “dinegrikan” karena sejak semula memiliki kontribusi yang sangat penting dalam pendidikan dan dalam perjuangan nasionalisme anti-kolonial di zaman penjajahan. Kebanyakan sekolah ini sekarang menjadi sekolah swasta yang terseok-seok di tengah-tengah hingar-bingar lembaga pendidikan negeri yang kini berada di atas rata-rata sekolah-sekolah swasta pada umumnya. Halaman berikut akan membahas sekedarnya tentang “anomali peradaban” dalam dunia pendidikan di Indonesia pada halaman-halaman berikut.

ANOMALI PERADABAN DALAM PENDIDIKAN NASIONAL KITA.

Konsep anomali aslinya adalah konsep astronomi, tetapi kemudian juga dipakai dalam ilmu sosial, humaniora dan musik. Dengan anomali peradaban maksudnya di sini ialah terjadinya proses pembelokan atau penyimpangan dari pola umum yang sudah dikenali sebelumnya dalam lintas perjalanan pemikiran pendidikan bangsa menuju peradaban. Sejarawan Jan Romain (1956) menggunakan istilah itu untuk menerangkan penyimpangan peradaban Eropa dari pola umum yang pernah berkembang sebelumnya. Gejala ini sangat mencolok sejak zaman Renaisans abad ke-14 di Itali dan kemudian menjalar ke seluruh Eropa. Antropolog Evans-Pritchard dalam studinya juga menunjukkan gejala anomali tentang perilaku sosial pada suku Nuer di Sudan Selatan. Belakangan fisikawan Pritjof Capra menulis tentang *Titik Balik Peradaban* (1998) dengan menunjukkan anomali peradaban di bidang sains, masyarakat dan timbulnya arah baru alam kebangitan peradaban.

Konsep anomali sebetulnya bersepadan dengan konsep yang lebih netral, perubahan, sebagaimana yang lazim dikenali dalam ilmu sejarah sebagai *the science of change*, sebuah disiplin yang lebih menekankan pencarian sisi-sisi keunikan (eksentrisitas) gejala sejarah dalam setiap zaman. Kebudayaan dan peradaban selalu mengalami perubahan, entah itu perubahan linear atau progresif ke arah positif (*true anomaly*), maupun perubahan ke arah negatif dan kehancuran (*eccentric/abnormal anomaly*).

Anomali peradaban dalam pendidikan nasional di Indonesia dapat dilihat gejalanya sejak selepas tahun 1950-an, terutama berkenaan dengan kemerosotan profesi guru (Mestika Zed, 1995). Sejak beberapa dekade terakhir mereka yang bertanggung jawab dalam mengambil keputusan di bidang pendidikan telah mengambil kebijakan pendidikan dalam pelbagai bentuk dan tingkat pendidikan. Pameo yang paling sering diulang-ulang ialah “ganti menteri ganti kurikulum”. Maka para pengelola pendidikan dalam hampir setiap tingkat telah sangat disibukkan oleh urusan administrasi pendidikan (anggaran, bantuan operasional sekolah, rancang bangun kurikulum, standar formal kompetensi guru, ujian nasional, dan sejenisnya). Untuk itu mereka harus mencuaikan waktu selama dua puluh empat jam, tetapi terlalu sedikit untuk merenungkan puluhan tahun perjalanan pendidikan nasional kita. Salah satu akibatnya ialah pesan peradaban dalam pendidikan “mencerdaskan kehidupan

bangsa” hilang ditelan oleh kesibukan rutinitas. Sekarang siapa yang berani mengklaim bahwa pendidikan kita sudah bagus dan stabil, kecuali mungkin para birokrat pendidikan yang cenderung narsistik. Namun jika kita membaca tulisan para pengamat ahli dan independen sejak sepuluh terakhir ini dunia pendidikan nasional kita sedang sakit dan kian memprihatinkan.

Tanpa perlu mengutak-atik statistik perbandingan kemajuan pendidikan di Indonesia dalam pelbagai tingkat dengan negara-negara maju, bahkan dengan negeri jiran sekalipun, kita sebenarnya dari waktu ke waktu sudah cukup banyak disuguhkan dengan fakta-fakta tentang pendidikan kita memang sedang sakit. Karena itu tidak ada alasan untuk melemparkan kesalahan dengan mencari kambing hitam dalam dunia pendidikan, kecuali memikirkan kembali perjalanan pemikiran pendidikan nasional kita selama ini.

Pertama, kiranya sudah sangat jelas, bahwa tujuan pendidikan bukan terutama untuk memperoleh pengetahuan kognitif sebanyak-banyaknya, walaupun itu penting, seperti juga perolehan keterampilan teknis, walaupun esesial dalam masyarakat modern, tetapi yang jauh lebih penting ialah pesan peradaban dalam misi pendidikan “menecerdaskan kehidupan bangsa”, yang sekaligus juga menjadi misi dan alasan untuk apa kita mendirikan Republik ini, Republik Indonesia. Dalam uraian di atas kita telah membincangkan tentang hubungan antara pendidikan dan peradaban dalam arti kualitas terbaik pikiran (*excellent thoughts*), tatakrama dan merasa (*feeling and taste*) serta moralitas publik pada umumnya. Kalau sekarang ditanya apakah adakah hubungan antara pendidikan dan peradaban maka banyak orang yang percaya bahwa gagal membangun hubungan antara pendidikan dan peradaban. Pendidikan kita sejauh ini tidak membuat orang lebih beradab dan bahkan kepanikan baru karena munculnya gejala pengangguran kaum terpelajar yang tidak tertampung dalam dunia kerja. Pendidikan mungkin dapat menghasilkan orang cerdas yang berketerampilan tinggi, tetapi kebanyakan hanya menghasilkan *a clever devil* yang bijaksana dan bisa diajak “bekerja sama”. Dunia pendidikan kita tampaknya memiliki banyak contoh tentang *evil genius*, tetapi minus moralitas publik. Disodorkannya konsep “pendidikan karakter” belakangan ini, tak syak lagi, merupakan bukti kegalauan dalam menyaksikan hasil pendidikan yang mengecewakan selama ini. Namun jantung persoalan sebenarnya tidak sepenuhnya terletak di sana. Perkenalkan saya menjelaskannya pada butir kedua berikut ini.

Kedua, selama puluhan kita menyaksikan tidak ada upaya pemikiran ulang (*rethinking*) terhadap asumsi-asumsi dan tujuan pendidikan yang telah diletakkan kerangka dasarnya oleh pendiri bangsa, sehingga terjadi semacam keterputusan atau pembelokan pendidikan nasional dari fondasi lama. Hampir semua wacana pemikiran pendidikan kita, termasuk dalam hal pendidikan karakter berkiblat ke Barat dan kebanyakan tanpa catatan kaki tentang isu yang sebenarnya sudah ada dalam khazanah pemikiran pendidikan terdahulu. Soal pendidikan karakter, misalnya, adalah bagian inheren dalam pendidikan seperti yang dikemukakan oleh para pemikir sebelumnya, tetapi dewasa ini ia muncul sebagai formula indoktrinasi yang berbau politik pendidikan yang disodorkan dari luar. Diskursus ilmiah tentang pendidikan

karakter tampaknya merasa lebih bergengsi mengutip literatur barat, padahal semua sudah teresdia dalam khazanah budaya kita, budaya lokal, agama dan Pancasila. Pendidikan kita juga sudah lama dibajak oleh politisi untuk tujuan-tujuan pragmatik tatkala Pilkada manajemen sekolah terancam karena dipaksa menjadi pendukung suara kontestan tertentu atau kepala daerah memaksa pimpinan sekolah menaikkan *ranking* sekolah di daerahnya dengan prosentase kelulusan yang harus lebih tinggi dari daerah lain. Yang terjadi kemudian ialah manipulasi nilai rapor atau ujian siswa. Lalu apa artinya kalau pengiriman dan pemindahan dokumen soal ujian dari pusat ke daerah harus dijaga polisi? Tidak salah juga kalau urusan pendidikan pada giliran menjadi anomali, identik dengan urusan kriminal sehingga perlu melibatkan polisi.

Ketiga, erat kaitannya dengan butir di atas, ialah bahwa para pengambil kebijakan pendidikan di negeri ini sering latah dengan ide-ide besar dan istilah-istilah yang tidak kita pahami benar medan maknanya (Yudi Latif 1999: 186). Ini adalah kebiasaan buruk yang memperdayakan karena pendidikan pada gilirannya dibajak oleh industrialis atau “tangan tak tampak” tatkala “pendidikan siap pakai” kian keras gaungnya. Inilah yang terjadi ketika bola salju perdebatan tentang isu pendidikan berorientasi industri mengelinding pada tahun 1990-an tatkala Pak Menteri mengusung konsep *link and match* sesuai dengan langgam keahliannya. Kurikulum “pendidikan siap pakai” digagas sedemikian rupa, sementara pengertian industrialisasi itu sendiri bagi kebanyakan para praktisi pendidikan masih samar-samar dipahami makna dan cakrawalanya. Kebanyakan memahami industrialisasi kira-kira sama dan sebangun dengan fungsi masukan dan perolehan pengembangan teknologi dalam pendidikan untuk memenuhi lapangan kerja di bidang industri. Dengan demikian pendidikan berorientasi industri mereduksi tujuan pendidikan yang sebenarnya sebagai hanya pemasok “suku cadang” siap pakai (siap latih) guna memenuhi kebutuhan industri. Ujung-ujungnya ialah bangsa kita kesusu untuk segera menghasilkan tukang berketerampilan tinggi dan bergaji tinggi, tetapi minus wawasan budaya di belakang teknologi. Kecenderungan ini tampaknya masih berlanjut sampai hari ini dan generasi muda kita harus bersaing ketat untuk mendapatkan jurusan-jurusan yang dianggap “basah” dan sebaliknya bidang-bidang yang “kering” dan tidak berguna khususnya dalam ilmu-ilmu sosial, sejarah dan humaniora. Tentu masih banyak lagi. Ide-ide tentang pendidikan berbasis ini dan itu semakin membingungkan, mana yang basis, mana azas, mana prinsip, mana substansi dan mana praksis pendidikan; semua kian tidak begitu jelas lagi. Debat yang relatif baru dan agak menggelikan ialah ketika hampir semua universitas di tanah air menggulirkan wacana “world class universty”.

Keempat, dimensi kebudayaan dalam pendidikan kian hilang dan bahkan pernah kebudayaan suatu waktu dilucuti dari kementerian ini. Sejak itu kebudayaan dipahami sebagai komoditas yang laku dijual, sehingga ia diletakkan di kementerian pariwisata. Untunglah ini kemudian disadari dan sekarang sudah dikembalikan lagi. Inkonsistensi dalam kebijakan pendidikan semacam ini tidak hanya mencerminkan betapa dangkalnya pemahaman kita tentang kebudayaan, tetapi juga hilangnya sendi peradaban dalam pendidikan nasional yang telah dibangun oleh para pendahulu

sebelumnya. Bila kita menggunakan kata “pendidikan yang berakar pada kebudayaan” maka yang dimaksudkan ialah bahwa pendidikan harus melayani upaya pencerdasan kehidupan bangsa dengan mengesktrak nilai-nilai terbaik dari budaya bangsa, yang sudah tahan uji dalam perjalanan sejarah ketika menghadapi tantangan zaman, kesengsaraan, mulai dari tirani sampai ke kolonialisme-imperialisme atau rintangan lainnya, seperti pengaruh buruk budaya global, kosumerisme dan budaya materialistik. Dalam kondisi seperti itu bangsa kita terombang-ambing kehilangan identitas. Sesungguhnya tidak ada cara lain untuk mengenali identitas, baik individual maupun kolektif (bangsa) kecuali lewat sejarah dan budaya. Kebudayaan mesetinya bukan subsistem pembangunan, melainkan fondasi seluruh pembangunan. Namun karena miskin pengertian budaya atau kebudayaan sebagai komponen peradaban, maka kebudayaan sejauh ini dilihat sebagai sub-sistem dalam pendidikan dan dengan demikian juga dalam pembangunan bangsa. Budaya membaca, budaya akademik, budaya disiplin, budaya menulis, semuanya berakar dalam nilai-nilai yang ditanam lewat proses pembudayaan. Kata mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana disinggung di muka, mempunyai makna kebudayaan dan dalam arti yang lebih tinggi, peradaban. Cerdas itu berarti memiliki ilmu yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan nyata. Cerdas bukan berarti keharusan menghafal seluruh mata pelajaran secara verbal, tapi kemudian terbengong-bengong saat harus menciptakan solusi bagi kehidupan nyata. Atau lagi-lagi mencari kambing hitam dengan mengatakan belum ada “undang-undang”nya.

Otak manusia memerlukan akurasi, dan itu tugas ilmu pengetahuan sementara jiwa membutuhkan makna (*meaning*). Di situ kebudayaan memiliki peran sentral dalam memaknai tindakan. Dalam tradisi akademik di mana pun di dunia maju, ilmuwan sejati bukanlah *man of science*, melainkan *man of culture* (budayawan), walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit. Sebab ilmu pengetahuan tanpa budaya bisa tergelincir ke teknologi (*applied science*) dan penyalahgunaan iptek, sengaja atau tidak, dapat menghancurkan manusia itu sendiri (Daoed Joesoef, 2014). Pada akhirnya pendidikan sebagai jalan peradaban merupakan panggilan misi hati nurani — *education is a calling of the conscience mission* (Ho Hsiu-hwang, 1995).

Kelima, bukan murid tetapi gurulah sesungguhnya yang memainkan peran sentral dalam dunia pendidikan. Pendidik sejati adalah guru yang menanam. Ibarat petani yang berkebun di taman buah, pada waktunya hasil kebun dapat dipetik untuk dinikmati orang banyak. Guru sejati bukan petualang yang menyamar sebagai guru karena ketiadaan lapangan kerja, sehingga hasilnya menjadi destruktif, mematikan spirit belajar siswa, *misleading* dan kedunguan. Pendidik sejati adalah orang yang dengan setia berbagi pengetahuan kepada murid-muridnya sesuai dengan keahliannya karena profesi guru adalah panggilan. Sungguh tidak enak menganalogikan guru dengan pematung karena ia mereduksikan para murid sebagai benda, tetapi pesan yang ingin disampaikan di situ ialah bahwa profesi guru pada akhirnya sebuah seni membentuk dan mengayomi sesuai dengan kaedah-kaedah standar. Selebihnya ada ruang di mana guru bisa berkreasi secara kreatif. Yang pertama, mengacu pada penguasaan *disciplinary content*, yang kedua pada *pedagogical content*; yang

pertama karenanya memiliki karaktersitik obyektivitas dan *disciplin oriented*, yang kedua relevan untuk metode pegajaran dan ujian. Yang pertama adalah *prerequisite* untuk yang kedua. Pada titik ini kita berjumpa dengan isu kronis dalam pendidikan: tambal sulam kurikulum. Pendidikan sebagai proses pemerdekaan tidak mungkin dicapai apabila gurunya sendiri terbelenggu. Maka sungguh ironis, jika kreativitas guru sebagai nakhoda di dalam kelas dibebani oleh prangkat navigasi yang begitu rumit dan melelahkan. Sejalan dengan Pasal 38 UU SISDIKNAS Tahun 2003, tugas pejabat pendidikan cukuplah menggariskan "kerangka dasar dan struktur umum kurikulum". Selebihnya, berikan kebebasan kepada guru untuk berimprovisasi. Pada akhirnya kita semua menyadari bahwa upaya melahirkan guru profesional sungguh tidak mudah. Gagasan pendidikan guru 'kedinasan' dan berasrama bukanlah ide yang baru. Tampaknya ide ini mendesak diwujudkan, sebab bekal ijazah kesarjanaan di berbagai disiplin ilmu saja tidak lagi cukup. Para calon pendidik masih harus mendapatkan proses penggemblengan dalam kecakapan ilmu pendidikan, setidaknya selama satu tahun. "Itulah peta jalan sederhana agar dunia pendidikan benar-benar menunaikan kerja mendidik tunas-tunas harapan bangsa demi keselamatan dan kebahagiaan hidup bersama" (Yudi Latif, 2016).

PENUTUP.

Pendidikan suatu bangsa harulah berbanding lurus dengan akar kebudayaan bangsa itu sendiri dan dalam arti tertentu peradaban Indonesia baru. Bangsa yang memiliki sistem pendidikan yang baik tidak pernah merendahkan kebudayaannya sendiri seraya menjadi sangat hiper-konsumtif dengan input luar. *Output* pendidikan yang kompitebel mestilah sejalan dengan amat pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa, suatu tafsir budaya dalam pradigma pendidikan nasional Indonesia. Kita tidak memerlukan generasi unggul tetapi munus kesadaran kolektif. *True education* sesungguhnya adalah penyulingan dari pemikiran terdahulu, penajaman, pemerian dan ekstraksi atau penghaluan berfikir dan merasa. Pemikiran pendidikan di Indonesia nampaknya kian pragmatik dan dangkal. Mungkin sangat canggih dalam menuangkan gagasan, tetapi seperti dikatakan di muka, kehilangan makna, sebab konon setan bersembunyi dalam detail — *the devil is in the detail*.

Pada akhirnya mungkin ada yang merasa bahwa persoalan dibentangkan dalam kertas kerja ini terlalu "berat", terutama bagi mereka yang mempunyai banyak pertanyaan, tetapi sedikit jawaban. Saya sendiri menyadari, bahwa pertemuan ini akan mencerminkan kenyataan bahwa kita seringkali mengetahui lebih sedikit daripada yang kita kira, tetapi mungkin mendapat manfaat yang lebih besar daripada tidak berbagi sama sekali. Apakah ini tidak masuk akal demi memikirkan ulang pemikiran pendidikan nasional kita. ***

KEPUSTAKAAN

Daoed Joesoef, "Pendidikan dan Kebudayaan", *Harian Kompas* (07/11/2014).

- Ho Hsiu-hwang, "Education as a Mission of the Conscience", in *Teaching and Learning in The Chinese University of Hong Kong* 1 (1 May 1995): 2. [(Translated by Kwok-kan Tam and A.T.L. Parkin, with Lidi Wang, from the Chinese version] diakses dari <http://humanum.arts.cuhk.edu.hk/hhho/humanmission.htm>
- Ibrahim, Thalib. *Pendidikan Moh. Sjafei INS Kayutanam*. Jakarta: Mahabudi Jakarta, 1978.
- Isnaini, Muhammad. "Moehammad Sjafei: Pemikiran dan Praktik Pendidikan tentang Ruang Pendidik INS Kayutanam." *Jurnal Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta*, 2012: 1-13.
- Ki Hadjar Dewantara, *Karya Ki Hadjar Dewantara. Bagian I Pendidikan (1962) dan Karya Ki Hadjar Dewantara Bagian II: Kebudayaan (1967)*. Yogyakarta: Diterbitkan oleh: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa.
- Kurniasih, Lilih (1990) *Indonesich Nederlandsce School (INS) Kayutanam, 1926-1942*. Depok: Skripsi Fakultas Sastra, Universitas Indonesia [Tidak Diterbitkan].
- Mestika Zed (1995) *Pendidikan Keguruan dan Krisis Profesi Guru Deawsa ini. Suatu Sumbangan Pemikiran Berdasarkan Telaah Sejarah Pendidikan di Sumatera Barat*. (Orasi Ilmiah Dies Natalis XII dan Wisuda IKIP Padang.
- _____. "Pendidikan Kolonial dan Masalah Distribusi Ilmu Pengetahuan dalam *Jurnal Sejarah, Masyarakat Sejarawan Indonesia*. NO 1, Th I (1991): 17-31.
- _____. "Building the National Heritage in the Light of History of Education and Scientific Integration", Makalah pengantar untuk *International Conference on 'Islamisation of Knowledge and Curriculum reform' in conjunction with the launching of 'International Islamic University Minangkabau'*, Bukittinggi, August 25-26, 2014.
- Moehammad Sjafei (1968). *Dasar-Dasar Pendidikan*. Padang: INS Kayutanam.
- Navis, A.A. *Filsafat dan Strategi Pendidikan M. Sjafei: Ruang Pendidik INS kayutanam*. Jakarta: PT Grasindo, 1996.
- Romein, Jan M. (1956) *Aera Eropa. Peradaban Eropa sebagai penjimpanan dari Pola uUum*. [terjemah dari bahasa Belanda oleh Noer Toegiman]. Bandung.
- Sri Edi Swasono, "Mencerdaskan kehidupan bangsa", *Harian Kompas*, 16/8/2005).
- Tarli Nugroho, "Pendidikan sebagai Strategi Kebudayaan: Esai Untuk Daoed Joesoef", *Makalah* diakses dari <http://melanjutkanindonesia.blogspot.co.id/2014/05/kebudayaan.html> Kamis, 01 Mei 2014.
- Targowski, Andrew "The Civilization Approach to Education in the 21st Century" dalam *Comparative Civilizations Review*, Number 65, Fall 2011, pp. 73-104.
- _____. "Pendidikan Tanpa Mendidik", *Kompas* 04/08/ 2016.
- Yudi Latif (1999) "Miskonsepsi Pendidikan Berorientasi Industri" dalam 186-190 dalam *Masa Lalu yang Membunuh Masa Depan*. Bandung: Kronik Indonesia Baru,
- Wescott, Roger W. (1975), "Anomalistics: The Outline of an Emerging Field of Investigation", in M. Maruyama & A. Harkins (eds.) *Cultures Beyond the Earth*. New York: Vintage Books, pp. 22-25.



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Konferensi Nasional Sejarah X

Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta
7-10 November 2016

Integrasi Tradisi Lisan Komunitas Bahari
dalam Pembelajaran Sejarah di Sekolah
dalam Rangka Pengembangan Karakter
Siswa

Prof. Dr. Anwar Hafid



Judul Makalah:
**INTEGRASI TRIDISI LISAN KOMUNITAS BAHARI DALAM PEMBELAJARAN
 SEJARAH DI SEKOLAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN
 KARAKTER SISWA**

Oleh: Anwar Hafid

ABSTRAK

Mencermati kehidupan konteks masa kini, maka perlu menengok kejayaan masa lalu dalam budaya bahari, sehingga dapat menjadi penyemangat dalam membangun Indonesia di berbagai dimensi kehidupan berbasis budaya bahari. Dewasa ini semangat kebaharian cenderung melemah, menyebabkan sumber daya laut Indonesia yang melimpah hilang begitu saja. Sementara itu kejayaan budaya bahari bangsa Indonesia pada masa lalu bukanlah cerita asing di kalangan generasi tua. Akan tetapi, kejayaan masa lalu itu hanya sampai sebatas kenangan bagi orang tua, sementara itu generasi muda sekarang berpaling makin jauh dari visi kebaharian, meskipun sebagai cucu para pelaut ulung yang pernah disegani berbagai bangsa di dunia.

Peran kebaharian Masyarakat Indonesia telah lama dan masih terekam dalam tradisi lisan berupa: nyanyian, pantun, cerita, dan mantra. Tradisi tersebut antara lain ditemukan dalam latar komunitas bahari seperti: Suku Buton, Bajo, Bugis-Makassar, dan Mandar di Kawasan Timur Indonesia. Generasi muda tidak bisa dibiarkan melupakan sejarah keunggulan nenek moyang di bidang kebaharian, karena generasi muda memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari pada elemen masyarakat lainnya untuk ikut mewujudkan kehidupan masyarakat yang cinta bahari. Untuk itu, generasi muda harus diberi pemahaman peradaban bahari dan potensi kelautan dalam peningkatan sumber daya ekonomi lewat pendidikan. Selama ini pembangunan terhadap peradaban bahari seolah-olah ditinggalkan, sehingga keberadaan pulau-pulau terluar dan pulau kecil sering diabaikan. Dengan demikian perlu kajian pembelajaran sejarah yang berkaitan dengan penguatan karakter bangsa dan pemahaman visi kebaharian dari berbagai komunitas bahari.

Pendidikan bermuatan kebaharian dapat diberikan melalui integrasi muatan tradisi lisan tentang kebaharian dalam pembelajaran IPS/Sejarah di SD, SMP, dan SMA. Keberadaan muatan kebaharian merupakan manivestasi investasi jangka panjang yang dapat mengangkat citra bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari. Pembelajaran bermuatan kebaharian diharapkan mampu membangun sikap dan wawasan anak didik sebagai bangsa bahari. Pengembangan kurikulum kebaharian melalui pembelajaran tradisi lisan di sekolah merupakan bagian dari respon terhadap kebijakan pemerintah, dimana kelautan menjadi faktor yang penting dalam mendukung pembangunan khususnya di sektor ekonomi. Akhirnya melalui pembelajaran IPS/Sejarah, maka rasa cinta dan karakter kebaharian akan tumbuh dan berkembang serta diharapkan mampu menanamkan image positif tentang kelautan pada diri anak yang kelak akan menjadi generasi penerus masa depan bangsa.

A. Pendahuluan

Letak geografis dan keadaan alam Indonesia terutama di Kawasan Timur Nusantara yang terdiri atas gugusan pulau, menyebabkan masyarakatnya sebagian hidup dari laut baik sebagai nelayan maupun sebagai pelayar niaga. Masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau seperti Komunis Buton, Bajo, Bugis-Makassar dan Mandar merupakan masyarakat maritim dan secara turun-temurun telah mewariskan kearifan berlayar, menangkap ikan, dan berdagang kepada anak cucunya melalui tradisi lisan dalam bentuk: cerita rakyat, pantun, lagu, dan ungkapan filosofi hidup. Mereka mengembangkan *learning community* (pendidikan informal dan pendidikan nonformal) dengan bahan belajar dikemas dalam tradisi lisan sekaligus langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memudahkan peserta didik (anak/keluarga, dan sawi) untuk mengadopsinya. Output pembelajaran ini dipandang cukup efektif karena berhasil menempatkan Indonesia sebagai masyarakat maritim yang disegani di dunia karena mereka berhasil mengarungi laut dan samudera yang luas.

Seiring dengan berkembangnya sistem pendidikan formal dalam lingkungan komunitas maritim ini, maka muatan kearifan lokal dalam dimensi kemaritiman pada pendidikan informal dan nonformal mengalami penurunan. Pendidikan formal yang diharapkan dapat lebih mengembangkan nilai-nilai karakter positif dari kearifan lokal belum mampu untuk mentransfer dalam pembelajaran termasuk dalam bentuk integrasi sekalipun, sehingga anak-anak dari komunitas maritim seakan mereka tercabut dari akar budayanya yang kemudian berdampak terhadap menurunnya sikap dan minat kebaharian masyarakat Indonesia termasuk anak dari komunitas bahari.

Mencermati fenomena tersebut, maka pendidikan formal harus mampu mengakomodir nilai-nilai lokal tersebut yang masih berserakan dalam bentuk tradisi lisan dari berbagai jenisnya. Artinya perlu mengakomodir kebutuhan lokal yang ada di sekitar peserta didik. Upaya mengakomodir kebutuhan lokal tersebut, maka Kemendikbud mengeluarkan Permen No. 79 Tahun 2014 Tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 Pasal 1 menyatakan bahwa muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.

Pasal 2 (1) Muatan lokal merupakan bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya. (2) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajarkan dengan tujuan membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk: (a) mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spiritual di daerahnya; dan (b) melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

Muatan lokal dapat berupa: seni budaya, prakarya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, bahasa, dan/atau teknologi. Muatan pembelajaran terkait muatan lokal berupa bahan kajian terhadap keunggulan dan kearifan daerah tempat tinggalnya, dapat diintegrasikan antara lain dalam mata pelajaran tertentu. Dalam konteks ini muatan lokal tradisi lisan, selain dapat diintegrasikan dalam mata pelajaran: seni budaya, prakarya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, juga diintegrasikan dalam Mata Pelajaran IPS SD/SMP atau Sejarah di SMA/MA/SMK.

Salah satu kearifan dan keunggulan lokal yang tersimpan dalam bentuk tradisi lisan adalah dimensi kebaharian dalam arti luas. Dalam konteks ini telah berjalan sepanjang sejarah yang terungkap dalam pernyataan “*Nenek Moyangku Seorang Pelaut*”, akan tetapi akhir-akhir ini cenderung mengalami kemunduran.

Salah satu upaya dalam membangun kembali semangat kebaharian bangsa Indonesia adalah dengan memasukkan konsep kebaharian dalam kurikulum pendidikan nasional, utamanya pada jalur pendidikan formal di tingkat pendidikan dasar (SD, SMP, MI, MTs), Pendidikan Menengah (SMA, SMK, MA) maupun pendidikan tinggi (PTN, PTS). Dengan masuknya materi kebaharian sebagai bagian integral dalam kurikulum pendidikan nasional, maka diharapkan mampu menanamkan image positif tentang kelautan pada diri anak didik yang kelak akan menjadi kader generasi penerus masa depan bangsa. Keberadaan pendidikan kebaharian merupakan manivestasi investasi jangka panjang yang dapat mengangkat citra bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari.

Pendidikan kebaharian mampu membangun sikap serta wawasan anak didik terhadap kondisi geografis Indonesia sebagai bangsa bahari dalam bentuk negara kepulauan yang terbesar di dunia. Dengan demikian wawasan dan pemahaman cinta bahari harus terus diajarkan dan dibiasakan sejak dini terhadap anak didik melalui pendidikan formal yang ada. Pengembangan budaya masyarakat bahari merupakan bagian dari respon terhadap kebijakan pemerintah tentang *“Tol Laut”*, menjadi faktor yang penting dalam mendukung pembangunan khususnya di sektor ekonomi. Muatan kebaharian adalah seperangkat informasi tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan laut, yang harus ditempuh dan dikuasai, untuk mencapai suatu tingkat kemampuan tertentu.

Terdapat suatu alasan yang mendasar mengapa pada pendidikan formal di semua jenjang pendidikan sangat tepat sebagai sarana membangun kembali semangat dan jiwa kebaharian bangsa Indonesia, yaitu: pendidikan formal pada semua jenjang pendidikan merupakan pendidikan yang pasti akan dilalui oleh setiap peserta didik. Pendidikan formal merupakan landasan untuk dapat memahami konsep kebaharian secara menyeluruh. Adapun keberadaan sekolah menengah pelayaran atau perikanan, akademi atau universitas yang membuka jurusan kelautan atau perikanan, mata pelajarannya sudah menjurus dan mengarah pada suatu profesi atau pekerjaan tertentu.

Melalui integrasi muatan materi kebaharian dalam pembelajaran, maka diasumsikan bahwa kelak warga negara Indonesia akan mengubah pandangan kontinental atau ke daratan selama ini dan akan digantikan dengan pandangan yang berwawasan kebaharian.

B. Konsep Tridisi Lisan

Hakikat kelisanan (*orality*) mencakup segala hal yang berhubungan dengan sastra, bahasa, sejarah, biografi, dan berbagai pengetahuan serta jenis kesenian lain yang disampaikan dari mulut ke mulut. Tradisi lisan tidak hanya mencakup ceritera rakyat, teka-teki, peribahasa, nyanyian rakyat, mitologi, dan legenda sebagaimana umumnya diduga orang, tetapi juga berkaitan dengan sistem kognitif kebudayaan, seperti: sejarah, hukum, dan pengobatan (Pudentia, 1999).

Penuturan secara verbal yang dipahami sebagai kesaksian lisan dari satu generasi ke generasi selanjutnya, merupakan hakikat dari tradisi lisan. Tradisi lisan lebih banyak berkenaan dengan peristiwa-peristiwa atau tradisi yang berkembang di tengah masyarakat bukan hanya yang berhubungan dengan satu peristiwa sejarah. Tradisi lisan dapat diidentikkan dengan folklor, baik folklor lisan maupun sebagian lisan.

Sifat dari tradisi lisan adalah turun temurun dan fungsinya untuk memperkuat ikatan komunal dalam masyarakat. Tradisi lisan mengacu pada historical gossip misalnya cerita tentang cikal bakal penghuni pohon dan tentang mitos. Tradisi lisan dapat diwariskan melalui adat-sitiadat, cerita dongeng, pertunjukan, dan kepercayaan masyarakat.

Tabel 1. Perbedaan Sejarah Lisan dan Tradisi Lisan

Sejarah Lisan	Tradisi Lisan
1. Merupakan metode pengumpulan	1. Merupakan sumber bagi penelitian

dan penyimpanan informasi kesejarahan	sejarah
2. Tidak terbatas pada kebudayaan lisan	2. Terbatas pada kebudayaan lisan
3. Sengaja dicari dengan teknik wawancara	3. Didapat secara langsung
4. Termasuk kesaksian mata	4. Tidak termasuk kesaksian mata
5. Si pencerita merupakan bagian dari peristiwa	5. Si pencerita bukan merupakan bagian dari peristiwa
6. Disampaikan secara langsung dari pelaku	6. Disampaikan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya

Menurut Sibarani (2000) tradisi lisan adalah semua kesenian, pertunjukan atau permainan yang menggunakan tutur lisan. Unsur kelisanan merupakan bagian utama dari tradisi lisan. Menurut Dorson (1963) tanpa kelisanan suatu budaya tidak bisa disebut tradisi lisan. Oleh karena itu secara utuh tradisi lisan mempunyai dimensi: (1) kelisanan, (2) kebahasaan, (3) kesetaraan, dan (4) nilai budaya.

Perkembangan tradisi lisan terjadi dari mulut ke mulut, sehingga menimbulkan banyak versi cerita. Menurut Hutomo (1991), tradisi lisan mencakup beberapa hal, yakni: (1) berupa kesusastraan lisan, (2) berupa teknologi tradisional, (3) berupa pengetahuan *folklore* di luar pusat-pusat istana dan kota metropolitan, (4) berupa unsur-unsur religi dan kepercayaan *folklore* di luar batas formal agama-agama besar, (5) berupa kesenian *folklore* di luar pusat-pusat istana dan kota metropolitan, dan (6) berupa hukum adat.

Menurut Vansina (1985) tradisi lisan sebagai "pesan verbal berupa pernyataan yang dilaporkan dari masa silam kepada generasi masa kini" di mana "pesan itu haruslah berupa pernyataan yang dituturkan, dinyanyikan, atau diiringi alat musik"; "Haruslah ada penyampaian melalui tutur kata dari mulut sekurang-kurangnya sejarak satu generasi". Para sosiolog, bahasawan, atau sarjana seni verbal mengajukan pendekatannya masing-masing, yang untuk kasus khusus (sosiologi) mungkin saja menekankan pengetahuan umum, fitur kedua yaitu membedakan bahasa dari dialog (bahasawan) biasa, dan fitur terakhir adalah bentuk dan isi yang mendefinisikan seni (pendongeng). Tradisi lisan dapat didefinisikan sebagai kesaksian yang disampaikan secara verbal dari satu generasi ke generasi berikutnya. Persifatan khusus sedemikian adalah tentang keverbalannya dan cara bagaimana ia disampaikan (Ki-Zerbo, 1990).

Tradisi lisan memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang pada dasarnya memiliki empat fungsi, yaitu: (1) sebagai sistem proyeksi, yakni sebagai alat pencermin angan-angan suatu kolektif, (2) sebagai alat pengesahan pranata-pranata dan lembaga-lembaga kebudayaan, (3) sebagai alat pendidikan, dan (4) sebagai alat pemaksa dan pengawas agar norma-norma masyarakat akan selalu dipatuhi oleh anggota kolektifnya.

Tradisi lisan sebagai bagian dari kajian lokal ataupun kearifan lokal menurut Lapien (1980) menunjukkan bahwa kepentingan lebih lanjut dari kajian secara lokal, yaitu: "untuk bisa mengadakan koreksi terhadap generalisasi-generalisasi yang sering dibuat dalam penulisan sejarah nasional". Sebagai ilustrasi masalah generalisasi yang menyangkut periodisasi sejarah Indonesia yang sering diberi istilah Zaman Hindu. Pada kenyataannya ada daerah-daerah yang tidak mengenal periode zaman Hindu (seperti Sangir-Talaud, Sewu, Rote, dan Wilayah Sulawesi Tenggara). Ada pula daerah-daerah yang sampai sekarang masih berpegang pada Hinduisme (seperti Bali, dan sebagian Lombok). Di sini juga nampak bahwa pengembangan penulisan sejarah lokal akan memberikan bahan pengecekan terhadap anggapan teoritis yang bersifat menggeneralisasikan masalahnya untuk seluruh Indonesia.

Ada beberapa aspek positif dalam pembelajaran sejarah lokal yang umumnya bersumber dari tradisi lisan, baik yang bersifat edukatif psikologis maupun yang bersifat

kesejarahan sendiri. *Pertama*, mampu membawa peserta didik pada situasi riil di lingkungannya dan mampu menerobos batas antara dunia sekolah dan dunia nyata di sekitar sekolah. Dilihat secara sosio-psikologis bisa membawa peserta didik secara langsung mengenal dan menghayati lingkungan masyarakatnya, dimana mereka merupakan bagian di dalamnya (Douch, 1967; Mahoney, 1981).

Kedua, pembelajaran sejarah lokal, akan lebih mudah membawa siswa pada usaha untuk mengenang pengalaman masa lampau masyarakatnya dengan melihat situasi masa kini, bahkan dapat memproyeksikan peluang dan tantangan pada yang akan datang. Dalam pembelajaran sejarah lokal peserta didik akan mendapatkan banyak contoh dan pengalaman dari berbagai tingkat perkembangan lingkungan masyarakatnya, termasuk situasi masa kini. Dengan demikian, mereka akan lebih mudah menangkap konsep perubahan yang menjadi kunci penghubung antara masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang.

Kalau dihubungkan dengan teori J. Bruner maupun dalam hubungan dengan konsep pendekatan proses, maka pembelajaran sejarah lokal sangat mendukung prinsip pengembangan kemampuan peserta didik untuk berpikir aktif, kreatif dan struktural konseptual. Hampir semua prinsip dalam rangka pembelajaran siswa aktif sangat relevan dengan kegiatan pembelajaran yang bermuatan sejarah lokal. Sesuai dengan sifat materi serta sumber sejarah lokal, maka peserta didik akan terdorong untuk menjadi lebih peka lingkungan, begitu juga mereka akan lebih terdorong mengembangkan keterampilan-keterampilan khusus seperti: mengobservasi, teknik bertanya atau melakukan wawancara, mengumpulkan dan menyeleksi sumber, mengadakan klasifikasi serta mengidentifikasi konsep, bahkan membuat generalisasi, kesemuanya itu mendorong bagi perkembangan proses belajar bersifat *discovery inquiry*.

Berdasarkan pemikiran tersebut menunjukkan bahwa tradisi lisan merupakan lambang identitas daerah/komunitas yang diungkapkan lewat bahasa lisan, tradisi, hukum, sejarah yang mengandung nilai-nilai luhur yang sangat berharga. Tradisi lisan merupakan suatu aset kekayaan budaya yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai bahan ajar bagi masyarakat setempat, sehingga dapat melestarikan nilai dan mengembangkan karakter positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Akhirnya tepatlah dikatakan Cobern dan Aikenhead (2008) bahwa transfer pengetahuan apapun bentuknya, harus mempertimbangkan latar belakang budaya peserta didik. Sejalan dengan itu Wenger (2004) menyatakan bahwa dengan mendeskripsikan secara bermakna kepada orang lain (peserta didik) hal-hal atau pengalaman-pengalaman yang makin menantang, akan mendorong kemampuan peserta didik untuk mendeskripsikannya.

Tradisi lisan komunitas bahari, juga memiliki keempat fungsi tersebut, sehingga tradisi lisan di satu sisi dapat digunakan sebagai media pembelajaran dan di sisi lain dapat digunakan sebagai sumber/materi pembelajaran. Fungsi tradisi lisan komunitas bahari akan dapat mengubah manusia terutama generasi muda ke masa depan yang lebih cerah apabila diamanatkan dalam proses pembelajaran baik dalam pendidikan formal, nonformal, dan informal. Dengan demikian perlu integrasi tradisi lisan masyarakat bahari ke dalam pembelajaran baik sebagai media pendidikan maupun sebagai sumber belajar.

Menurut Sibarani (2013) folklor termasuk yang lisan/tradisi lisan dapat digunakan sebagai media pendidikan untuk menyampaikan pelajaran kepada siswa guna mempermudah pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan individu untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Selain itu, tradisi lisan juga dapat berfungsi sebagai salah satu langkah dalam melestarikan budaya lokal yang ada. Hal ini dirasakan perlu pada saat sekarang ini karena banyak dari generasi muda sudah melupakan budaya yang merupakan warisan leluhur nenek moyang dan kebanggaan identitasnya.

Dalam kondisi tersebut, maka peran guru sangat penting untuk mendisain pembelajaran dalam aspek: materi, metode, dan media pembelajaran. Guru IPS/Sejarah tidak

cukup hanya menjadi pengajar, tetapi juga harus menjadi peneliti untuk menggali sejarah lokal yang masih berserakan dalam bentuk tradisi lisan untuk selanjutnya diintegrasikan dalam pembelajaran.

C. Tradisi Lisan dalam Komunitas Bahari

Komunitas Bahari di Kawasan Timur Indonesia, seperti: Komunitas Buton, Bajo, Bugis-Makassar dan Mandar masih tetap mempertahankan semboyan ***Nenek Moyangku Seorang Pelaut***. Mereka memiliki tradisi lisan yang masih hidup sampai saat ini, dan tradisi lisan tersebut memiliki muatan edukatif dan normatif yang masih relevan dikembangkan dalam era sekarang ini.

Bagi Masyarakat Buton, konsep masyarakat bahari diformalkan dalam struktur pemerintahan Kesultanan Buton, karena terdapat jabatan *Kapilao Matanyo dan Kapitalao Sukanayo* (Panglima Angkatan Laut Timur dan Panglima Angkatan Laut Barat) (Hafid, 2012).

Masyarakat Buton di Wakatobi mengenal tradisi *po asa-asa* (bersatu) dan *po hamba-hamba* (bantu-membantu). Tradisi persatuan dan tolong-menolong ini dibangun di atas landasan filosofi *mai to assae na hada, ara no assamona hada mou te bumbu no dete* (mari kita satukan kehendak, jika kehendak sudah menyatu, maka bukit pun akan menjadi rata). Tradisi ini diimplementasikan dalam pelayaran yang tercermin dalam konsep *asa rope* (satu perahu), *mate asa-asa tumbu asa-asa* (mati sama-sama, hidup sama-sama) yang dipegang teguh dalam kondisi perahu terancam bahaya, misalnya: ancaman badai dan karam. Konsep lain adalah *porambanga* (berlayar bergandengan) artinya beberapa perahu meninggalkan pelabuhan secara bersama-sama dengan satu tujuan (Ali-Hadara, 2015).

Tradisi lisan dalam bentuk gangguan *Sanggila* (bajak laut) dari di Wilayah Wakatobi-Buton terdapat dua kelompok *sanggila*, yaitu: (1) *Sanggila Mangindanao/Manginda/Mindanao* dari Philipina Selatan, (2) *Sanggila Tobelo* dari Maluku Utara (Lapian, 2009; Ali-Hadara, 2015). Pertarungan antara sesama *sanggila* sering terjadi yang disebut *kapala nu sanggila* (kepalanya bajak laut) artinya pertarungan satu lawan satu dan bagi yang kalah kepalanya dipenggal kemudian dibiarkan begitu saja. Salah seorang pemimpin *sanggila* yang terkenal bernama *La Bolontio*, kemudian tewas di tangan pasukan Buton yang dipimpin oleh La Kilaponto dan para pengikutnya yang selamat melarikan diri. Kehadiran para *sanggila* di wilayah perairan Wakatobi mendapat perlawanan dari masyarakat yang dipimpin oleh La Mainaka.

Cerita tersebut mengandung nilai-nilai persatuan, tolong-menolong, dan semangat patriotisme yang perlu diwarisi oleh generasi muda, sehingga dipandang perlu untuk dipelajari lebih awal melalui pendidikan formal sejak SD.

Tradisi lisan masyarakat Buton yang memuat aspek religius terungkap dalam *Kabanti Ajonga Yinda Malusa* yang menyatakan bahwa pada zaman pemerintahan *Sangia Ncili-Ncili* (Sultan Zainuddin La Tumpamana 1681-1689) setiap hari jum'at Sultan Ternate mengharuskan semua pembesar Buton melakukan shalat jum'at di Ternate. Ketika azan terdengar, mereka masih dalam perjalanan dan dapat pergi pulang dari Buton ke Ternate dengan perahunya. Selanjutnya dalam versi lain dinyatakan bahwa Sultan Zainuddin (La Tumpamana) yang selalu shalat jum'at di Ternate yang berangkat ke Ternate dengan menggunakan perahu *Wasilomata* (sekejap mata) (Ihsan, 2015).

Seiring dengan perkembangan pelayaran niaga di Nusantara pada abad XVII, maka di setiap pelabuhan ditempatkan perwakilan (*Syahbandar*), pemangku jabatan ini harus mahir berbahasa Melayu dan bahasa daerah setempat sebagai alat diplomasi. Dari sinilah peran pelayar niaga Buton, Bajo, Bugis-Makassar, dan Mandar (BBBMM) dalam mentransformasikan pemakaian Bahasa dan Sastra Melayu di wilayah-wilayah kerajaan pesisir pantai Nusantara dan Asia Tenggara. Sejak abad XVII pelabuhan Makassar menjadi tempat

transit barang dagangan dari Kawasan Timur Nusantara untuk selanjutnya ke Barat atau sebaliknya (Hafid, 2005; Zuhdi, 1997). Para pedagang BBMM sudah akrab dengan pedagang Melayu, mungkin pula peran Orang Bajo seperti ditulis dalam Lontarak Asal-usul Suku Bajo, yang memiliki banyak persamaan budaya khususnya bahasa dengan suku Laut di Selat Malaka, juga mengakui leluhurnya dari Johor, yang kemudian tersebar di segenap pesisir pantai dan pulau-pulau terpencil di Indonesia, Malaysia, Brunai Darussalam, bahkan sampai di Philipina Selatan, Siam, dan Kamboja. Suku Bajo tetap konsisten mempertahankan Bahasa dan Sastra Melayu, selain Bahasa Bajo (Hafid, 2003).

Konteks masyarakat Bajo, maka dua orang peneliti bajo bernama Ismail dan Nuraini (2013) memandang bahwa Masyarakat Bajo memiliki kebanggaan dan kesetiaan pada bahasa dan budayanya. Namun, bahasa dan budaya Bajo tidak diajarkan di sekolah sehingga ada kekhawatiran punah di kemudian hari. Para penutur tradisi lisan yang merupakan satu-satunya alat pelestarian budaya dan media pembelajaran karakter dalam dimensi kebaharian mereka semakin berkurang. Misalnya di Sulawesi Tenggara pelantun *Iko-iko* M. Syukur yang biasa di panggil Wa Candra atau di panggil Puto Syukur, telah meniggal dunia (Anonim, 2009). Puto Syukur terkenal dengan nyanyian *Iko-iko nya* yang merupakan cerita-cerita tentang budaya bajo, termasuk masalah sosial yang baru saja terjadi, tak lepas dari untaian kata dari iko-iko yang ia bawaikan.

Perkembangan *iko-iko* dari tahun ke tahun mengalami kemunduran (stagnan) bahkan terancam punah. Penutur *iko-iko* yang masih ada saat ini, termasuk di Sulawesi Tenggara sangat terbatas dan bahkan sangat langka. Dengan demikian jika kondisi ini dibiarkan, maka *iko-iko* yang merupakan kebanggaan Komunitas Bajo akan punah. Berikut contoh Iko-iko:

Nahkoda Asang

Nahkoda Asang Bele. Bele llaw masi ya didikki. Boan pore sanang pore lama' ma rantau. Kalaha' sehe ma mia dirina sanang ooo. Kallalao ele kabittaang na nggai bele lagi sanang ya tattanda ele mma na.

Ma tikka ne ya ma kampoh sanang masi ya teteo bona ngala gandah na , ngala po' saramana sanang bele. Duaine manusia kampoh , pupo' ka toroh jambatah. Bona ngoya' sanang yo' na ooo. Juragang daha kita geger. barah dandangang datu bele. Bona palua sanang bona ningge ma poong tikala' Bona ngoya' ka kampoh.

Ayo'na datu barah kaang ne kamu tikkang kampoh kami bele. Allau patundo sanang ne iyya ka torh jambatah bona duai matilawang mmana. Yyo'na oooo mma bele sanang. Ngga ko sanang ndiku, Sitti Rugayya. Andah, yyo'na sanang ndi nnte Sitti Rugaiyya udane sanang di boa ele Balanda bele sanang ka tana balanda bele,

Allau yyo'na mma ooo bele sanang. Cilaka ai ko itu ma aku nggai wwa ku karapiku, nggai ndi kudu karapiku bele. Undah iyya ma nanges bona manguju dirina sanang. Bona duai ka bido' dui ya ka bido' pakunjah sanang Mbo Panai.

Yyo'na ana' Nahkoda Asang , boanu aku katonang ku nte piddi' atainu na pore bono ka tana Balanda bele, Ndah bona barangka' sanang ka tana Balanda.

Masi ya teteo kita ne kappal Balanda pa ampa' ma bundaang na. Bona ngala mariang na sanang. Bona nyerang kappal Balanda nggai bibitta bona patindeng.

Artinya:

Nahkoda Asang, dia masih kecil sudah di tinggalkan pergi berlayar merantau ke kampung orang lain mencari jati dirinya. Merantau, karena lamanya, dia sudah tidak di tandai oleh Mamanya.

Setelah dia sampai ke Kampung, masih jauh dia sudah mengambil Gendang kemudian memukulnya. Datang lah orang-orang di kampung, berkumpul di ujung jembatan, kemudian dia berteriak, juragan jangan ribut, siapa tahu ada anak Datu (Raja). Kemudian dia keluar (dari kapal), kemudian dia berdiri di tiang layar, kemudian berteriak ke kampung.

Katanya kami datang ke kampung kami. setelah sandar ke ujung jembatan, dia (Nahkoda Asang) menanyakan Mamanya. Katanya, hai Mama, Di mana Adikku, Sitti Rugayya. Ibunya menjawab Sitti Rugaiyya sudah di bawa oleh Belanda ke negeri Belanda.

Pada hari itu katanya, celaka apa kah ini yang terjadi pada diriku tidak Bapakku (uwa ku) saya dapatkan, bukan juga adikku. Setelah dia menangis dia mempersiapkan dirinya (akan berangkat).

Kemudian dia (Nahkoda Asang) turun ke Perahunya, melompatlah Mbo Panai,

Katanya Anakku Nahkoda Asang, bawa saya, saya tahu kau sakit hati, sehingga mau pergi berperang ke negeri Belanda.

Masih jauh, dia sudah melihat Kapal Belanda, menghadang di depannya. Kemudian mereka mengambil Meriam dan menyerang kapal Belanda, tidak lama Kapal itu tenggelam.

Iko-iko tersebut menggambarkan sikap patriotisme dan menjunjung tinggi harkat dan martabat keluarga dan bangsa, melawan kejahatan penjajah Belanda.

Berikut contoh nauya (nyanyian Bajo) yang menggambarkan pendidikan kebaharian:

Ella-ella, tidorko daha nandole

Batongko daha nanges

Batongko daha dinanges uwan'nu pore sakai ka Papua

Barah dibunang umor taha, nia dalle'na

Barah dibunangko umor taha mubasar nusakai daruwa uwa'nu.

Hai bunga tidurlah jangan ingat-ingat yang lain

Bangunlah jangan menangis

Bangunlah jangan engkau menangis bapakmu pergi berlayar jauh ke Papua

Mudah-mudahan dia diberi umur panjang dan banyak rezekinya

Mudah-mudahan engkau diberi umur panjang dan besar, engkau berlayar seperti bapakmu.

Masyarakat bahari lainnya adalah Bugis-Makassar yang memiliki berbagai ungkapan lisan menggambarkan kegemaran dan keberanian mengarungi lautan, yaitu: *Pura babbara' sompe'ku, pura tangkisi gulikku, ulebbirennni tellengge natowalie* (Jika layar sudah terkembang, kemudi sudah terpasang, lebih baik tenggelam dari pada surut langkah/kembali (Machmud, 1976). Dalam ungkapan sejenis dinyatakan bahwa: *Sompen'ni tapada sompe' tapada mammenanga tasiallabuang* (Marilah kita berlayar bersama-sama untuk menuju suatu tujuan). Ungkapan serupa berbunyi *Teegi-teegi sore lopie, koni taro sengereng* (dimana saja perahu berlabuh di situlah kita menanam/menyimpan kenangan). Artinya, bagi Orang Bugis Makassar merantau ke negeri orang merupakan suatu yang biasa, dan negeri rantauan dianggap negerinya sendiri, sehingga dia berusaha menanam/menyimpan kenangan, menanam budi baik atau membangun wilayah di mana ia bermukim, mereka cenderung menetap di daerah perantauan. Perantau Bugis-Makassar harus mampu bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungan barunya. Ia harus mau menerima dan toleransi dengan budaya setempat, setelah ia mampu menyakinkan masyarakat setempat untuk menerimanya sebagai

bagian dari masyarakat itu sendiri. Ibarat pepatah Melayu, dimana bumi dipijak disana langit dijunjung. Maka falsafah Bugis-Makassar ini bermakna, dimanapun perahuku kutambatkan, di sanalah saya menanam budi baik. Selanjutnya terdapat beberapa nyanyian Pelaut Bugis-Makassar, berikut ini.

Pitte Cina uala ranreng lopi

Jarung sipeppa' uala balango

Nakua sompe' mua

Dengan benang Cina (sutera) seutas sebagai tali perahu

Dengan jarum sebatang sebagai jangkar

Akupun tetap berlayar

Somperengng-e uala paddaga-raga

Tasi-e uala lino pottanang

Lolangeng ri masagena-e

Berlayar adalah nafas hidupku

Laut adalah daratanku

Dijadikan pengembaraan tanpa batas

Nalawa mua salareng riwu

Nakuguncirik gulikku

Kualeleangngi tellengng-e natowali-e

Meski di hadapan ada topan

Kemudiku tetap kuputar

Lebih baik tenggelam dari pada surut/kembali

Dua sompe kupattinja

Dua guling kupattejjok

Dua balango kupangatta

Makkarewangeng maneng

Dua layar kusiapkan

Dua kemudi kutancapkan

Dua jangkar kuteguhkan/persiapkan

Semua adalah sahabatku (Hamid, 2005).

Orang Bugis-Makassar adalah perantau, umumnya orang sudah tahu, akan tetapi, jika pertanyaanya adalah “apakah yang membuat Orang Bugis-Makassar suka merantau? dan mengapa Orang Bugis banyak sukses di tanah rantau? Tentu saja tidak semua orang akan mampu menguraikan jawabannya.

Sedikit berkelakar bahwa etos kerja Orang Bugis-Makassar sangat tinggi karena Orang Bugis-Makassar sangat kompleks kebutuhan hidupnya. Terutama saat ia sudah dewasa, mulailah berpikir untuk menikah, dan tradisi pernikahan di kalangan Orang Bugis-Makassar tidak murah. Setelah menikah berpikir lagi untuk memiliki rumah dan kendaraan. Setelah itu tercapai, maka mereka ingin naik Haji. Bagi mereka status *haji* adalah simbol religius dan simbol strata sosial ekonomi bagi Orang Bugis-Makassar. Setelah semua itu tercapai, maka Orang Bugis-Makassar kembali lagi ke kebutuhan dasar tadi, ingin menikah lagi, ingin memiliki rumah baru, kendaraan baru, naik haji lagi dan seterusnya. Kebutuhan yang tinggi inilah yang membuat Orang Bugis-Makassar memiliki etos kerja keras yang menyebabkan mereka merantau dengan mengarungi lautan.

Orang Bugis-Makassar tidak hanya sukses di tanah rantau, tetapi juga mampu beradaptasi dengan lingkungan dimana mereka berdiam. Di beberapa daerah kehadirannya banyak mewarnai dinamika dan eksistensi masyarakat setempat. Di tanah Jawa mereka mampu hadir ditengah riuh rendah pergolakan pada zaman Kerajaan Mataram Islam, sehingga muncullah Kampung Bugisan dan Daengan. Di tanah para Dewa, mereka berbaur dengan masyarakat dan budaya Bali hingga muncullah kampung Serangan. Di daratan Sumatera, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, Papua bahkan hingga di luar negeri keberadaan mereka juga tercatat dalam sejarah dan benak masyarakat pribumi. Entah itu catatan bertinta emas dan atau bertinta kelabu. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa catatan kelabunya tidaklah sebanyak catatan emasnya. Kemampun mereka beradaptasi dengan masyarakat dan budaya setempat adalah kuncinya.

Khasanah budaya Bugis-Makassar sendiri banyak mengajarkan falsafah-falsafah hidup sebagai kearifan lokal yang menjadi bekal bagi para perantau. Beberapa falsafah tersebut diantaranya: *Palettui aleta riolo tejjokata*; *pasaniasai jamatta riolo temmototta*=sampai ke tujuan sebelum berangkat; selesaikan pekerjaan esok hari sebelum bangun tidur.

Falsafah ini mengajarkan kepada calon perantau agar tidak “merantau buta”, atau tidak merantau tanpa arah dan tujuan yang jelas. Perantau sejati Bugis-Makassar tidak merantau dengan mengikuti arah kaki kemana hendak melangkah, tidak boleh berprinsip: *tegi-tegi monro tallenttung ajeta, konitu leppang* (dimana kaki terantuk, disanalah kita berhenti). Prinsip ini bermakna dan bersugesti negatif, tetapi merantau harus disertai dengan kepastian akan tempat yang dituju apa yang akan dikerjakan di sana, bahkan calon perantau harus meyakinkah ruh dan jiwanya sudah ada dan menyatu dengan negeri rantau yang akan dituju.

Hukum ekonomi yang meminimalkan modal dan memaksimalkan keuntungan adalah inti yang diajarkan dalam falsafah ini. Seorang perantau, harus berangkat dengan bekal sedikit dan kelak jika pulang harus membawa hasil sebanyak-banyaknya. Di luar ranah ekonomi, falsafah ini juga bermakna “lihatlah ketika anda berangkat merantau anda bukan siapa-siapa, maka saat anda kembali nanti, maka anda harus menjadi orang terpendang”. Pemaknaan ini cocok untuk mereka yang merantau dengan tujuan menimba ilmu atau mengejar jenjang karir, ataupun mereka yang merantau karena mengejar cintanya.

Niat yang teguh, tekad yang bulat, semangat yang membara harus terus terjaga, tak boleh luntur dalam perjalanan ke negeri rantau bahkan saat berada di negeri rantau itu sendiri. Seorang perantau harus berpegang pada niat, tekad dan semangat. Jika tidak, dikhawatirkan ia akan mundur atau surut jauh sebelum ia mencapai yang diimpikannya, serta mundur sebelum tiba di negeri rantau.

Falsafah tersebut menegaskan bahwa seseorang yang telah memilih merantau sebagai jalan hidup, harus kukuh, kokoh dan kekeh dengan pilihannya. Tidak boleh ada kata mundur apalagi batal, sehingga tidak jadi merantau, apapun risikonya, seperti ungkapan sebelumnya yang menggambarkan seorang pelaut yang telah memasang kemudinya, sudah kembangkan layarnya, mereka tidak akan surut kembali sebelum samapai pada tujuannya. Falsafah tersebut adalah contoh kecil dari beragamnya kearifan lokal Bugis-Makassar yang terkait dengan ikhwal kemaritiman yang dikemas dalam beberapa tradisi lisan.

Petuah nenek moyang tentang kebaharian, yaitu: *de gaga-tu akkatennningetta ri tengana tasi'e saliwenna puang-allata'ala riakkatennning, jaji maresopi limbang tasi na tollettu ri pottanang-e*. Kalau sudah di tengah laut (air) tidak ada pegangan kita, selain berpegang teguh (tawakkal) kepada Allah (yang memberi keselamatan, rezeki dan lain-lainnya), jadi perlu perjuangan untuk bisa sampai dan bertemu dengan daratan.

Makna di balik itu sangat jelas bagi pelayar Bugis-Makassar sebagai komunitas maritim bahwa kalau mau hidup dan bisa bertahan hidup, maka peganglah filosofi tersebut sebagai spirit dalam berjuang mengarungi dunia ini sehingga cita-cita dan harapan untuk menghidupi keluarga secara layak bahkan menjadi saudagar sukses yang sering kita dengar selama ini. Masih banyak bentuk kearifan lokal lainnya yang sekiranya tak cukup ruang untuk diulas pada tulisan ini.

D. Pendidikan Berbasis Sosial Budaya

Salah satu model belajar yang menarik adalah model Cina yang kembali ke akar, yaitu menemukan kembali kekuatan dahsyat dari budaya asli masyarakat. Cina berusaha keras mengawinkan era kecerdasan jaringan dengan tradisi dan akar budayanya sendiri. Dalam melaksanakan misi tersebut, Cina menemukan kembali bahwa banyak metode belajar yang efektif saat ini sebenarnya telah pernah diajarkan 2.500 tahun yang lalu oleh Confusius, diantaranya : (1) Dia menekankan pentingnya memadukan ide baru dengan ide lama yang telah teruji, (2) menginginkan terjadinya reformasi sosial melalui pendidikan, (3) mengandalkan konsep belajar dengan praktek, (4) menggunakan seluruh dunia sebagai ruang kelasnya, (5) menggunakan musik dan puisi secara meluas dalam pembelajaran, (6) belajar tentang cara belajar sama pentingnya dengan belajar tentang informasi, (7) setiap orang memiliki daya belajar yang khas, dan (8) bangunlah nilai dan perilaku terpuji (Driden dan Vos, 2011).

Mencermati pandangan tersebut, maka tidak mengherankan selama lebih dari 2.000 tahun Orang Cina belajar matematika lewat alat belajar cepat paling awal di dunia yaitu *Swipoa/dipoa* atau *sempoa*. Demikian pula dua alat belajar lain untuk matematika yaitu permainan “kartu” dan “domino”. Dalam banyak hal Cina telah memperkenalkan Revolusi Belajar, dan kita menemukan kembali hal tersebut. Berbagai kebenaran klasik tersebut umumnya berserakan dalam bentuk tradisi lisan Masyarakat Cina klasik dan selanjutnya dapat dihubungkan dengan riset otak dan komunikasi instan mutakhir.

Contoh model pembelajaran sejenis dalam arti pembangunan pada masyarakat Jepang yang mengakar pada Teori Z yang dikembangkan oleh William G. Ouchi bersumber dari tradisi Masyarakat Jepang yang terbiasa hidup berdekatan, karena itu Orang Jepang memiliki kehidupan yang lebih terbuka, sehingga sedikit sekali rahasia kehidupan pribadi yang tersembunyi. Masyarakat Jepang memiliki lima karakter kunci yang dipandang sebagai akar kekuatan bangsanya, yaitu: (1) *Emulasi*, hasrat atau upaya untuk menyamai atau melebihi kemajuan orang lain, (2) *Konsensus*, kebiasaan untuk berkompromi dan bukan konfrontasi, (3) *Futurism*, berpandangan jauh ke depan menatap kemajuan bagi perorangan dan kemajuan bersama di masa depan, (4) *Kualitas*, mutu menjadi faktor penarik bagi setiap proses dan hasil produksi Jepang, dan (5) *Kompetisi*, sumberdaya manusia dan produk Jepang memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dalam tata kehidupan dan tata ekonomi global (Sudjana, 2010).

Kemajuan Jepang kemudian diikuti oleh Korea Selatan yang juga memunculkan teori baru yang dikembangkan oleh Myon Woo Lee yang disebut Teori W. Lee merekomendasikan pengembangan budaya teknologi dan industri khusus Korea Selatan untuk mengantarkan negeri ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Lee juga menyarankan upaya mengoptimalkan penggunaan budaya, keunggulan geografis, karakteristik penduduk, sumber daya alam, dan kreativitas masyarakat. Budaya Korea Selatan

menekankan aspek kekeluargaan dan solidaritas (Sudjana, 2010). Kemajuan ketiga bangsa tersebut dalam berbagai sektor kehidupan umumnya berakar pada budaya kompromi/kekeluargaan dan kerjasama/solidaritas, unsur-unsur budaya tersebut umumnya dimanfaatkan melalui tradisi lisan.

Menurut Wenger (2005) cara paling cepat dan tepat untuk mengubah dunia ini menjadi lebih baik adalah mengajak sebanyak mungkin orang membiasakan diri melakukan pengamatan sendiri, mengartikulasikan, mengungkapkan dan mencatat pengamatan tersebut. Ketika mereka melakukan hal demikian, pengamatan, persepsi, pemikiran, dan gagasan mereka akan mencuat tak terduga dan akan berkembang laur biasa.

Bagi masyarakat maritim khususnya Masyarakat Bajo yang bermukim di wilayah pesisir terpencil atau di pulau-pulau Menurut Ismail dan Nuraini (2013) terjadi kelangkaan Buku Bahasa Bajo di wilayah konsentrasi masyarakat Bajo, sehingga mengharuskan pemerintah mengembangkan Kurikulum/Buku yang Berbahasa Bajo sebagai muatan Lokal dan menjadikan tradisi lisan seperti: iko-iko, lagu, pantun, falsafah hidup sebagai muatan ajar yang terintegrasi. Pentingnya iko-iko sebagai tradisi lisan yang memiliki nuansa kebaharian nampak dari iko-iko "*Papakannahan Datu Kimbayat* (Cerita Raja Kumbayat) yang menceritakan seorang anak bangsawan pedagang kaya yang ulet dan merakyat. Ia berdagang antar pulau (Banjar dan Singapura), dalam cerita tersebut nampak adanya relasi antar komunitas, seperti ia (Abdul Hasani) yang menumpang perahu Orang Buton dari Banjar Pangatan ke Singapura.

Bagi masyarakat pesisir dan pulau terpencil/terluar seperti tersebut perlu menyimak pandangan Barbara Prashing bahwa kunci menuju sukses belajar dan bekerja adalah menemukan keunikan gaya belajar dan gaya bekerja anda sendiri (Dryden dan Vos, 2011). Namun disisi lain guru seharusnya membantu siswa dalam mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, dan menyodorkan berbagai pertanyaan untuk membuat siswa memikirkan permasalahan dan jenis informasi yang dibutuhkan untuk sampai pada solusi yang dapat dipertahankan. Menurut Arends (2008) bahwa peserta didik perlu diajari tata cara menjadi investigator aktif dan cara menggunakan metode-metode yang sesuai dengan permasalahan yang mereka teliti, seperti: wawancara, observasi atau membuat catatan, termasuk etika investigator yang baik.

Pandangan tersebut mempertegas pentingnya budaya lokal yang berserakan dalam bentuk tradisi lisan untuk dikemas dalam bentuk muatan lokal yang terintegrasi dalam pembelajaran, sehingga terjadi pembelajaran yang unik sesuai dengan kebutuhan dan karakter masyarakat setempat.

E. Bentuk Integrasi Tradisi Lisan dan Pembelajaran Sejarah di SMA

Pengintegrasian tradisi lisan kebaharian pada satuan pendidikan formal, khususnya dalam pembelajaran IPS dan Sejarah adalah untuk menanamkan dan menumbuhkan kembali semangat serta jiwa kebaharian bangsa. Wujud muatan integrasi dikemas dalam mata pelajaran IPS/Sejarah sebagai satu kompetensi dasar dan atau integrasi dalam beberapa topik yang relevan. Bentuk ini tidak perlu menyediakan guru-guru mata pelajaran khusus, tetapi cukup disiapkan pelatihan pada guru-guru mata pelajaran IPS dan Sejarah yang akan diberi muatan kebaharian.

Pengintegrasian tradisi lisan komunitas bahari dapat dilakukan dengan menggunakan metode tugas, yaitu guru memberi tugas kepada siswa baik secara individu maupun secara kelompok dengan petunjuk yang jelas, sehingga siswa dengan mudah memperoleh informasi dari masyarakat melalui teknik: wawancara, pengamatan, dan studi dokumen, sehingga siswa dapat mengembangkan beberapa keterampilan, seperti: keterampilan bertanya, keterampilan mengemukakan pendapat secara lisan dan tulisan, keterampilan mengamati suatu fenomena sosial. Dalam kondisi seperti ini siswa dapat memperkaya dirinya dengan berbagai sumber

belajar yang ada di sekitarnya. Di sisi lain masyarakat akan berusaha mempertahankan dan mengembangkan tradisi lisan yang ada di lingkungannya, termasuk upaya masyarakat melakukan interpretasi nilai-nilai yang ada dalam tradisi lisan, sehingga dapat disosialisasikan kepada generasi muda di lingkungannya dalam berbagai momen yang ada.

Satu contoh bentuk integrasi tradisi lisan Komunitas Bahari (Komunitas Bugis-Makassar) dilakukan oleh (Asban, 2016) dalam bentuk uji coba melalui Penelitian Tindakan Kelas. Perbaikan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan tradisi lisan dalam pembelajaran pada materi: **Jenis-jenis Manusia Purba dan Hasil Kebudayaanannya**. Pada pelaksanaan pembelajaran dimulai dengan menarik perhatian siswa saat membuka pelajaran. Dalam konteks ini guru menggunakan *Metode Tugas dan Metode Tanya Jawab*: Minggu sebelumnya guru telah memberikan tugas observasi dan wawancara kepada tokoh masyarakat Bugis-Makassar tentang tradisi lisan yang terkait dengan falsafah hidup Orang Bugis-Makassar yang dituangkan dalam tugas kelompok, dipadukan dengan materi umum yang ada dalam buku pegangan siswa. Pembelajaran minggu ini, Guru menanyakan kembali mengenai tugas kelompok yang akan didiskusikan. Sebelum pembelajaran dimulai, guru terlebih dahulu menyampaikan tujuan pembelajaran dan sedikit memberikan gambaran mengenai pendekatan pembelajaran yang menggunakan tradisi lisan. Kemudian guru memberikan pengantar mengenai pelajaran yang akan diberikan dengan membacakan falsafah hidup Komunitas Bugis-Makassar, yaitu:

1. *Naiya tau malempuu-e' manguruu eloo-i' tau sugi-e* (orang jujur sewarisan dengan orang kaya). Maknanya : orang jujur tidak sulit memperoleh kepercayaan dari orang kaya karena kejujurannya.
2. *Rebba sipatokkong, mali' siparappe', sirui' menre' tessirui'no', malilu sipakainge'* (Rebah saling menegakkan, hanyut saling menarik ke pinggir pantai, jika khilaf saling mengingatkan).
3. *Naiya acca ripatoppokie' je'kko, rirapangngi alliiri; nare'kko te'yai mareddu', mapooloi* (kepandaian yang disertai ketidak-jujuran ibarat tiang rumah, jika tidak tercabut ia akan patah).
4. *Temmettak nawa-nawa majaa'*
Tammassuk ada-ada belle
Teppugauk-gauk maceko
Tidak pernah berpikiran jahat
Tidak mengeluarkan kata-kata dusta
Tidak melakukan perbuatan curang
5. *Ka-antu jekkonga kammai batu nibuanga naung rilikuo' na-antu lombusuka kammai bulo ammwanga ri je'ne'ka, nuossakaugi poko'na ammumbai appa'na, nuassakaugi appa'na ammumbai poko'na* (kecurangan itu sama dengan batu yang dibuang ke dalam lubang; sedangkan kejujuran laksana bambu yang terapung di air, jika ditekan pangkalnya, maka ujungnya akan timbul, dan jika ditekan ujungnya, maka pangkalnya akan timbul).

Setelah melihat siswa telah siap untuk memulai pembelajaran, kemudian guru membagi kelompok dan mempersilahkan siswa untuk duduk berdasarkan kelompoknya. Guru mempersilahkan kelompok pertama untuk tampil di depan kelas mempresentasikan hasil observasi yang dilakukan bersama kelompoknya selama 10 menit, selanjutnya ditanggapi dan kemudian dilanjutkan kelompok berikutnya secara berturut-turut. Pada akhir pembelajaran guru mengajak siswa untuk memberikan kesimpulan atas pembelajaran yang dilakukan kemudian guru memberikan kesimpulan akhir. Kemudian guru mengakhiri pembelajaran dengan kembali memberikan motivasi kepada siswa dan mengingatkan kelompok berikutnya agar dapat lebih baik dalam mempresentasikan hasil observasinya.

Hasil penelitian di atas menyimpulkan bahwa: (1) Penerapan metode diskusi dengan menggunakan tradisi lisan dalam pembelajaran sejarah pada siswa kelas X.5 SMAN 03

Bombana dapat meningkatkan keefektifan mengajar guru. Hal ini didasarkan pada peningkatan yang terjadi dalam tiap siklus. Pada siklus I terlihat keefektifan mengajar guru mencapai 71% meningkat menjadi 76% pada siklus II dan terus mengalami peningkatan pada siklus III mencapai 96%. (2) Aktifitas belajar siswa dalam pembelajaran Sejarah dapat ditingkatkan melalui metode diskusi dengan menggunakan tradisi lisan yaitu tindakan siklus I diperoleh sebesar 47,7% kemudian meningkat menjadi 66,2% pada siklus II, dan pada siklus III mencapai sebesar 85,1%. (3) Penerapan metode diskusi dengan menggunakan tradisi lisan dalam pembelajaran sejarah dapat meningkatkan karakter positif siswa. Hal ini terlihat dari pelaksanaan tindakan sebanyak tiga siklus dan terlihat peningkatan persentase yang cukup tinggi yaitu pada pelaksanaan tindakan siklus I, siklus II, dan siklus III terlihat selalu terjadi peningkatan terhadap 5 sikap yang diamati yakni: disiplin, jujur, tanggung jawab, peduli dan santun, seperti tampak pada tabel 1.

Tabel 1. Rakapitulasi Data Setiap Siklus

No	Tindakan	Keefektifan Mengajar Guru	Aktivitas Belajar Siswa	Karakter (%)				
				Disiplin	Jujur	Tanggung Jawab	Peduli	Santun
1	Siklus I	71	47,7	75	70	58,33	58,33	57,14
2	Siklus II	76	66,2	79,16	75	75	70,83	71,42
3	Siklus III	96	85,1	91,66	90	91,66	91,66	92,85

Sumber: Data Observasi

Beberapa saran diajukan: (1) Kepada guru-guru sejarah kiranya dapat mengintegrasikan tradisi lisan untuk meningkatkan karakter positif siswa, sehingga siswa dapat mengeksplorasi kemampuannya dalam mengemukakan gagasan dan mudah memahami materi pembelajaran yang disajikan, (2) Bagi siswa dapat lebih termotivasi untuk mengembangkan diri dan mengenal budaya, sehingga dapat mengembangkan karakter adab kesopanan baik dalam berfikir, bertindak dan berbicara agar tercipta generasi berkualitas yang berkarakter positif.

F. Penutup

Upaya melestarikan dan mengembangkan semangat kebaharian masyarakat Indonesia, harus dilakukan dalam pendidikan formal mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Salah satu bentuk pembelajaran muatan kebaharian dapat dilakukan melalui pengintegrasian tradisi lisan komunitas bahari. Pengintegrasian tradisi lisan kebaharian pada satuan pendidikan formal, khususnya dalam pembelajaran IPS dan sejarah dapat mempercepat penanaman dan menumbuhkan kembali semangat serta jiwa kebaharian bangsa yang nyaris hilang. Wujud muatan integrasi dalam pembelajaran IPS/Sejarah dapat berupa satu kompetensi dasar dan atau integrasi dalam beberapa topik yang relevan. Bentuk ini tidak perlu menyediakan guru-guru khusus mata pelajaran baru, tetapi cukup disiapkan pelatihan pada guru-guru mata pelajaran IPS dan Sejarah yang akan diberi muatan kebaharian.

Pengintegrasian tradisi lisan komunitas bahari dapat dilakukan dengan menggunakan metode tugas dan diskusi yaitu guru memberi tugas kepada siswa baik secara individu maupun secara kelompok dengan petunjuk yang jelas, sehingga siswa dengan mudah memperoleh informasi dari masyarakat melalui teknik: wawancara, pengamatan, dan studi dokumen, agar siswa dapat mengembangkan beberapa keterampilan, seperti: keterampilan bertanya, keterampilan mengemukakan pendapat secara lisan dan tulisan, keterampilan mengamati suatu fenomena sosial.

Secara empiris model integrasi tradisi lisan dalam pembelajaran sejarah telah terbukti efektivitasnya oleh hasil penelitian yang telah dilakukan oleh guru SMA yang terbukti dapat

meningkatkan keefektifan mengajar guru, meningkatkan aktivitas belajar siswa, dan berhasil pula mengembangkan karakter positif siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali-Hadara; Tamanajo; dan La Bia, Buhari. 2015. *Sejarah Wakatobi: Dari Praintegrasi Hingga Kabupaten*. Kendari: HISPISI Sultra.
- Anonim. 2009. *Bajo Bangkit*, Kamis, 03 September 2009. <http://bajobangkit-sultra.blogspot.com/>. Akses, 22 April 2012
- Arends, Richard I. 2007. *Learning to Teach*. New York: McGraw Hill Companies.
- Asban. 2016. "Penerapan Metode Diskusi Dengan Menggunakan Tradisi Lisan Dalam Mengembangkan Karakter Positif Siswa Pada Pembelajaran Sejarah Sman 03 Bombana". *Tesis Program Pascasarjana Universitas Halu Oleo Kendari*
- Coburn, W.W dan Aikenhead, G.S. 2008. "Cultural Aspects of Learning Science". In B.J. Fraser & K.G. Tobin (Eds). *International Handbook of Science Education* (pp.39-52). Kluwer Academic Publisher.
- Danandjaja, James. 1984. *Folklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng dan lain-lain*, Jakarta: Grafiti Pers.
- Douch, R.1967. *Local History an the Teacher*. London: Rout-ledge & Kegan Paul.
- Dryden, Gordon dan Vos, Jeannette. 2011. *The Learning Revolution*. Bandung: Kaifa.
- Ismail, Nany dan Nuraini, Chandra. 2013. "Berbicara dan Bercerita di Kepulauan Kangean. Dalam Illouz, Charles and Grange, Philippe. *Kepulauan Kangean: Penelitian Terapan untuk Pembangunan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Hafid, Anwar. 2012. "Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Dan Kesetiakawanan Sosial Generasi Muda di Sulawesi Tenggara". Makalah *Disajikan dalam Bimbingan Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial (K2KS) Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Tenggara, Tanggal 17 Oktober 2012*
- Hamid, Abu. 2005. *Passompe Pengembaraan Orang Bugis*. , Makassar: Pustaka Refleksi.
- Hutomo, Suripan Hadi. 1991. *Mutiara yang Terlupakan: Pengantar Studi Sastra Lisan*. Surabaya: HISKI Komisariat Jawa Timur.
- Ihsan, Moch. Musoffa dan Rosdin, Ali. 2015. "Falsafah Bhinci-Bhinciki Kuli dalam Masyarakat Buton" dalam *Pendidikan Multikultura Berbasis Kearifan Lokal*. Jakarta: Balitbang Kemendikbud.
- Ki-Zerbo, Joseph. 1990. *Methodology and African Prehistory*. UNESCO International Scientific Committee for the Drafting of a General History of Africa: James Currey Publishers.
- Lapian, A.B. 1980. "Memperluas Cakrawala melalui Sejarah Lokal" dalam *Majalah Prisma*. No. 8 Tahun IX. Jakarta: LP3ES.
- Lapian, A.B. 2009. *Orang Laut Bajak Laut Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Machmud, A. Hasan. 1976. *Silasa: Setetes Embun di Tanah Gersang*. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara.
- Mahoney, J. 1981. *Local History: A Guide for Research and Writing*. Washington DC: National Education Association.
- Moeliono, Anton M. dkk. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indoensia*. Jakarta: Depdikbud RI.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 79 Tahun 2014 Tentang *Muatan Lokal Kurikulum 2013*. Jakarta: Kemendikbud.
- Pudentia MPSS (ed.), 1998. *Metodologi Kajian Tradisi Lisan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Yayasan Asosiasi Tradisi Lisan.
- Sibarani, Robert. 2012a. *Kearifan Lokal. Hakekat, Peran, dan Metode Tradisi Lisan*. Jakarta: Asosiasi Tradisi Lisan (ATL).

- Sibarani, Robert. 2012b. "Tradisi Lisan Sebagai Sumber Kearifan Lokal: Sebuah Pemahaman Metodologis". Makalah disajikan pada *Seminar Internasional Tradisi Lisan Nusantara di Tanjung Pinang*, Tanggal 23-27 Mei 2012.
- Sibarani, Robert. 2013. "Folklor sebagai Media dan Sumber Pendidikan: Sebuah Ancangan Kurikulum dalam Pembentukan Karakter Siswa Berbasis Nilai Budaya Batak Toba". Dalam *Folklor Nusantara: Hakekat, Bentuk, Fungsi*. Yogyakarta: Ombak.
- Sudjana, D. 2010. *Manajemen Program Pendidikan untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Falah.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Vansina, Jan. 1985. *Oral Tradition as History*. James Currey Publishers.
- Wenger, Win. 2005. *Beyon Teraching & Learning*. Bandung: Nuansa.
- Zacot, Francois-Robert. 2008. *Orang Bajo Suku Pengembara Laut*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

SMA/MA.	: SMA NEGERI 03 BOMBANA
Mata Pelajaran	: Sejarah
Kelas/Semester	: X/2
Standar Kompetensi	: 2. Menganalisa Peradaban Indonesia dan Dunia
Kompetensi Dasar	: 2.1. Menganalisa Kehidupan Awal Masyarakat Indonesia
Indikator	: Menjelaskan penemuan jenis-jenis manusia purba Menjelaskan hasil kebudayaan manusia purba
Alokasi Waktu	: 4x45 menit

A. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu untuk:

1. Menjelaskan perbedaan pokok manusia purba dari tahun ketahun
2. Menguraikan mengapa penemuan *pithecanthropus erectus* sempat menggemparkan dunia ilmu pengetahuan
3. Menguraikan ciri-ciri *pithecanthropus*
4. Mengidentifikasi ciri-ciri kebudayaan pacitan
5. Menjelaskan hasil kebudayaan manusia purba
6. Menjelaskan hasil kebudayaan manusia purba
7. Menunjukkan sikap disiplin
8. Menunjukkan sikap jujur
9. Menunjukkan sikap tanggung jawab
10. Menunjukkan sikap peduli
11. Menunjukkan sikap santun
12. Membuat peta penyebaran manusia purba di Indonesia

B. Materi Pembelajaran

1. Jenis-jenis manusia purba
2. Hasil kebudayaan manusia purba

C. Metode Pembelajaran

Diskusi, Ceramah

D. Strategi Pembelajaran: Tradisi Lisan

E. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan Pertama

1. Kegiatan Pendahuluan

- Apersepsi guru mengajukan pertanyaan mengenai pengertian manusia purba.
- Menyampaikan tujuan pembelajaran.
- Membagi kelompok
- Membacakan falsafah hidup moronene

2. Kegiatan Inti

Eksplorasi

Dalam kegiatan eksplorasi, guru:

- Guru menjelaskan penemuan dan jenis-jenis manusia purba (**nilai yang ditanamkan: Tanggung Jawab, peduli lingkungan**)

• **Elaborasi**

Dalam kegiatan elaborasi, guru:

- Siswa secara berkelompok menyusun kronologi mengenai jenis-jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia. (**nilai yang ditanamkan: Tanggung Jawab, peduli lingkungan.**);

Konfirmasi

Dalam kegiatan konfirmasi, Siswa:

- Menyimpulkan tentang hal-hal yang belum diketahui (*nilai yang ditanamkan: Tanggung jawab, peduli*);
 - Menjelaskan tentang hal-hal yang belum diketahui. (*nilai yang ditanamkan: Peduli lingkungan, tanggung jawab*)
3. Kegiatan Penutup
- Bersama-sama melakukan refleksi materi yang telah dibahas. (*nilai yang ditanamkan: Jujur, disiplin,, tanggung jawab, peduli, santun*);
 - Menarik kesimpulan materi. (*nilai yang ditanamkan: Peduli lingkungan, tanggung jawab*);
- F. Sumber Belajar
- Kurikulum KTSP dan perangkatnya
 - Pedoman Khusus Pengembangan Silabus KTSP SMA
 - Buku sumber Sejarah SMA
 - Peta konsep
 - Buku-buku penunjang yang relevan
- G. Penilaian
- Jenis tagihan : Portofolio
- Bentuk tagihan : Menyusun kronologi
- Contoh instrumen : Susunlah kronologi mengenai jenis-jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia!

Tabel 1 Format Penilaian Portofolio

No	Aspek yang diamati	Nilai Capaian Kelompok					Rata-rata Total
		K1	K2	K3	K4	K5	
1.	Menyimak penjelasan guru.						
2.	Menghargai pendapat teman.						
3.	Keterampilan merumuskan masalah.						
4.	Keterampilan mencari dan mengolah sumber belajar						
5.	Keterampilan menyusun data dan informasi						
6.	Keterampilan menyajikan data						
7.	Keterampilan menyelesaikan masalah						
8.	Keterampilan menyusun laporan						
9.	Mengemukakan pendapat atau ide kepada guru atau teman.						
10.	Berdiskusi dalam kelompok.						
11.	Mempresentasikan hasil kerja kelompok						
12.	Menarik kesimpulan						
13.	Berperilaku yang relevan dalam kegiatan pembelajaran.						
Jumlah							
Rata-rata (%)							

Kriteria Penilaian :

Kriteria Indikator	Nilai Kualitatif	Nilai Kuantitatif
80-100	Memuaskan	4
70-79	Baik	3
60-69	Cukup	2
45-59	Kurang cukup	1

Mengetahui,
Kepala Sekolah,

Rumbia,
Peneliti,

2016

JAM'AN,S.Pd
NIP. 196509101994121007

ASBAN,S.Pd
NIP.198006172006041019

Tabel 2 RUBRIK PENILAIAN SOSIAL

No.	Nama Siswa	Skor Aspek yang Dinilai						Jumlah Skor	Nilai Akhir (NA) atau Skor Rerata
		Sosial							
		Disiplin	jujur	Tanggung Jawab	Peduli	Santun			
1									
2									
3									
4									
5									
dst									

Rentang Skor = 1 – 5, skor minimal = 6, skor maksimal = 30

Tabel 3 Penilaian Karakter Tanggung Jawab (Naondroi Adanna)

No.	Aspek yang diamati	Skor			
		1	2	3	4
1.	Melaksanakan setiap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya (napigauai setiap jamang ye mencaji tanggung jawabna)				
2.	Melaksanakan tugas individu dengan baik (napigauai tugas ri ale wedding makessing)				
3.	Menerima resiko dari tindakan yang dilakukan (naruntu resiko pole setiap kesalahan ye di pegau-e)				
4.	Tidak menuduh orang lain tanpa bukti yang akurat (denappitenna tau lain tanpa bukti ye manessa)				
5.	Mengakui dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan (mengakui sibawa millau dampeng atas kesalahan ye nappigau-e)				
6.	Melaksanakan apa yang pernah dikatakan tanpa di suruh (mappigau-i aga pura di puada tanpa di suroh)				
Jumlah Skor					
Rata-Rata Skor					
Persentase					

Tabel 4 Penilaian Karakter Peduli (Maperu)

No.	Aspek yang diamati	Skor			
		1	2	3	4
1.	Selalu bekerja sama saat sedang menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru (tenni pada majamma naselesaikan tugas ye di arengi pole gurunna)				
2.	Menghormati teman yang berbeda pendapat (nahormati silona ye berbeda pendapat)				
3.	Menerima kekurangan teman (aktif majamma kelompok)				
4.	Memaafkan kesalahan teman saat mengerjakan soal kelompok (nadampengangi kesalahan silonna)				
5.	Selalu membagi ilmu yang diperolehnya kepada teman kelompoknya (tenni mabagi paddisengeng narutu-e kepada silo kelompona)				
6.	Tidak mendahulukan kepentingan pribadi (de'appadioloi kepentingan pribadinna)				
Jumlah Skor					
Rata-Rata Skor					
Persentase					

Tabel 5 RUBRIK TES PENGETAHUAN

No	Indikator	Teknik	Bentuk Instrumen	Instrumen
1.	Peserta didik dapat: Menjelaskan penemuan jenis-jenis manusia purba	Tes tertulis	Tes uraian	a. Jelaskan perbedaan pokok manusia purba dari tahun ketahun b. Uraikan mengapa penemuan fosil <i>pithecanthropus erectus</i> sempat menggemparkan dunia ilmu pengetahuan? c. Identifikasi ciri-ciri <i>pithecanthropus</i> d. Identifikasi ciri-ciri kebudayaan pacitan e. Jelaskan hasil kebudayaan manusia purba
2.	Menjelaskan hasil kebudayaan manusia purba	Tes tertulis	Tes uraian	

Tabel 6 LEMBAR PENGAMATAN ASPEK PSIKOMOTORIK

No	Nama Siswa	Aspek yang Diamati												Jumlah
		Psikomotorik A												
		4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	
1		V												
2			v											
3				V	V									

Tabel 7 RUBRIK PENGAMATAN ASPEK PSIKOMOTORIK

Aspek dan Skor	Deskriptor
Psikomotorik A	Membuat peta penyebaran manusia purba di Indonesia
4	Jika keempat aspek berikut muncul selama pengamatan 1. Nama peta 2. Kontras warna 3. Garis jalur 4. Legenda
3	Jika hanya tiga aspek yang muncul
2	Jika hanya dua aspek yang muncul
1	Jika hanya satu aspek yang muncul

Tabel 8 LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS MENGAJAR GURU PADA SIKLUS II

Tahapan	Aspek yang Diamati	Dilakukan		Skor			
		Ya	Tidak	1	2	3	4
Tahap Pendahuluan	Membuka pelajaran	√				√	
	Menyampaikan tujuan pembelajaran	√				√	
	Memperkenalkan mengenai strategi pembelajaran yang akan diterapkan	√			√		
Tahap 1	Memberikan motivasi kepada siswa	√				√	
	Menanyakan kesiapan siswa dalam memulai pelajaran	√				√	
	Memberikan gambaran umum tentang materi pelajaran	√					√
	Membuka materi dengan membacakan falsafah Bugis	√				√	
Tahap 2	Membentuk kelompok belajar	√				√	
	Mempersilahkan agar para siswa duduk dalam sebuah kelompok yang telah ditentukan	√				√	
	Menjelaskan mengenai tugas yang telah disiapkan	√					√
	Mempersilahkan siswa untuk mendiskusikan materi yang akan diajarkan					√	
Tahap 3	Mengawasi jalannya proses pembelajaran	√				√	
	Memberikan penjelasan kepada siswa yang kurang memahami model pembelajaran	√			√		
	Mengontrol suasana dalam pembelajaran	√				√	
	Membimbing diskusi kelompok	√				√	
Tahap 4	Membimbing siswa untuk menjawab pertanyaan didepan kelas	√					√
	Fasilitator dalam presentase	√				√	
	Memotivasi siswa agar dapat terlibat aktif	√				√	
	Memotivasi agar siswa berani tampil didepan kelas	√				√	
Tahap 5	Melakukan refleksi atas pembelajaran	√				√	
	Melakukan analisis pembelajaran	√				√	
	Memberikan penguatan kepada siswa	√				√	
	Memberikan penghargaan kepada siswa yang tampil di depan kelas	√				√	
Tahap penutup	Melibatkan siswa dalam memberikan kesimpulan	√				√	
	Memberikan tugas rumah kepada siswa	√					√
Jumlah Skor		76					
Rata-rata skor		3,04					
Persentase kemampuan aktifitas guru		76					

Tabel 9 LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS BELAJAR SISWA PADA SIKLUS II

No	Aspek yang diamati	Nilai Capaian Kelompok					Rata-rata Total
		K1	K2	K3	K4	K5	
1.	Menyimak penjelasan guru.	2	3	3	3	3	2,8
2.	Menghargai pendapat teman.	1	3	3	1	3	2,2
3.	Keterampilan merumuskan masalah.	1	3	1	3	1	1,8
4.	Keterampilan mencari dan mengolah sumber belajar	2	3	2	1	2	2
5.	Keterampilan menyusun data dan informasi	1	1	1	1	1	1
6.	Keterampilan menyajikan data	1	3	2	3	3	2,4
7.	Keterampilan menyelesaikan masalah	2	2	2	1	2	1,8
8.	Keterampilan menyusun laporan	1	3	1	1	1	1,4
9.	Mengemukakan pendapat atau ide kepada guru atau teman.	1	2	2	2	3	2
10.	Berdiskusi dalam kelompok.	3	3	3	2	1	2,4
11.	Mempresentasikan hasil kerja kelompok	1	3	1	1	2	1,6
12.	Menarik kesimpulan	3	3	3	3	2	2,8
13.	Berperilaku yang relevan dalam kegiatan pembelajaran.	1	2	2	1	2	1,6
Jumlah		20	34	26	23	26	25,8
Rata-rata (%)		51,3	87,2	66,7	59	66,7	66,2

Tabel 10 HASIL EVALUASI BELAJAR SISWA PADA SIKLUS II

No	Nama Siswa	Nilai	Keterangan	
			Lulus	Tidak
1	AMR	74		√
2	ARS	80	√	
3	ALS	93	√	
4	DKN	73		√
5	FNA	85	√	
6	IDR	80	√	
7	INR	73		√
8	IML	80	√	
9	KTA	80	√	
10	KNH	89	√	
11	LMA	87	√	
12	MAR	83	√	
13	MYS	85	√	
14	RDA	87	√	
15	RDT	94	√	
16	RWT	73		√
17	RST	82	√	
18	VVA	86	√	
19	ARM	74		√
20	RRY	81	√	
21	MFN	74		√
Nilai Rata-Rata		81,57		
Persentase Ketuntasan		71,42%		

Tabel 11 REKAPITULASI DATA TIAP SIKLUS

No	Tindakan	Aktifitas (%)		Karakter (%)				
		Guru	Siswa	Disiplin	Jujur	Tanggung Jawab	Peduli	Santun
1.	Siklus I	71	47,7	75	70	58,33	58,33	57,14
2.	Siklus II	76	66,2	79,16	75	75	70,83	71,42
3.	Siklus III	96	85,1	91,66	90	91,66	91,66	92,85

Sumber: Rekapitulasi Data Observasi

BAHAN AJAR TRADISI LISAN FALSAFAH HIDUP ORANG BUGIS

1. *Naiya tau malempuu-e' manguruu eloo-i' tau sugi-e* (orang jujur sewarisan dengan orang kaya). Maknanya: orang jujur tidak sulit memperoleh kepercayaan dari orang kaya karena kejujurannya.
2. *Rebba sipatokkong, mali' siparappe', sirui' menre' tessirui'no', malilu sipakainge'* (Rebba saling menegakkan, hanyut saling mendamparkan/saling menarik ke pinggir pantai, jika khilaf saling mengingatkan).
Maknanya: Rebah tegak-menegakkan, ialah supaya berpijak dengan teguh dan berdiri dengan megah di atas bumi kehidupan. Jika hanyut/ada kesulitan yang dihadapi seseorang harus tolong menolong. Tidak ada jalan kehidupan tanpa rintangan dan persimpangan, itulah perlunya ingat-mengatkan ke jalan yang benar. Jika semuanya sudah berpadu, maka akan menjelmah gotong royong yang sempurna.
3. *Naiya accae ripatoppoki je'kko, rirapangngi alliiri;, nare'kko te'yai mareddu', mapooloi* (kepandaian yang disertai kecurangan ibarat tiang rumah, jika tidak tercabut ia akan patah).
Maknanya: Bagi Masyarakat Bugis, tiang rumah dihubungkan satu dengan yang lain menggunakan pacak, jika pacak itu bengkok, sulit masuk ke lubang tiang dan patah kalau dipaksakan. Kiasan terhadap orang pandai tetapi tidak jujur selamanya tidak akan mendatangkan kebaikan (berkah) bahkan dapat membawa bencana/malapetaka.
4. *Temmettak nawa-nawa majaa': Tidak pernah berpikiran jahat*
Tammassuk ada-ada belle: Tidak mengeluarkan kata-kata dusta
Teppugauk-gauk maceko: Tidak melakukan perbutan curang
5. *Ka-antu jekkonga kammai batu nibuanga naung rilikuo' na-antu lombusuka kammai bulo ammwanga ri je'ne'ka, nuossakaugi poko'na ammumbai appa'na, nuassakaugi appa'na ammumbai poko'na* (kecurangan itu sama dengan batu yang dibuang ke dalam lubang; sedangkan kejujuran laksana bambu yang terapung di air, jika ditekan pangkalnya, maka ujungnya akan timbul, dan jika ditekan ujungnya, maka pangkalnya akan timbul).
Maknanya: kecurangan mudah disembunyikan; Akan tetapi kejujuran senantiasa tampak dan muncul ke permukaan.
6. Raja dan pemerintahan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan memerintah berdasarkan etika pemerintahan yang disebut *sulapa' 'appa'* (empat penjuru tetapi bukan penjuru angin, melainkan kearifan, yaitu: *Lempuu*²⁶ (lurus, jujur), *tongeng* (kebenaran, benar), *warani* (berani), dan *temmappallaisengngi/adele* (adil). Kemudian di tengah *sulapa' 'appa'* didirikan *siri' dan pesse*. Seorang pemimpin *masiri'* kalau tidak jujur atau lurus dalam menjalankan pemerintahan. *Masiri'* kalau tidak tegas dan berani melindungi dan mensejahterakan rakyatnya dalam menjalankan pemerintahan. *Masiri'* kalau tidak dapat berlaku adil didalam menjalankan pemerintahan. Ketika seseorang memimpin menjalankan *sulapa' 'appa'* dalam pemerintahannya dan mendapat perlakuan yang membuat yang bersangkutan direndahkan martabat maka *rapu (rumpun)* dari seseorang yang telah direndahkan tidak akan *masseddi siri'* (rumpun itu membela kehormatan saudara se-rapu-nya). Selanjutnya *masseddi siri'* berkembang menjadi *pesse*. Pembebasan kehormatan se-rapu dan jaringan rapu –nya. Jadi pada dasarnya seseorang pemimpin di Sulawesi Selatan malu kalau tidak jujur, berani, benar, dan adil. Etika ini berlaku pula dalam kehidupan social.

BAHAN AJAR SESUAI BUKU PEGANGAN SISWA JENIS-JENIS MANUSIA PURBA DI INDONESIA

Manusia yang hidup pada zaman prasejarah sekarang sudah berubah menjadi fosil. Fosil manusia yang ditemukan di Indonesia terdiri dari beberapa jenis. Hal ini diketahui dari kedatangan para ahli dari Eropa pada abad ke-19, di mana mereka tertarik untuk mengadakan penelitian tentang fosil manusia di Indonesia.

Fosil manusia yang ditemukan pertama kali berasal dari Trinil, Jawa Timur oleh Eugene Dubouis, sehingga menarik para ahli lain untuk datang ke Pulau Jawa, mengadakan penelitian yang serupa. Selanjutnya penyelidikan fosil manusia dilakukan oleh GRH Von Koenigswald, Ter Har, dan Oppenoorth serta F. Weidenrech. Mereka berhasil menemukan fosil manusia di daerah Sangiran, Ngandong, di lembah Sungai Bengawan Solo. Atas temuan fosil tersebut, Von Koenigswald membagi zaman Dilluvium/Pleistocen di Indonesia menjadi 3 lapisan yaitu

1. Pleistocen bawah/lapisan Jetis,
2. Pleistocen tengah/lapisan Trinil dan
3. Pleistocen atas/lapisan Ngandong.

Penyelidikan fosil manusia selain dilakukan oleh orang-orang Eropa, juga oleh para ahli dari Indonesia, seperti Prof. Dr. Sartono, Prof. Dr. Teuku Jacob, Dr. Otto Sudarmadji dan Prof. Dr. Soejono. Lokasi penyelidikan antara lain Sangiran dan lembah Sungai Bengawan Solo. Dari hasil penyelidikan tersebut dapat diketahui jenis manusia purba yang hidup di Indonesia. Untuk itu silahkan Anda pelajari uraian berikut ini

a. *Meganthropus*

Seperti yang telah diuraikan pada materi sebelumnya, Von Koenigswald menemukan tengkorak di Desa Sangiran tahun 1941. Tengkorak yang ditemukan berupa tulang rahang bawah, dan gigi geliginya yang tampak mempunyai batang yang tegap dan geraham yang besar-besar.

Dari penemuan tersebut, maka oleh Von Koenigswald diberi nama *Meganthropus Palaeojavanicus* yang artinya manusia raksasa tertua dari Pulau Jawa. Fosil tersebut diperkirakan hidupnya antara 20 juta - 15 juta tahun yang lalu, dan berasal dari lapisan Jetis. Untuk lebih menambah pemahaman Anda tentang jenis manusia purba di Indonesia, maka bandingkanlah jenis *Meganthropus* ini dengan jenis fosil yang lain seperti pada uraian materi berikut ini.

Ciri Meganthropus :

- a. Hidup antara 2 s/d 1 juta tahun yang lalu
- b. Badannya tegak
- c. Hidup mengumpulkan makanan
- d. Makanannya tumbuhan
- e. Rahangnya kuat

b. *Pithecanthropus/Homo Erectus*

Dengan kedatangan Eugene Dubouis ke Pulau Jawa tahun 1890 di Trinil, Ngawi ditemukan tulang rahang, kemudian tahun 1891 bagian tengkorak dan tahun 1892 ditemukan tulang paha kiri setelah disusun hasil penemuan fosil-fosil tersebut oleh Eugene Dubouis diberi nama *Pithecanthropus Erectus* artinya manusia kera yang berjalan tegak. Dan sekarang fosil tersebut dinamakan sebagai *Homo Erectus* dari Jawa. *Homo Erectus* hidupnya diperkirakan antara 1,5 juta - 500.000 tahun yang lalu dan berasal dari Pleistocen tengah atau lapisan Trinil.

Ciri Pithecanthropus :

- a. Hidup antara 2 s/d 1 juta tahun yang lalu
- b. Hidup berkelompok
- c. Hidungnya lebar dengan tulang pipi yang kuat dan menonjol

d. Mengumpulkan makanan dan berburu

e. Makanannya daging dan tumbuhan

Dari penjelasan di atas, apakah Anda sudah memahami bahwa Homo Erectus ternyata usianya lebih muda jika dibandingkan dengan Meghanthropus Palaeojavanicus.

Para ilmuwan awalnya menganggap hasil temuan E. Dubouis (Homo Erectus) bukan termasuk garis keturunan manusia, tetapi setelah adanya temuan fosil oleh Von Koenigswald dari lapisan jetis/pleistocen bawah, maka seluruh ilmuwan mengakui bahwa fosil-fosil yang ditemukan Von Koenigswald lebih tua umurnya jika dibandingkan dengan Homo Erectus yang ditemukan oleh E. Dubouis.

c. Homo Sapiens

Homo Sapiens adalah jenis manusia purba yang memiliki bentuk tubuh yang sama dengan manusia sekarang. Mereka telah memiliki sifat seperti manusia sekarang. Kehidupan mereka sangat sederhana, dan hidupnya mengembara.

Ciri jenis Homo :

- a. Hidup antara 25.000 s/d 40.000 tahun yang lalu
- b. Muka dan hidung lebar
- c. Dahi masih menonjol
- d. Tarap kehidupannya lebih maju dibanding manusia sebelumnya

Jenis fosil Homo Sapiens yang ditemukan di Indonesia terdiri dari:

1. Fosil manusia yang ditemukan di daerah Ngandong Blora di Sangiran dan Sambung Macan, Sragen, lembah Sungai Bengawan Solo tahun 1931 - 1934. Fosil ini setelah diteliti oleh Von Koenigswald dan Weidenreich diberi nama Homo Sapien Soloensis (Homo Soloensis).
2. Fosil manusia yang ditemukan di Wajak (Tulung Agung) tahun 1889 oleh Van Reitschotten diteliti oleh Eugene Dubouis kemudian diberi nama menjadi Homo Sapiens Wajakensis.

Kebudayaan Paleolitikum di Indonesia ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandong, maka sering disebut Kebudayaan Pacitan dan Kebudayaan Ngandong.

1) Kebudayaan Pacitan

Alat-alat kebudayaan Pacitan ditemukan oleh Von Koenigswald pada tahun 1935. Di daerah Pacitan banyak ditemukan alat-alat dari batu yang masih sangat kasar. Alat-alat tersebut berbentuk kapak, yakni kapak perimbas (chooper), karena tidak memakai tangkai maka disebut Kapak Genggam. Alat budaya Pacitan diperkirakan dari lapisan pleistosen tengah (lapisan Trinil); sedangkan pendukung kebudayaan tersebut ialah Pithecanthropus erectus. Kapak Genggam selain ditemukan di Pacitan, juga ditemukan di Sukabumi dan Ciamis (Jawa Barat), Parigi dan Gombong (Jawa Tengah), Bengkulu dan Lahat (Sumatra Selatan), Awangbangkal (Kalimantan Selatan), dan Cabenge (Sulawesi Selatan), Flores, dan Timor. Selain Kapak Genggam, juga dikenal jenis lain, yakni alat Serpih (flake).

2) Kebudayaan Ngandong

Di sekitar daerah Ngandong dan Sidorejo (dekat Ngawi, Madiun, Jawa Timur) didapatkan banyak alat-alat dari tulang di samping kapak-kapak genggam dari batu. Alat-alat Kebudayaan Ngandong ditemukan oleh Von Koenigswald pada tahun 1941 dan yang banyak ditemukan alat-alat dari tulang (semacam alat penusuk = belati), dan tanduk rusa terutama di gua.



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Konferensi Nasional Sejarah X

Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta
7-10 November 2016

Sejarah Maritim dalam Kurikulum Pendidikan di Sekolah (Implementasi Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia)

Dr. Anzar Abdullah



SEJARAH MARITIM DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN DI SEKOLAH

**(Implementasi Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia)*
Anzar Abdullah**

**Dosen Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI) Makassar,
Email:anzarabdullah91@yahoo.co.id.**

Abstrak

Untuk membangun Negara maritim yang besar, diperlukan landasan nilai-nilai kemaritiman yang kuat. Pembangunan Negara maritim tanpa landasan nilai budaya maritim yang kuat, hanya akan melahirkan eksploitasi kekayaan laut yang tidak terkendali. Dalam hubungan inilah “Sejarah Maritim” sangat penting dimasukkan dalam kurikulum pendidikan di Sekolah sebagai media enkulturasi budaya maritime kepada peserta didik, yang diharapkan kelak dapat membangun Negara dan bangsa yang berorientasi pada dunia maritim. Hal ini sejalan dengan program pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Mohammad Jusuf Kalla mengenai “Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia”. Demikian juga sesuai dengan apa yang telah dicanangkan oleh pemerintahan sebelumnya di masa Habibie, mengenai Deklarasi Bunaken yang menyatakan bahwa pembangunan dan persatuan nasional Indonesia harus berorientasi ke laut. Selain itu, semasa Pemerintahan Soekarno, ada Deklarasi Djuanda yang juga menjadi dasar visi kelautan Indonesia. Dan demikian juga di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, ada “Seruan Sunda Kelapa” yang pokok pikirannya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama membangun kekuatan maritim dengan berlandaskan pada kesadaran penuh bangsa Indonesia. Bagaimana program dan visi pemerintah ini dapat direalisasikan dalam praktiknya? Hal inilah yang akan menjadi pokok pembicaraan dalam paper ini. Sejarah sebagai unsur yang dapat mewariskan ingatan kolektif bangsa mengenai visi kelautan Indonesia, sejak masa prasejarah sampai Indonesia memasuki zaman modern ini, akan memberikan kontribusi dengan cara mengusulkan agar memasukkan “Sejarah Maritim” dalam kurikulum pendidikan di sekolah. Bagaimana model dan pendekatan pembelajaran Sejarah Maritim ini akan dilakukan oleh guru atau pendidik? Adalah sesuatu yang sangat menarik, dan akan dibahas secara tuntas dalam paper ini.

Kata Kunci: Sejarah Maritim dalam Kurikulum Pendidikan di Sekolah, Implementasi visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

I. Pendahuluan

Laut mempunyai peran penting dalam sejarah umat manusia. Sebelum dikenal dan dipergunakannya sarana transportasi darat dan udara, hubungan social budaya, dan politik antar pulau dan benua, dilakukan melalui laut. Hal itu

* Paper di peresentasikan pada Konferensi Nasional Sejarah X, 7 – 10 November 2016, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Indonesia.

didukung oleh kondisi geografis dunia yang seperduanya adalah laut. Faktor inilah yang menjadi dasar untuk memahami berbagai dinamika awal sejarah dan migrasi manusia, dan karenanya sejarah maritime itu sangat penting dipelajari dan diperkenalkan kepada peserta didik.

Kegiatan pelayaran dan perdagangan maritime pada prinsipnya melibatkan para pelaku dalam usaha untuk mencari keuntungan ekonomi (*vent for surplus*) dan pertukaran budaya (*cross cultural trade*). Pelayaran samudera yang dilakukan bangsa Barat (Eropa) yang mengantarkan mereka pada pencapaian “daerah baru” dalam perkembangannya menciptakan kolonisasi di berbagai belahan dunia, bahkan berkembang menjadi praktik imperialisme. Walaupun hal itu, nantinya telah juga membawa proses transformasi budaya pada masyarakat dan suku bangsa yang didatanginya, sehingga terjadi proses adopsi budaya yang makin memperkaya khasanah kebudayaan dunia.

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia pun tidak bisa dilepaskan dari dinamika kemaritima dunia. Tersedianya ragam komoditi niaga di berbagai wilayah di kepulauan nusantara, seperti lada, cengkeh, kapur barus, kayu manis, kopi, dan pala, telah menarik perhatian bangsa-bangsa untuk mencari pusat-rempah tersebut. Lembaran sejarah dunia pun diwarnai oleh rekaman aktivitas pelayaran dan perniagaan serta berbagai peristiwa politik yang menarik untuk dipelajari.

Selain orientasi ekonomi dan politik atau kekuasaan, perdagangan maritime juga menjadi “benang sutera” budaya, meminjam istilah Jacob Cornelis van Leur (1967), sepanjang pantai di Asia Tenggara, khususnya kepulauan nusantara. Persebaran agama-agama besar dunia menyertai perkembangan kegiatan pelayaran dan perniagaan maritime. Tidak heran, apabila dinamika itu dalam pandangan Schrieke (1960) melahirkan perlombaan memperoleh umat antara penganut agama, khususnya Islam dan Kristen. Jauh sebelum dinamika itu, aktivitas perdagangan maritime telah mengantarkan persebaran dan perkembangan agama Hindu-Budha di Asia Tenggara kepulauan.

Mengingat hal tersebut, pembelajaran sejarah maritime sangat penting bagi peserta didik mulai dari TK, Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Tujuannya

ialah untuk membuka cakrawala berpikir atas realitas ekonomi, politik, dan budaya dunia maritime Indonesia dan dunia. Hal ini penting dilakukan, sejalan dengan program pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ingin berfokus pada sector maritime. Misi yang dikumandangkan untuk mendukung visi “*Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*” banyak yang bersentuhan langsung dengan dunia maritime. Domain maritime yang dimaksudkan ialah harus sesuai dengan makna laut, yakni sebagai medium transportasi, medium pariwisata, medium perdagangan, dan medium pertahanan keamanan. Oleh karena itu sesungguhnya dunia maritime adalah sebuah komunikasi lintas budaya dengan menjadikan lautan.

Sejarah Indonesia telah membuktikan, bahwa jauh sebelum Indonesia merdeka, Kerajaan Sriwijaya pernah menguasai seluruh wilayah lautan seperdua Asia Tenggara, memiliki Bandar Niaga yang ramai, pertahanan yang tangguh, dan disiplin dalam menegakkan hukum. Untuk itu, dalam upaya merecovery apa yang telah dilakukan oleh kerajaan maritime di masa lalu, dalam konteks dunia maritime modern sekarang ini, perlu dilakukan pembenahan dan inovasi, khususnya pewarisan nilai-nilai bahari ke dalam jiwa peserta didik melalui pendidikan di sekolah.

II. Pembahasan

1. Mengapa Semangat dan Jiwa Bahari penting untuk diwariskan?

Menyangkut pertanyaan ini, menarik perhatian yang dilontarkan oleh Alfred Thayer Mahan, seorang ilmuan asal Belanda, bahwa” para sejarawan pada umumnya tidak mengenal laut sebagai bagian dari kehidupan, karena mereka tidak pernah menaruh perhatian khusus terhadapnya, lagi pula mereka tidak mempunyai pengetahuan yang khusus tentang laut, dan mereka tidak mengindahkan pengaruh daripada kekuatan laut yang sangat menentukan jalannya peristiwa besar dunia (1890).”¹

Pernyataan tersebut di atas, adalah sebuah bentuk keprihatinan sekaligus tantangan dan tanggung jawab ilmiah bagi para sejarawan, guru sejarah, dosen

¹ E.Poelinggomang, *Sejarah Maritim Dunia*, (Makassar: Lembaga kajian dan Pengembangan Pendidikan (LKPP), 2012), h. 6.

sejarah dan peminat sejarah. Untuk itu, porsi sejarah maritime dalam historiografi Indonesia perlu diberi tempat secara khusus, mengingat serangkaian peristiwa besar manusia tidak dapat dilepaskan dari peran laut sebagai media enkulturasi.

Selain itu melihat beberapa peninggalan sejarah, terutama monument, maka ditemukan banyak symbol karya sejarah masa lalu yang mengabadikan kehidupan maritime. Hal ini dapat disaksikan pada monument raksasa Candi Borobudur, ditemukan replika perahu yang sedang mengarungi samudera. Begitu juga proses kedatangan bangsa Austronesia dari Yunan China Selatan ke Nusantara yang kemudian diidentifikasi sebagai nenek moyang bangsa Indonesia. Perjalanan yang dengan menggunakan perahu bercadik, merupakan kegiatan pelayaran maritime. Persebaran etnis di Nusantara, juga melalui lalu lintas pelayaran laut. Demikian juga aktivitas perdagangan antar pulau yang ditandai berkembangnya kota-kota pelabuhan di sepanjang pantai Nusantara. Oleh karena itu, aktivitas dunia maritime sesungguhnya adalah sebuah komunikasi lintas budaya dengan menjadikan laut sebagai mekanisme pemersatu dalam mencapai integrasi bangsa. Pentingnya lintas budaya sebagai bagian media enkulturasi bangsa, pernah dikemukakan oleh Fernand Braudel, sejarawan bermazhab Annales Perancis, bahwa *“The sea...provides unity, transport, the means of change and intercourse...but it has also been the great divider, the obstacle that had to be overcome (laut...memungkinkan adanya persatuan, pengangkutan, sarana pertukaran dan perhubungan...Namun demikian, laut juga telah menjadi pemisah yang hebat, suatu halangan yang harus diatasi.*²

Melalui hubungan laut, secara langsung akan menjebol sekat pemisah antar pulau di seluruh Nusantara. Hal ini dapat kita lihat ketika jaringan pelayaran dan perdagangan terbentuk sebagai pola sebelum dan sesudah datangnya bangsa Barat ke Nusantara dalam tiga jalur, yakni: *Pertama*, jalur yang menghubungkan antara Maluku dengan perairan Kepulauan Natuna, laut Sulawesi, pesisir Utara

² Lihat, Fernand Braudel, *The Mediterranean and Mediterranean World in the Age of Philip II* (terj. S. Reynold) Vol. 1 (New York: Harper Colophon Book, 1976); Lihat juga, Ahmading, *Pelautkah Orang Selayar: Tanah Doang Dalam Catatan Sejarah Maritim* (Yogyakarta: Ombak, 2006); A.B. Lapien dalam J.C. van Leur dan F.R.J. Verhoeven, *“Teori Mahan dan Sejarah Kepulauan Indonesia* (Jakarta: Bhatara, 1974).

Pulau Kalimantan dan Sulawesi, dan seterusnya Kepulauan Maluku dan Philipina atau sebaliknya. *Kedua*, jalur yang menghubungkan antara kawasan Barat dan Timur Nusantara dengan melintasi perairan laut Jawa, perairan Sulawesi Selatan (Selayar), perairan Sulawesi Tenggara, laut Banda, dan seterusnya kepulauan Maluku atau sebaliknya. *Ketiga*, jalur yang menghubungkan pesisir Utara pulau Jawa, Madura, Nusa Tenggara, Laut Banda, seterusnya ke kepulauan Maluku atau sebaliknya. Namun dari sekian banyak jalur itu, laut Jawalah yang paling ramai. Hal ini disebabkan, laut Jawa memiliki kedudukan strategis dalam jalur lalu lintas perdagangan dunia yang ramai antara Malaka, Jawa, dan Maluku. Berfungsinya laut Jawa sebagai jembatan penghubung pusat perdagangan di sepanjang pantai Nusantara, telah memberi kontribusi penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan kota-kota dagang di Nusantara selama abad ke 16 sampai abad ke 18 Masehi. Tersebutlah kota-kota dagang yang terkenal seperti: Banten, Cirebon, Batavia, Gresik, Tuban, Demak, Rembang, Pasuruan, Surabaya, Probolinggo, Panarukan, Buleleng, Lampung, Palembang, Banjarmasin, Pontianak, Sampit, Sambas, Makassar, Sumba, Kupang, dan Larantuka.³

Dari penelusuran sejarah, bangsa Indonesia sesungguhnya tidak terpengaruh atau tidak terbentuk jiwa baharinya karena adanya factor dari luar, karena orientasi maritime justru datang dari bangsa Indonesia sendiri. Hal ini, tentu saja disebabkan kesadaran akan factor geografis dan ekologis bangsa Indonesia, membuat mereka sangat menggantungkan hidupnya di laut. Namun tidak berarti komoditi atau barang dagangan mereka hanya bersumber dari laut semata, sehingga menutup akses dari sumber agraris. Hal ini terbukti di dalam sejarah, bahwa barang-barang komoditi hasil pertanian, seperti cengkeh, lada, kayu manis, pala, dan kapur barus menjadi barang yang sangat dicari dan diminati di pasaran Eropa dan Cina. Barang komoditi ini diekspor sampai ke Cina Utara

³ E. Poelinggomang, *Makassar Abad ke XIX: Studi Tentang Kebijakan Perdagangan Maritim* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2002) . Lihat juga, L.J. Touwen, *Shipping and Trade in the Java Sea Region 1870-1940: A Collection of Statistics on the Major Java Sea Ports* (Leiden: KITLV Press, 2001).

masa dinasti Han 2000 tahun yang lalu, demikian juga ke Roma Italia pada tahun 70 Masehi, dan Mesopotamia pada tahun 1700 SM.⁴

Selain itu, ketika masa pra colonial, rakyat Nusantara memanfaatkan laut sebagai alat pemersatu dan menjadi medium pergaulan antar etnis di Nusantara. Dari factor ekonomi, pelabuhan di suatu pulau ke pulau lainnya digunakan sebagai transit bagi pelayaran niaga. Misalnya untuk mengirim barang dagangan ke Maluku, maka pedagang dari Aceh akan transit terlebih dahulu di pelabuhan Jepara. Setelah itu dari Jepara barang dagangan akan dikirimkan ke Maluku, dan sebaliknya. Demikian juga dengan Makassar yang pada abad ke 16 masehi, menjalin hubungan dagang dengan pusat-pusat niaga di daerah penghasil komoditas, seperti Banten, Surabaya, Sumbawa, Bima, Alor, Maluku, dan Banjarmasin. Pulau-pulau di Nusantara menjadi hidup dan amat ramai akibat kegiatan perdagangan.⁵

Dari catatan sejarah, kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir dan terbentuk sebelum kemerdekaan. Hal ini dapat dibuktikan dengan ditemukannya berbagai situs pra sejarah di gua Pulau Muna (Sulawesi Tenggara), Seram (Maluku), Goa Maros (Sulawesi Selatan), Relief di Candi Borobudur yang penuh lukisan perahu layar, telah membuktikan fakta sejarah yang tidak terbantahkan, bahwa memang nenek moyang bangsa kita adalah pelaut ulung. Bukan hanya itu, ditemukan juga persamaan benda-benda sejarah antara suku asli kepulauan Australia (Aborigin) dengan di Pulau Jawa, menandakan bahwa nenek moyang kita sudah melakukan hubungan dengan bangsa lain dengan memakai kapal layar lewat jalur laut.

Selain factor sejarah di atas, kita sekarang tarik dalam konteks dunia maritime kontemporer, maka mengembalikan ruh kegiatan dunia maritime di wilayah kepulauan Indonesia, dari aspek ekonomi tentu saja akan meningkatkan

⁴ Lihat van Der Meulen dalam Suroyo, dkk, *Sejarah Maritim Indonesia I: Menelusuri Jiwa Bahari Bangsa Indonesia Abad ke-17 Masehi* (Semarang: Jeda, 2007), h. 35. Lihat juga, A. Dahana, *Tujuh Pelayaran Cheng Ho Sebagai Diplomasi Kebudayaan, 1405-1433 dalam Leo Suryadinata (ed.). Laksamana Ceng Ho dan Asia Tenggara*, (Jakarta: LP3ES, 2007).

⁵ Elfrida Gultom, *Refungsionalisasi pengaturan Pelabuhan untuk Meningkatkan Ekonomi Nasional* (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2007); Singgih Tri Sulistiono, *Pengantar Sejarah Maritim Indonesiia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas, 2004).

kesejahteraan rakyat. Setidaknya terdapat sepuluh sector yang dapat dikembangkan untuk kemakmuran Indonesia yang diambil dari kegiatan dunia maritime, yaitu : 1) industry perikanan, budi daya perikanan pantai dan budi daya laut, 3) industry pengolahan ikan, 40 industri bio teknologi kelautan, 5) energy dan pertambangan, 6) pariwisata pesisir dan laut, 7) transportasi laut dan pelabuhan, 8) industry maritime dan jasa, 9) sumber daya pulau-pulau kecil, dan 10) sumber daya non-konvensional.⁶

Belajar dari sejarah masa lalu bangsa Indonesia, potensi laut yang begitu besar, maka menjadi hal yang amat penting bagi pemerintah sekarang ini untuk mengembangkan laut sebagai basis potensial prekonomian bangsa untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Laut Indonesia merupakan urat nadi prekonomian nasional dan penggerak lalu lintas ekonomi dunia. Indonesia secara natural lahir dan tumbuh sebagai Negara dan bangsa maritime, jauh sebelum datangnya bangsa Eropa mengerus kekayaan dan sumber daya alam Indonesia.

Presiden Soekarno di masa pemerintahannya, telah berani melahirkan suatu deklarasi keutuhan wilayah Indonesia pada tanggal 13 Desember 1957 yang dikenal dengan Deklarasi Djuanda. Konsep dasar dari Deklarasi Djuanda ini ialah memandang bahwa kepulauan Indonesia merupakan wilayah pulau-pulau, wilayah perairan, dan dasar laut di dalamnya sebagai suatu kesatuan historis, geografis, ekonomis, dan politis. Dengan konsep ini, maka wilayah perairan Indonesia yang tadinya merupakan wilayah laut lepas, kini menjadi bagian integral dari wilayah Indonesia yang berada di bawah kedaulatan NKRI.

Pentingnya laut bagi bangsa Indonesia, sehingga Presiden Soekarno pada peresmian Institusi Angkatan Laut, tahun 1953 mengatakan, “...usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali, Ya...bangsa pelaut dalam arti yang seluas-luasnya. Bukan sekedar menjadi jongos-jongos di kapal, bukan! Tetapi bangsa pelaut dalam arti kata cakrawati samudera. Bangsa pelaut yang memiliki armada

⁶ Lihat, M. Djulianti Suroyo, dkk, *Sejarah Maritim Indonesia I: Menelusuri Jiwa Bahari Bangsa Indonesia Hingga Abad ke-17 Masehi* (Semarang: Jeda, 2007); Lihat juga, P. Sianipar, *Jembatan Selat Sunda dan Kepentingan Nasional: Paper presented for Seminar Hari Kebangkitan Teknologi Nasional*, Agustus 2012.

niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri.”⁷

Demikian juga, bukan sebuah kebetulan, jika senandung lagu berikut ini diciptakan oleh puteri seorang pelaut berdarah Bugis bernama Saridjah Niung atau yang dikenal dengan nama Ibu Sud:

*“Nenek moyangku orang pelaut
Gemar mengarung luas samudera
Menerjang ombak tiada takut
menempuh badai sudah biasa
angin bertiup layar terkembang
ombak berdebur di tepi pantai
pemuda b’rani bangkit sekarang
ke laut kita beramai-ramai”*

Sebuah lagu bersyair sederhana, namun memiliki pesan moral filosofis dan pewarisan nilai sejarah dari sebuah bangsa ulung penakluk samudera nan luas. Sebuah adagium mengatakan bahwa *“pelaut ulung tak pernah lahir dari laut yang tenang”*.⁸

Bukan pula sebuah kebetulan, jika Presiden Joko Widodo di penghujung pidato kepresidenannya di Gedung DPR/MPR RI pada hari Senin 20 Oktober 2014, menyampaikan pesan Presiden Pertama RI, Soekarno tentang jiwa Cakrawati Samudera sebagai ajakan untuk membangun Indonesia menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat, bangsa yang makmur, dan bangsa yang damai. Jiwa Cakrawati yang dimaksud ialah jiwa pelaut yang berani mengarungi gelombang dan hempasan ombak yang menggulung.⁹

Sejarah dunia memberikan pelajaran bagi kita, bahwa sejak abad ke-16 Masehi, kejayaan Negara adidaya di Eropa diperoleh setelah mereka melakukan ekspansi mencari dunia baru dan tanah jajahan melalui perdagangan rempah-rempah, keramik dan tenunan, seperti Belanda, Inggris, Spanyol, Portugis, dan Prancis. Terciptalah Negara jajahan di Asia dan Afrika, dan Amerika Selatan yang

⁷ Lihat, Priyadi Kardono, (ed.), *Paradigma Geomaritim: Strategi Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dalam Perspektif Geografi* (Jakarta: Badan Informasi Geospasial, 2015), h. 19.

⁸ Lihat juga, Pidato Joko Widodo pada Musyawarah Nasional XII Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama), 6 November 2014 di Kendari.

⁹ Lihat Kardono, *Paradigma Geomaritim*, h. 19.

dimulai dari perdagangan dan ekspansi mereka dengan memakai teknologi pelayaran yang modern di kala itu, dengan munculnya kapal uap. Ruang lautan dikuasai oleh mereka yang mempunyai kemampuan jelajah yang tinggi. Slogan *British Rules the Waves*, menunjukkan keunggulannya menguasai tujuh samudera dunia. Dampaknya ialah, kerajaan-kerajaan besar yang pernah jaya di miliki Nusantara, meskipun symbol kejayaannya bercorak pedalaman, namun mereka membangunnya melalui penjelajahan samudera antar pulau dan antar Negara. Cikal bakal inilah yang seharusnya mengantarkan Indonesia sebagai Negara maritime yang memiliki kekuatan menguasai lautan (*sea power*). Tidak berlebihan jika kemudian kesadaran historis yang disertai tekad tersebut direalisasikan menjadi sebuah visi menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim dunia.

Kemunduran dunia maritime di Nusantara dimulai sejak masuknya bangsa Eropa, terutama bangsa Belanda. Dengan hadirnya bangsa Eropa di Nusantara dengan armada dan militer yang kuat dan modern, menggeser kekuatan maritime kerajaan-kerajaan Islam Nusantara ketika itu. Mereka digiring ke pedalaman melalui kepercayaan mistik dan mitologi yang tidak lagi untuk mencintai laut. Hal ini pernah dikatakan oleh Pramudya Ananta Toer dalam bukunya *Arus Balik*: “*hancurnya Kerajaan-Kerajaan di Nusantara, karena Singgasana Rajanya dipalingkan ke laut.*”¹⁰

Belanda waktu itu, malahan melakukan rekayasa social dan militer yang berhasil merubah paradigma jati diri rakyat Nusantara, dari yang semula merupakan bangsa pelaut berubah menjadi bangsa agraris (*land based oriented*). Kolonialisme telah membawa dampak terhadap perubahan cara pandang manusia Nusantara dari sifatnya yang bahari ke agraris oriented. Laut tidak lagi menjadi prioritas, karena telah dikuasai oleh colonial Belanda.

Ketika memasuki alam kemerdekaan, upaya untuk mengembalikan visi kelautan Indonesia mulai dilakukan kembali oleh pemerintahan Soekarno. Upaya itu kemudian berhasil dilakukan dengan lahirnya Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957, yang intinya ialah “kepulauan Indonesia merupakan wilayah pulau-pulau,

¹⁰ Lihat, Pramodya Ananta Toer, *Arus Balik: Sebuah Epos Pasca Kejayaan Nusantara di Awal abad ke 16* (Jakarta: Hasta Mitra, 2002).

wilayah perairan, dan dasar laut di dalamnya sebagai suatu kesatuan historis, geografis, ekonomis, dan politis. Dengan konsep ini maka wilayah perairan Indonesia yang tadinya merupakan wilayah laut lepas, kini menjadi bagian integral dari wilayah Indonesia yang berada di bawah kedaulatan NKRI. Namun Presiden Soekarno belum mempunyai kesempatan banyak untuk merubah paradigma *land based oriented* menjadi *maritime based oriented*, disebabkan factor politik, dan stabilitas keamanan. Dalam kurun waktu 1960-1966, Presiden Soekarno sudah mempunyai pandangan mengenai Geopolitik Indonesia, namun belum sempat terlaksana dengan baik karena keburu terjadi pergantian pemerintahan ke Orde baru.

Pemerintah Orde Baru di bawah Soeharto, bukannya visi kelautan yang dikembangkan, tetapi visi ke *land based oriented* (pembangunan agraris) di darat. Meskipun ada upaya untuk membawa visi pembangunan kelautan pada tahun 1982, ketika Menteri Luar Negeri di jabat oleh Mochtar Kusumaatmadja. Pada waktu itulah 119 negara termasuk Indonesia menandatangani Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 atau *United nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS). Dalam konvensi ini ada 9 pasal mengenai perihal ketentuan tentang prinsip “Negara Kepulauan” (*archipelago state*). Salah satu pasalnya ialah menyatakan bahwa laut bukan sebagai alat pemisah, melainkan sebagai alat yang menyatukan pulau-pulau yang satu dengan yang lainnya, yang kemudian diimplementasikan oleh Indonesia dengan konsep “Wawasan Nusantara”.¹¹ Tetapi, mengingat Soeharto dengan latar seorang anak Petani dan perwira Angkatan Darat, tentu lebih berorientasi kepada paradigma continental, sehingga hampir semua kebijakan pembangunannya jauh dari aspek maritime.

Selanjutnya, setelah Soeharto lengser, dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie, muncul suasana baru, sehingga paradigma nasional yang mendukung visi kemaritiman lahir kembali dengan adanya “*Deklarasi Bunaken*” yang dicetuskan tanggal 26 September 1998. Deklarasi ini pada dasarnya menyatakan secara tegas,

¹¹ Lihat Rochmin Dahuri, Potensi Kelautan Indonesia, in <http://ugm.ac.id/id/berita/9256-potensi.kelautan.indonesia.12.triliun.belum.digarap.maksimal>; Nono Sampono, *Optimalisasi Implementasi Kurikulum Kebaharian Dalam Sistem pendidikan Nasional*, Paper presented di Sekolah Yayasan Hangtuah, Jakarta, Rabu 19 Agustus 2015, h. 7.

dua hal pokok, yaitu: kesadaran bangsa Indonesia akan geografis wilayahnya, dan kemauan yang besar dari bangsa Indonesia untuk membangun dunia kelautan. Kesadaran geografis adalah kesadaran bangsa Indonesia untuk memahami dan menyadari akan kondisi obyektif kepulauan Indonesia yang 2/3 bagian wilayahnya adalah laut. Kesadaran ini sangat penting bagi keberhasilan bangsa dalam melaksanakan pembangunan kelautan.

Deklarasi Bunaken adalah kunci pembuka babak baru pembangunan nasional yang berorientasi ke laut, karena mengandung komitmen bahwa: *Pertama*, visi pembangunan dan persatuan nasional Indonesia harus juga berorientasi ke laut. Kedua, semua jajaran pemerintahan dan masyarakat hendaknya juga memberikan perhatian untuk pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan potensi kelautan Indonesia. Selain itu, tumbuh kesadaran bahwa potensi dan kekayaan yang ada di laut merupakan sumber ekonomi utama Negara. Laut adalah kehidupan masa depan bangsa.

Atas pertimbangan dan pemikiran di atas, maka Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001) membentuk Kementerian baru yakni Departemen Eksplorasi Laut dengan Keputusan Presiden No. 355/M/Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999. Juga dibentuk Dewan Maritim Indonesia (DM) yang bertugas untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan program pembangunan kelautan Indonesia.

Pada tahun 2001, yakni pada tanggal 27 Desember 2001, bertempat di Pelabuhan Rakyat Sunda Kelapa Jakarta, Presiden Megawati Soekarnoputri juga telah mencanangkan “*Seruan Sunda Kelapa*.” Inti dari Seruan Sunda Kelapa ini ialah mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama membangun kekuatan maritime atau kelautan, dengan berlandaskan pada kesadaran penuh bahwa bangsa Indonesia hidup di Negara kepulauan, dengan wilayah laut yang kaya dengan sumber daya alam. Ada Lima (5) pilar program pembangunan kelautan yang terdapat di dalam “*Seruan Sunda Kelapa*”, yaitu:

1. Membangun kembali wawasan bahari;
2. Menegakkan kedaulatan secara nyata di laut;
3. Mengembangkan industry dan jasa maritime secara optimal dan lestari bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

4. Mengelola kawasan pesisir, laut, dan pulau kecil, dan
5. Mengembangkan hukum nasional di bidang maritime.

Dengan digagasnya *Seruan Sunda Kelapa*, diharapkan dapat membangkitkan kesadaran sejarah untuk mengembalikan visi bangsa Indonesia ke pada dunia maritime. *Seruan Sunda Kelapa* adalah paradigma nasional untuk membangkitkan semangat dan visi maritime nasional untuk memberi kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional, membangkitkan kekuatan armada niaga nasional, mempercepat tercapainya cita-cita masa depan bangsa, serta memperkuat simpul ke-Indonesiaan.

Bukan hanya itu, di masa Presiden SBY, Dewan Maritim Indonesia (DMI) diganti menjadi Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN) melalui Kepres No.21 tahun 2007 dan menyelenggarakan Konferensi Kelautan Dunia “*World Ocean Conference (WOC)*” di Manado pada tanggal 11-15 Mei 2009. Ini adalah inisiatif Indonesia dalam forum internasional untuk mengambil keputusan mengembangkan kolaborasi internasional untuk komitmen bersama dalam menghadapi isu kelautan dunia dan perubahan iklim global. Dengan demikian, WOC 2009 dapat dikatakan sebagai komitmen bangsa Indonesia dalam usaha mengembangkan, mengelola, dan melestarikan sumber daya laut nasional dan internasional secara berkelanjutan.

Walaupun pemerintah Indonesia telah begitu banyak membuat kebijakan dan doktrin untuk mengembalikan kejayaan maritime seperti di masa lampau sebelum datangnya bangsa Barat, mulai dari Orde lama, Orde Baru hingga Orde Reformasi, namun hingga kini masih tetap bersifat normative dan belum terealisasi sebagaimana yang diharapkan, baik dalam bidang ekonomi, social dan budaya, maupun pertahanannya. Kehilangan orientasi terhadap visi maritime tentu menjadi salah satu penyebab utama, mengapa paradigma pembangunan nasional belum berbasis kemaritiman. Ada empat factor yang selama ini bangsa Indonesia kehilangan momentum visi kemaritimannya, yaitu : (1) Kehilangan orientasi akan geografis Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar dunia, (2) Kehilangan orientasi wawasan nasional atau Wawasan Nusantara terhadap nilai-nilai

kebaharian, (3) Kehilangan orientasi akan kesadaran pentingnya laut bagi Indonesia, (4) Kehilangan orientasi akan kesadaran diri sendiri terhadap nilai-nilai kebaharian.

Perubahan paradigma pembangunan Indonesia baru terjadi ketika Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 November 2014 di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur di Naypyidaw, Myanmar. Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo mengumumkan keinginan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. Untuk itu Indonesia akan membangun kembali budaya maritime, menjaga dan mengelola sumber daya laut, memprioritaskan pembangunan infrastruktur maritime, membangun pertahanan untuk menjaga kedaulatan laut, serta melalui diplomasi maritime mengajak mitra Indonesia untuk bekerja sama dalam bidang kelautan dan meniadakan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, penyelundupan, perompakan laut, dan sengketa wilayah laut.¹²

2. Strategi Membangkitkan Budaya Maritim

Sekalipun kaya akan hasil laut, bangsa Indonesia tidak terkenal sebagai pemakan ikan. Oleh karena itu, budaya maritime harus terbentuk dalam sebuah reformasi cultural atau revolusi mental, meminjam istilahnya Presiden Jokowi, yang diawali dari meja makan keluarga Indonesia, di mana ikan harus menjadi menu utama bangsa Indonesia. Gemar makan ikan laut, selain mencerdaskan bangsa sebagaimana bangsa Jepang, akan mendorong terpenuhinya tata kelola kelautan Indonesia yang baik.¹³ Selain itu, bila dibandingkan rata-rata konsumsi ikan orang Indonesia yang hanya mencapai + 30 kg pertahun, masih kalah dengan konsumsi orang Malaysia yang mencapai +37 kg pertahun. Jika dibandingkan lagi dengan Jepang, kita hanya separuhnya dari konsumsi mereka yang mencapai 60 kg pertahun. Kalau konsumsi ikan saja masih rendah, itu artinya tidak mengherankan apabila penanganan *illegal fishing* tidak dianggap penting.

¹² Nono Sampono, *Implementasi Kurikulum*, h. 9; Kardono, *Paradigma Geomaritim*, h. 20.

¹³ Lihat, Sri Sultan Hamengkubuwono X, *Budaya Maritim Indonesia, Peluang, Tantangan dan Strategi: Sarasehan Road Map Pembangunan Kelautan dan Kemaritiman Indonesia Serta Pencanaan Bulan Maritim UGM*, Yogyakarta, 28 Agustus 2014.

Apabila kesadaran konsumsi ikan orang Indonesia yang jumlah penduduknya lebih 240 juta orang dapat menyamai orang Jepang, artinya dua kali lebih banyak kebutuhan ikan dari data sekarang, hal itu akan memaksa pemerintah secara serius menangani lautnya agar kebutuhan konsumsi ikan orang Indonesia terpenuhi. Serius menangani tata kelola kelautan itu termasuk di dalamnya adalah mengurai keruwetan yang terjadi, karena tumpang tindih peraturan dan tidak terkoordinasi dengan baik, dan karena adanya egoisme sektoral.

Kerugian Indonesia akibat *illegal fishing* ini diperkirakan mencapai 30 triliun pertahun. Jumlah trilyunan ini adalah angka yang sangat besar dan dapat dijadikan alokasi anggaran untuk pendidikan anak Indonesia. Jepang saja untuk mencari ikan sampai ke kutub Utara, dan segala jenis ikan pun diburu. Sementara kita Indonesia yang wilayah lautnya sangat luas dari Jepang, belum memanfaatkan maksimal tata kelola satu atap kelautan. Semua instansi merasa punya hak atas tata kelola laut, meskipun untuk bertanggung jawab atas kerugian tata kelola tersebut tidak ada yang mau bertanggung jawab.¹⁴

Oleh karena itu, kita harapkan pemerintah melahirkan kebijakan baru mengenai budaya maritime yang berangkat dari rumah tangga penduduk Indonesia, tiada hari tanpa makan ikan ikan laut. Memang membentuk suatu budaya itu tidak instan, tetapi melalui proses pendidikan, dipelajari dan diedukasi. Ini adalah hal sederhana, tetapi sangat penting merubah cara pandang bangsa Indonesia terhadap lautnya. Apabila program makan ikan laut menjadi tradisi, kebutuhan makan ikan akan meningkat, *illegal fishing* diperangi, pembangunan infrastruktur kelautan dan kekuatan pertahanan laut ditingkatkan, maka akan lahir budaya maritime yang tangguh.

3. Penyusunan Sejarah Maritim dalam Kurikulum, sebuah gagasan awal?

Pendidikan adalah dasar dari pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, sains, dan teknologi, menekan dan mengurangi kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan, serta peningkatan kualitas peradaban manusia pada umumnya. Orientasi system dan materi pendidikan yang diterapkan dalam suatu Negara

¹⁴ Lihat, Yosaphat Didik Heru Purnomo, Perlu Revolusi Laut Untuk Wujudkan Budaya Maritim, Suara Pembaruan di muat di *BERITASATU.Com*, Jakarta, 25 Agustus 2014., access 15 Juni 2016.

hendaknya disesuaikan dan relevan dengan kondisi geografis yang dimiliki. Kebanggaan Indonesia akan kejayaan lautnya mulai terkikis saat mengalami penjajahan oleh Belanda, yang menyetir orientasi maritime menjadi orientasi agraris. Pola pendidikan yang dikembangkan juga menjadi lebih banyak difokuskan pada bidang pertanian dan perkebunan. Kini saatnya kita kembali pada jati diri Indonesia yang asli, yang tertuang dalam pasal 25A undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia tahun 1945 tentang wilayah Negara, “*Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.*”

Merintis pendidikan berbasis maritime bukan suatu hal yang mudah, dan juga bukan sesuatu yang mustahil. Memang selama ini, ada kesalahan di dalam system kurikulum kita, mengapa? Karena selama ini murid-murid di sekolah kurang mengenal laut Indonesia, karena system kurikulum dalam pendidikan tidak berfokus pada pengenalan terhadap potensi laut yang luar biasa itu. Padahal dinegara lain, pengenalan lingkungan alam, terutama laut menjadi bagian penting dalam kurikulum sekolah, mulai dari Sekolah dasar sampai Sekolah Menengah Atas. Indonesia yang jelas-jelas adalah Negara kepulauan, justru kalah dalam hal ini.¹⁵ Oleh karena itu, gagasan, ide, dan konsep tentang upaya pengenalan akan dunia maritime Indonesia harus segera dilakukan sejak anak masih duduk di bangku Taman kanak-Kanak. Sedangkan murid Sekolah Dasar dapat mulai diperkenalkan dengan laut melalui materi dan permainan yang atraktif, seperti lagu, pengenalan akan biodata laut, seperti ikan melalui gambar di aqua rium, dan peta yang menunjukkan luasnya wilayah Negara Indonesia. Lagu “*Nenek Moyangku Seorang Pelaut*” ciptaan Ibu Sud dapat menjadi referensi pembelajaran sederhana yang mendidik sekaligus menyenangkan itu, agar selalu diperdengarkan kepada peserta didik sebelum memulai pelajaran di kelas. Tujuannya ialah untuk mengenalkan kepada ingatan kolektif anak (*term memori*) agar membentuk dasar wawasan maritime di benak para calon pemimpin bangsa masa depan.

¹⁵ Lihat Ainur Rahman, Indonesia Butuh Kurikulum Pendidikan kelautan, in <http://news.detik.com/read/2015/03/06/202521/282106/10/1/banyuwangi-dipilih-menjadi-pusat-pendidikan-maritim-nasional>, diakses 5 Juni 2016.

Sedangkan pada tingkat Sekolah Lanjutan Menengah, pendidikan wawasan kemaritiman, adalah bagaimana membentuk sumber daya manusia kelautan yang berdaya saing dan kompeten. Untuk kepentingan ini perlu dibangun sekolah tinggi yang bergerak di bidang maritime, baik kelautan, perikanan, perkapalan, nautika, keniagaan, maupun pertahanan.

Perubahan orientasi dan visi dari daratan ke visi kelautan atau maritime, memang memerlukan waktu yang relative panjang. Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian semua pihak, terutama adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemristekdikti), dan kementerian teknis lainnya yang terkait dengan kelautan. Katakanlah, Kemdikbud dan Kemristekdikti sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap mutu pendidikan nasional, mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, berdasarkan pada keperluan bangsa akan generasi pewaris dan penerus jiwa bahari. Akan tetapi, kini aspek ini tidak mendapatkan perhatian khusus terutama pada jenjang pendidikan dasar sampai menengah. Hanya di sebagai kecil perguruan tinggi memiliki pilihan beragam untuk memperoleh pendidikan kelautan yang diperlukan.

Faktor tersebut memberikan indicator, bahwa dari pendidikan formal, kurikulum pendidikan nasional yang diterapkan masih belum mampu mengakomodir kepentingan akan sumber daya manusia yang menguasai tentang dunia maritime. Apa lagi anak-anak usia sekolah yang berasal dari keluarga yang mayoritas berada dalam kesulitan ekonomi, masih kurang mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak sesuai haknya. Padahal aspek kelautan atau dunia maritime suatu Negara akan maju apabila didukung oleh kemampuan sumber daya manusia dibidang kemaritaman. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis menuju tercapainya tujuan itu perlu segera dilakukan, mulai dari inisiasi pengenalan dunia maritime hingga pendalaman teknologi terkini yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan potensi kelautan atau kemaritiman di Indonesia.¹⁶

¹⁶ Lihat Nono Sampono, *Implementasi Kurikulum Kebaharian Dalam Sistem Pendidikan Nasional*, Paper presented di Sekolah Yayasan Hangtuah' Rabu 19 Agustus 2015.

Untuk merealisasikan cita-cita untuk membangun Negara maritime yang kuat diperlukan landasan budaya dan nilai bahari yang kuat pula. Pembangunan Negara maritime tanpa landasan budaya dan nilai bahari yang kuat, hanya akan melahirkan eksploitasi kekayaan laut yang tidak terkendali. Dalam hubungannya inilah Sejarah Maritim sangat diperlukan di dalam kurikulum pendidikan di sekolah, agar menjadi sosialisasi dan enkulturasi budaya dan nilai-nilai bahari kepada seluruh masyarakat Indonesia dalam membangun Negara dan bangsa dan terintegrasi di masa datang.

Pembelajaran sejarah sebagai pengalaman bersama anak bangsa, akan dapat memperkuat integrasi nasional. Hal ini mengingat, baik secara historis maupun geografis, Indonesia merupakan Negara maritime, maka unsure kelautan menjadi bagian yang inheren dengan sejarah Indonesia. Melalui laut itulah apa yang dinamakan bangsa Indonesia terbentuk setelah melalui proses *cross-cultural communication* dengan laut sebagai wadah utamanya. Oleh karena itulah materi pembelajaran sejarah dan Budaya Maritim diharapkan dapat memperkuat integrasi bangsa sebagai Negara maritime. Demikian juga, materi pelajaran sejarah yang diberikan harus menyentuh akar kepribadian bangsa Indonesia, agar dapat membangkitkan kesadaran sejarah (*historical consciousness*), khususnya di kalangan peserta didik.¹⁷

Ada beberapa alasan atau pertimbangan sehingga mata pelajaran Sejarah Maritim sebagai bagian dari upaya membangkitkan kesadaran sejarah peserta didik, yaitu: *Pertama*, bahwa secara geografis Indonesia merupakan kawasan kepulauan terbesar di dunia, yang luas wilayah lautnya lebih luas daripada daratannya.¹⁸ Kawasan yang amat luas itu, dihuni oleh berbagai kelompok suku bangsa yang selama berabad-abad telah menggunakan laut sebagai media untuk saling berkomunikasi. *Kedua*, ada kemauan yang amat kuat untuk membangun masa depan Indonesia sebagai Negara maritime, yang tidak hanya bisa dilakukan

¹⁷ Martin Ballard, *New Movement in the Study and Teaching of History* (Bloomington: Indiana University, 1971).

¹⁸ Tony H. Purwoko, *Indonesian Inter island Shipping: An Assessment of the Relationship of Government Policies and Quality of Shipping Services* (Ph.D Dissertation, University of Hawai'i at Manoa, 1989)

dengan cara mengeksploitasi kekayaan laut, sebab hal itu justru akan menjerumuskan bangsa Indonesia menuju proses pemiskinan akut. Untuk itu, membangun Negara maritime yang besar seperti Indonesia tanpa landasan budaya dan nilai bahari yang kuat, hanya akan melahirkan eksploitasi laut. *Ketiga*, secara substansi mata pelajaran Sejarah Maritim akan mampu menyediakan wacana yang luas mengenai komunikasi lintas budaya (*cross-cultural communication*) antara satu komunitas dengan komunitas yang lain, yang menjadi dasar proses integrasi bangsa di kalangan masyarakat di kepulauan seluruh Indonesia. Hal ini sangat dimungkinkan karena hubungan lewat jalur laut dalam pelayaran dan perdagangan, telah memprekondisikan terjadinya komunikasi lintas budaya.

Laut mengandung dinamika yang menciptakan kesatuan, hubungan antar manusia dan antar bangsa lewat transportasi laut, perdagangan dan pertemuan budaya.¹⁹ Dengan demikian kearifan akan bisa dipetik oleh peserta didik mengenai nilai-nilai kemaritiman atau kebaharian yang akan memperkuat proses komunikasi lintas budaya, yang sesungguhnya menjadi fondasi yang kokoh untuk integrasi bangsa Indonesia di masa yang akan datang sebagai Negara maritime.

4. Rancangan Materi Sejarah Maritim dalam Kurikulum Pendidikan.

4.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

Istilah maritime diadopsi dari istilah asing. Dalam Oxford English Dictionary, kata maritime berasal dari kata *myrtyayne*, *martayne*, dan *maritan*, juga *maritime-us* (bahasa Latin) mari= mare yang artinya laut.²⁰ Sedangkan dalam KBBI²¹, kata maritime adalah mengandung pengertian (1) segala sesuatu yang berkenaan dengan laut, (2) berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Jadi dapat disimpulkan bahwa sejarah maritime adalah studi tentang aktivitas manusia di masa lampau yang berkaitan dengan aspek-aspek kemaritiman, khususnya pelayaran dan perdagangan.

¹⁹ Lihat Singgih Tri Sulistiyono, *Model sosialisasi dan Enkulturasikan Nilai-Nilai Kebaharian Untuk Memperkuat Integrasi Indonesia Sebagai Negara Maritim Melalui Pengajaran Sejarah dan Budaya Maritim Nusantara di Sekolah Dasar* (Semarang: Fakultas Sastra Universitas Diponegoro, 2005).

²⁰ Poelinggomang, *Sejarah Maritim*, h. 1.

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), h. 115.

Adapun ruang lingkup sejarah maritime yang dirancang untuk materi ajar di sekolah ialah masih kita merujuk kepada sejumlah studi yang telah dilakukan oleh para sarjana, yang berhubungan dengan dunia kelautan, meliputi aspek perdagangan, pelayaran, perkapalan, pelabuhan atau Bandar, serta perompakan atau bajak laut.

Studi J.C. Van Leur (1934) memfokuskan kajiannya pada perdagangan awal di Asia Tenggara, termasuk Indonesia sampai datangnya VOC. Menurutnya, perdagangan di masa itu lebih bersifat perdagangan komoditi lux (mewah dan mahal). Volumennya kecil, tetapi bernilai tinggi. Kapal-kapal yang dipergunakan berukuran kecil, karena memang tidak membutuhkan tempat yang luas dan besar dalam pengangkutannya. Sementara menurut Meilink-Roelofs (1962), bahwa perdagangan masa itu bersifat besar-besaran, ditandai perdagangan rempah-rempah, seperti lada yang memerlukan kapal besar.

Sementara sejarah perkembangan dan pengaruh perdagangan masyarakat di pesisir Nusantara adalah merupakan focus kajian dari O.W. Wolters. Menurutnya, munculnya kerajaan-kerajaan periode awal di Asia Tenggara, merupakan akibat dari reaksi penduduk setempat yang diberikan kesempatan oleh pedagang asing ketika menjalin hubungan perdagangan maritime. Sedangkan bagi Kenneth R. Hall (1985),²² menghubungkan kemunculan Negara-negara baru di Asia Tenggara dengan perkembangan perdagangan.

Anthony Reid (1999),²³ dalam kajiannya, melihat kedudukan bandar niaga atau kota-kota pelabuhan di sepanjang pesisir sangat penting dalam perdagangan maritime di Asia Tenggara, terutama pada pelayaran tradisional yang memanfaatkan angin muson yang bertiup sepanjang tahun, dari bulan April-Agustus, angin bertiup ke Utara menuju daratan Asia. Sebaliknya, dari bulan Desember-Maret angin bertiup ke arah Selatan, yakni dari daratan Asia ke

²² Kenneth R. Hall, *Maritime Trade and State Development in Early Southeast Asia* (Honolulu: University of Hawaii Press, 1985).

²³ Anthony Reid, *Dari Ekspansi Hingga Krisis: Jaringan Perdagangan global Asia Tenggara 1450-1680*. Diterjemahkan oleh R.Z. Leirissa (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999); Asia Tenggara dalam *Kurun Niaga 1450-1680 Jilid 1: Tanah di Bawah Angin*. Diterjemahkan oleh Mochtar Pabotinggi (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992). Lihat juga, Susanto Zuhdi, *Laut, Sungai dan Perkembangan Peradaban: Dunia Maritim Asia Tenggara, Indonesia dan Metodologi Strukturalis*, dalam Konferensi Nasional Sejarah VIII, Jakarta, 14-16 November 2006.

Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan. Pergantian angin muson ini secara langsung mempengaruhi rute pelayaran, demikian juga pertumbuhan dan perkembangan pelabuhan di Asia Tenggara.

Yang sangat menarik juga untuk dikaji berhubungan dengan aktivitas pelayaran dan perdagangan di dalam sejarah maritime, ialah masalah perompakan. Kegiatan ini, menurut Fernand Braudel (1976) dan Lopian (2009)²⁴ terkait erat dengan keadaan kemakmuran di suatu perairan. Korelasi antara kegiatan bajak laut dengan perdagangan merupakan bentuk awal dari perdagangan maritime. Dalam hal itu keperluan akan barang komoditi dagang yang semula berupa tukar-menukar barang timbul karena kekurangan suatu barang tertentu di suatu tempat, sedangkan tempat lain mempunyai surplus.

4.2 Susunan Materi Ajar Sejarah Maritim Dalam Kurikulum Pendidikan

Berikut ini susunan Materi Ajar Sejarah Maritim yang dirancang untuk Kurikulum Pendidikan di Sekolah.

(1) Konsep dan Konteks Sejarah Maritim

2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Sejarah Maritim

2.2 Fakta Geografis dan Sejarah Maritim Dunia

2.3 Dinamika Pelayaran dan Perdagangan Dunia

(2) Zona Perdagangan Maritim Asia Abad ke-XIII-XIV

2.1 Dinamika Pelayaran dan Perdagangan Asia

2.2 Perdagangan Laut Awal

2.3 Sriwidjaya Sebagai Pemegang Hegemoni Perdagangan di Asia Tenggara

2.4 Jenis Perahu Layar

2.5 Ciri-Ciri Perdagangan

2.6 Komoditi Perdagangan

2.7 Zona Maritim Teluk Bengal, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Jawa dan Laut Sulu (hubungan antar dan interkoneksi).

2.8 Kemunduran dan Runtuhnya Sriwidjaya

(3) Hubungan Pelayaran Cina dan Jawa

²⁴ Adrian B. Lopian, *Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad 16 dan 17* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2009); *Orang Laut Bajak Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX*, Disertasi Universitas Gadjah Mada, 1987.

- 3.1 Majapahit Sebagai Pemegang Hegemoni Pelayaran dan Perdagangan
- 3.2 Teknologi Perkapalan
- 3.3 Hubungan Perdagangan Awal Cina, Jawa dan Maluku
- 3.4 Hubungan Perdagangan Swasta dan Negara
- 3.5 Merosotnya Hubungan Pelayaran dan Perdagangan Cina dan Jawa
- 3.6 Runtuhnya Majapahit dan Muncuknya Kerajaan Islam Pesisir
- (4) Zona Pelayaran dan Perdagangan di Asia Tenggara Abad ke XV-XVII.
 - 4.1 Asia Tenggara dalam Kurun Niaga, dan Tanah bawah Angin
 - 4.2 Angin Musim dan Perbintangan Sebagai Pedoman Pelayaran
 - 4.3 Kota-Kota pelabuhan Dagang di Nusantara (Malaka, Aceh, Tuban, Gresik, Cirebon, Surabaya, Sedayu, Semarang, Banten, Sunda Kelapa, Makassar, Banjar, Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo, dan Ende Flores)
 - 4.4 Organisasi Pelayaran dan Perdagangan
 - 4.5 Pola-Pola Perdagangan
 - 4.6 Elite Perdagangan (Saudagar Asing, Keturunan Orang Asing, Bangsawan Pribumi, dan Syhabandar)
- (5) Pelayaran dan Perdagangan ke Dunia Baru (Penjelajahan Samudera)
 - 5.1 Mengenal Dunia Baru
 - 5.2 Perintis Pelayaran Samudera
 - 5.3 Pelayaran Portugis dan Spanyol (Portugis di Malaka, Portugis dan Spanyol di Maluku)
 - 5.4 Pelayaran Inggris (Kebangkitan Negara Bangsa, Pembentukan Kongsi Dagang dan Pos Dagang)
 - 5.5 Raja Laut dan Bajak Laut (Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, Bajak Laut Tobelo)
- (6) Perdagangan Maritim dan Transformasi Budaya
 - 6.1 Pelaut dan Pedagang
 - 6.2 Jalur Pelayaran Nusantara
 - 6.3 Barang komoditi Perdagangan
 - 6.4 Angkutan Sungai dan Laut
 - 6.5 Undang-Undang Perdagangan dan Pelayaran Amanna Gappa

5. Bagaimana Model dan Strategi Pembelajarannya?

Pendekatan edukatif yang dapat dipakai di dalam upaya meningkatkan semangat dan motivasi dalam rangka membentuk karakter dan kesadaran sekjarah peserta didik untuk mencintai laut ialah melalui “*Program Arung Sejarah Bahari*”. Program ini dicetuskan sebagai pola atau pendekatan berbagai disiplin ilmu antara lain, sejarah, budaya, perikanan, kemaritiman, dan pertahanan keamanan. Upaya ini bertujuan untuk membentuk generasi muda Indonesia yang memiliki visi dan misi serta mencintai laut sebagai media enkulturasi, melalui Arung Sejarah Bahari. Kegiatan ini memiliki makna yang sangat penting bagi pembentukan *nation and character building* bagi peserta didik. Arung yang berarti menjelajah samudera luas, sedangkan sejarah di sini diberi makna sebagai kehidupan manusia di masa lampau, sedangkan bahari adalah laut beserta dinamika dan peradabannya yang berkembang. Dengan demikian, laut artinya tidak hanya dilihat sebagai kumpulan air yang sangat luas, tetapi lebih luas menyangkut segala aspek kehidupan yang ada di dalam wilayah laut. Jadi dapat dikatakan bahwa melalui model Arung Sejarah Bahari, peserta didik mengarungi lautan sejarah kehidupan manusia dalam lingkup dan tingkat peradaban yang telah dicapainya.

Secara singkat, dapat dikatakan bahwa tujuan model pembelajaran Arung Sejarah Bahari ialah; untuk menumbuhkembangkan jiwa dan semangat kebaharian khususnya di kalangan peserta didik. Mendorong terbentuknya forum silaturahmi antar generasi muda bangsa yang berjiwa maritime. Meningkatkan pemahaman peserta didik tentang peradaban maritime dan potensi laut Indonesia dalam meningkatkan sumber daya ekonomi bangsa. Menggali factor-faktor integrative dari peradaban Melayu sebagai cikal-bakal budaya nasional dan pemersatu bangsa. Mengadakan perjalanan ke berbagai tempat situs peradaban maritime di Indonesia.

Selain itu, model pembelajaran lainnya ialah dengan melalui Program “Lawatan Sejarah Nasional (Lasenas)” yang dikemas dalam sebuah program khusus. Model pembelajaran ini adalah termasuk bagian dari model pembelajaran berbasis behavioristik, kognitif, dan konstruktivistik. Model pembelajaran ini,

juga dapat dimasukkan ke dalam sebuah model yang disebut dengan “*edutainment*” yaitu sebuah model pembelajaran yang menggabungkan konsep “*learning by doing*” dan “*learning by experiencing*”. Program ini telah diakui membuka sumber daya baru, untuk mengangkat tingkat pencapaian hasil belajar peserta didik ke tingkat yang lebih tinggi.²⁵

Konsep *edutainment*, adalah program pendidikan dan pembelajaran yang dikemas dalam konsep hiburan yang sedemikian rupa, sehingga setiap peserta hampir tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya sedang diajak untuk belajar memahami nilai-nilai, sehingga kegiatan tersebut memiliki nuansa yang berbeda dibandingkan dengan pembelajaran biasa. Lawatan Sejarah yang dikemas dalam *edutainment* ini, sebenarnya hanyalah sebuah kendaraan atau media, yang terpenting adalah muatan belajarnya, baik itu internal maupun eksternal isunya.

Dari hasil testimony *Lawatan Sejarah Daerah (Laseda)* maupun *Lawatan Sejarah Nasional (Lasenas)* sejak tahun 2003, peserta merasakan memperoleh “sesuatu yang baru” yang berbeda dengan sebelumnya.²⁶ Mengapa ada sesuatu yang baru? Karena ada factor-faktor kunci sukses yang terkumpul dalam diri peserta, seperti *positive mental attitude*. Caranya dilakukan dengan menggali keinginan seseorang yang paling dalam dan menjadikannya sebagai *main need* atau *main good*. Sedangkan *outputnya* nanti diserahkan kepada individu masing-masing untuk berubah sebagai dampak pengiringnya.

Bagaimana guru mendesain model pembelajaran ini? Pada tahap persiapan, setiap rancangan kegiatan, guru harus bertanggung jawab penuh menentukan schedule, di mana mereka harus cermat memperhitungkan alokasi waktu menit pemanit. Harus dirancang, agar tidak ada jeda yang menyebabkan acara menjadi jenuh. Hal ini dapat dikembangkan teknik-teknik *entertainment*, seperti *sounds*, diantaranya *music*, *illustration*, *video presentation*, *inspirational message*, *games* dan sejenisnya. Suatu variasi yang direkomendasikan oleh pembelajaran konstruktivisme dengan *quantum learningnya*.²⁷

²⁵ Lihat, Jamie McKenzie, *Beyond Edutainment and Technotainment*, in <http://fno.org/sep00/eliterate.html>

²⁶ Lihat Kompas, *Lawatan Sejarah Nasional*, 6 September 2003.

²⁷ Lihat Marsha Weil and Bruce Joice, *Model of Teaching* (Boston: Allyn and Bacon, 2000)

Penting juga diperhatikan, tiap-tiap pembicara yang terlibat dalam kegiatan ini saling berkoordinasi satu sama lainnya. Saling mengisi dan saling menguatkan pesan (*message*), muatan (*quote*), serta materi (*material*) yang akan disampaikan sebagai suatu *continual synergy* yang memiliki benang merah, yang akan memudahkan peserta didik untuk memahami pembelajaran yang disampaikan secara sederhana.

Lawatan Sejarah dan Arung Sejarah dapat dilaksanakan di mana saja, tergantung situs sejarahnya. Lamanya kegiatan, penggunaan equipments, serta penentuan aplikasi materi outbund sangat menentukan hasil akhir pembelajaran, yang dapat berupa soft, middle, atau high impact. Artinya, semakin tinggi impact yang dihasilkan, semakin tinggi pula motivasi orang tersebut setelah selesai mengikuti Lawatan Sejarah. Bahkan secara positif mempengaruhi dan memotivasi teman yang lainnya.

Model pembelajaran lainnya, yang juga dapat dijadikan diterapkan adalah melalui Kemah Kerja Sejarah (Kemeja). Kemeja ini dimaksudkan sebagai suatu kegiatan di alam terbuka untuk beberapa waktu yang dilakukan oleh guru, pembimbing dan peserta didik, dan berdiam dalam kemah atau suatu rekreasi yang dilaksanakan di alam terbuka dengan berbagai metode yang menyenangkan. Pembelajaran model ini bersifat interaktif antara guru dengan peserta didik dan sebaliknya. Model ini diperuntukkan menjawab paradigma bahwa sejarah adalah bukan mata pelajaran hapalan. Karena dalam model ini, guru dan peserta didik akan mendialogkan materi pelajaran yang dipelajari di kelas dengan kenyataan yang sebenarnya di tengah-tengah masyarakat. Bahkan masyarakat dapat dilibatkan sebagai nara sumber belajar.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan Kemeja ini ialah: kegiatan harus bersifat informal, tidak diikat oleh disiplin yang kaku dan otoriter; menanamkan unsure kerelaan pada peserta didik, sejak awal sudah ditanamkan unsure ketulusan dalam keikutsertaannya; mengembangkan suasana rekreasi sambil belajar; mengandung illustrative dalam arti memantapkan pengetahuan yang diperoleh di kelas dengan kenyataan dari obyek yang di amati; menekankan penghayatan sejarah agar mendapatkan refleksi, inspirasi, dan edukasi.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Perubahan orientasi pembangunan nasional Indonesia dari daratan ke maritime atau kelautan, adalah penting dan mendesak. Laut Indonesia harus dikelola secara professional, untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dan bangsa. Beberapa fungsi laut Indonesia yang seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan berbasis kemaritiman adalah: laut sebagai media pemersatu bangsa; media komunikasi dan transportasi; media sumberdaya alam; media pertahanan dan keamanan sebagai Negara laut; dan media untuk membangun pengaruh kepada dunia internasional sebagai poros maritime dunia. Untuk itu kesadaran terhadap generasi muda akan kejayaan masa lampau dari negerinya yang pernah merajai laut, maka penting untuk mempelajari sejarah maritime. Oleh karena itu, sejarah maritime harus menjadi bagian integral dari system pendidikan nasional di sekolah. Mata Pelajaran Sejarah harus masuk di dalam kurikulum pendidikan.

B. Rekomendasi

1. Diusulkan agar Mata Pelajaran Sejarah dimasukkan dalam kurikulum pendidikan nasional, mulai tingkat Paud, SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK sampai Perguruan Tinggi. Diharapkan kepada Kemdikbud dan Kemristekdikti berperan utama dalam mempersiapkan rancangan kurikulum berbasis kemaritiman, khususnya mata pelajaran sejarah maritime.
2. Kemdikbud dan Kemristekdikti segera mungkin merealisasikan visi Indonesia sebagai poros maritime dunia melalui implementasi kurikulum maritime, khususnya mata pelajaran sejarah maritime di dalam system pendidikan nasional.
3. Diusulkan, untuk mendapatkan calon pemimpin bangsa ke depan yang memiliki kompetensi dan integritas kemaritiman dan kebaharian yang komprehensif, supaya Kemdikbud mendirikan SMA Taruna Nusantara Bahari di setiap kota-kota pelabuhan di Indonesia.

REFERENCE

- Ahamading, *Pelautkah Orang Selayar: Tanah Doang Dalam Catatan Sejarah Maritim*, Yogyakarta: Ombak, 2006.
- Ananta Toer, Pramoedya, *Arus Balik: Sebuah Epos Pasca Kejayaan Nusantara di Awal Abad ke-16*, Jakarta: Hasta Mitra, 2002.
- Ballard, Martin, *New Movement in the Study and Teaching of History*, Bloomington: Indiana University Press, 1971.
- Braudel, Fernand, *The Meditteranian and the Meditteranian World in Age of Philip II* (terj. S.Reynold), Vol. 1, New York: Haper Colophon Book, 1976.
- Dahana, A, "Tujuh Pelayaran Cheng Ho Sebagai Diplomasi Kebudayaan, 1405-1433" dalam Leo Suryadinata (ed.). *Laksamana Cheng Ho dan Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES, 2007.
- Dahuri, Rochmin, Potensi Kelautan Indonesia (online), <http://ugm.ac.id/id/berita/9256>, akses 20 Juni 2016.
- Didik Heru Purnomo, Yosaphat, *Perlu Revolusi Laut Untuk Wujudkan Budaya Maritim*, Suara Pembaruan: Berita Saku.com, 25 Agustus 2014. Akses 15 Juli 2016.
- Djulianto Suryo, M, et.al, *Sejarah Maritim Indonesia I: Menelusuri Jawa Bahari Bangsa Indonesia Hingga Abad ke-17 Masehi*, Semarang: JEDA, 2007.
- Gultom, Elfrida, *Refungsionalisasi Pengaturan Pelabuhan Untuk Meningkatkan Ekonomi Nasional*, Jakarta: P.T. Radja Grafindo Persada, 2007.
- H.Poerwoko, Tony, *Indonesia Inter Island Shipping: An Assessment of the Relationship of Government Policies and Quality of shipping Services* (Ph.D Dissertation university of Hawai'I at Manoa, 1989).
- Hamengkubuwono X, Sri Sultan, *Budaya Maritim Indonesia, Peluang, Tantangan dan Strategi: Sarasehan Road Map Pembangunan Kelautan dan Kemaritim, serta Pencanaan Bulan Maritim*, UGM, Yogyakarta, 28 Agustus 2014.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Jakarta: Balai Pustaka, 2011.
- Kardono, Priyadi, (ed.), *Paradigma Geo Maritim: Strategi Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia Dalam Perspektif Geografi*, Jakarta: Badan Informasi Geospasial, 2015.

Kompas, Lawatan Sejarah Nasional, 6 September 2003.

Lapian, Adrian B, *Pelayaran Perniagaan Nusantara Abad ke-16 dan 17*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2009.

-----, *Orang Laut Bajak Laut Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi*, Disertasi Doktor Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1987.

-----, Teori Mahan (dalam J.C.van Leur dan F.R.J. Verhoeven), *Sejarah Kepulauan Indonesia*, Jakarta: Bhatara, 1974.

McKenzie, Jamie, *Beyond Edutainment and Technotainment* in <http://fno.org/sepoo/eliterate.html>.

Poelinggomang, E.L, *Sejarah Maritim Dunia*, Makassar: Lembaga Kajian dan Pengembangan Pendidikan (LKPP), 2002.

-----, *Makassar Abad ke-19: Studi Tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2002.

R. Hall, Kenneth, *Maritime Trade and State Development in Early Southeast Asian*, Honolulu: University of Hawai'i Press, 1985.

Rahman, Ainur, Indonesia Butuh Kurikulum Kelautan, dalam <http://news.detik.com/banyuwangi> dipilih menjadi pusat pendidikan maritime nasional, akses, 5 Juni 2016.

Reid, Anthony, *Dari Ekspansi Hingga Krisis; Jaringan Perdagangan Global Asia Tenggara 1450-1680* (terj.) R.Z. Leirissa, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.

-----, *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680, Jilid I: Tanah di Bawah Angin* (terj.) Mochtar Pabottinggi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sampono, Nono, *Implementasi Kurikulum Kebaharian Dalam Sistem Pendidikan Nasional*, Paper presented di Sekolah Yayasan Hangtuh, Rabu 19 Agustus 2015.

Sianipar, P, *Jembatan Selat Sunda dan Kepentingan Nasional*, Paper presented untuk Seminar Nasional Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, Jakarta, 2012.

Tri Sulistiyono, Singgih, *Model Sosialisasi dan Enkulturasasi Nilai-Nilai Kebaharian Untuk Memperkuat Integrasi Indonesia Sebagai Negara Maritim Melalui Pengajaran Sejarah dan Budaya Maritim*

Nusantara di Sekolah Dasar, Semarang: Fakultas Sastra Universitas Diponegoro, 2005.

-----, *Pengantar Sejarah Maritim Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas, 2004.

Touwen, L.J., *Shipping and Trade in the Java Sea Region 1870-1940: A Collection of Statistics of the Major Java Sea Parts*, Leiden: KITLV Press, 2001.

Widodo, Joko, *Pidato Pada Musyawarah Nasional XII Keluarga Alumni Gadjah Mada (Kagama)*, 6 November 2014, Kendari.

Weill, Marsha and Bruce Joice, *Model of Teaching*, Boston; Allyn and Bacon, 2000.

Zuhdi, Susanto, *Laut, Sungai dan Perkembangan Peradaban: Dunia Asia Tenggara, Indonesia dan Metodologi Strukturis*, Paper Presented in Konferensi Nasional Sejarah VIII, Jakarta, 14-16 November 2006.



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Konferensi Nasional Sejarah X

Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta
7-10 November 2016

Model Lacak Jejak Berbasis Narasi
Imajinatif: Upaya Membangun *Higher
Order Thinking Skill* dalam Pembelajaran
Sejarah

Idrus A. Rore, S.Pd., S.H., M.Pd



**MODEL LACAK JEJAK BERBASIS NARASI IMAJINATIF:
UPAYA MEMBANGUN *HIGHER ORDER THINKING SKILLS*
DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH**

**IDRUS. A. RORE, S.Pd., S.H., M.Pd
(Widyaiswara LPMP Sulawesi Tengah – Palu)**

Pada saat KBK (2004 – 2006) dan KTSP (2006 – 2013) diterapkan, posisi mata pelajaran sejarah sangat lemah. Terjadi pengurangan jam bahkan pada semester tertentu menghilangkan mata pelajaran sejarah pada kelas IPA. Implementasi Kurikulum 2013 menempatkan sejarah sebagai mata pelajaran yang kuat. Dalam struktur Kurikulum 2013 dikenal istilah Mata Pelajaran Sejarah dan Mata Pelajaran Sejarah Indonesia. Mata Pelajaran Sejarah diberikan kepada siswa yang memilih peminatan Ilmu-ilmu sosial (IIS) atau siswa pada peminatan Matematika dan Ilmu Alam (MIA) dan Peminatan Bahasa yang mengambil mata pelajaran lintas minat mata pelajaran sejarah. Sementara itu, Mata Pelajaran Sejarah Indonesia diberikan kepada semua siswa mulai dari kelas X – XII tanpa memandang peminatan yang dipilih.

Bagi siswa yang memilih peminatan IIS, setiap pekan memperoleh materi sejarah minimal 5 JP (3 JP mata pelajaran sejarah dan 2 JP mata pelajaran sejarah Indonesia). Di sisi lain, realitas pembelajaran sejarah selama ini masih terbelenggu situasi, “membosankan, tidak menarik, kurang diminati, dan yang paling fatal dianggap pelajaran hafalan tidak membutuhkan pemikiran dan analisis mendalam.” Karena itu, menuntut guru sejarah kreatif dan dinamis mengelola pembelajaran dengan cara menerapkan berbagai model pembelajaran. Dalam konteks Kurikulum 2013, semua guru menggunakan “pendekatan saintifik dan salah satu di antara tiga model pembelajaran yang direkomendasikan Kemdikbud (Permendikbud 103/2014), yakni *problem based learning* (PBL), *project based learning* (PJBL), dan *discovery/inquiry*.”

Pendekatan dan tiga model tersebut digunakan mulai dari kelas 1 SD sampai kelas XII SMA. Jadi, kelak selama 12 tahun siswa mendapat materi pelajaran dengan pendekatan dan model pembelajaran yang sama dan dilakukan semua guru, maka dapat ditebak akan muncul kejenuhan karena betapapun baiknya sebuah pendekatan dan model pembelajaran, tetap membosankan jika dilakukan monoton. Karena itu, perlu dikembangkan model pembelajaran lain untuk memperkuat Kurikulum 2013 sekaligus menjadikan sejarah sebagai mata pelajaran berorientasi pada *Higher Order Thinking Skill* (HOTS) karena kelemahan pembelajaran sejarah selama ini belum mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi.

Salah satu model pembelajaran dimaksud adalah model Lacak Jejak Berbasis Narasi Imajinatif (LJBNI). Model LJBNI yang telah diujicobakan dalam bentuk *action research* memiliki karakteristik; 1) relevan dengan pendekatan saintifik; 2) berciri kooperatif; 3) berciri konstruktivistik; dan 4) yang paling fundamental berorientasi menumbuhkan HOTS. Membangun HOTS sangat

penting karena nilai-nilai sejarah hanya dapat diaktualisasikan melalui pembelajaran berpikir tingkat tinggi. Pada tataran taksonomi, pembelajaran sejarah tidak boleh hanya sampai pada C1, C2, dan C3. Model LJBNI, memfasilitasi pembelajaran sejarah sampai pada level kognitif C4, C5, dan C6 yang merupakan manifestasi HOTS.

Model LJBNI tidak hanya berorientasi kognitif melainkan juga menekankan penguatan afektif yakni nilai karakter bangsa, seperti; menghargai, kerjasama, rasa ingin tahu, komunikatif, toleransi, dan kreatif. Selain itu, model LJBNI juga memberikan peluang bagi guru sejarah untuk mengembangkan dan menerapkannya pada materi sejarah yang bernuansa memperkuat visi kelautan, misalnya materi yang berkaitan dengan kerajaan-kerajaan maritim di Nusantara, proses islamisasi di nusantara, bahkan materi tentang masuk dan berkembangnya kolonialisme dan imperialisme di Nusantara juga dapat menggunakan model LJBNI karena semua materi tersebut memiliki kaitan yang kuat dengan aspek kelautan.

Key word: Model lacak jejak berbasis narasi imajinatif, higher order thinking skills, dan pembelajaran sejarah

**MODEL LACAK JEJAK BERBASIS NARASI IMAJINATIF:
UPAYA MEMBANGUN *HIGHER ORDER THINKING SKILLS*
DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH**

**IDRUS. A. RORE, S.Pd., S.H.,M.Pd
(Widyaiswara LPMP Sulawesi Tengah – Palu)**

PENDAHULUAN

Pada tahun 2004 diimplementasikan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang mereduksi Kurikulum 1994. Pada tahun 2006 KBK disempurnakan menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan pada tahun 2013 diintrodusir Kurikulum 2013 sebagai penyempurnaan KTSP yang kemudian diberlakukan secara bertahap hingga kini. Tercatat, satu dasawarsa terakhir, sudah tiga kali dilakukan penyempurnaan kurikulum. Kurikulum memang harus senantiasa dievaluasi dan diperbaharui agar tetap sesuai dinamika dan konteks zaman. Karena wajah masa depan bangsa, antara lain ditentukan kurikulum yang diberikan kepada siswa dewasa ini. Muatan kurikulum yang baik, idealnya selalu merefleksikan jiwa zaman karena setiap zaman memiliki karakter dan ciri khas tersendiri sehingga kurikulum juga harus disesuaikan. Kurikulum yang tidak sesuai dengan konteks zaman, tidak akan mencerahkan dan menjawab kebutuhan generasi masa kini dan masa depan.

Pada tataran praktis (sekolah), kurikulum lebih dimaknai sebagai mata pelajaran. Karena itu, eksistensi mata pelajaran ditentukan oleh kurikulum yang sedang berlaku. Sejak Indonesia merdeka, untuk pertama kali dalam sejarah kurikulum, mata pelajaran sejarah mendapat perlakuan istimewa. Pada saat KBK dan KTSP diberlakukan, posisi mata pelajaran sejarah sangat lemah. Alokasi waktu yang sebelumnya 2 X 45 menit perpekan perkelas dipangkas menjadi 1 X 45 menit. Bahkan pada Jurusan IPA, mata pelajaran sejarah ditiadakan sama sekali. Untuk Jurusan IPS tetap mendapat jatah 2 X 45 menit. Sungguh ironis, Pada satu sisi diakui urgensi karakter dan jati diri bangsa dalam pembangunan nasional, akan tetapi pada sisi yang lain justru mata pelajaran sejarah sebagai

instrumen yang diyakini dapat memperkuat karakter dan jati diri bangsa, dinafikan seolah-olah sejarah tidak bermakna. Memang, dalam konteks pembelajaran sejarah, salah satu gugatan tidak beralasan yang sering dikedepankan adalah untuk apa belajar sejarah.? Pranoto (2010: 6) mensinyalir “sering orang khilaf bahwa sejarah tidak mempunyai nilai.”

Bukan hanya siswa yang terjangkit pemahaman keliru melainkan juga masyarakat pada umumnya bahkan di kalangan guru seringkali terkontaminasi persepsi negatif bahwa mata pelajaran sejarah tidak kontributif dalam kehidupan. Ketika rapat dewan guru untuk penentuan dan pembagian jam mengajar, maka mata pelajaran sejarah lebih dominan ditempatkan pada jam terakhir (jam 12.00 ke atas - siang). Sementara itu, mata pelajaran lain, seperti matematika, fisika, kimia, dan bahasa Inggris dijadwalkan pada pagi hari (07.00 – 12.00). Argumentasi yang sering dibangun adalah mata pelajaran tersebut membutuhkan pemikiran dan konsentrasi yang tinggi sehingga perlu dijadwalkan pagi hari karena pada pagi hari, pemikiran dan konsentrasi siswa masih segar.

Pengalaman empirik memberikan kesan bahwa *stakeholder* di berbagai satuan pendidikan telah “sepakat” mewariskan kepada guru sejarah untuk melaksanakan pembelajaran pada siang hari. Parahnya lagi, siapapun boleh mengajar mata pelajaran sejarah. Maka tidak mengejutkan, ketika di sebuah sekolah tidak ada guru sejarah yang berlatar belakang disiplin pendidikan sejarah, maka mata pelajaran sejarah “dikeroyok” guru dari berbagai disiplin ilmu lain. Akan tetapi, ketika guru mata pelajaran matematika dan fisika atau mata pelajaran eksat lain tidak tersedia di sekolah tersebut, maka sungguh sangat mengejutkan jika guru sejarah diberikan kepercayaan mengampu mata pelajaran dimaksud dan sejauh ini kejutan itu belum terjadi.

Argumentasi lain yang sering dikemukakan untuk menggampangkan pembelajaran sejarah terutama di era pra sertifikasi guru adalah mata pelajaran eksat dan bahasa Inggris sangat dibutuhkan dan berguna dalam kehidupan sehari-hari. “Pembenaran” ini, tampaknya relevan dengan kecenderungan berpikir pragmatis yang sedang menerpa dunia pendidikan bahwa yang disebut nilai guna harus bersifat langsung dan berwujud material. Padahal, karakteristik sejarah

sebagai mata pelajaran berbasis fakta masa lampau yang berpijak pada masa kini dan berorientasi masa depan, justru nilai pragmatismenya bersifat *indirect* dan *immaterial*, antara lain; membentuk kepribadian dan memperkuat karakter bangsa atau seperti dikemukakan (Ali 2005: 349) “membentuk jiwa manusia.” Sementara itu, Rochmat (2009: 14) menegaskan bahwa “sejarah itu harus fungsional untuk mempertajam wawasan kemanusiaan seseorang dalam berurusan dengan jaman yang tidak pernah berhenti bergerak.”

Pada tataran implementasi di kelas, Ahmad (2007: 59) menyatakan guru sejarah harus menjalankan peranan dalam menerapkan “nilai kewarganegaraan serta unsur patriotisme.” Mata pelajaran sejarah sebagai agen pembentuk jiwa manusia, pencerah wawasan kemanusiaan, dan membangun nilai kewarganegaraan berjiwa patriotis adalah anasir-anasir penting yang tidak mungkin diabaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, Kartodirdjo (1992: 248) tegas menyatakan “dalam rangka pembangunan bangsa, pengajaran sejarah tidak semata-mata berfungsi memberi pengetahuan sejarah sebagai kumpulan informasi fakta sejarah, tetapi juga bertujuan menyadarkan anak didik atau membangkitkan kesadaran kesejarahannya.” Justru orientasi pada pembentukan kesadaran sejarah inilah yang seharusnya menjadi fokus pembelajaran sejarah.

Mewujudkan kesadaran sejarah siswa, mensyaratkan mata pelajaran sejarah tidak boleh hanya dipahami sebagai sarana *transfer of knowledge* melainkan sekaligus media penyadaran jiwa. Mata pelajaran sejarah mesti berfungsi membentuk kesadaran sejarah. Karena dengan kesadaran sejarah, maka karakter siswa semakin menguat. Yulifar (2008: 206) menegaskan pendidikan “sejarah merupakan suatu proses enkulturasi dalam rangka *nation and character building* melalui proses pelebagaan nilai-nilai yang positif seperti: nilai-nilai warisan luhur, heroisme dan nasionalisme, nilai-nilai masyarakat industri, serta nilai-nilai ideologi bangsa.” Sementara itu, Zuhdi (2008: 290) lebih lanjut menyatakan bahwa fungsi sejarah sebagai materi yang substantif untuk “*nation and character building*.” Paling tidak melalui mata pelajaran sejarah, siswa terbebas dari buta masa silam. Mata pelajaran sejarah sesungguhnya mampu

menjadikan siswa mengenal diri, leluhur, riwayat perjuangan bangsa sehingga membentuk sikap cinta tanah air sebagai suatu nilai yang sangat vital untuk memperkokoh eksistensi bangsa dan negara.

Nilai fundamental ini, semakin berpotensi dicapai seiring perlakuan negatif terhadap mata pelajaran sejarah dalam struktur KBK dan KTSP mulai tereduksi dan tidak berlanjut pada Kurikulum 2013 yang telah memposisikan sejarah sebagai mata pelajaran yang sangat strategis dalam konstalasi Kurikulum Nasional. Semua siswa wajib mengikuti mata pelajaran Sejarah Indonesia (2 JP atau 2 X 45 menit) tanpa memandang peminatan yang dipilih. Sementara itu, jika siswa memilih peminatan Ilmu-Ilmu Sosial (IIS) maka diberikan mata pelajaran sejarah (3 JP) atau siswa pada peminatan Matematika/Ilmu Alam (MIA) dan Peminatan Bahasa yang memilih lintas minat mata pelajaran sejarah juga mendapat 3 JP. Dalam struktur kurikulum 2013, sejarah dibagi menjadi mata pelajaran sejarah Indonesia dan mata pelajaran sejarah sehingga siswa berpotensi mendapat materi pelajaran berbasis sejarah sebanyak 5 JP perpekan (peminatan Ilmu-ilmu Sosial). Akan tetapi, dibalik harapan dan keistimewaan ini, problem besar juga menghantui guru sejarah karena selama ini dengan alokasi waktu hanya 2 JP, ternyata mata pelajaran sejarah telah gagal menarik minat dan perhatian siswa.

Pembelajaran sejarah sampai saat ini masih kurang menggembirakan. Mata pelajaran sejarah tampaknya sedang sakit, koma, kurang vitamin dan lemas. Kondisi ini bukan kasuistik spasial dan temporal tertentu melainkan bersifat universal. Mata pelajaran sejarah belum dapat perhatian serius sehingga dianggap pelajaran yang membosankan. Widja (1991:1) menyatakan bahwa “praktek-praktek pengajaran sejarah di sekolah, sering memunculkan kesan tidak menarik bahkan cenderung membosankan.” Ismaun (2001:99), mengungkapkan “keluhan para siswa yang kadang-kadang kita dengar pada umumnya adalah mereka merasa jenuh atau bosan dalam menerima pelajaran dan mempelajari materi pelajaran sejarah.” Substansi yang sama dikemukakan Anhar Gonggong (Suara Merdeka, 23 Juni 2005) bahwa “sejarah dipandang sebagian orang sebagai dongeng masa lampau, lalu dianggap mata pelajaran yang membuang-buang waktu.”

Lalu, bagaimana jika siswa mendapat suguhan mata pelajaran sejarah sebanyak 5 JP,? Dapat diprediksi pembelajaran sejarah akan semakin terjebak dan terbelunggu dalam kebosanan, pikiran dan jiwa siswa semakin tersekat. Jika kondisi ini dibiarkan terus, maka pembelajaran sejarah akan semakin tidak menarik di kalangan siswa. Memang, guru sejarah dituntut menerapkan pendekatan saintifik yang potensial membuat pembelajaran lebih menarik karena berorientasi *active learning*, akan tetapi pendekatan ini bukan milik khas guru sejarah. Semua guru dari SD/MI, SMP/MTs, sampai SMA/MA/SMK dituntut mampu memahami dan melaksanakan pendekatan saintifik sehingga tetap berpeluang menjadikan pembelajaran sejarah berada dalam ritme monoton. Terlebih lagi jika guru sejarah hanya menguasai tiga model pembelajaran yang mendukung pendekatan saintifik, yakni *problem based learning*, *discovery/inquiry*, *project based learning* sebagaimana direkomendasikan Kemdikbud. Karena itu, guru sejarah perlu lebih kreatif mengelola pembelajaran sejarah. Demikian pula, para akademisi dan ahli pendidikan sejarah juga hendaknya lebih kontributif memberikan perhatian intensif dalam mendesain metode, media, strategi, dan model pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan daya tarik mata pelajaran sejarah.

MENEMUKAN TITIK LEMAH

Menjadi guru sejarah yang baik harus mengetahui dan menguasai dua hal, yakni: 1) Tahu apa yang diajarkan dan 2) Tahu cara membelajarkan. Tahu apa yang diajarkan berorientasi pada penguasaan substansi keilmuan (mata pelajaran sejarah) atau berkaitan dengan kompetensi profesional guru sejarah sedangkan tahu cara membelajarkan atau mengajarkan sejarah berarti berada pada domain kompetensi pedagogik dengan segala implikasinya. Jika kedua "tahu" ini dikuasai guru sejarah, maka dapat membuat pembelajaran lebih efektif sehingga siswa tertarik dan berminat mempelajari sejarah. Hal ini sejalan dengan pandangan Ismaun (2005: 163) yang menyatakan "apabila kita beranggapan bahwa pendidikan sejarah memang masih diperlukan dalam kehidupan yang serba berubah pada masa depan maka yang harus kita jawab adalah: Sejarah apa yang

perlu diajarkan dan bagaimana proses pembelajarannya.” Dua hal inilah yang perlu dikuasai dengan baik oleh guru sejarah, yakni “tahu apa dan tahu cara membelajarkan sejarah.”

Tanpa berpretensi mengabaikan “tahu apa,” yang juga diakui masih bermasalah hingga kini, maka yang paling krusial dibenahi adalah “tahu cara” membelajarkan sejarah karena secara konkrit memang menunjukkan pembelajaran sejarah belum beranjak secara signifikan dari metode ekspositori yang memposisikan siswa sebagai objek yang terbatas pada kegiatan mendengarkan dan mencatat. Karena itu, Hapsari (2006:1) menyatakan ”yang membuat siswa tidak suka belajar sejarah, antara lain proses pembelajaran yang tidak menarik atau membosankan.” Kumalasari (2005:12-13) mengemukakan penyebab munculnya masalah dalam pembelajaran sejarah, antara lain “metode membelajarkan sejarah pada umumnya kurang menantang daya intelektual peserta didik.” Permasalahan pembelajaran sejarah sebagaimana dikemukakan di atas dapat diakumulasi dalam satu pemahaman yakni proses pembelajaran sejarah belum efektif.

Terkait proses, ada tiga kelemahan mendasar yang sering ditemukan dalam pembelajaran sejarah, yakni; *pertama*, penerapan model, strategi, dan metode pembelajaran bersifat monoton. Rumus yang paling sering digunakan adalah *one for all*. Satu metode untuk membelajarkan semua materi. Suhartini (2001:6) menjelaskan ”guru cenderung menggunakan satu metode dalam membelajarkan keseluruhan materi, tanpa mempertimbangkan karakteristik dari setiap topik materi yang disampaikan.” Metode yang paling sering menjadi tumpuan harapan guru sejarah adalah metode ceramah. Begitu akrabnya guru sejarah dengan metode ceramah, maka kesan yang muncul adalah mata pelajaran sejarah identik dengan ceramah dan bukan sejarah kalau tidak berceramah. Pembelajaran sejarah belum berhasil melakukan transformasi dari ekspositori ke model-model pembelajaran lain yang lebih menekankan pada aspek konstruktivistik dan kooperatif yang sekarang menjadi kecenderungan dalam pembelajaran. Terkait dengan trend aplikasi *cooperative learning* dalam pembelajaran, Hasan (2000:26) menganjurkan, “*cooperatvie learning* yang

berkembang akhir-akhir ini dapat digunakan sebagai jawaban atau solusi untuk mengatasi kurangnya minat belajar siswa pada mata pelajaran sejarah.”

Kelemahan *kedua* dalam proses pembelajaran sejarah adalah terlalu fokus pada domain kognitif. Suhartini (2001:6) mensinyalir kekeliruan metode pembelajaran sejarah yang dikembangkan oleh guru disebabkan antara lain ”padatnya materi pelajaran sehingga memungkinkan untuk mengambil jalan pintas, berarti mengabaikan aspek afektif dan psikomotorik.” Kelemahan ini memang bukan semata-mata disebabkan guru sejarah karena orientasi pembelajaran sebelum Kurikulum 2013 terlalu kognitif sentris. Kelemahan ini sebagian disebabkan sistem kurikulum sehingga semua guru relatif terjebak pada domain kognitif. Sejalan dengan pemberlakuan Kurikulum 2013 yang antara lain menekankan pada penilaian autentik tiga ranah (kognitif, afektif, dan psikomotor), maka ke depan kelemahan tersebut diharapkan dapat teratasi dengan baik. Akan tetapi, yang perlu disikapi lebih serius adalah justru kelemahan *ketiga* dalam pembelajaran sejarah yang berpangkal pada kelemahan kedua, yakni dimensi kognitif yang disentuh terlalu dangkal. Deliman (2005:114) menyatakan ”materi pelajaran di kelas tidak lebih dari kisah tentang rekonstruksi peristiwa dan aktivitas manusia di masa lampau yang bagi siswa sifatnya abstrak, *nonempirical*, dan *nonobservable*.” Akibatnya pembelajaran sejarah terbatas pada pengembangan ingatan, yang dalam hirarki kognisi Bloom maupun Anderson dan Krathwohl menempati urutan paling rendah. Dengan demikian, secara substansi kelemahan proses pembelajaran sejarah selama ini terlalu monoton dan belum mengedepankan kemampuan berpikir tingkat tinggi.

BERTANYA MENUJU HOTS

Pembelajaran sejarah perlu didesain dalam kerangka menuntun siswa menggunakan pikiran secara maksimal. Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi atau *Higher Order Thinking Skills* (HOTS) merupakan solusi untuk meningkatkan minat belajar sejarah karena minat belajar siswa hanya dapat ditumbuhkan jika materi yang disajikan menantang pemikiran. Erat kaitannya dengan HOTS, realitas menunjukkan bahwa guru- guru sejarah kurang memberikan perhatian

yang serius terhadap kemahiran berfikir yang kreatif dan kritis dalam pembelajaran sejarah. Berpikir kreatif dan kritis sama dengan HOTS. Jika selama ini HOTS belum mendapat perhatian guru, maka sulit mengharapkan pembelajaran sejarah mendapat respon positif. Karena “berpikir tingkat tinggi dapat mendorong peserta didik untuk berpikir secara luas dan mendalam tentang materi pelajaran.” (Kemdikbud, 2016: 4). Kerja otak sebagai instrumen belajar lebih reaktif dan kreatif jika diperhadapkan pada pembelajaran yang berisi HOTS.

Ada dua realitas yang menjadi indikator pembelajaran sejarah belum berorientasi HOTS, yakni 1) instrumen evaluasi yang digunakan guru sejarah khususnya tes hasil belajar; dan 2) pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guru pada saat proses pembelajaran. Indikator pertama jelas terlihat dari soal-soal yang diberikan kepada siswa yang berada pada cakupan *Low Order Thinking Skills* (LOTS) yang berkisar pada pengungkapan ingatan. Pemantauan Supervisi dan Pembinaan Pasca Evaluasi Hasil Belajar (EHB) SMA yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMA, sebagian besar guru SMA sasaran (termasuk guru sejarah) dalam menyusun butir soal cenderung hanya mengukur kemampuan LOTS dan soal-soal yang dibuat tidak kontekstual. Soal-soal yang disusun oleh guru umumnya mengukur keterampilan *recall*. Selain itu, jika dilihat dari konteksnya sebagian besar menggunakan konteks di dalam kelas dan sangat teoretis, serta jarang menggunakan konteks di luar kelas (kontekstual). Sehingga tidak memperlihatkan keterkaitan antara pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari (Kemdikbud, 2016: 4). Secara praktis, hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran sejarah belum mengakomodir HOTS dengan indikator berada pada tingkat “analisis, sintesis, dan evaluasi” (Bloom, 1979: 18) atau dalam perspektif revisi yang dilakukan Anderson dan Krathwohl (2001: 34) berada pada ranah kognitif “analisis, evaluasi, dan mencipta.”

Realitas paling nyata pembelajaran sejarah terindikasi LOTS adalah jika dilakukan pengamatan pada saat guru melaksanakan pembelajaran ternyata pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guru sejarah selama proses pembelajaran, berada ada domain ingatan atau paling tinggi pada tataran MOTS yakni

pemahaman dan penerapan (C2 dan C3). Akibatnya pembelajaran menjadi kurang bermakna. Fakta ini sejalan dengan hasil temuan Usaid dan Depdikbud (2013: 125) yang menyatakan, “jika tujuan mengajar itu antara lain untuk mengembangkan siswa berpikir, maka kemampuan utama guru adalah mengajukan pertanyaan. Namun seringkali pertanyaan yang diajukan hanya membutuhkan jawaban YA atau TIDAK pertanyaan yang membutuhkan hanya satu jawaban, atau pertanyaan yang mendorong siswa untuk mengulang gagasan yang telah dikemukakan guru; bukan pertanyaan yang merangsang siswa untuk mengemukakan gagasannya sendiri.” Bahkan yang lebih merisaukan adalah akibat dari pertanyaan kognitif rendah dan cara guru mengajukan pertanyaan menyebabkan siswa hanya menjawab setengah dari jawaban yang seharusnya, misalnya; Bapak proklamator adalah.....Soekarno Ha.....? jadi siswa hanya menjawab TA. Dapat dibayangkan bagaimana mungkin pembelajaran sejarah menarik minat dan mendapat perhatian, merangsang daya pikir siswa jika pertanyaan dan cara bertanya dilakukan dengan pendekatan yang jauh dari pedagogis. Padahal, Supriatna (2008: 223) menyatakan “pertanyaan-pertanyaan kritis yang dikembangkan dalam pembelajaran sejarah tidak hanya dapat memfasilitasi para peserta didik untuk mampu berpikir kritis, tetapi juga menjadikan dirinya sebagai pelaku sejarah pada zamannya.”

Substansi dan cara bertanya atau keterampilan guru mengajukan pertanyaan perlu mendapat perhatian guru sejarah karena Saud (2008: 170) dengan tegas menyatakan bahwa “belajar pada hakikatnya adalah bertanya dan menjawab pertanyaan.” Dalam kaitan ini pula Gunawan (2012: 256) memberikan uraian lebih lanjut “bertanya dapat dipandang sebagai refleksi dari keingintahuan setiap individu, sedangkan menjawab pertanyaan mencerminkan kemampuan seseorang dalam berpikir” Sebenarnya dengan bertanya, maka seseorang sudah menunjukkan aktivitas berpikir. Hanafiah dan Suhana (2009: 74) menjelaskan bahwa “proses belajar yang dilakukan peserta didik diawali dengan proses bertanya. Proses bertanya yang dilakukan peserta didik sebenarnya merupakan proses berpikir yang dilakukan peserta didik dalam rangka memecahkan masalah

dalam kehidupannya.” Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guru memungkinkan siswa untuk lebih memahami suatu materi.

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan aktivitas bertanya sama dengan aktivitas belajar sehingga bertanya sangat penting dilakukan dalam pembelajaran. Hal ini diakui Pribadi (2009: 164) yang menyatakan “pengajuan pertanyaan merupakan hal penting dalam aktivitas pembelajaran. Pertanyaan akan memunculkan gagasan asli yang merupakan inti dari pendekatan pembelajaran konstruktivistik.” Betapa pentingnya keterampilan bertanya sehingga Marno dan Idris (2014: 113) menyatakan “keterampilan bertanya adalah suatu pengajaran itu sendiri sebab pada umumnya guru dalam pengajarannya selalu melibatkan/menggunakan tanya jawab.” Dengan demikian tidak ada pembelajaran tanpa pertanyaan. Akan tetapi, tentu saja yang dimaksudkan adalah pertanyaan-pertanyaan yang dapat memicu pemikiran kritis siswa karena “pertanyaan-pertanyaan yang tajam dapat menyempurnakan keyakinan dan menjelaskan berbagai kejadian.” (Johnson, 2009: 159)

Marno dan Idris (2014: 113) meyakini “dalam proses investigasi, pertanyaan yang baik akan menuntun kita pada jawaban yang sesungguhnya.” Karena itu, keterampilan bertanya perlu dikembangkan guru sejarah sekaligus diaplikasikan di dalam kelas baik bertanya secara langsung dalam bentuk verbal maupun mengajukan pertanyaan dalam LKS untuk diinvestigasi lebih lanjut oleh siswa. Jenis pertanyaan dan cara mengajukan pertanyaan perlu mendapat perhatian guru sejarah karena dipercaya bahwa pendekatan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan keterampilan dan daya berpikir siswa. Karena itu, pertanyaan yang perlu diajukan adalah pertanyaan HOTS yang memicu siswa untuk berpikir analitis, evaluatif, dan kreatif sehingga siswa dapat menjadi pemikir yang kritis dan kreatif.

LJBNI: ALTERNATIF MENGEMBANGKAN HOTS

Analisis terdahulu menunjukkan bahwa salah satu kelemahan pembelajaran sejarah adalah belum optimal meningkatkan HOTS. Untuk mengembangkan HOTS, maka keterampilan bertanya perlu mendapat perhatian guru sejarah karena

pembelajaran tidak dapat dipisahkan dengan keterampilan bertanya. Pembelajaran sejarah akan kehilangan makna tanpa pertanyaan. Keterampilan bertanya tidak hanya berkaitan cara guru mengajukan pertanyaan melainkan juga substansi pertanyaan mengarah pada pengembangan kemampuan berpikir siswa yang analitis, evaluatif, dan kreatif. Untuk mengembangkan HOTS melalui keterampilan bertanya, maka dapat dilakukan guru sejarah, antara lain dengan menggunakan instrumen atau Lembar Kerja Siswa (LKS) yang bersifat investigatif.

Berdasarkan LKS investigatif, guru memfasilitasi siswa melacak peristiwa sejarah secara imajinatif. LKS investigatif ini didesain dalam bentuk narasi imajinatif yang kemudian secara teknis konseptual disebut Lacak Jejak Berbasis Narasi Imajinatif (LJBNi). LJBNi dapat dipahami sebagai sebuah model pembelajaran sejarah berbasis kooperatif dan konstruktivistik yang menggunakan instrumen LKS imajinatif sebagai sarana bagi siswa untuk melakukan pelacakan jejak sejarah. Dengan demikian, dalam pembelajaran sejarah, LJBNi bukan sekadar berfungsi sebagai LKS untuk memfasilitasi siswa melakukan investigasi melacak peristiwa sejarah atau permasalahan yang dikaji dalam LJBNi melainkan memiliki prosedur pelaksanaan yang sistematis, karena itu LJBNi ini sesungguhnya lebih berorientasi pada model pembelajaran sejarah yang dalam pelaksanaannya membutuhkan instrumen atau LKS Narasi Imajinatif.

Model LJBNi memiliki kerangka konseptual yang kuat karena menekankan dua hal vital dalam pembelajaran sejarah, yakni lacak jejak dan imajinasi. Alwi (2000: 622) menjelaskan lacak adalah mencari, memeriksa dengan teliti, dan menyelidiki. Sedangkan jejak bermakna peristiwa. Jadi lacak jejak artinya menyelidiki suatu peristiwa. Konsep lacak jejak ini sangat relevan dengan pembelajaran sejarah karena berorientasi pada menyelidiki suatu peristiwa sejarah secara mendalam sehingga membutuhkan pemikiran siswa yang analitis dan kritis (HOTS). Dalam proses melacak peristiwa sejarah, akan lebih menarik jika dilakukan melalui suatu narasi yang bersifat imajinatif.

Dasar teoretis perlunya imajinasi dalam pembelajaran sejarah dikemukakan Kartodirdjo (1992: 91) “dari pengalaman sehari-hari kita mengetahui bahwa kita

senantiasa menggunakan imajinasi.” Karena manusia senantiasa menggunakan imajinasi maka tepat untuk membiasakan siswa belajar sejarah dengan menggunakan imajinasi sehingga Kumalasari (2005: 12) sampai pada kesimpulan bahwa “pengajar sejarah yang baik adalah yang mampu merangsang dan mengembangkan daya imajinasi peserta didik.” Tentu tidak mudah menumbuhkan imajinasi siswa dalam menelaah suatu peristiwa sejarah, akan tetapi hal ini penting karena seperti ditegaskan Collingwood (1985: 78) dalam menelaah suatu peristiwa sejarah, maka perlunya berpikir seperti aktor sejarah untuk memahami secara mendalam di balik peristiwa sejarah.

Pembelajaran sejarah perlu mengajak siswa berpikir imajinatif. Gagasan ini diakui Abdullah (Lubis-editor, 2001: 115) yang menyatakan “dalam usaha merekonstruksi peristiwa sejarah itu, sejarawan haruslah membayangkan seakan-akan dirinya adalah aktor sejarah yang dikisahkannya itu.” Wadah untuk menuntun siswa berpikir sebagai aktor sejarah adalah melalui narasi imajinatif yang dikembangkan secara efektif. Narasi imajinatif yang dikembangkan dalam pembelajaran sejarah akan memberikan ruang bagi siswa untuk melakukan tanya jawab intensif dan mengembangkan cakrawala berpikir secara mendalam.

Supriatna (2005: 113) menyatakan “kegiatan tanya jawab dalam proses pembelajaran sejarah dapat dipilih oleh guru sejarah dalam proses pembelajaran sejarah.” Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa model LJBNI adalah sebuah model yang didesain menggunakan narasi imajinatif yang memungkinkan siswa melacak peristiwa sejarah yang sedang dipelajari mengikuti tahapan pengamatan, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan (saintifik) sehingga pembelajaran sejarah tidak hanya berorientasi pada hasil belajar melainkan memungkinkan siswa lebih aktif dan berpikir tingkat tinggi. Selain itu, dimensi afektif dan psikomotorik juga tersentuh sehingga bukan semata-mata aspek kognitif yang dikembangkan. Contoh LKS LJBNI yang telah dikembangkan dalam pembelajaran sejarah dapat dilihat sebagai berikut.

Contoh LKS LJBNI

Mata Pelajaran	Sejarah
Kelas/Semester	
Hari/Tanggal	
Anggota Kelompok	
Petunjuk	1. Baca dan cermati secara teliti narasi yang ada di bawah ini. 2. Diskusikan hasil bacaan narasi kemudian kerjakan tugas yang ada pada LKS
POPEYE BERTEMU BALAPUTRA DEWA Siapa yang tidak kenal Popeye sang pelaut yang suka makan sayur bayam untuk mengalahkan Brutus. Kali ini, ceritanya bukan memperebutkan Olive atau menyelamatkan Olive dari Brutus yang sering mengganggunya, melainkan berkisah tentang perjalanan Popeye mengarungi lautan lepas. Suatu ketika Popeye terseret gelombang dahsyat hingga terdampar di lautan nan indah bernama Nusantara. Popeye terkesima menyaksikan hamparan laut luas milik Nusantara. Hmmm, betapa indahnya, Popeye bergumam. Dari bagian paling barat Nusantara hingga ujung timur sudah dijelajahi. Popeye semakin takjub dan berkata dalam hati, “betapa kayanya negeri ini.” Suatu ketika, Ia menemukan sebuah benda ajaib. Bahkan Ia merasa benda temuannya ini teramat ajaib. Baru kali ini, hanya di kepulauan nusantara Popeye menemukan benda semacam itu. Tapi, Ia juga yakin benda temuan ini belum seberapa dibandingkan isi Nusantara yang belum terjamah. Benda tersebut namanya “Memutar Waktu.” Ya... itu adalah sebuah benda mirip buatan Dora Emon. Kalian tahu kan siapa Dora Emon itu.? Dia juga berasal dari sebuah negeri kepulauan bernama Sakura. Dengan benda ajaib itu Popeye bisa kembali ke masa silam bahkan masa yang paling lampau. Rupanya Popeye sudah penasaran dan tidak sabaran ingin segera membuktikan keajaiban benda yang ditemukannya di Nusantara. Popeye pun mencobanya dengan penuh semangat, dan lalu tiba-tiba terdengar suara Bommm. Popeye sudah terpental ke masa silam. Semakin takjub saja Popeye dengan cerutu besarnya ketika memorinya berada di masa silam karena ternyata Nusantara banyak melahirkan orang-orang hebat. Kalau saja Ia hidu sesaman, pasti akan diajak untuk melawan kejahatan Brutus. Popeye bertemu banyak tokoh, seperti; Ken Arok dan istrinya yang jelita Ken Dedes, Airlangga, Kertanegara, Jayabaya, Samaratungga, Tunggul Amatung musuh bebuyutan Ken Arok. Di Nusantara, Popeye ketemu juga dengan Ratu Simo yang dikenal sangat adil dan bijaksana. Di sudut Nusantara lain, Popeye juga berkenalan akrab dengan Purnawarman dan Mulawarman. Popeye akhirnya menghabiskan banyak waktu bermukim di kerajaan yang dipimpin Balaputra Dewa sang pesaing beratnya Rakai Pikatan dalam memperebutkan Mataram Kuno. Betapa maju dan berkembang kehidupan rakyat di kerajaan ini. Malahan menjadi pusat penyebaran agama tertentu. Di ibukota kerajaan, Ia menyaksikan betapa raja kharismatik ini dengan kerja keras, disiplin, pantang menyerah, dan dengan segala kreativitas dan potensi yang dimiliki, Ia berhasil melambungkan Nusantara. Padahal Ia pernah berada dititik nol. Namun, Ia cepat bangkit dan tidak putus asa. Puas belajar dan menjelajah masa silam, Popeye ingin kembali ke masa kini	

untuk menata hidup ke depan. Ia pun menekan tombol pemutar waktu. Lalu, Boommm, tiba-tiba ia sudah berada di jalan Sam Ratulangi persis di depan kantor Surat Kabar Radar Sulteng. Seorang wartawan bertanya pada Popeye, “diantara semua tokoh nusantara itu siapa yang paling dekat dengan Anda. ? Popeye bilang, semuanya. Tapi yang paling cocok adalah Balaputra Dewa. Mengapa Balaputra Dewa ? Popeye tidak menjawab. Ia hanya tersenyum puas, dan berkata saya juga merasa cocok dengan para perenang seperti; Mat Biondi dan Elfa Manora Nasution. Setelah cukup lama, berada di nusantara, maka ia harus segera kembali ke kampungnya karena Popeye mendengar kabar bahwa Brutus berhasil menangkap Olive. “Selamat tinggal Nusantara yang Indah berselimut kekayaan tiada terkira,” kata Popeye.

TUGAS LACAK JEJAK

1. Dengan menggunakan PETA, lacak posisi Kerajaan yang menjadi topik pembicaraan narasi di atas.!
2. Identifikasi bukti-bukti keberadaan kerajaan tersebut !
3. Uraikan penyebab kemajuan dan kemunduran kerajaan tersebut.!
4. Investigasi fakta, konsep, dan karakteristik yang ada pada kerajaan tersebut.!
5. Buatlah narasi faktual secara singkat berdasarkan bukti, fakta, dan karakteristik kerajaan tersebut.!

TEMUAN

Jika dalam proses pelacakan kelompok Anda menemukan permasalahan atau pertanyaan yang perlu didiskusikan lebih lanjut, maka tuliskan temuan permasalahan dan pertanyaan kelompok Anda.

Aspek-aspek yang dilacak tentu saja dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan sumber belajar dan kesiapan siswa. Karena itu, HOTS dapat dipertajam, misalnya setelah melakukan analisis terhadap penyebab kemajuan dan keruntuhan sebuah kerajaan, maka apakah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya keruntuhan sebuah kerajaan.? Pertanyaan semacam ini berada pada level evaluasi atau kreasi dan mencipta. Lebih dari pada itu, bermakna mendidik siswa untuk menjadikan sejarah bukan hanya mata pelajaran yang harus dipelajari di sekolah melainkan memetik pelajaran dari apa yang sudah dipelajari. Dari Belajar Sejarah Menjadi Belajar Dari Sejarah.

PROSEDUR LJBNI

Pembelajaran dikelola berdasarkan tiga fase utama, yakni; perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut setelah evaluasi. Pembelajaran yang efektif selalu berawal dari perencanaan yang baik dan menjadi dasar pelaksanaan pembelajaran yang sistematis dan diakhiri dengan penilaian yang mengarah pada HOTS. Karena itu, model pembelajaran LJBNI juga didesain mengacu pada prosedur baku

sistematika pembelajaran. Dengan perkataan lain, sebelum melaksanakan pembelajaran maka ada beberapa aspek yang perlu dilakukan dan setelah pembelajaran juga perlu dilakukan tindak lanjut. Secara konkrit, prosedur LJBNI dapat dijelaskan berdasarkan tiga fase pembelajaran di atas.

Pada fase perencanaan pembelajaran yang perlu dilakukan adalah: 1) mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); 2) menyusun LKS narasi imajinatif sesuai materi yang akan dibahas untuk dijadikan dasar dalam melakukan lacak jejak; 3) menyiapkan media pembelajaran yang relevan; 4) menyiapkan sumber belajar yang relevan; dan 5) mengembangkan instrumen penilaian yang berorientasi HOTS yang dapat dimasukkan dalam satu paket dengan RPP atau berdiri sendiri.

Fase pelaksanaan pembelajaran mengikuti tiga tahapan utama, yakni: tahap pendahuluan, inti, dan penutup. Klasifikasi tiga tahapan utama pelaksanaan pembelajaran sejalan dengan Permendikbud No 103 Tahun 2015 yang kemudian disempurnakan menjadi Permendikbud No 22 Tahun 2016. Pada tahap pendahuluan tidak berbeda dengan model pembelajaran lain, terdiri atas beberapa kegiatan, seperti; 1) menyampaikan salam pembuka; 2) mengecek kehadiran siswa; 3) berdoa sebelum memulai pembelajaran; 4) memberikan apersepsi; 5) memberikan motivasi; 6) menyampaikan manfaat dan relevansi materi dengan kehidupan siswa; 7) menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai; dan menyiapkan LKS LJBNI yang sudah disusun dan dikembangkan pada fase perencanaan.

Pada tahap inti (kegiatan inti) atau tahap implementasi prosedur LJBNI terdiri atas beberapa langkah yang dapat dilakukan guru sejarah, yakni: 1) membagi kelompok heterogen; 2) menjelaskan tugas dan tanggung jawab kelompok; 3) mendistribusikan LKS LJBNI dan sumber belajar lain; 4) menyampaikan pengantar singkat materi yang akan dibahas yang dapat divariasikan dengan media pembelajaran yang relevan; 5) memfasilitasi siswa dalam kelompok untuk membaca, memahami, dan mencermati permasalahan yang dikemukakan dalam LKS LJBNI atau dapat pula divariasikan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk merumuskan permasalahan sendiri;

6) memfasilitasi siswa dalam kelompok untuk mengumpulkan data dan fakta serta melacak jejak sesuai LKS LJBNI; 7) memfasilitasi siswa dalam kelompok untuk mendiskusikan dan mendalami temuan fakta hasil pelacakan peristiwa sejarah sesuai LKS LJBNI; 8) memfasilitasi siswa dalam kelompok melakukan eksplanasi sesuai tugas HOTS dalam LKS LJBNI; 9) memfasilitasi siswa dalam kelompok untuk memperdalam hasil temuan dan eksplanasi; 10) memfasilitasi kelompok melakukan presentasi untuk mengkomunikasikan hasil kerja kelompok; 11) memfasilitasi kelompok melakukan tanya jawab dan *feed back*; dan 12) memberikan penguatan terhadap proses dan hasil diskusi yang berkembang selama pelaksanaan pembelajaran.

Jika dianalisis secara detail dua belas langkah dalam tahapan kegiatan inti pembelajaran LJBNI, maka dapat diklasifikasi menjadi lima langkah utama sesuai sistematika pendekatan saintifik. Langkah ke 5 dan 6 dapat dikelompokkan sebagai tahap mengamati dan menanya dalam prosedur pendekatan saintifik. Langkah ke 6 adalah mengumpulkan data dalam tahapan pendekatan saintifik. Langkah ke 7, 8, dan 9 adalah tahapan asosiasi atau pemaknaan dalam pendekatan saintifik, dan langkah atau kegiatan ke 10, 11, dan 12 merupakan tahapan mengkomunikasikan dalam pendekatan saintifik.

Tahapan penutup pada fase pelaksanaan pembelajaran terdiri atas beberapa langkah, yakni; 1) memfasilitasi siswa merumuskan rangkuman atau kesimpulan hasil pembelajaran; 2) memberikan evaluasi; 3) memberikan tugas terkait materi yang telah dibahas atau materi yang akan dibahas pada pertemuan berikut; 4) memberikan pesan-pesan moral sebelum mengakhiri pembelajaran; dan 5) salam penutup.

Pasca pembelajaran yang terdiri atas; tiga tahapan pendahuluan, inti, dan penutup bukan berarti pembelajaran LJBNI sudah berakhir. Pembelajaran masih tetap berlanjut dalam konteks tindak lanjut. Tindak lanjut mengarah pada hasil evaluasi yang diberikan pada tahap penutup. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa model LJBNI belum optimal dalam mengembangkan HOTS maka perlu dilakukan remedi individual atau klasikal dengan mempertimbangkan kuantitas siswa yang belum mencapai HOTS. Jika hasil analisis menunjukkan bahwa

HOTS sudah tercapai sesuai kriteria yang sudah ditentukan, maka dapat diberikan pengayaan.

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN LJBNI

Model pembelajaran apakah yang terbaik digunakan dalam pembelajaran sejarah.? Semua model pembelajaran dapat dipertimbangkan untuk digunakan dalam pembelajaran sejarah. Prinsip dalam metodologi pembelajaran adalah tidak ada satupun model pembelajaran terbaik untuk semua materi pelajaran karena semua model pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dalam perspektif ini, maka yang paling urgen adalah penerapan model pembelajaran sejarah perlu memperhatikan beberapa prinsip. Idrus (SKH-Alkhairat: 2014) mengidentifikasi lima prinsip pembelajaran yang dapat dipedomani guru sejarah, yakni; “1) variatif; 2) dari fakta ke analisis; 3) terbuka dan dialogis; 4) divergen; dan 5) progresif.” Penerapan kelima prinsip tersebut, mampu menghindarkan pembelajaran sejarah dalam siklus monoton dan yang paling mendasar menjadi bingkai dalam mengembangkan HOTS. LJBNI juga didesain dengan memperhatikan kelima prinsip pembelajaran sejarah sehingga secara teoretis dan praktis LJBNI memiliki keunggulan. Akan tetapi, seperti halnya semua model pembelajaran, tentu saja LJBNI juga memiliki sejumlah kekurangan dan keterbatasan.

Berdasarkan kajian teoretis dan temuan lapangan dalam *action research* Idrus (2015: 57 - 69) mencatat beberapa kelebihan atau keunggulan LJBNI, yakni; 1) berorientasi HOTS; 2) mengakomodir ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik; 3) relevan dengan pendekatan saintifik; 4) berciri kooperatif; 5) berciri konstruktivistik; dan 6) mengakomodir perspektif materi kemaritiman. Enam kelebihan LJBNI dapat diuraikan lebih lanjut dengan mensinyalir kembali realitas pembelajaran sejarah selama ini belum mengoptimalkan HOTS melainkan LOTS atau paling kurang untuk sebagian baru berada pada tataran MOTS. LJBNI mampu mengembangkan HOTS bukan saja pada pengajuan sejumlah pertanyaan yang menggunakan Kata Kerja Operasional (KKO) berorientasi analisis, sintesis, dan evaluasi atau mencipta sehingga menuntut jawaban dan pemikiran HOTS

melainkan pada teks atau naskah/narasi imajinatif juga mensugesti siswa untuk lebih konsentrasi dan serius dalam mengikuti pembelajaran sejarah. LKS LJBNI yang baik mampu memberikan tantangan dan daya tarik dalam pembelajaran sejarah.

Pembelajaran selama ini (bukan hanya sejarah) terlalu fokus pada kognitif. Kecenderungan ini terutama terjadi sebelum diberlakukannya Kurikulum 2013. LJBNI mengakomodir ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik. Melalui LKS LJBNI, siswa memperoleh nilai-nilai afektif seperti; teliti, sabar, mendorong rasa ingin tahu, bekerjasama dalam kelompok, dan membangun komunikasi untuk melacak jejak - menemukan fakta (pengetahuan – kognitif), dan pada akhirnya terampil melakukan eksplanasi merangkai fakta menjadi satu alur narasi sejarah dan kemudian mempresentasikan secara lisan (keterampilan – psikomotorik). Dengan demikian LJBNI tidak hanya *cognitive oriented*, melainkan juga menekankan pada afektif dan psikomotorik sehingga pembelajaran sejarah sesuai dengan misi utamanya mengembangkan kepribadian, jati diri, dan karakter siswa. Selain itu, sejalan pula dengan *assessment authentic* yang menghendaki penilaian dilakukan pada tiga ranah secara simultan sebagaimana diamanatkan dalam Kurikulum 2013.

Model LJBNI tidak hanya mendukung penilaian autentik melainkan juga relevan dengan pendekatan saintifik sebagai salah satu ciri utama dalam Kurikulum 2013. Semua tahapan saintifik terlihat jelas dalam implementasi saintifik. Proses mengamati diawali dengan membaca naskah LJBNI yang kemudian disusul dengan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan didiskusikan dalam kelompok setelah itu dituntun melacak jejak dan fakta sejarah untuk dijadikan basis membangun eksplanasi sejarah. Dalam konteks ini narasi imajinatif yang telah dikembangkan diakhiri dengan narasi faktual yang dilakukan siswa untuk kemudian melakukan komunikasi dan presentasi.

LJBNI juga berciri kooperatif dan konstruktivistik. Kedua ciri menjadi kekuatan dan keunggulan model LJBNI yang selama ini justru menjadi salah satu aspek yang paling sering diabaikan guru sejarah. Berciri kooperatif karena penerapan LJBNI mensyaratkan pembagian kelompok heterogen. Instrumen

LJBNI hanya bisa diselesaikan secara efektif dan efisien melalui kerjasama dalam kelompok-kelompok kecil. Sementara itu, melalui proses pelacakan fakta maka siswa menemukan sendiri pengetahuan dan membangun argumentasi untuk menjawab pertanyaan HOTS yang diberikan dalam LKS. Fase paling konkrit terjadinya proses konstruktivistik adalah ketika siswa melakukan narasi faktual berdasarkan narasi imajinatif. Akhirnya kelebihan LJBNI juga mencakup kemampuan mengakomodir perspektif materi kemaritiman. Dalam pengembangan LKS LJBNI mengacu pada kurikulum sejarah. Kurikulum sejarah memiliki sejumlah materi yang secara tegas berbasis kemaritiman. Jika dianalisis mendalam maka orientasi LJBNI dalam perspektif materi kemaritiman dapat dipetakan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1: Muatan Nilai Kemaritiman dalam Kurikulum Sejarah Indonesia SMA/MA/SMK

Kelas	Kompetensi Dasar	Nilai Kemaritiman	
		Ya	Tidak
X	3.1. memahami konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang, dan waktu dalam sejarah		V
	3.2. memahami konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah		V
	3.3. menganalisis kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia (Melanesoid, Proto, dan Deutero melayu)	V	
	3.4. memahami hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat	V	
	3.5. menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha ke Indonesia	V	
	3.6. menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada masa kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini	V	
	3.7. menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia	V	
	3.8. menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini	V	
	3.1. menganalisis proses masuk dan perkembangan	V	

XI	penjajahan bangsa Eropa (Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris) ke Indonesia		
	3.2. menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa (Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris) sampai dengan abad ke-20	V	
	3.3. menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa (Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris) dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini	V	
	3.4. menghargai nilai-nilai sumpah pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini	V	
	3.5. menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia	V	
	3.6. menganalisis peran tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia		V
	3.7. menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia		V
	3.8. menganalisis peristiwa pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia pada awal kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia masa kini	V	
	3.9. menganalisis peran dan nilai-nilai perjuangan Bung Karno dan Bung Hatta sebagai proklamator serta tokoh-tokoh lainnya sekitar proklamasi		V
	3.10. menganalisis strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Sekutu dan Belanda	V	
XII	3.1. menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa antara lain PKI Madiun 1948, DI/TII, APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI, Permesta, G-30-S/PKI		V
	3.2. mengevaluasi peran dan nilai-nilai perjuangan tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa 1945–1965		V
	3.3. menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi Bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal	V	
	3.4. menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi Bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin	V	
	3.5. menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi Bangsa Indonesia pada masa Orde Baru		V
	3.6. menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi Bangsa Indonesia pada masa awal Reformasi		V

	3.7. mengevaluasi peran pelajar, mahasiswa, dan pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia		V
	3.8. mengevaluasi peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia antara lain KAA, Misi Garuda, Deklarasi Djuanda, Gerakan Non Blok, ASEAN, OKI, dan Jakarta Informal Meeting	V	
	3.9. mengevaluasi kehidupan Bangsa Indonesia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era kemerdekaan (sejak proklamasi sampai dengan Reformasi)	V	

Sumber: Analisis penulis terhadap Permendikbud Nomor 24/2016 Tentang KI dan KD Pelajaran Pada Kurikulum 2013 pada Dikdasmen.

Berdasarkan Tabel 1. Dapat dipahami bahwa mata pelajaran Sejarah Indonesia terdiri atas 27 Kompetensi Dasar (KD). Dari 27 KD, ternyata 17 di antaranya berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan dimensi kemaritiman. Dengan demikian, maka LJBNI berpotensi untuk menggarap muatan materi kemaritiman, seperti sampel pada LKS LJBNI yang telah ditampilkan terdahulu dan juga terdapat pada KD KTSP. Demikian pula dengan mata pelajaran sejarah pada kelas peminatan menunjukkan sejumlah KD bermuatan kemaritiman seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2: Muatan Nilai Kemaritiman dalam Kurikulum Sejarah SMA/MA

Kelas	Kompetensi Dasar	Nilai Kemaritiman	
		Ya	Tidak
X	3.1. menganalisis kehidupan manusia dalam ruang dan waktu	V	
	3.2. menganalisis kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan	V	
	3.3. menganalisis keterkaitan peristiwa sejarah tentang manusia di masa lalu untuk kehidupan masa kini	V	
	3.4. menganalisis sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni		V
	3.5. menganalisis cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam karya sejarah		V
	3.6. mengevaluasi kelebihan dan kekurangan berbagai bentuk/jenis sumber sejarah (artefak, fosil, tekstual, nontekstual, kebendaan, visual, audiovisual, tradisi lisan)		V
	3.7. memahami langkah-langkah penelitian sejarah (heuristik, kritik/verifikasi, interpretasi/eksplanasi, dan penulisan sejarah)		V

	3.8. menganalisis ciri-ciri dari historiografi tradisional, kolonial, dan modern		V
	3.9. menganalisis persamaan dan perbedaan antara manusia purba Indonesia dan dunia dengan manusia modern dalam aspek fisik dan nonfisik	V	
	3.10. menganalisis kehidupan awal manusia Indonesia dalam aspek kepercayaan, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi serta pengaruhnya dalam kehidupan masa kini	V	
	3.11. menganalisis peradaban awal dunia serta keterkaitannya dengan peradaban masa kini pada aspek lingkungan, hukum, kepercayaan, pemerintahan, dan sosial	V	
XI	3.1. menganalisis kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini	V	
	3.2. menganalisis kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Islam dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini	V	
	3.3. menganalisis pemikiran-pemikiran yang melandasi peristiwa-peristiwa penting di Eropa antara lain Renaissance, Merkantilisme, Reformasi Gereja, Aufklarung, Revolusi Industri dan pengaruhnya bagi kehidupan bangsa Indonesia serta bangsa lain di dunia pada masa kini	V	
	3.4. menganalisis pemikiran-pemikiran yang melandasi revolusi-revolusi besar dunia (Amerika, Perancis, Cina, Rusia, dan Indonesia) dan pengaruhnya bagi kehidupan umat manusia pada masa kini	V	
	3.5. menganalisis hubungan perkembangan paham-paham besar seperti demokrasi, liberalisme, sosialisme, nasionalisme, Pan Islamisme dengan gerakan nasionalisme di Asia-Afrika		V
	3.6 menganalisis pengaruh Perang Dunia I dan Perang Dunia II terhadap kehidupan politik global (LBB dan PBB)	V	
	3.7 menganalisis respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme dalam bidang politik (organisasi pergerakan), ekonomi (bentuk perlawanan terhadap praktik monopoli), sosial-budaya (karya seni dan sastra), dan pendidikan (Taman Siswa, Kayu Tanam)	V	
	3.8 menganalisis akar-akar nasionalisme Indonesia dan pengaruhnya pada masa kini	V	
	3.9. menganalisis akar-akar demokrasi di Indonesia dan perkembangannya pada masa kini		V
	3.10 menganalisis persamaan dan perbedaan tentang		V

	strategi pergerakan nasional		
	3.11 menganalisis kehidupan bangsa Indonesia di bidang sosial, ekonomi, budaya, militer, dan pendidikan pada zaman pendudukan Jepang	V	
	3.12 menganalisis pemikiran dalam Piagam PBB, Proklamasi 17 Agustus 1945, dan perangkat kenegaraan serta maknanya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa kini	V	
XII	3.1 menganalisis secara kritis respon Internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia	V	
	3.2 mengevaluasi perkembangan IPTEK dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia	V	
	3.3 menganalisis peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global	V	
	3.4 menganalisis sejarah organisasi regional dan global yakni NATO, SEATO, PAKTA WARSAWA, CENTO, ANZUS, SAARC, OPEC, APEC, MEE, GATT, WTO, AFTA, NAFTA, CAFTA, dan pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia	V	
	3.5 mengevaluasi sejarah kontemporer dunia antara lain runtuhnya Vietnam Selatan, Apartheid di Afrika Selatan, USSR, Jerman Timur, Yugoslavia, Cekoslowakia		V
	3.6 menganalisis konflik-konflik di Timur-Tengah, Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur, Eropa, Afrika, dan Amerika Latin		V

Sumber: Analisis penulis terhadap Permendikbud Nomor 24/2016 Tentang KI dan KD Pelajaran Pada Kurikulum 2013 pada Dikdasmen.

Berdasarkan Tabel 2. Tercatat 29 KD yang dijabarkan dari kelas X, XI, dan XII. Dari 29 KD tersebut, ternyata 19 berkaitan dengan muatan kemaritiman dan 10 KD belum dapat ditemukan kaitan secara langsung dengan muatan kemaritiman. Hal yang menarik adalah beberapa KD seperti KD 3.1 dan KD 3.2 pada kelas XI secara langsung menyebut istilah kemaritiman. Karena itu, potensi ini merupakan salah satu aspek yang dapat dikembangkan guru sejarah dengan menggunakan model LJBNI.

Berbagai kelebihan model pembelajaran LJBNI telah diuraikan secara menyeluruh. Selanjutnya, kelemahan atau kekurangan model pembelajaran LJBNI dapat diidentifikasi sebagai berikut: 1) membutuhkan kemampuan khusus untuk merancang LKS LJBNI; 2) dalam pelaksanaan membutuhkan waktu yang lama;

dan 3) membutuhkan sumber belajar yang lebih variatif. Dari ketiga kelemahan LJBNI, tampaknya yang paling mendasar adalah kelemahan yang berkaitan dengan merancang LKS LJBNI karena dalam realitas untuk mengembangkan LKS LJBNI memang tidak hanya membutuhkan imajinasi guru sejarah terkait materi yang akan dibelajarkan dengan LJBNI melainkan juga berkaitan dengan kompetensi guru sejarah dalam menulis.

LKS LJBNI adalah sebuah narasi imajinatif berbasis materi sebagaimana tertera dalam kurikulum. Karena itu, ada dua hal yang perlu dikuasai guru sejarah yakni; menulis dan imajinasi. Jadi, hasil imajinasi ditulis dalam bentuk narasi yang menarik sehingga pada tahap awal ketika membaca LKS LJBNI, maka siswa sudah tertarik dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Jika materi tidak dikembangkan dalam bentuk narasi imajinatif, maka LKS tersebut tidak lebih dari sekadar memindahkan narasi dari buku ke LKS. Jika ini terjadi, maka jelas pembelajaran tidak akan menarik dan menantang pemikiran siswa. Karena itu, untuk mengatasi keterbatasan ini, maka guru sejarah dapat melakukan pengembangan LKS LJBNI secara kolektif melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

Kelemahan yang berkaitan dengan waktu sangat tergantung pada kemampuan guru sejarah memanej waktu. *Action research* memang dilakukan pada kelas XI IPS dengan alokasi waktu 3 JP sehingga relatif tidak terlalu bermasalah. Bagaimana dengan pembelajaran sejarah dengan alokasi waktu 2 JP. ? Misalnya pelaksanaan pembelajaran Sejarah Indonesia, apakah 2 JP cukup untuk melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien.? Meskipun belum diujicobakan untuk pembelajaran 2 JP, akan tetapi dinamika yang berkembang selama *action research* dapat diasumsikan, waktu 2 JP dinilai relatif cukup untuk melaksanakan LJBNI. Lagi pula, jika dikombinasi dengan pendekatan saintifik, maka pelaksanaan LJBNI tidak harus selesai dalam satu paket pembelajaran. Adapun kelemahan keterbatasan sumber belajar, memang dapat menjadi kendala terutama untuk sekolah yang memiliki keterbatasan sumber belajar, misalnya; jaringan internet belum tersedia dan koleksi perpustakaan belum memadai. Akan tetapi, dengan kreativitas guru sejarah, maka kelemahan ini dapat diantisipasi.

PENUTUP

Kelemahan pembelajaran sejarah selama ini terlalu monoton, kurang kreatif, dan belum mampu mengembangkan HOTS sehingga berimplikasi pada respon siswa yang kurang positif. Selain itu, pembelajaran sejarah juga terjebak pada *cognitive oriented*. Padahal dalam *assessment authentic* sesuai spirit Kurikulum 2013 menghendaki penekanan pada afektif, kognitif, dan psikomotorik. Jika hal ini dibiarkan terus berlanjut, maka dikhawatirkan misi positif mata pelajaran sejarah sebagai wadah transfer nilai terancam gagal. Karena itu, kelemahan-kelemahan pembelajaran sejarah harus segera diantisipasi dan salah satu solusinya adalah mengembangkan model LJBNI.

LJBNI didesain dengan mengikuti 3 fase pembelajaran yakni; perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Pada fase perencanaan yang paling vital adalah mengembangkan LKS LJBNI sedangkan pada fase pelaksanaan pembelajaran tetap mengacu pada tiga langkah, yakni; kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Sementara itu untuk fase tindak lanjut merupakan evaluasi atas pembelajaran yang telah dilakukan untuk menentukan pemberian remedial atau pengayaan.

Model LJBNI memiliki kelebihan atau keunggulan dan kekurangan atau kelemahan. Kelebihan LBNI, yakni: 1) berorientasi HOTS; 2) mengakomodir ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik; 3) relevan dengan pendekatan saintifik; 4) berciri kooperatif; 5) berciri konstruktivistik; dan 6) mengakomodir perspektif materi kemaritiman. Sedangkan kelemahan LJBNI, yakni: 1) membutuhkan kemampuan khusus untuk merancang LKS LJBNI; 2) dalam pelaksanaan membutuhkan waktu yang lama; dan 3) membutuhkan sumber belajar yang lebih variatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Abdul Razak & Andi Suwirta. (2007). *Sejarah dan Pendidikan Sejarah: Perspektif Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Historia Utama Press.
- Ali, R. Moh. (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: LKIS.
- Alwi. H. (2000). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Anderson, L. & Krathwohl, D. (2001). *A Taxonomy For Learning, Teaching and Assessing*. New York: Longman.
- Bloom, B. S. (1979). *Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals*. London: Longman Group LTD.
- Collingwood. R.G. (1985). *Ide Sejarah*. (Terjemahan Muhd. Yusof Ibrahim). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pengajaran Malaysia.
- Deliman, A. (2005) *Perspektif Materi Pendidikan Sejarah Yang Ideal, Socio*, Vol. I, Nomor 1, Yogyakarta: HISPISI dan FIS UNY, 113-127
- Gonggong, Anhar. *Suara Merdeka*, 23 Juni 2005.
- Hanafiah, Nanang dan Suhana, Cucu. (2009). *Konsep Strategi Pembelajaran*. Bandung: Refika Aditama.
- Hapsari, Ratna. (2006). "Mengajar Sejarah dengan Efektif, Sebuah Pengalaman" *Makalah*. disampaikan dalam Mukemas Pengajaran Sejarah, Surabaya 11-13 Juli.
- Gunawan. H. (2012). *Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Hasan, Said.H. (2000). *Kurikulum dan Buku Teks Pelajaran Sejarah. Historia*. No 1 Vol.1. 13-28.
- Idrus. (2014). *Pendekatan Saintifik Solusi Pengembangan Daya Tarik Mata Pelajaran Sejarah*. SKH. Alkhairaat. Palu
- _____. (2015). *Penerapan Lacak Jejak Berbasis Narasi Imajinatif untuk Meningkatkan Higher Order Thinking Skills dalam Pembelajaran Sejarah di kelas XI IPS 2 SMA Negeri 2 Dolo*. Palu (Penelitian Mandiri untuk Kenaikan Pangkat Widyaiswara LPMP Sulawesi Tengah)

- Ismaun. (2005). *Filsafat Sejarah Sebuah Paparan Pengantar*. Bandung: Historia Utama Press. UPI Bandung
- _____. (2001). *Paradigma Pendidikan Sejarah yang Terarah dan Bermakna*. *Historia*. No.4. Vol. II. : 88-118.
- Johnson. E.B. (2009). *Contextual Teaching and Learning*. Terjemahan. California: Corlin Press.
- Kartodirdjo, Sartono. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Kemdikbud RI. (2015). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 tahun 2014 Tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*. Jakarta: Kemdikbud.
- _____. (2016). *Panduan Penyusunan Soal High Order Thinking Skill's (HOTS)*. Direktorat Pembinaan SMA: Jakarta
- _____. (2016). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 tahun 2014 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Kemdikbud.
- Kumalasari, Dyah. (2005). "Sejarah dan Problematika Pendidikan". *Istoria*. Vol. 1 No. 1, September 2005. hal. 7 – 22.
- Lubis, N. (Editor). (2001). *80 Tahun Prof. Sartono Kartodirdjo: Pelopor Sejarah Indonesia*. Jakarta: MSI-Satya Historika.
- Marno dan Idris. (2014). *Strategi, Metode, dan Teknik Mengajar: Menciptakan Keterampilan Mengajar Seara Efektif dan Edukatif*. Yogyakarta Arruz Media.
- Pranoto, Suhartono. (2010). *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Pribadi, Beny. A. (2009). *Model desain sistem pembelajaran. Langkah penting merancang kegiatan pembelajaran yang efektif dan berkualitas*. Jakarta: Dian Rakyat
- Rochmat, Saefur. (2009). *Ilmu Sejarah dalam Perspektif Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Saud, Udin. S. (2008). *Inovasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

- Suhartini, Dewi. (2001). Minat Siswa Terhadap Topik-topik Mata Pelajaran Sejarah dan beberapa Faktor yang Melatarbelakanginya. *Tesis*. Bandung: Program Pascasarjana UPI.
- Supriatna, Nana. (2005). Konstruksi Pembelajaran Sejarah Lokal untuk Memahami Isu-isu Sosial. *Historia*. Vol. VI No. 11. 2005. hal. 113-133.
- _____. (2008). Mengembangkan Pertanyaan Kritis Model *Ways of Knowing* Habermas dalam Pembelajaran Sejarah (Makalah disajikan dalam seminar Konstruksi Pembelajaran Sejarah Kritis Himas tanggal 23 Mei 2007 – UPI)
- Usaid dan Depdikbud.(2013). *Praktik yang Baik*. Jakarta: BPSDMPK-PMP
- Widja, I Gde. (1991). *Dasar-dasar Pengembangan Strategi Serta Metode Pengajaran Sejarah*. Edisi Pertama. Jakarta: Depdikbud
- Yulifar, Lely. (2008). “Pengembangan Model Pembelajaran Sejarah untuk Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme Siswa Sekolah Dasar Melalui Integrasi Materi Pembelajaran Lintas Bidang Studi.” Dalam Supriatna, Nana & Erlina Wiyanarti. (Ed.). *Sejarah dan Keberagaman: penghormatan Kepada Prof. Helius Syamsuddin*. hal. 203-217. Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS – UPI.
- Zuhdi, Susanto. (2008). “Nasionalisme: Tantangan dalam Pembangunan Nilai-nilai Pendidikan di Indonesia.” Dalam Supriatna, Nana & Erlina Wiyanarti. (Ed.). *Sejarah dan Keberagaman: penghormatan Kepada Prof. Helius Syamsuddin*. hal. 203-217. Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS – UPI.



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Konferensi Nasional Sejarah X

Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta
7-10 November 2016

Konstruksi Nilai-Nilai Karakter Melalui
Paradigma Pedagogi Reflektif (PPR)
dalam Materi Sejarah Maritim Untuk SMA

Sumini Theresia



**KONSTRUKSI NILAI-NILAI KARAKTER
MELALUI PARADIGMA PEDAGOGI REFLEKTIF (PPR)
DALAM MATERI SEJARAH MARITIM UNTUK SMA**

Oleh : Sumini Theresia

FKIP Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Tulisan ini bertujuan untuk (1) mengembangkan pembelajaran sejarah dengan Paradigma Pedagogi Reflektif pada materi sejarah maritim di SMA yang berhubungan dengan aspek *competence*, *conscience*, dan *compassion* dalam membangun potensi siswa menjadi pribadi yang utuh. (2) Menanamkan kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat melalui penanaman nilai-nilai sejarah maritim dan budayanya.

Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan model penulisan deskriptif analitis. Manfaat dari pendekatan ini diharapkan dalam proses pembelajaran sejarah maritim mampu (1) mengarahkan peserta didik berefleksi menemukan nilai-nilai kehidupan sehingga bisa merencanakan tindakan yang berguna, bukan karena kepatuhan dan tradisi, namun pada kesadaran akan nilai kemanusiaan tanpa meninggalkan aspek kognitif. (2) Membangun diri sendiri agar bertanggung jawab terhadap masyarakat.

Kata kunci: Paradigma Pedagogi Reflektif, karakter, *competence*, *conscience*, *compassion*, sejarah maritim.

A. PENDAHULUAN

Pembelajaran sejarah pada jenjang SMA saat ini menitikberatkan pada kajian sejarah nasional. Hal ini tentu saja wajar dalam kerangka kebangsaan maka dibutuhkan upaya untuk meningkatkan rasa nasionalisme, salah satunya melalui mata pelajaran sejarah di sekolah. Pendidikan sejarah sangatlah penting bagi generasi muda. Pembangunan karakter bangsa (*national character building*) dapat diupayakan melalui pendidikan sejarah terutama di sekolah.

Begitu pentingnya pendidikan sejarah, maka dalam Kurikulum 2013, mata pelajaran sejarah mendapat tempat istimewa. Terdapat mata pelajaran Sejarah Indonesia yang sifatnya wajib bagi seluruh siswa. Sementara bagi siswa pada jenjang SMA yang memilih peminatan Ilmu Sosial selain mendapat mata pelajaran Sejarah Indonesia, juga mendapat mata pelajaran Sejarah. Mata

pelajaran Sejarah Indonesia mengkaji mengenai sejarah nasional, sedangkan Sejarah mengkaji lebih luas lagi, termasuk sejarah dunia.

Pembelajaran Sejarah Indonesia memegang peran strategis dalam pembentukan karakter, maka setiap siswa dipastikan memperolehnya sampai ke jenjang SMA. Harapannya setiap generasi muda di Indonesia sungguh memahami sejarah bangsanya sehingga tumbuh kesadaran sejarah yang tinggi. Oleh karena itu, mata pelajaran Sejarah Indonesia perlu dikembangkan tidak hanya pada kajian sejarah nasional, namun juga sejarah lokal di daerah masing-masing maupun sejarah tematik. Dengan memahami sejarah lokal dan tematik diharapkan dapat semakin memperkuat pemahaman terhadap sejarah nasional.

Terkait dengan hal itu, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan garis pantai terpanjang kedua serta luas laut mencapai 5,8 juta kilometer persegi yang merupakan dua pertiga luas wilayah negara, hingga saat ini menempatkan orientasi pendidikan dan pembangunan yang bertumpu ke darat (*landbase oriented*). Pendidikan sejarah lebih terfokus pada peristiwa-peristiwa yang terjadi di daratan, sedangkan laut dengan segala isinya seringkali hanya menjadi pelengkap cerita dalam pembahasan suatu peristiwa di daratan. Dengan menyadari keberadaan wilayah negara tersebut perlu kiranya penanaman nilai-nilai kemaritiman dalam segala aspek khususnya melalui pendidikan.

Konstruksi nilai-nilai kemaritiman di sekolah khususnya pada mata pelajaran sejarah menjadi penting untuk penguatan sumber daya manusia dan penunjang peningkatan penguasaan ilmu dan teknologi di bidang kelautan. Pendidikan kemaritiman untuk mendukung penguatan kembali budaya dan potensi maritim sangatlah penting. Keberadaannya merupakan manifestasi investasi jangka panjang yang dapat mengangkat citra sebagai bangsa bahari. Kejayaan kerajaan maritim di masa lampau seperti Sriwijaya, Majapahit, Demak maupun kerajaan lainnya di Nusantara perlu ditanamkan pada jiwa peserta didik sehingga pada dirinya tumbuh semangat juang untuk mempertahankan NKRI sebagai negara dan bangsa bahari. Melalui pembelajaran sejarah nilai-nilai karakter kebaharian peserta didik dapat ditumbuhkembangkan.

Prinsip utama pembelajaran sejarah di sekolah yakni agar siswa memperoleh kemampuan berpikir historis dan pemahaman sejarah. Melalui pembelajaran sejarah siswa mampu mengembangkan kompetensi untuk berpikir secara kronologis dan memiliki pengetahuan tentang masa lampau yang dapat digunakan untuk memahami dan menjelaskan proses perkembangan dan perubahan masyarakat serta keragaman sosial budaya dalam rangka menemukan dan menumbuhkan jati diri bangsa di tengah-tengah kehidupan masyarakat dunia. Dengan pengetahuan sejarah diharapkan siswa memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat lingkungannya melalui pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah dan kebudayaan masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut tulisan ini bertujuan untuk (1) mengembangkan pembelajaran sejarah dengan Paradigma Pedagogi Reflektif pada materi sejarah maritim di SMA yang berhubungan dengan aspek *competence*, *conscience*, dan *compassion* dalam membangun potensi siswa menjadi pribadi yang utuh. (2) Menanamkan nilai kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat, melalui pemahaman nilai-nilai sejarah maritim dan budayanya. Untuk mewujudkannya diperlukan pembelajaran yang mampu mengaktifkan siswa untuk terlibat penuh dalam proses pembelajaran.

Paradigma Pedagogi Reflektif (PPR) adalah suatu pendekatan pembelajaran di mana guru mendampingi peserta didiknya berkembang menjadi pribadi yang utuh. Visi pendidikan menurut PPR tidak sekedar mengembangkan peserta didik mampu menguasai pengetahuan dan keterampilan, tetapi jauh lebih luas yaitu membantu peserta didik ke arah perkembangan sepenuh-penuhnya semua bakat anugerah Allah setiap pribadi anggota komunitas manusia (Ciri-ciri Khas Pendidikan pada Lembaga Pendidikan Jesuit, 1987:11).

Dengan demikian visi ini arah pendidikan tidak hanya mengembangkan salah satu segi atau beberapa segi kemanusiaan, melainkan mengembangkan sepenuh-penuhnya setiap peserta didik yang dipercayakan masyarakat kepada suatu lembaga pendidikan. Dalam implementasinya konsep ini sesuai dengan konsep pembelajaran kontekstual (*Contextual Teaching and Learning*) (Depdikbud, 2003). Melalui konsep pembelajaran ini hasil pembelajaran sejarah

maritim diharapkan akan lebih bermakna bagi peserta didik. Proses pembelajaran ini berlangsung dalam bentuk kegiatan peserta didik, di mana mereka bekerja dan mengalami, bukan hanya transfer pengetahuan. Proses belajar lebih dipentingkan daripada hasilnya. Dalam pemahaman konteks ini, peserta didik tahu untuk apa ia belajar dan apa makna belajar bagi dirinya. Dengan demikian diharapkan sadar apa yang mereka pelajari di kelas akan bermanfaat bagi hidupnya nanti.

B. PENDIDIKAN KARAKTER

Secara etimologis, kata karakter berasal dari bahasa Yunani yaitu *charsssein* yang berarti “*to engrave*” (Ryan and Bohlin , 1999 dalam Darmiyati Zuchdi dkk, 2012 : 16) yang diartikan mengukir, melukis, memahatkan, atau menggoreskan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata karakter diartikan dengan tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain, dan watak. Orang berkarakter berarti orang yang berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat atau berwatak. Dengan makna tersebut karakter identik dengan kepribadian atau akhlak.

Pendidikan karakter menurut Lickona (1991:51) dalam Darmiyati Zuchdi (2012) mengandung tiga unsur pokok yaitu *knowing the good* (mengetahui kebaikan), *desiring the good* (mencintai kebaikan), dan *doing the good* (melakukan kebaikan). Pendidikan karakter tidak sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, tetapi lebih dari itu pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (*habitation*) yang baik sehingga peserta didik paham, mampu merasakan, dan mau melakukan yang baik. Hal ini berkaitan erat dengan pendidikan moral dan akhlak.

Sekolah yang dipercaya oleh masyarakat untuk mendidik anak-anaknya merupakan media yang subur dalam penyemaian karakter. Tanggung jawab *stakeholder* sekolah terhadap karakter peserta didik adalah tanggung jawab duni-akhirat. Sekolah yang baik adalah sekolah yang mampu membentuk karakter peserta didiknya.

Pendidikan karakter di Indonesia didasarkan pada sembilan pilar karakter dasar yaitu (1) cinta kepada Allah dan alam semesta beserta isinya, (2) tanggung

jawab, disiplin dan mandiri, (3) jujur, (4) hormat dan santun, (5) kasih sayang, peduli, dan kerja sama, (6) percaya diri, kreatif, kerja keras dan pantang menyerah, (7) keadilan dan kepemimpinan, (8) baik dan rendah hati, dan (9) toleransi, cinta damai dan persatuan. Pendidikan tersebut dilakukan melalui pendidikan nilai. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter di Indonesia berasal dari empat sumber utama yaitu agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional.

Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi warganegara yang lebih baik yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sebagai warga negara. Nilai budaya digunakan untuk memaknai suatu konsep dan arti dalam komunikasi antaranggota masyarakat. Posisi budaya yang demikian penting dalam kehidupan bermasyarakat mengharuskan budaya menjadi sumber nilai dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa.

Kesemuanya itu didukung oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Hamid Hasan, 2010).

C. PARADIGMA PEDAGOGI REFLEKTIF

Paradigma Pedagogi Reflektif (PPR) adalah suatu paradigma pendidikan yang sudah sejak lama dilakukan dalam pendidikan Jesuit sejak tahun 1586 yang diambil alih dari suatu pendekatan Latihan Rohani Santo Ignatius Loyola (retret pribadi). Latihan rohani yaitu usaha orang untuk mengenal kehendak Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan sendiri. Model dan bimbingan yang terjadi dalam retret diambil alih dalam bidang pengajaran dan pendidikan ilmu pengetahuan dan nilai di lembaga pendidikan. Dalam lingkup pendidikan, retretan adalah peserta didik atau orang yang sedang belajar. Sedangkan yang dicari adalah ilmu pengetahuan,

keterampilan, dan nilai hidup yang dipelajari. Pembimbing retreat adalah guru/pendidik (Paul Suparno, 2015:18).

Dalam PPR, tujuan seluruh pendidikan adalah agar peserta didik menjadi manusia yang utuh, yang gembira dalam mengabdikan Tuhan lewat melayani sesamanya. Pribadi utuh menurut Pedro Arrupe, S.J., terjadi bila seseorang mau hidup bersama sesama (*people for and with other*) (Subagya, S.J., dkk., 2012 : 22). Keutuhan pribadi menurut Pedro Arrupe adalah bernuansa sosial yaitu peka dan rela membantu dan hidup bersama orang lain. Nilai kehidupan yang terdalem adalah bila orang hidup bagi orang lain.

Sebagai model pembelajaran, PPR menekankan siklus pembelajaran yang terdiri atas konteks, pengalaman, refleksi dan tindakan. Secara singkat akan dijelaskan kerangka dasar PPR sebagai berikut:

Konteks, dalam pembelajaran peserta didik diajak untuk mencermati konteks-konteks hidupnya guna mengenali faktor-faktor yang berpotensi mendukung atau menghambat proses pembelajaran yang dialaminya. Guru harus memulai proses pembelajarannya dari diri peserta didik dengan memahami sebanyak mungkin konteks-konteks yang melingkupinya sebagai subjek yang akan ditantang, didorong, dan didukung untuk mencapai perkembangan pribadi yang utuh. Konteks juga dapat berupa pengertian-pengertian yang dibawa seseorang peserta didik ketika memulai proses belajar. Pendapat dan pemahaman yang diperoleh sebelumnya atau dari lingkungannya merupakan konteks yang harus diperhatikan. Konteks sosio-ekonomis, politis, dan kebudayaan yang merupakan lingkungan hidup peserta didik dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik "sebagai manusia bagi orang lain".

Pengalaman, pada tahap ini peserta didik diajak untuk melakukan kegiatan yang memuat tidak hanya aspek kognitif (pemahaman) atas materi yang tengah disimak tetapi juga aspek afektif (perasaan/penghayatan) dan aspek konatif (niat/kehendak). Jadi keseluruhan pribadi (budi, rasa, dan kehendak) peserta didik diasah supaya mereka dapat memperoleh pengetahuan yang semakin utuh. Berdasarkan konteks-konteks yang telah dikenali pada tahap sebelumnya, guru menciptakan kondisi belajar yang memungkinkan peserta didik mengingat

pengalamannya yang berkaitan dengan bidang ilmu yang dibahas. Peserta didik didorong untuk menyaring fakta, menimbang perasaannya, dan memilih nilai-nilai yang telah mereka kenal terkait dengan bidang ilmu yang mereka simak. Pada tahap ini peserta didik diajak mencari pemahaman baru dengan melakukan perbandingan, kontras, evaluasi, analisis dan sintesis atas semua kegiatan mental psikomotorik untuk memahami realitas secara lebih baik. Pengalaman yang diolah berupa pengalaman hidup mereka sendiri (pengalaman langsung) atau pengalaman yang diperoleh lewat membaca atau mendengar (pengalaman tidak langsung).

Refleksi, menjadi unsur yang penting dalam pedagogi reflektif karena menjadi penghubung antara pengalaman dan tindakan. Refleksi juga merupakan suatu proses menuju perubahan pribadi yang dapat memengaruhi perubahan lingkup sekitarnya. Dengan refleksi, peserta didik diajak, didukung untuk mengadakan pertimbangan seksama dengan menggunakan daya ingat, pemahaman, imajinasi, dan perasaan menyangkut bidang ilmu, pengalaman, ide, tujuan yang diinginkan atau reaksi spontan untuk menangkap makna dan nilai hakiki dari apa yang dipelajari. Melalui refleksi, pengalaman peserta didik diharapkan menjadi bermakna hidupnya sehingga mendorong melakukan aksi.

Tindakan, adalah pertumbuhan batin yang mencakup dua tahap, yaitu pilihan-pilihan batin (hasil refleksi pengalaman) dan manifestasi lahiriahnya (perwujudan nyata) yang dapat dipertanggungjawabkan. Pilihan batin; pada tahap ini merupakan momentum bagi peserta didik untuk memilih kebenaran sebagai miliknya. Pilihan yang dinyatakan secara lahiriah; berdasarkan makna-makna hidup, sikap, nilai-nilai yang telah menjadi bagian dari dirinya, mendorong peserta didik berbuat sesuatu yang konsisten dengan keyakinan barunya. Kalau maknanya positif, peserta didik akan meningkatkan keadaan yang menimbulkan pengalaman yang bermakna positif. Kalau maknanya negatif, peserta didik akan berusaha memperbaiki, mengubah, mengurangi atau menghindari apa yang menimbulkan pengalaman negatif itu. Tindakan dalam pembelajaran, yang dimaksud adalah memaknai hasil pembelajaran dengan pikiran dan hati untuk mewujudkan pengetahuannya dalam praktik kehidupan nyata.

Evaluasi, terkait dengan tujuan pendidikan Yesuit adalah membentuk manusia yang berkepribadian utuh, kompeten secara intelektual, bersedia untuk selalu berkembang, bersikap religius, serta penuh kasih dan tekad untuk berbuat dalam pelayanan yang tulus kepada sesama umat Allah. Dalam pedagogi reflektif, pencapaian tujuan itu dilakukan dengan melakukan evaluasi yang menyeluruh pada aspek pengetahuan, perkembangan sikap, penentuan prioritas dan tindakan yang selaras dengan prinsip *men and women for and with others*.

Dalam praktiknya, pelaksanaan pembelajaran berbasis pedagogi reflektif mengacu pada tujuan pembelajaran yang meliputi 3 C (*Competence, Conscience, dan Compassion*). *Competence* adalah kemampuan kognitif dari ilmu yang dipelajari, *conscience* adalah kemampuan afektif untuk menentukan pilihan-pilihan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral, sedangkan *compassion* adalah kemampuan psikomotorik dan kemauan untuk mengembangkan bakat dan kemampuan yang dimiliki disertai dengan motivasi untuk menggunakannya demi orang lain (Pedoman Model Pembelajaran Berbasis Ignasian, 2008: 18). Dalam PPR peserta didik yang kompeten bukan hanya menjadi pandai tetapi sekaligus akan didorong untuk peka pada kebutuhan orang lain dan mau berbuat sesuatu berkaitan dengan bidangnya itu bagi kemajuan orang lain.

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, UU Sisdiknas 2003 pasal 3, diungkapkan secara umum manusia Indonesia yang diharapkan terjadi melalui pendidikan yaitu manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Manusia Indonesia yang diharapkan melalui pendidikan tersebut adalah manusia dewasa yang utuh dan berkepribadian.

D. IMPLEMENTASI PPR DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH MARITIM

Untuk meningkatkan pemahaman tentang wawasan kemaritiman bangsa Indonesia khususnya bagi para peserta didik diperlukan adanya kesamaan persepsi tentang konstelasi geografi negara Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan atau pemahaman tentang *archipelagic state yang diartikan sebagai “negara laut*

utama” yang ditaburi pulau-pulau yang dikelilingi laut (Adrian B. Lopian, 2011). Sudah saatnya bangsa Indonesia memandang laut sebagai sarana dan wahana untuk mewujudkan satu kesatuan wilayah negara dalam arti politik, hukum, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan serta merupakan salah satu medan juang dalam upaya pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Nilai-nilai kemaritiman seperti tanggung jawab, keberanian, kerjasama, kepedulian, kejujuran, tenggang rasa dan persatuan dapat ditransfer dan diwariskan kepada peserta didik. Salah satu cara untuk melakukan transfer nilai-nilai tersebut melalui pembelajaran sejarah. Dalam Kurikulum 2013, materi Sejarah Indonesia yang mengandung sejarah maritim dapat dilihat dari sejarah kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Nusantara sampai kerajaan Islam baik Demak maupun Samudera.

Penyampaian materi tersebut ditempuh dengan menggunakan tahapan-tahapan PPR seperti telah dijelaskan di depan.

Pada tahap konteks, guru menggali konteks peserta didik dengan mengajak mereka untuk mencermati konteks-konteks hidupnya tentang pembelajaran sejarah yang mereka miliki khususnya terkait materi sejarah maritim kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit sampai kerajaan Islam Demak dan Samudera. Pemahaman pengetahuan dan pendapat peserta didik tentang materi yang diperoleh sebelumnya baik dari sekolah maupun lingkungan hidupnya merupakan konteks yang harus diperhatikan. Konteks lingkungan hidup yang berupa latar belakang sosio-ekonomis dan politis peserta didik dapat memengaruhi perkembangan dirinya bagi orang lain.

Pada tahap pengalaman, peserta didik diajak untuk melakukan kegiatan yang melibatkan seluruh aspek baik kognitif (pemahaman), afektif (perasaan/penghayatan) dan aspek konatif (niat/kehendak) atas materi yang dipelajari. Jadi keseluruhan pribadi (budi, rasa, dan kehendak) peserta didik diasah supaya mereka memperoleh pengetahuan yang semakin utuh. Berdasarkan konteks-konteks yang telah dikenali pada tahap sebelumnya, guru dapat menggunakan ppt, video pembelajaran atau media lain tentang kerajaan-kerajaan

maritim yang sedang dipelajari untuk mengawali pengalaman mereka atas materi tersebut. Dengan kegiatan yang diciptakan guru, peserta didik didorong untuk menyaring fakta, menimbang perasaannya, dan memilih nilai-nilai yang telah mereka kenal terkait dengan kehidupan maritim yang dibahas. Selanjutnya peserta didik diajak mencari pemahaman baru dengan melakukan perbandingan, kontras evaluasi, analisis dan sintesis atas semua kegiatan mental psikomotorik untuk memahami realitas kehidupan maritim di Indonesia secara lebih baik.

Pada tahap refleksi, menjadi unsur yang penting PPR karena menjadi penghubung antara pengalaman dan tindakan. Refleksi juga merupakan suatu proses menuju perubahan pribadi yang dapat memengaruhi perubahan lingkup sekitarnya. Dengan bantuan pertanyaan reflektif dari guru, peserta didik diajak untuk melihat lebih menyeluruh dan mempertanyakan nilai serta makna bagi kehidupannya dan bagi orang lain. Misalnya guru dapat memberikan pertanyaan panduan sebagai berikut:

- a. Apakah materi Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Demak yang dipelajari bermakna bagi hidup Anda?
- b. Apakah materi Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Demak yang dipelajari bermakna bagi orang lain, masyarakat dan bangsa Indonesia?
- c. Nilai-nilai apakah yang Anda temukan dengan mempelajari materi kerajaan Sriwijaya, Majapahit dan Demak? Berikan alasanmu!
- d. Reaksi batin apakah yang muncul dalam diriku dengan mempelajari sejarah maritim tersebut? Apakah bahan itu memberi tantangan bagi diriku di masa depan? Tantangan apa?
- e. Pengalaman apakah yang menyentuh hati, kehendak, perasaan Anda? Apa akibatnya untuk hidup Anda?
- f. Adakah dorongan yang muncul pada diri Anda untuk melakukan sesuatu berdasarkan apa yang Anda pelajari?

Dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan reflektif di atas, peserta didik diajak, didukung untuk mengadakan pertimbangan seksama dengan menggunakan daya ingat, pemahaman, imajinasi dan perasaan menyangkut materi sejarah maritim Indonesia, pengalaman, ide, tujuan yang diinginkan atau reaksi spontan

untuk menangkap makna dan nilai hakiki dari tanggung jawab, keberanian, kejujuran, kerjasama, kepedulian, tenggang rasa dan persatuan dari apa yang dipelajari. Melalui refleksi, pengalaman peserta didik diharapkan menjadi bermakna sehingga mendorong diri melakukan aksi.

Pada tahap tindakan, pilihan-pilihan batin (hasil refleksi pengalaman) dan manifestasi lahiriahnya (perwujudan nyata) perlu dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hasil refleksinya peserta didik akan memilih kebenaran sebagai miliknya yang diungkapkan dalam bentuk pilihan-pilihan nilai yang menjadi bagian dari dirinya akan mendorongnya untuk berbuat sesuatu yang konsisten dengan keyakinan barunya tentang nilai-nilai kemaritiman yang dipelajari.

Dalam hal ini jika hasil refleksi bermakna positif maka peserta didik akan muncul upaya yang mendorong ke peningkatan yang lebih positif lagi. Demikian juga jika hasil refleksi bermakna negatif peserta didik akan berusaha memperbaiki, mengubah, atau menghindarinya. Seperti misalnya, kejayaan kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Demak serta kerajaan maritim lainnya, yang secara positif memanfaatkan laut sebagai sarana integrasi politik, militer, perdagangan, kebudayaan, pendidikan dan agama, serta kerja sama dengan negara-negara lain, akan mendorong peserta didik secara kritis menilai keberartian laut bagi suatu negara.

Laut dapat dijadikan ladang mata pencaharian, laut juga dijadikan sebagai tempat menggalang kekuatan dengan mempunyai armada laut yang kuat berarti bisa mempertahankan kerajaan dari serangan luar dan menggalang persatuan bangsa. Dengan mengoptimalkan potensi laut menjadikan bangsa Indonesia maju karena mempunyai potensi yang sangat besar untuk mengembangkan laut. Laut akan memberikan manfaat yang sangat vital bagi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian bangsa. Selain itu, pemahaman akan kelemahan yang ada pada kerajaan-kerajaan tersebut secara kritis, peserta didik melihat segi positif dan negatif kelemahan tersebut dengan menganalisis sendiri, bukan hanya sekedar mengikuti buku ataupun gurunya yang mengajar.

Melalui pemahaman nilai-nilai sejarah maritim yang dipelajari, tindakan peserta didik lebih pada kesadaran diri yang mendalam dan keinginan untuk

mengembangkan diri secara lebih baik dalam hidup bersama orang lain di masyarakat lingkungannya. Maka kehendak dan afeksinya menjadi berubah. Jelas di sini PPR sudah membantu peserta didik untuk semakin baik dan maju. Dalam kerangka nilai, peserta didik telah mengalami perkembangan karakter tertentu di antaranya nilai kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat. Bila kesadaran seseorang semakin baik, pandangan moralnya semakin baik, kesadaran untuk bertanggung jawab, peduli pada sesama semakin baik, maka perlahan-lahan akan mempengaruhi tindakan mereka sehari-hari. Dengan kata lain apa yang dirasakan, dipikirkan dan diyakini, akan diwujudkan dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu komitmen diri dalam hidup bersama orang lain (Paul Suparno, 2015: 38).

Secara menyeluruh peserta didik dikembangkan sebagai manusia yang utuh, yang berkembang baik segi kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Mereka menjadi manusia yang utuh dari kemampuan kognitif, suara hati dan kepekaan pada orang lain. Mereka berkembang bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain dan masyarakatnya.

Dalam pelaksanaannya, peserta didik diajak untuk merumuskan suatu komitmen dari pemaknaan pengalaman yang telah diperolehnya. Komitmen tersebut harus bersifat kongkrit bukan teoritis, abstrak, atau sekedar retorika belaka. Tindakan yang dirumuskan sifatnya operasional atau dapat diwujudkan dalam praktik hidup sehari-hari. Misalnya peserta didik diberi pertanyaan pemantik seperti “Apa komitmenmu untuk menjaga kelestarian laut?”

Pada tahap evaluasi, evaluasi dalam PPR dimaksudkan untuk melihat secara keseluruhan bagaimana seluruh proses pembelajaran yang terjadi. Dapat terjadi proses tidak berjalan lancar, sehingga hasilnya memang tidak kelihatan. Kegiatan evaluasi dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Evaluasi proses dilakukan dengan observasi terhadap aktivitas mahasiswa selama pembelajaran berlangsung, *performance*, portofolio, tugas kelompok dan evaluasi diri. Dalam Pedagogi Reflektif, pencapaian tujuan itu dilakukan dengan melakukan evaluasi yang menyeluruh pada aspek pengetahuan, perkembangan

sikap, penentuan prioritas dan tindakan yang selaras dengan prinsip *men and women for and with others*.

Evaluasi hasil dapat dilakukan dengan tes yang dilaksanakan pada akhir pokok bahasan. Selain itu guru juga akan membuat catatan-catatan penting bagi peserta didik yang berpartisipasi selama pembelajaran berlangsung. Penilaian dilakukan dengan mengacu pada kerangka konseptual pedagogi reflektif yaitu meliputi *competence*, *conscience*, dan *compassion* dengan bobot yang berbeda. Penentuan nilai mengacu pada kriteria yang berlaku di sekolah yang bersangkutan. Sebagai contoh berikut pertanyaan yang dapat dipakai untuk mengukur tingkat keberhasilan PPR.

Competence: Jelaskan faktor-faktor pendukung kejayaan maritim pada masa Sriwijaya, Majapahit dan Demak!

Conscience: Apa yang kamu rasakan setelah mempelajari kejayaan maritim bangsa Indonesia pada masa lalu apabila dibandingkan dengan kondisi saat ini?

Compassion: Apa yang akan kamu lakukan melihat penangkapan ikan yang merusak biota laut?

Untuk penilaian aspek *conscience* dan *compassion*, guru perlu melihat proses peserta didik melakukan refleksi atas pengalaman mereka. Refleksi inilah yang perlu dipantau untuk melihat sejauh mana peserta didik berkembang suara hatinya, kepekaannya. Maka instrumen penilaiannya yang lebih tepat adalah jurnal atau portofolio.

E. KESIMPULAN

Pengembangan pembelajaran sejarah dengan Paradigma Pedagogi Reflektif (PPR) pada materi sejarah maritim di SMA berpatokan pada tiga aspek yakni aspek *competence*, *conscience*, dan *compassion* dalam membangun potensi siswa menjadi pribadi yang utuh. Melalui pemahaman materi dan pemaknaan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti rasa tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, peduli, sikap juang dan persatuan dapat berkembang pada diri peserta didik.

Salah satu upaya menanamkan kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat yakni melalui penanaman nilai-nilai sejarah maritim dan budayanya. Melalui refleksi mengarahkan peserta didik untuk menemukan nilai-nilai kehidupan sehingga bisa merencanakan tindakan yang berguna bagi orang lain, bukan karena kepatuhan dan tradisi, namun pada kesadaran akan nilai kemanusiaan tanpa meninggalkan aspek kognitif. Dengan upaya itu peserta didik akan mampu membangun diri sendiri dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian B. Lopian. 2011. *Orang Laut Bajak Laut Raja Laut*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Ciri-ciri Khas Pendidikan pada Lembaga Pendidikan Jesuit*. 1987. Semarang: Provinsi Indonesia Sarikat Jesus.
- Darmiyati Zuchdi, dkk. 2012. *Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: UNY Press.
- Hamid, H, dkk. 2010. "Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa", *Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-nilai Budaya untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Puskur Balitbang Kemendiknas.
- P3MP-LPM.2012. *Pedoman Model Pembelajaran Berbasis Pedagogi Ignatian*. Yogyakarta: USD.
- Subagya, S.J. dkk. 2012. *Paradigma Pedagogi Reflektif*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Kanisius.
- Suparno, Paul. 2015. *Pembelajaran di Perguruan Tinggi Bergaya Paradigma Pedagogi Reflektif*. Yogyakarta: USD.
- UU RI no. 20. Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*.
- Wiryo Priyotamtama. 2008. Model Pedagogi Ignatian Ditinjau dari Komponen "Pengalaman" dan Pengaruh-pengaruh yang bisa Diharapkan dalam Widya Dharma, *Majalah Ilmiah Kependidikan*. Vol 19, No.1, Oktober 2008.



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Konferensi Nasional Sejarah X

Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta
7-10 November 2016

Menguatkan Visi Kemaritiman dalam
Pembelajaran Di Wilayah Pedalaman

Tsabit Azinar Ahmad



MENGUATKAN VISI KEMARITIMAN DALAM PEMBELAJARAN DI WILAYAH PEDALAMAN

Tsabit Azinar Ahmad

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

azinarahmad@mail.unnes.ac.id

ABSTRAK

Visi kemaritiman menjadi salah satu isu sentral yang tengah diusung oleh kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Perkembangan ini tentu saja berimbas dengan pengembangan aspek kemaritiman dalam berbagai bidang, tak terkecuali dalam bidang pendidikan. Sebagai bagian dari pendidikan nasional, mata pelajaran sejarah juga memiliki peran dalam menguatkan visi kemaritiman melalui pembelajaran sejarah maritim. Akan tetapi, pengembangan pembelajaran sejarah maritim bukan tanpa kendala, terutama apabila disampaikan pada wilayah yang tidak berada di kawasan pesisir. Oleh karena itu, tulisan fokus pada upaya untuk (1) menganalisis urgensi dan relevansi terhadap pembelajaran sejarah maritim dalam kurikulum mata pelajaran sejarah; (2) mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi pembelajaran sejarah maritim; (3) merumuskan gagasan dan strategi yang direkomendasikan dalam menerapkan pembelajaran sejarah maritim di wilayah yang tidak berbasis maritim. Secara umum, kurikulum pelajaran sejarah sangat terbuka untuk dikaitkan dengan konten-konten alternatif, termasuk sejarah maritim. Selain itu, sejarah maritim sebenarnya adalah proses yang tidak dapat dilepaskan dari sejarah nasional secara keseluruhan, sehingga keberadaan sejarah maritim dalam pembelajaran sejarah menjadi faktor yang melekat. Akan tetapi, pembelajaran sejarah maritim akan mengalami kendala ketika disampaikan pada wilayah-wilayah yang tidak bersinggungan langsung dengan aspek kemaritiman. Hal ini terjadi misalnya pada daerah yang ada di kawasan pedalaman atau pegunungan, notabene berbasis agraris. Pembelajaran sejarah maritim seolah menjadi sesuatu yang “asing” dan *out of context* ketika disampaikan. Namun demikian, bukan berarti hal ini menjadi argumen bahwa pembelajaran sejarah maritim tidak relevan untuk disampaikan kepada siswa yang memiliki konteks kultural yang berbeda. Sejarah maritim seolah menjadi *out of context* untuk disampaikan di wilayah pedalaman karena selama ini belum ada upaya dalam menerapkan strategi kontekstualisasi dalam pembelajarannya. Oleh karena itu, perlu ada strategi kontekstualisasi dalam pembelajaran sejarah maritim. Upaya pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan strategi *linking* dan *bridging* dalam pembelajaran sejarah. Dalam menerapkan strategi *linking*, prinsip yang perlu dipegang adalah kontinuitas, yakni bahwa tidak ada peristiwa sejarah yang berjalan sendiri. Artinya, akan selalu ada keterkaitan antarperistiwa pada kurun waktu yang sama. Dengan demikian, pembelajaran ditekankan untuk mencari hubungan antara peristiwa di pesisir dan pedalaman. Strategi kedua adalah *bridging*. Pada tahap ini, pembelajaran perlu menjembatani perbedaan kultur melalui upaya “menghadirkan” suasana kemaritiman ke dalam kelas. Strategi ini diterapkan dengan menerapkan “alih media” serta pemilihan metode belajar yang sesuai. Dengan demikian, diharapkan penguatan visi maritim dapat dilakukan di manapun dan kontekstual dalam lingkungan budaya yang beraneka ragam.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terluas di dunia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indonesia memiliki 17.504 pulau dan 12.827 desa tepi laut atau sekitar 15,6% dari seluruh desa/kelurahan yang ada.¹ Indonesia bahkan memiliki total garis pantai sepanjang 99.093 kilometer.² Kondisi geografis ini menjadi tantangan bagi kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Beberapa program telah dirancang, seperti penegakkan kedaulatan wilayah laut NKRI, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversity, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan.³

Penguatan Indonesia sebagai poros maritim dunia memerlukan dukungan dan penopang yang kuat. Untuk itu, ketika diselenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 *East Asia Summit* pada 13 November 2014, Presiden Joko Widodo menegaskan dalam pidatonya bahwa pembangunan akan difokuskan pada lima pilar utama, sebagai berikut.

- (1) Membangun kembali budaya maritim Indonesia; (2) Menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama; (3) Memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, *deep seaport*, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim; (4) Menerapkan diplomasi maritim, melalui usulan peningkatan kerja sama di bidang maritim dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara dan bukan memisahkan; (5) Membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.⁴

Upaya membangun kembali budaya maritim bertujuan agar masyarakat Indonesia memiliki landasan budaya dan nilai bahari yang kuat sebagai dasar pembangunan negara maritim.⁵ Salah satu bentuk penguatan budaya maritim adalah dengan menghadirkan perspektif historis tentang berbagai kehidupan maritim masyarakat. Aspek maritim dalam masyarakat berhubungan dengan interaksi manusia dan laut.

¹ Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indonesia memiliki 17.504 pulau walaupun menurut Badan Informasi Geospasial (2014), saat ini pulau yang terdaftar dan berkoordinat berjumlah 13.466 pulau. Lihat *Statistik Indonesia 2016* hlm. 3-4.

² *National Geographic Indonesia*. 2013. "Terbaru: Panjang Garis Pantai Indonesia Capai 99.000 Kilometer". Dalam <http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/10/terbaru-panjang-garis-pantai-indonesia-capai-99000-kilometer>. Diakses 1 Oktober 2016.

³ *presidenRI.go.id*. 2015. Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Dalam <http://presidenri.go.id/maritim/indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia.html>. Diakses 1 Oktober 2016.

⁴ *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*. 2014. "Presiden Jokowi Deklarasikan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia." Dalam <http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Presiden-Jokowi-Deklarasikan-Indonesia-Sebagai-Poros-Maritim-Dunia.aspx>. Diakses 1 Oktober 2016.

⁵ Singgih Tri Sulistiyono. 2009. "Historiografi Maritim Indonesia: Prospek dan Tantangan." *Makalah* dipresentasikan pada Seminar Nasional Musyawarah Wilayah II DIY – Jateng yang diselenggarakan oleh Keluarga Mahasiswa Jurusan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta, 8 Mei 2009.

Interaksi tersebut mencakup berbagai aspek seperti perdagangan, pelayaran, perkapalan, tradisi bahari, mitologi laut, perompakan, perikanan, hukum laut.⁶

Kehidupan maritim Indonesia dalam perspektif sejarah menjadi kajian yang perlu untuk diulas karena perkembangan masyarakat kita banyak berhubungan dengan laut. Laut pulalah yang membawa berbagai pengaruh peradaban besar ke kawasan Indonesia, yang mempengaruhi corak kehidupan masyarakat sampai saat ini. Pentingnya kemaritiman dalam kajian sejarah pernah diungkapkan oleh AB Lopian dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar.⁷ Ia mengungkapkan secara gamblang bahwa “jika berbicara tentang sejarah Nusantara maka mau tak mau aspek kelautan patut diperhatikan. ... berbicara tentang sejarah Nusantara, maka dengan sendirinya aspek maritim akan selalu menonjol.” Dengan kata lain, laut adalah pembuka sejarah bangsa Indonesia, bahkan aktivitas kehidupan masyarakat sejak awal penyebarannya, terjaidi di laut.⁸ Oleh karena itu, memperkuat budaya maritim tidak dapat dipisahkan dari kajian sejarah maritim yang ada di Indonesia.

Salah satu upaya memperkuat budaya maritim adalah melalui pendidikan. Dalam hal ini, sejarah maritim perlu disampaikan melalui pendidikan sejarah, baik di jalur formal di sekolah, jalur informal di keluarga, maupun jalur nonformal di masyarakat. Namun demikian, tulisan ini tidak akan menjelaskan seluruh jalur, tetapi fokus pada pembelajaran sejarah yang diterapkan di sekolah. Jalur formal di sekolah dipilih karena melalui jalur ini, pemerintah memiliki kekuasaan untuk menentukan kebijakan dan arah tujuan pendidikan sejarah. Selain itu, dalam pendidikan formal terdapat standarisasi yang menjadi acuan, yakni kurikulum. Kurikulum berfungsi sebagai arahan sekaligus landasan pijak untuk terjaminnya kesinambungan materi dengan tujuan pendidikan nasional.

Upaya menguatkan budaya maritim dalam pendidikan dilakukan melalui pembelajaran sejarah maritim. Pembelajaran sejarah maritim merupakan upaya terintegrasi untuk mengenalkan sejarah maritim secara luas di kalangan peserta didik. Melalui pembelajaran sejarah maritim, diharapkan terwujud kesepahaman terhadap identitas bersama sebagai bangsa bahari. Selain itu, pembelajaran sejarah maritim bermaksud agar masyarakat Indonesia memiliki kesadaran bahwa laut berperan sebagai variabel dependen terhadap perkembangan masyarakat. Untuk itu, isu-isu yang menjadi *concern* dalam sejarah maritim menjadi kajian yang diintegrasikan dalam pembelajaran sejarah. Dengan demikian, diharapkan masyarakat mampu mengambil makna tentang arti penting laut dan perairan dalam perkembangan sejarah Indonesia, sehingga penguatan budaya bahari dapat diterapkan.

⁶ Gusti Asnan. 2007. *Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. Hlm. 7.

⁷ A.B. Lopian. 1992. “Sejarah Nusantara Sejarah Bahari”. *Pidato Pengukuhan*. Diucapkan pada upacara penerimaan jabatan guru besar luar biasa Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada tanggal 4 Maret 1992. Hlm. 3.

⁸ Bambang Budi Utomo. 2014. “Awal Perjalanan Sejarah menuju Negara Kepulauan.” Dalam Dorothea Rosa Herliany, dkk (ed). *Arus Balik Memori Rempah dan Bahari Nusantara Kolonial dan Poskolonial*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. Hlm. 4.

Penerapan pembelajaran sejarah maritim tidaklah tanpa permasalahan. Walaupun Indonesia adalah negara kepulauan, tidaklah berarti budaya yang dimilikinya bersifat homogen. Susanto Zuhdi mengungkapkan bahwa perkembangan kerajaan-kerajaan awal di Asia Tenggara mengarah pada dua karakteristik. *Pertama*, negara-negara persungai/pesisir, meliputi kepulauan Indonesia, semenanjung Malaya, dan Filipina. *Kedua*, negara-negara persawahan di dataran rendah, seperti Burma, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Jawa.⁹ Dua pola kerajaan ini juga ditemukan di Indonesia, di mana pola persungai/pesisir mewariskan corak kehidupan maritim. Sementara itu, pola persawahan mewariskan corak kehidupan agraris.¹⁰ Perbedaan ini kemudian bermuara pada munculnya istilah wilayah pesisir dan wilayah pedalaman.¹¹

Perbedaan karakteristik masyarakat karena faktor budaya dan geografis inilah yang menjadi tantangan utama pelaksanaan pembelajaran sejarah maritim. Pembelajaran sejarah maritim akan mengalami kendala ketika disampaikan pada wilayah-wilayah yang tidak bersinggungan langsung dengan aspek kemaritiman. Hal ini menyebabkan pembelajaran sejarah maritim seolah menjadi sesuatu yang “asing” dan *out of context* ketika disampaikan. Akan tetapi, hal ini tidak seketika memunculkan alasan bahwa pembelajaran sejarah maritim tidak perlu diajarkan di daerah pedalaman. Pembelajaran sejarah maritim tetap perlu disampaikan untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh terhadap realitas sejarah di Indonesia yang tidak dapat lepas dari laut. Pembelajaran sejarah maritim juga berpotensi memperkenalkan keragaman sejarah dan budaya bagi peserta didik yang tidak secara langsung bersentuhan dengan aspek kemaritiman. Dengan demikian, diharapkan tumbuh sikap saling memahami dan menghargai perbedaan sejarah dan kebudayaan masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan pada pemikiran di atas, tulisan ini terfokus pada upaya menerapkan pembelajaran sejarah maritim, terutama di wilayah pedalaman yang tidak bersinggungan langsung dengan aktivitas kemaritiman.

URGENSI & RELEVANSI PEMBELAJARAN SEJARAH MARITIM

Kehidupan maritim dalam sejarah dunia menempati posisi yang istimewa. Lincoln Paine mencatat sektor maritim telah mampu menjadi penggerak sejarah umat manusia. Ia berpendapat bahwa nenek moyang manusia telah mampu melakukan adaptasi teknologi dan sosial agar mampu hidup di kawasan perairan, seperti misalnya

⁹ Susanto Zuhdi. 2006. “Laut, Sungai dan Perkembangan Peradaban: Dunia Maritim Asia Tenggara, Indonesia dan Metodologi Strukturalis.” *Makalah*. Disampaikan dalam Konferensi Nasional Sejarah VIII, Jakarta 14-16 November 2006. Hlm.4

¹⁰ *Ibid*. Hlm. 7

¹¹ Dalam konteks Jawa, daerah pesisir merujuk pada kawasan yang ada di daerah pantai utara Jawa, seperti Surabaya, Semarang, Tegal, Rembang, Pati. Sementara daerah pedalaman merujuk pada kawasan mancanegara, seperti daerah Kediri, Pacitan, Ngawi, Kebumen, Wonosobo, Banjarnegara, serta Banyumas. Lihat Mudjahirin Thohir. 1999. *Wacana Masyarakat dan Kebudayaan Jawa Pesisiran*. Semarang: Penerbit Bendera. Lihat juga Wasino. 2005. *Tanah, Desa, dan Penguasa: Sejarah Pemilikan dan Penguasaan Tanah di Pedesaan Jawa*. Semarang: Unnes Press. Hlm. 18-19.

perdagangan, peperangan, eksplorasi, dan migrasi.¹² Ia mengambil contoh dari persebaran Islam yang sangat dipengaruhi oleh penjelajahan samudera. Kemudian, ada pula kajian Fernand Braudel yang mengkaji tentang arti penting laut bagi masyarakat di kawasan Mediterania.¹³ Menurut Braudel, laut turut serta membentuk manusia di sana. Laut juga menyediakan sarana untuk mempersatukan masyarakat yang tersebar di berbagai titik, juga menjadi sarana pengangkutan dan perdagangan. Laut juga menyediakan tantangan yang mengharuskan masyarakat untuk menaklukkannya. Hal ini berlaku pula untuk Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Laut telah membentuk sejarah Indonesia sejak ribuan tahun yang silam sampai saat ini.

Kajian kemaritiman dalam perspektif sejarah memiliki arti strategis dalam membangun budaya bahari Indonesia. Singgih Tri Sulistiyono dkk. mencatat ada beberapa arti penting kajian atas sejarah maritim.¹⁴ *Pertama*, didukung dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan terbesar, terdapat berbagai kelompok etnik yang selama berabad-abad telah menggunakan laut sebagai wahana untuk saling berkomunikasi. Sejarah maritim menjadi wahana untuk membangkitkan kesadaran sebagai sebuah bangsa. *Kedua*, aspek maritim yang telah melekat di masyarakat Indonesia selama ribuan tahun. Dengan demikian, telah terbentuk seperangkat nilai yang mampu menjaga eksistensi dan kontinuitas masyarakat. Dengan demikian, sejarah maritim berperan sebagai media sosialisasi dan enkulturasi nilai-nilai budaya bahari bagi masyarakat. Berbagai nilai tersebut sangat berperan dalam menumbuhkan kearifan masyarakat terhadap pengelolaan bahari. *Ketiga*, masyarakat maritim yang berkembang di kepulauan Indonesia telah menjalin hubungan selama berabad-abad. Di sini, sejarah maritim mampu memberikan contoh nyata tentang komunikasi lintas budaya (*cross-cultural communication*) antara satu komunitas dengan komunitas yang lain sebagai dasar integrasi di kalangan masyarakat. Di sini dicontohkan tentang nilai egaliter dan keterbukaan sebagai prasyarat terbentuknya integrasi.

Pembelajaran sejarah maritim yang diberikan di sekolah bermanfaat agar kehidupan manusia di masa lalu dapat dipahami secara utuh dan menyeluruh. Hal ini berfungsi agar peserta didik mampu menghargai arti penting laut dan perairan dalam perkembangan masyarakat Indonesia. Penghargaan atas eksistensi dan kontribusi laut dalam membentuk kebudayaan Indonesia menjadi satu prasyarat terwujudnya kelestarian budaya dan lingkungan di masa kini dan mendatang. Namun demikian, apakah hal ini berlaku untuk daerah pedalaman?

Bagi daerah di pedalaman, pembelajaran sejarah maritim juga memiliki peran untuk melihat interaksi dan resiprositas antara masyarakat pesisir dan pedalaman. Hal

¹² Lincoln Paine. 2013. *The Sea and Civilization: A Maritime History of the World*. New York: Alfred. A. Knopf.

¹³ Fernand Braudel. 1972. *The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II*. Volume I. Diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh Sian Reynolds. New York: Harper & Row. Hlm. 276.

¹⁴ Singgih Tri Sulistiyono, dkk. 2005. "Model Sosialisasi dan Enkulturasi Nilai-Nilai Kebaharian untuk Memperkuat Integrasi Indonesia sebagai Negara Maritim melalui Pengajaran Sejarah dan Budaya Maritim Nusantara di Sekolah Dasar." *Laporan Penelitian*. Fakultas Sastra Universitas Diponegoro. Hlm. 2-3.

ini karena baik masyarakat yang tinggal di pesisir maupun di pedalaman ternyata hidup dalam sebuah ketergantungan akan laut.¹⁵ Ke dua kelompok masyarakat tersebut hidup dalam kondisi hubungan yang resiprokal, bahkan pada titik tertentu ada hasrat untuk saling mengendalikan. Oleh karena itu, pembelajaran sejarah maritim juga berperan untuk melihat seberapa penting peran laut bagi masyarakat pedalaman. Hal ini bermuara pada penguatan tentang kontribusi laut dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Pentingnya aspek kemaritiman dalam masyarakat Indonesia yang tertuang dalam sejarah maritim pada dasarnya memiliki relevansi dalam pelajaran sejarah di sekolah. Beberapa aspek dominan dari kajian maritim yang terintegrasi dengan struktur kurikulum terutama dalam aspek (1) perniagaan,¹⁶ (2) pelayaran dan eksplorasi,¹⁷ (3) persilangan budaya dan inkorporasi gagasan, (4) peperangan dan perlawanan,¹⁸ dan (5) penguasaan wilayah dan politik kelautan.¹⁹ Hal ini tampak dari materi yang ada dalam buku pegangan untuk kurikulum 2013.

Tabel 1. Kompetensi Dasar (KD) Kurikulum 2013 & Kesesuaian Aspek Kemaritiman²⁰

Kelas	Kompetensi Dasar	Aspek Kemaritiman	Materi yang sesuai
X	3.3 Menganalisis asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia (Proto, Deutero Melayu dan Melanesoid).	Persilangan budaya dan inkorporasi gagasan	Persebaran proto dan deutro melayu.
	3.5 Menganalisis berbagai teori tentang proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia.	1. Perniagaan 2. Persilangan budaya dan inkorporasi gagasan	Proses Indianisasi
	3.6 Menganalisis karakteristik kehidupan masyarakat,	1. Perniagaan 2. Peperangan dan	Sriwijaya sebagai negara maritim

¹⁵ Bambang Budi Utomo. *Op.cit.* Hlm. 3.

¹⁶ Aspek ini terutama berhubungan dengan kepemilikan modal, sistem perdagangan, komoditas-komoditas perdagangan, sumber-sumber penghasil barang, serta perkembangan pelabuhan. Lihat A.B. Lopian. 2008. *Pelayaran dan Perniagaan Nusantara abad ke-16 dan 17*. Depok: Komunitas Bambu. Hlm. 59-88.

¹⁷ Aspek ini berhubungan dengan teknologi pelayaran, jenis-jenis kapal, serta jalur-jalur pelayaran. *Ibid.* hlm. 1-40.

¹⁸ Aspek ini berhubungan dengan *naval power* atau kekuatan armada laut dan konflik yang terjadi di lautan. Lihat Abd Rahman Hamid. 2015. *Sejarah Maritim Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. Hlm. 27.

¹⁹ Aspek ini berhubungan dengan *sea power* atau penguasaan atas wilayah laut atau untuk menjamin kelancaran pelayaran dan perdagangan, serta kebijakan politik tentang laut. *Ibid.* hlm. 27

²⁰ Diolah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013a. *Sejarah Indonesia SMA/MA/SMK/MAK Kelas X Semester 1*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013b. *Sejarah Indonesia SMA/MA/SMK/MAK Kelas X Semester 2*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014a. *Sejarah Indonesia SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Semester 1*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014b. *Sejarah Indonesia SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Semester 2*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. *Sejarah Indonesia SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kelas	Kompetensi Dasar	Aspek Kemaritiman	Materi yang sesuai
	pemerintahan, dan kebudayaan pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini.	3. Penguasaan wilayah dan politik kelautan	
	3.7 Menganalisis berbagai teori tentang proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia.	1. Perniagaan 2. Persilangan budaya dan inkorporasi gagasan	Proses Islamisasi
	3.8 Menganalisis karakteristik kehidupan masyarakat, pemerintahan dan kebudayaan pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dan menunjukan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini.	1. Perniagaan 2. Peperangan dan perlawanan, 3. Penguasaan wilayah dan politik kelautan	Kerajaan-kerajaan Islam: Banten, Ternate, Tidore, Gowa.
XI	3.2 Menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Barat (Portugis, Belanda, Inggris) di Indonesia.	1. Perniagaan, 2. Pelayaran dan eksplorasi, 3. Persilangan budaya dan inkorporasi gagasan, 4. Penguasaan wilayah dan politik kelautan.	Komoditas perdagangan; jalur pelayaran portugis dan spanyol; proses Kristenisasi; VOC; tanam paksa; pelayarna masa kolonial
	3.3 Menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Barat di Indonesia sebelum dan sesudah abad ke-20.	1. Peperangan dan perlawanan	Perlawanan terhadap kolonialisme
	3.6 Menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia	1. Peperangan dan perlawanan, 2. Penguasaan wilayah dan politik kelautan.	Perang Dunia II dan Pendudukan Jepang
XII	3.4 Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Liberal	Penguasaan wilayah dan politik kelautan	Deklarasi Djuanda dan konsep wawasan nusantara
	3.5 Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin	Peperangan dan perlawanan	Pertempuran laut Aru

Tabel di atas menunjukkan bahwa di setiap jenjang, terdapat aspek kemaritiman yang menjadi wahana memperkuat pemahaman tentang arti penting laut. Hal ini tampak dari

adanya beberapa KD yang memiliki kesesuaian dengan aspek-aspek kemaritiman. Dengan demikian dalam kurikulum 2013 sebenarnya sudah mengakomodasi materi-materi sejarah maritim. Ditinjau dari aspek penguatan budaya maritim, hal ini merupakan potensi sekaligus peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pondasi Indonesia sebagai poros maritim dunia.

HAMBATAN PEMBELAJARAN SEJARAH MARITIM

Pelaksanaan pembelajaran sejarah maritim tidaklah tanpa hambatan. Ada beberapa permasalahan yang sampai saat ini menjadi pekerjaan rumah agar segera diselesaikan. Untuk memudahkan analisis, hambatan dapat ditinjau dari tiga aspek: historiografis, pedagogis, dan geografis. *Pertama*, ditinjau dari aspek historiografis, Singgih Tri Sulistiyono menjelaskan bahwa “Penulisan sejarah maritim Nusantara masih ketinggalan jika dibandingkan dengan penulisan jenis sejarah yang lain seperti sejarah pedesaan dan agraria, sejarah politik, sejarah ekonomi, dan sebagainya. Ketinggalan itu juga semakin terasa jika dibandingkan dengan kemajuan penulisan sejarah maritim di negara-negara lain.”²¹ Ketinggalan ini berkaitan dengan belum tereksplorasinya tema-tema yang berhubungan dengan aspek kemaritiman.

Ketinggalan dalam aspek penulisan sejarah semakin menguat ketika dihadapkan pada realitas hubungan antara pesisir dan pedalaman. Dari berbagai referensi tentang sejarah maritim Indonesia yang ada pada saat ini, hubungan antara daerah pesisir dan pedalaman masih mendapatkan porsi yang sedikit. Sedikitnya kajian yang menghubungkan antara daerah pesisir dan pedalaman berdampak pada terbatasnya akses guru di daerah pedalaman untuk membangun kontekstualisasi atas sejarah maritim.

Aspek kedua yang menjadi hambatan pelaksanaan pembelajaran sejarah maritim adalah faktor pedagogis. Keterbatasan aspek pedagogis meliputi beberapa komponen, seperti (1) faktor kebijakan, (2) faktor guru-guru sejarah, (3) faktor media dan sumber belajar; (4) faktor siswa. Ditinjau dari faktor kebijakan, walaupun konten sejarah maritim telah terintegrasi di dalam materi yang diajarkan, belum ada upaya terintegrasi dalam penyampaian. Aspek maritim selama ini hanya melekat dalam materi yang lain. Artinya, belum ada kajian khusus tentang aspek kemaritiman yang ada pada tiap periode. Sampai saat ini, masih ada sekolah yang belum menerapkan kurikulum 2013. Akibatnya, pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan sama sekali tidak ada mata pelajaran sejarah. Di SMK yang masih menerapkan kurikulum 2006, yang tersedia hanyalah mata pelajaran IPS, di mana materi kesejarahan hanya membahas pergerakan nasional.²²

Ditinjau dari faktor guru, pembelajaran sejarah maritim pada dasarnya bukanlah kajian yang sama sekali baru. Namun demikian, bekal teoretis tentang aspek kemaritiman masih belum maksimal. Lemahnya aspek teoretis dan konseptual tentang

²¹ Singgih Tri Sulistiyono. 2009. *Op.cit.* Hlm. 14.

²² Korespondensi elektronik dengan Azizah Ariani, S.Pd.Gr., Guru IPS di SMK Mandiraja, Banjarnegara tanggal 9 September 2016.

sejarah maritim disebabkan perkembangan historiografi yang masih belum maksimal. Pengembangan mata kuliah sejarah maritim bagi calon guru di perguruan tinggi keguruan dianggap belum menjadi prioritas, termasuk pada perguruan tinggi tempat penulis mengajar di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Semarang. Di sini calon-calon guru yang sebagian besar dari daerah pesisir tidak mendapatkan kuliah tentang sejarah maritim sebagai bekal untuk mengkaji berbagai aspek kemaritiman secara teoretis dan konseptual.

Apabila perguruan tinggi keguruan di daerah pesisir belum menaruh perhatian terhadap kajian kemaritiman, lantas bagaimana dengan perguruan tinggi keguruan di daerah pedalaman? Di beberapa perguruan tinggi keguruan yang ada di daerah pedalaman seperti Program Studi Pendidikan Sejarah di Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan Universitas Sebelas Maret Surakarta.²³ Belum dimasukkannya mata kuliah khusus tentang kemaritiman dilatarbelakangi oleh permasalahan relevansi kajian dengan konteks lokalitas yang berkembang. Namun demikian, ketika saat ini aspek kemaritiman tengah menjadi prioritas nasional, perubahan atas kurikulum di perguruan tinggi keguruan sepatutnya menjadi kebutuhan.

Ketersediaan media pembelajaran dan sumber belajar tentang aspek kemaritiman menjadi komponen yang berpengaruh terhadap kesuksesan pembelajaran. Di sini, media dan sumber belajar berperan dalam menumbuhkan visualisasi guru dan peserta didik terhadap berbagai aktivitas kebaharian. Namun demikian, ternyata akses bagi guru dan siswa tentang media pembelajaran dan sumber belajar yang kredibel masih terkendala.²⁴ Guru-guru mengaku masih mengalami hambatan untuk mencari referensi yang lengkap tentang kehidupan maritim di masa lalu yang bersifat komprehensif.

Ditinjau dari faktor siswa, ada permasalahan budaya menjadi penghambat ketercapaian tujuan pembelajaran sejarah maritim secara optimal. Bagi siswa yang berasal dari daerah pedalaman, wawasan terhadap budaya dan kearifan lokal kemaritiman nyaris tidak ada.²⁵ Selain itu, gambaran kehidupan bahari seperti aktivitas pelayaran dan pelabuhan masih bersifat abstrak.²⁶ Namun demikian, ternyata permasalahan tentang tidak akrabnya siswa dengan budaya maritim tidak hanya terjadi di daerah pedalaman. Di daerah yang masih tergolong pesisir, masih terdapat pemahaman yang rendah terkait sejarah maritim. Penelitian Nur Achmad Haryanto terhadap masyarakat Desa Bajing Meduro, Desa Babaktulong, dan Desa Dasun, yang mewakili sebagian besar karakteristik masyarakat Rembang menunjukkan tingkat

²³ Korespondensi elektronik dengan Arifin Suryo Nugroho, M.Pd., Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada 9 September 2016. Korespondensi elektronik dilakukan pula dengan Prof. Dr. Hermanu Joebagio, M.Pd., Profesor sejarah dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret, Surakarta 9 September 2016.

²⁴ Korespondensi elektronik dengan Sri Utari, S.Pd, Guru Sejarah di SMA N 1 Banjarnegara pada 9 September 2016.

²⁵ Korespondensi elektronik dengan Arifin Suryo Nugroho, M.Pd., 9 September 2016.

²⁶ Korespondensi elektronik dengan Heni Purwono, M.Pd., Guru Sejarah SMA N 1 Sigaluh Banjarnegara sekaligus Ketua MGMP Sejarah Kabupaten Banjarnegara pada 9 September 2016.

kesadaran sejarah kemaritiman yang rendah atau cukup memprihatinkan.²⁷ Faktor-faktor yang turut mempengaruhi rendahnya kesadaran sejarah masyarakat pesisir terhadap aspek kemaritiman diduga karena tidak adanya tradisi tutur yang berkembang pada masyarakat Rembang, sehingga sejarah lokal yang dimiliki para generasi pendahulunya tidak dapat diwariskan ke generasi berikutnya. Di satu sisi, belum ada muatan lokal khusus sejarah tentang kemaritiman di wilayah Rembang pada kurikulum pendidikan dan minimnya sosialisasi tentang sejarah kemaritiman di Rembang.

Selain aspek historiografis dan pedagogis, ada pula hambatan ditinjau dari aspek geografis. Hambatan ini terutama terjadi pada kawasan yang secara geografis dan kultural memiliki perbedaan dengan daerah pesisir yang berbasis maritim. Perbedaan ini mengakibatkan adanya permasalahan untuk membangun kontekstualisasi dan visualisasi. Permasalahan dalam membangun kontekstualisasi meliputi ketidakmampuan menghubungkan salingketerkaitan antara daerah pesisir dan pedalaman. Hal ini sangat mungkin terjadi karena tidak tersedia contoh-contoh di sekitar lingkungan tempat tinggal siswa atau sekolah yang dapat dijadikan sebagai *best practices*. Ketika pembelajaran terhambat untuk dapat mengaitkan konteks lokalitas sekitar dengan aspek kemaritiman, akibatnya muncul permasalahan dalam membangun visualisasi atas aktivitas masyarakat di masa lalu yang berhubungan dengan bahari.

Permasalahan-permasalahan di atas turut menjadi faktor yang perlu dibenahi agar pembelajaran sejarah maritim mampu berperan sebagai wahana penumbuhan budaya maritim yang kokoh di masyarakat.

MENGAGAS PEMBELAJARAN SEJARAH MARITIM DI PEDALAMAN

Pengembangan sejarah maritim, terutama untuk daerah pedalaman dapat ditinjau dari dua segi. *Pertama*, pengembangan dari aspek konten. Pada aspek ini, strategi utama yang dilakukan adalah *linking*, yakni mencari keterhubungan, kesinambungan, dan resiprositas antara daerah pesisir dan daerah pedalaman. Secara teknis, aspek ini mencakup perumusan dari segi tujuan pembelajaran, materi, dan sumber-sumber yang mendukung pengajaran sejarah maritim.

Kedua, pengembangan dari aspek konteks. Pada aspek ini, strategi utama yang diketengahkan adalah *bridging*. Strategi *bridging* merupakan upaya untuk menjembatani perbedaan budaya antara daerah pesisir dan pedalaman melalui upaya “menghadirkan” suasana kemaritiman ke dalam kelas. Pada aspek ini, secara teknis dilakukan penguatan atas faktor guru, strategi pembelajaran, dan fasilitas penunjang. Penguatan dua aspek ini menjadi prasyarat mutlak dalam pengembangan pembelajaran sejarah maritim.

Pengembangan pertama dengan menerapkan strategi *linking* menekankan aspek *content* atau esensi pembelajaran. Pada aspek ini pertama-tama perlu dirumuskan kesepahaman terhadap relevansi sejarah maritim dalam pembelajaran di pedalaman.

²⁷ Nur Achmad Haryanto. 2010. “Kesadaran Masyarakat dan Siswa Sekolah Dasar terhadap Sejarah Maritim di Kabupaten Rembang.” *Skripsi*. Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang.

Asumsi dasar yang dikembangkan adalah “tidak ada peristiwa sejarah yang berjalan sendiri.” Artinya, akan selalu ada keterkaitan antarperistiwa pada kurun waktu yang sama. Dengan demikian, pembelajaran ditekankan untuk mencari hubungan antara peristiwa di pesisir dan pedalaman, serta bagaimana kontribusi daerah pedalaman terhadap aktivitas di pesisir. Asumsi ini kemudian diturunkan dan dikonsepsikan dalam tujuan pembelajaran. Tujuan yang hendak dicapai secara umum adalah pengetahuan, kesadaran, dan perilaku yang bijak terhadap laut yang memiliki kontribusi terhadap perkembangan bangsa Indonesia secara keseluruhan, baik di pesisir maupun di pedalaman. Dengan demikian, laut sebagai pemersatu tidak hanya menjadi slogan semata, tetapi juga bisa berdampak dan dirasakan kehadirannya.

Upaya memperkuat asumsi bahwa selalu ada keterhubungan antarperistiwa sejarah yang ada di daerah pedalaman dan pesisir adalah dengan menghadirkan keduanya secara bersama-sama. Untuk itu, perlu dihadirkan fakta yang memperkuat bahwa ke dua daerah tersebut tidaklah dapat dipisahkan. Fakta pertama adalah “laut merupakan pintu gerbang perubahan”. Melalui lautan, daerah-daerah pedalaman mendapatkan sentuhan-sentuhan baru seperti masuknya kepercayaan-kepercayaan dari luar, seperti Hindu, Budha, Islam, maupun Kristen. Salah satu bukti yang memperkuat ini adalah bahwa peninggalan-peninggalan candi yang tertua di Jawa justru terdapat di daerah pegunungan Dieng pada awal abad VIII.²⁸ Hal ini sangat dimungkinkan karena daerah pedalaman yang berupa pegunungan menjadi tempat yang sesuai dalam pembangunan bangunan suci. Oleh karenanya, perkembangan daerah pedalaman menjadi sangat dimungkinkan. Lincoln Paine mengungkapkan bahwa adalah hal yang luar biasa Indonesia saat ini adalah negara dengan pemeluk Islam terbesar di dunia. Islam sebagai agama yang muncul dari daerah gurun tersebar secara luas justru menjadi agama mayoritas di daerah kepulauan.²⁹

Fakta kedua yang perlu diperkuat adalah “selalu terdapat keterkaitan antara laut, daerah pesisir, dan daerah pedalaman”. Fakta ini penting untuk disampaikan agar masyarakat dan peserta didik di daerah pedalaman memahami bahwa laut menjadi bagian yang turut mempengaruhi kehidupan mereka. Upaya menguatkan fakta ini dilakukan dengan menghadirkan data dalam aspek perniagaan terdapat beberapa jaringan perdagangan, yakni (1) perdagangan antara daerah pantai dan pedalaman, (2) perdagangan antardaerah pantai, (3) perdagangan dengan pulau-pulau lepas pantai; (4) perdagangan dengan seberang laut.³⁰ Hubungan dagang yang terjalin antara daerah pedalaman dan pesisir disebabkan beberapa komoditas penting yang diperjualbelikan di pasa internasional adalah barang-barang yang berasal dari pedalaman, seperti *benzoin* (bahan kemenyan), kamfer, kayu dan hasil-hasil hutan, barang-barang tambang, serta

²⁸ Supratikno Raharjo. 2002. *Peradaban Jawa Dinamika Pranata Politik, Agama, dan Ekonomi Jawa Kuno*. Depok: Komunitas Bambu. Hlm. 259.

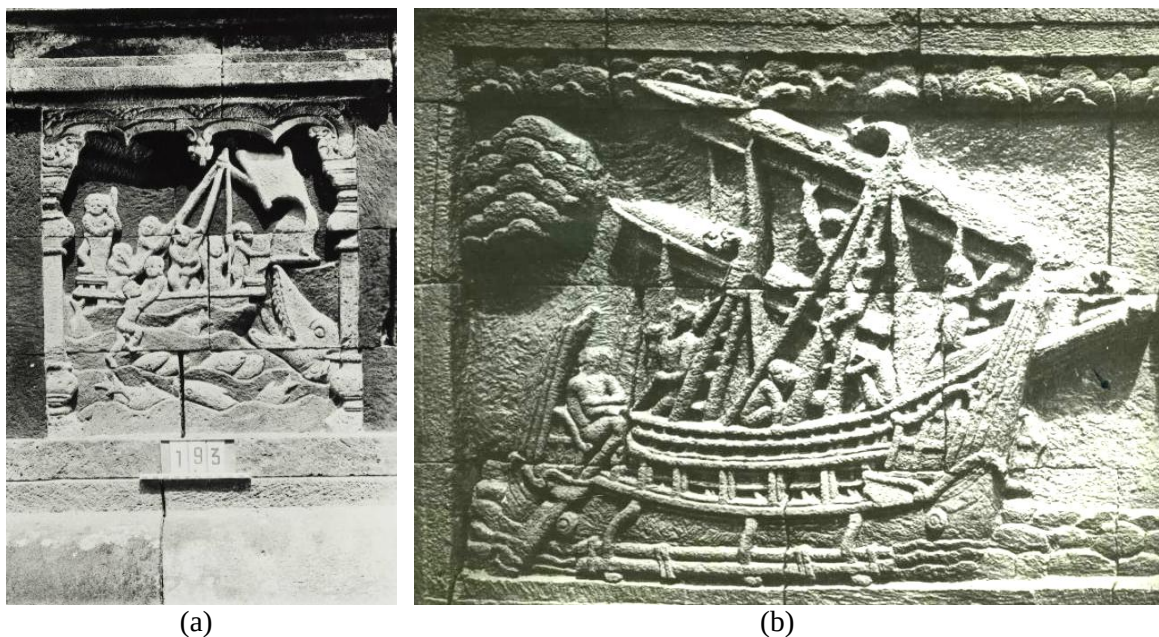
²⁹ Lincoln Paine. *Loc.cit.*

³⁰ Gusti Asnan. *Op.cit.* Hlm. 143.

beras dan bahan-bahan makanan.³¹ Sementara itu, komoditas yang dibawa dari pesisir ke pedalaman antara lain kain, garam, tembakau Cina, opium, dan berbagai barang besi. Di sini sungai memiliki peran yang menghubungkan antara pesisir dan pedalaman.

Daerah pedalaman menjadi penopang daerah penghasil rempah. Hal ini terjadi karena di daerah penghasil rempah prioritas masyarakat lebih cenderung untuk tidak menanam tanaman pangan. Oleh karenanya, tanaman pangan didatangkan dari daerah lain, termasuk daerah pedalaman. Dengan demikian, daerah pedalaman berperan menjaga siklus produksi yang dilakukan oleh masyarakat di daerah penghasil rempah yang menjadi faktor penarik perdagangan dan pelayaran samudera.

Selain upaya saling memenuhi kebutuhan antara daerah pedalaman dan pesisir, ada pula bukti yang menguatkan bahwa aspek kemaritiman telah dikenal di daerah pedalaman. Hal ini tampak dari adanya relief yang menceritakan aktivitas kemaritiman di Borobudur. Selain itu, dalam prasasti bertanggal 17 Mei 827 yang ditemukan di kaki Gunung Sumbing (Temanggung, Jawa Tengah) disebutkan adanya jabatan nahkoda kapal (*Dan Puhāwan Glis*) dari Sumatera yang memberikan persembahan kepada *sīma*-nya.³²



Keterangan

(a) Foto relief tentang aktivitas pelayaran

(b) Foto relief perahu bercadik di Borobudur

Gambar 1. Salah satu relief di Borobudur tentang aktivitas kemaritiman
(Sumber: kitlv.nl)

³¹ *Ibid.* Hlm. 144-151. Lihat juga A.B. Lopian. *Op.cit.* hlm 79-95; Sartono Kartodirdjo. 2014. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 dari Emporium sampai Imperium*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. Hlm. 10-12, 145.

³² Bambang Budi Utomo. *Op.cit.* Hlm. 15.

Lekatnya laut dalam masyarakat pedalaman dapat pula dilihat dari adanya mitologi tentang Nyai Lara Kidul. Eksistensi laut memiliki keterkaitan dengan pendirian kerajaan Mataram yang ada di pedalaman. Upaya itu dilakukan oleh Sutawijaya atau Panembahan Senapati yang memiliki hubungan gaib dengan penguasa pantai selatan Jawa. Sartono Kartodirdjo menafsirkan bahwa hubungan ini ditafsirkan sebagai “dwi tunggal antara daratan dan laut”.³³ Hal ini menjadi faktor yang memperkuat konsepsi tentang tanah air.

Tiap periode ada beberapa materi yang memiliki tema yang sama. Materi-materi tersebut bertema: (1) perniagaan, (2) pelayaran dan eksplorasi, (3) persilangan budaya dan inkorporasi gagasan, (4) peperangan dan perlawanan, dan (5) penguasaan wilayah dan politik kelautan. Ke lima materi ini dapat dikembangkan secara fleksibel pada tiap periodisasi dan diintegrasikan pada tiap KD.

Pengembangan materi perlu didukung dengan sumber-sumber yang memadai. Pada pengembangan sumber, ada beberapa buku yang layak direkomendasikan. Buku yang direkomendasikan meliputi: (1) konsep-konsep sejarah maritim dan (2) aspek-aspek kemaritiman dalam perspektif sejarah. Kajian atas konsep-konsep sejarah maritim dilakukan untuk mengetahui aspek teoretis tentang arti penting laut dan perairan bagi kehidupan masyarakat. Beberapa referensi yang dapat digunakan adalah buku *Sejarah Maritim Indonesia* karya Abd Rahman Hamid. Selain itu, bahkan ada referensi yang dapat diakses secara online seperti *Sejarah Maritim Indonesia: Menelusuri Jiwa Bahari Bangsa Indonesia dalam Proses Integrasi Bangsa* yang diterbitkan oleh Universitas Diponegoro dan Departemen Kelautan dan Perikanan.³⁴

Referensi tentang aspek kemaritiman dalam perspektif sejarah sebenarnya dapat diperoleh dari beberapa sumber yang sudah ada. Beberapa sumber tersebut adalah *Sejarah Nasional Indonesia* edisi pemutakhiran yang terbit pada 2008, terutama pada jilid II (Zaman Kuno), jilid III (Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan Islam di Indonesia), dan jilid IV (Kemunculan Penjajahan di Indonesia). Selain itu dapat pula digunakan *Indonesia dalam Arus Sejarah* terbitan tahun 2012 pada jilid II (Kerajaan Hindu Buddha), jilid III (Kedatangan dan Peradaban Islam), dan jilid IV (Kolonisasi dan Perlawanan). Akan tetapi, di kalangan guru sumber pokok ini masih terbatas, sehingga perlu adanya upaya untuk mengadakan sumber-sumber ini di perpustakaan-perpustakaan sekolah.

Pengembangan kedua ditinjau dari aspek konteks. Aspek ini menyangkut sistem pelaksanaan pembelajaran sejarah maritim. Pada aspek ini, minimal terdapat tiga pilar penopang, yaitu guru, strategi pembelajaran, dan fasilitas penunjang. Dalam pembelajaran sejarah maritim, guru memiliki posisi penting. Hal ini karena guru sejarah memiliki peran sebagai penransmisi pengetahuan kesejarahan dan pendorong

³³ Sartono Kartodirdjo. Op.cit. Hlm. 149.

³⁴ Agus Supangat (Ed). 2003. *Sejarah Maritim Indonesia: Menelusuri Jiwa Bahari Bangsa Indonesia dalam Proses Integrasi Bangsa*. Jakarta: Diterbitkan Pusat Kajian Sejarah dan Budaya Maritim Asia Tenggara, Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro Semarang dan Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumberdaya Non Hayati Departemen Kelautan dan Perikanan.

siswa untuk membangun pengetahuan mereka sendiri.³⁵ Dalam konteks pembelajaran sejarah maritim, pengenalan aspek-aspek kemaritiman perlu diberikan pada guru-guru sejarah. Ini karena dalam pembelajaran sejarah maritim banyak diulas aspek-aspek kemaritiman kemaritiman. Oleh karena itu, pengembangan pengetahuan guru tentang isu-isu aspek-aspek kemaritiman menjadi prasyarat pelaksanaan pembelajaran sejarah maritim.

Pengembangan pengetahuan guru sejarah tentang sejarah maritim dilakukan dengan tiga pendekatan. *Pertama*, menyediakan fasilitas dan akses bagi guru untuk mempelajari konsep kemaritiman dan sejarah maritim. *Kedua*, memacu guru untuk secara aktif mencari referensi di berbagai sumber. *Ketiga*, pendampingan terhadap guru dalam pengembangan pengetahuan tentang sejarah maritim. Ke tiga pendekatan tersebut tidak hanya menjadi tugas guru, tetapi juga melibatkan peran serta *stakeholders* sebagai pendamping guru sejarah.

Di dalam proses pendampingan, beberapa pihak memiliki peran untuk menambah pengetahuan dan pemahaman guru terhadap sejarah lingkungan. *Pertama*, pemerintah berperan dalam hal kebijakan dan penyediaan fasilitas penunjang. *Kedua*, sejarawan berperan dalam pengembangan historiografi sejarah maritim Indonesia. Saat ini sudah mulai muncul sejarawan yang mengembangkan penelitian dalam bidang sejarah maritim. Namun demikian, kajian tentang hubungan pedalaman dan pesisir masih belum banyak diulas. Oleh karena itu, perlu satu gerakan yang mendorong sejarawan mengembangkan kajian sejarah maritim yang dihubungkan dengan wilayah pedalaman. *Ketiga*, LPTK berperan dalam menyiapkan calon guru sejarah yang mampu mengembangkan pembelajaran sejarah maritim. Caranya adalah dengan memberikan pendidikan, pelatihan, dan pendampingan bagi guru dan calon guru sejarah. Salah satu upaya yang dapat dikembangkan oleh LPTK adalah pengembangan mata kuliah Sejarah Maritim. *Keempat*, MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran). MGMP berperan sebagai komunitas yang saling menguatkan dan mendukung pengembangan sejarah maritim. *Kelima*, media massa. Media massa berperan sebagai sarana publikasi hasil kajian tentang sejarah maritim dan isu-isu terkait dengan kemaritiman.

Pilar kedua dalam aspek pengembangan konteks adalah strategi pembelajaran. Dalam pengembangan pilar strategi ditawarkan tiga model dalam pembelajaran. Model yang paling sederhana dalam pengembangan pembelajaran sejarah maritim adalah model kronologis-integratif. Pada model ini, materi-materi terkait sejarah maritim Indonesia menjadi bagian dari materi yang telah ada. Tiap mendiskusikan materi tertentu, didiskusikan juga aspek-aspek kemaritiman yang terjadi pada periode tersebut. Konsekuensi dari pendekatan ini adalah adanya upaya untuk mencari aspek-aspek kemaritiman yang terjadi dalam setiap periode.

Model kedua dalam pengembangan pembelajaran sejarah maritim adalah model kapita selekta. Berbeda dengan model pertama yang mengintegrasikan aspek kemaritiman dalam materi yang telah tersedia, model ini lebih bersifat mandiri. Dalam

³⁵ S.G. Grant. 2003. *History Lessons: Teaching, Learning, and Testing in U.S. High School Classrooms*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

hal ini perlu dikembangkan satu materi khusus yang menjelaskan perkembangan sejarah maritim dalam berbagai tema untuk setiap periode. Dengan demikian, ada alokasi khusus yang dirancang untuk menjelaskan perkembangan berbagai isu lingkungan. Misalnya adalah ada materi pokok khusus yang menjelaskan tentang sejarah maritim di Indonesia. Materi tersebut berisikan beberapa tema penting yang diambil dari beberapa periode sejarah, mulai prasejarah sampai kontemporer.

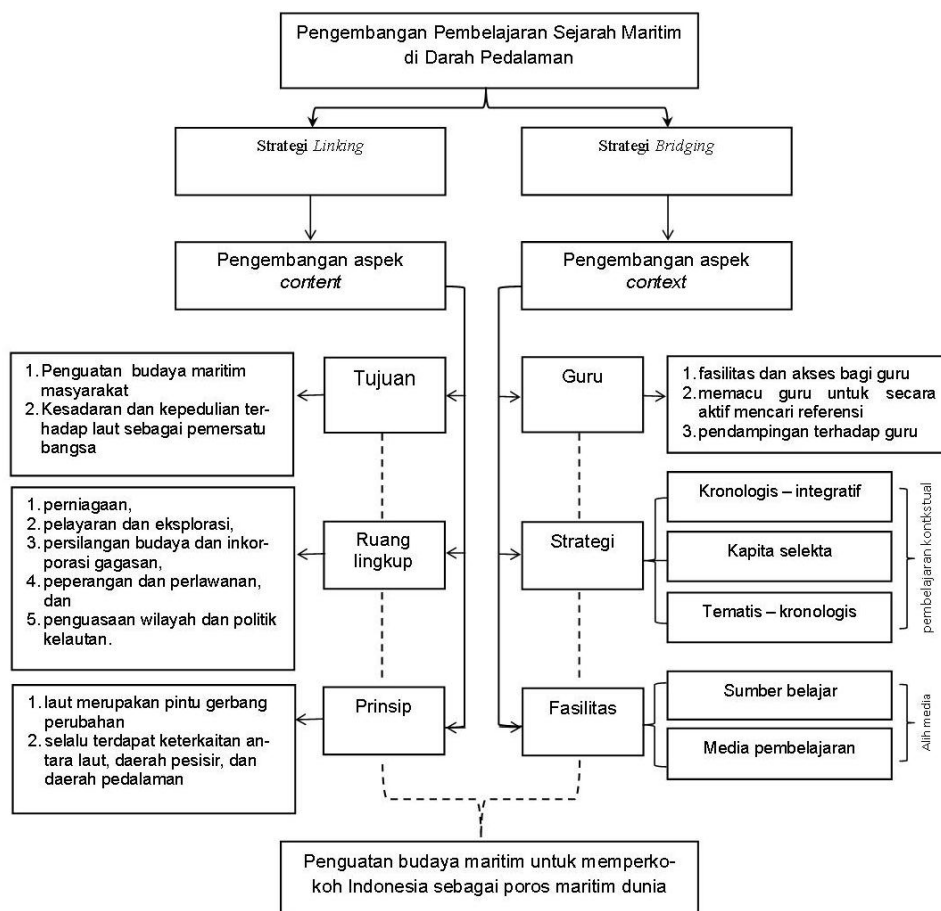
Model ketiga dalam pengembangan pembelajaran sejarah maritim adalah tematis-kronologis. Model ini lebih kompleks daripada model pertama dan kedua. Ini karena model ini menuntut adanya satu kompetensi dasar khusus yang dialokasikan untuk mendiskusikan tema-tema dalam sejarah maritim. Secara ideal, model ini mengulas beberapa tema penting secara terperinci. Tema-tema sejarah maritim dibicarakan dalam beberapa pertemuan khusus. Namun demikian, pengembangan kompetensi dasar baru memerlukan kebijakan baru dalam kurikulum.

Ke tiga model pembelajaran sejarah maritim dapat diimplementasikan melalui berbagai pendekatan dan strategi. Guru dapat memilih berbagai pendekatan, seperti pendekatan saintifik, proyek, atau *problem based learning*. Metode yang diterapkan dapat beragam disesuaikan dengan karakteristik materi.

Untuk mewujudkan kebermaknaan dalam PSBL, perlu pengaitan materi dengan konteks yang terjadi di sekitar siswa. Konteks mencakup fenomena di masyarakat, peristiwa aktual, permasalahan sosial, isu hangat yang tengah berkembang, jiwa zaman, dan perkembangan keilmuan mutakhir. Pada daerah berbasis maritim, konteks yang dapat dikembangkan misalnya berbagai tradisi yang berhubungan dengan laut, seperti sedekah laut. Selain itu, konteks dapat dilihat dari aktivitas nelayan dan pelabuhan yang ada. Akan tetapi permasalahan muncul ketika pembelajaran diterapkan di daerah pedalaman. Konteks yang hendak dikaitkan sangatlah terbatas. Namun demikian, ada alternatif yang dapat dipilih berupa kondisi kekinian yang berhubungan dengan perdagangan, seperti komoditas perdagangan yang berasal dari daerah pesisir yang diperdagangkan di pasar. Apabila memungkinkan, dapat pula dikaitkan antara sungai dan laut sebagai bagian yang terintegrasi. Di sini guru perlu bekerja keras dalam mengaitkan realitas perdagangan saat ini dengan aspek kemaritiman dilihat dari perspektif sejarah.

Pilar ketiga dalam aspek konteks adalah ketersediaan fasilitas belajar. Fasilitas belajar meliputi ketersediaan sumber dan media yang menunjang pembelajaran. Dalam pembelajaran sejarah maritim, sumber belajar yang paling mudah diakses adalah aktivitas terkait aspek kemaritiman yang tengah terjadi saat ini. Guru dapat memanfaatkan internet untuk mendapatkan sumber-sumber mutakhir terkait aspek kemaritiman. Penggunaan media sangat penting untuk mewujudkan atmosfer pembelajaran yang sesuai. Dalam hal ini perlu ada upaya untuk “membawa kehidupan maritime ke dalam kelas” dengan memanfaatkan berbagai media. Media yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran sejarah maritim antara lain gambar-gambar tentang aktivitas dan peninggalan kemaritiman, poster, video dokumenter, dan berbagai media yang dapat diakses dari internet.

Secara keseluruhan, pengembangan pembelajaran sejarah maritim dapat dirangkum pada gambar 2. Pada gambar tersebut tampak bahwa keseluruhan komponen memiliki keterkaitan.



Gambar 2. Pengembangan Pembelajaran Sejarah Maritim di Daerah Pedalaman

SIMPULAN

Pembelajaran sejarah maritim memiliki arti strategis dalam menopang visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Melalui pembelajaran sejarah maritim, penguatan aspek budaya maritim menjadi dimungkinkan. Hal ini dilakukan dengan menganalisis berbagai praktik yang dilakukan oleh masyarakat di masa lalu berhubungan dengan kemaritiman. Namun demikian, pelaksanaan pembelajaran sejarah maritim terkendala ketika disampaikan pada daerah yang tidak berbasis maritim. Untuk itu, perlu ada pendekatan khusus yang dilakukan dalam pembelajaran sejarah maritim. Pendekatan ini difokuskan untuk membangun pemahaman tentang arti penting laut dan perairan dalam sejarah umat manusia. Upaya untuk mewujudkan keterkaitan antara daerah pesisir dan pedalaman dilakukan dengan berdasarkan pada premis utama bahwa “laut merupakan pintu gerbang perubahan” dan “selalu terdapat keterkaitan antara laut, daerah pesisir, dan daerah pedalaman”. Dengan pengembangan fokus tersebut diharapkan tidak ada lagi kesenjangan antara kawasan pedalaman dan pesisir dalam melihat potensi laut sebagai pemersatu bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnan, Gusti. 2007. *Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Braudel, Fernand. 1972. *The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II*. Volume I. Diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh Sian Reynolds. New York: Harper & Row.
- Grant, S.G.. 2003. *History Lessons: Teaching, Learning, and Testing in U.S. High School Classrooms*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
- Hamid, Abd Rahman 2015. *Sejarah Maritim Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Haryanto, Nur Achmad. 2010. "Kesadaran Masyarakat dan Siswa Sekolah Dasar terhadap Sejarah Maritim di Kabupaten Rembang." *Skripsi*. Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang.
- Kartodirdjo, Sartono. 2014. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 dari Emporium sampai Imperium*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. Hlm. 10-12, 145.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2014. "Presiden Jokowi Deklarasikan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia." Dalam <http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Presiden-Jokowi-Deklarasikan-Indonesia-Sebagai-Poros-Maritim-Dunia.aspx>. Diakses 1 Oktober 2016.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013a. *Sejarah Indonesia SMA/MA/SMK/MAK Kelas X Semester 1*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013b. *Sejarah Indonesia SMA/MA/SMK/MAK Kelas X Semester 2*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014a. *Sejarah Indonesia SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Semester 1*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014b. *Sejarah Indonesia SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Semester 2*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. *Sejarah Indonesia SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Lapian, A.B. 1992. "Sejarah Nusantara Sejarah Bahari". *Pidato Pengukuhan*. Diucapkan pada upacara penerimaan jabatan guru besar luar biasa Fakultas Sastra Univesitas Indonesia pada tanggal 4 Maret 1992.
- Lapian, A.B. 2008. *Pelayaran dan Perniagaan Nusantara abad ke-16 dan 17*. Depok: Komunitas Bambu.
- National Geographic Indonesia. 2013. "Terbaru: Panjang Garis Pantai Indonesia Capai 99.000 Kilometer". Dalam <http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/10/terbaru-panjang-garis-pantai-indonesia-capai-99000-kilometer>. Diakses 1 Oktober 2016.
- Paine, Lincoln. 2013. *The Sea and Civilization: A Maritime History of the World*. New York: Alfred. A. Knopf.
- presidenRI.go.id. 2015. "Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia." Dalam <http://presidenri.go.id/maritim/indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia.html>. Diakses 1 Oktober 2016.
- Raharjo, Supratikno. 2002. *Peradaban Jawa Dinamika Pranata Politik, Agama, dan Ekonomi Jawa Kuno*. Depok: Komunitas Bambu. Hlm. 259.
- Statistik Indonesia 2016*. Jakarta: Diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik
- Sulistiyono, Singgih Tri. 2009. "Historiografi Maritim Indonesia: Prospek dan Tantangan." *Makalah* dipresentasikan pada Seminar Nasional Musyawarah Wilayah II DIY – Jateng yang diselenggarakan oleh Keluarga Mahasiswa Jurusan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta, 8 Mei 2009.
- Sulistiyono, Singgih Tri. dkk. 2005. "Model Sosialisasi dan Enkulturasasi Nilai-Nilai Kebaharian untuk Memperkuat Integrasi Indonesia sebagai Negara Maritim melalui Pengajaran Sejarah dan Budaya Maritim Nusantara di Sekolah Dasar." *Laporan Penelitian*. Fakultas Sastra Universitas Diponegoro.

- Supangat, Agus (Ed). 2003. *Sejarah Maritim Indonesia: Menelusuri Jiwa Bahari Bangsa Indonesia dalam Proses Integrasi Bangsa*. Jakarta: Diterbitkan Pusat Kajian Sejarah dan Budaya Maritim Asia Tenggara, Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro Semarang dan Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumberdaya Non Hayati Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Thohir, Mudjahirin. 1999. *Wacana Masyarakat dan Kebudayaan Jawa Pesisiran*. Semarang: Penerbit Bendera.
- Utomo, Bambang Budi. 2014. "Awal Perjalanan Sejarah menuju Negara Kepulauan." Dalam Dorothea Rosa Herliany, dkk (ed). *Arus Balik Memori Rempah dan Bahari Nusantara Kolonial dan Poskolonial*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. Hlm. 1-43
- Wasino. 2005. *Tanah, Desa, dan Penguasa: Sejarah Pemilikan dan Penguasaan Tanah di Pedesaan Jawa*. Semarang: Unnes Press.
- Zuhdi, Susanto. 2006. "Laut, Sungai dan Perkembangan Peradaban: Dunia Maritim Asia Tenggara, Indonesia dan Metodologi Strukturis." *Makalah*. Disampaikan dalam Konferensi Nasional Sejarah VIII, Jakarta 14-16 November 2006.



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Konferensi Nasional Sejarah X

Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta
7-10 November 2016

Museum: Sumber Pengajaran Sejarah
dan Budaya Bahari

Sudirman, S.S., M .Hum



MUSEUM:
SUMBER PEMBELAJARAN SEJARAH DAN BUDAYA BAHARI

Sudirman
Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh

1. Pendahuluan

Nenek moyang bangsa Indonesia merupakan orang yang memiliki latar belakang kebudayaan bahari. Berbagai bukti masa prasejarah Indonesia dapat memberikan pemahaman bahwa nenek moyang bangsa Indonesia sebagian besar bangsa pelaut atau pengembara. Mereka menggunakan potensi laut sebagai sarana memenuhi berbagai kebutuhan dan kepentingan, seperti halnya untuk perdagangan, transportasi, dan komunikasi dengan bangsa atau daerah lain, serta memanfaatkan sumber daya alam di laut sebagai salah satu sumber mata pencaharian hidup. Dengan demikian, Indonesia memiliki banyak aspek peninggalan sejarah dan budaya bahari. Potensi bahari sebagai bagian dari kekayaan Indonesia perlu dilestarikan, salah satunya melalui museum bahari.

Museum bahari adalah lembaga tempat menyimpan, merawat, mengamankan, dan memanfaatkan benda-benda bukti materil hasil sejarah dan budaya bahari guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian budaya bangsa. Museum bahari dapat berfungsi sebagai sarana pencerdasan kehidupan bangsa. Sebagai tempat pelestarian, museum bahari dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan koleksi yang berkaitan dengan sejarah dan budaya bahari. Museum bahari juga dapat berfungsi sebagai tempat sumber data bagi bahan kajian kebaharian. Sebagai sumber informasi, museum bahari dapat berfungsi sebagai tempat memperlihatkan perkembangan sejarah dan peradaban bahari. Sebagai tempat rekreasi keilmuan, museum bahari dalam konteks sejarah peradaban manusia dapat dianggap sebagai penanda hadirnya suatu budaya. Dengan museum bahari yang representatif dan berkualitas, citra peradaban suatu masyarakat dapat dilihat.

Berbagai sumber pembelajaran dapat digunakan dalam mencapai tujuan pendidikan, termasuk bukti nyata atau faktual. Museum bahari dapat menjadi salah satu sumber pembelajaran sejarah dan budaya bahari bagi masyarakat, khususnya siswa. Museum mempunyai tujuan yang sama dengan pendidikan, yaitu menumbuhkan nilai budaya bangsa pada generasi muda melalui koleksi yang dimilikinya. Oleh karena itu, keberadaan museum sangat berguna dan menunjang bagi kegiatan pembelajaran siswa. Untuk itu, dalam makalah

ini akan mendiskusikan beberapa pemikiran, gagasan, dan pemanfaatan museum bahari sebagai sumber pembelajaran sejarah dan budaya bahari bagi siswa.

2. Museum sebagai Sumber Pembelajaran

Jejak masa lampau lazim pula disebut dengan istilah sumber sejarah. Jejak masa lampau dapat dikelompokkan dalam dua bagian. Kelompok pertama, yaitu jejak material, yakni jejak dari aktivitas orang yang hidup pada masa lampau yang berwujud. Kelompok kedua jejak non-material, yakni jejak yang tidak berwujud; tidak dapat dilihat dan diraba, hanya dapat diketahui karena terdapat dan berlaku dalam masyarakat. Jejak merupakan sumber informasi penulisan dan pembelajaran sejarah. Oleh karena itu, jejak sejarah merupakan sumber sejarah yang esensial.

Sumber informasi yang sangat diperlukan oleh orang yang akan melakukan rekonstruksi tentang masa lampau pada dasarnya terdapat atau dijumpai pada masyarakat itu sendiri. Namun, karena kesadaran sejarah yang semakin meningkat oleh berbagai pihak, untuk keperluan praktis diadakan penyimpanan terhadap sumber-sumber informasi tersebut. Untuk itu, disediakan tempat khusus untuk menyimpan jejak-jejak itu. Di antara tempat penyimpanan jejak sejarah dan budaya bahari adalah museum. Jejak-jejak masa lampau kebaharian yang disimpan di museum dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, di antaranya pendidikan.

Dengan demikian, museum mempunyai peranan penting dalam menunjang kegiatan pembelajaran sejarah dan budaya. Hal itu disebabkan museum sebagai tempat penyimpanan jejak sejarah dan budaya bahari yang tugasnya melayani kepentingan masyarakat dalam memamerkan dan mempublikasikan koleksi yang dimilikinya. Museum juga merupakan suatu gambaran nyata dunia serta nilai dan aksesibilitas yang dimilikinya menjadikan museum sebagai media penting yang dapat menghubungkan pengunjung, khususnya siswa dengan dunia kebaharian.

1) Pembelajaran di Museum

Peranan museum dalam pembelajaran bagi pengunjung, khususnya kelompok siswa sangat penting. Museum seharusnya menyusun program-program yang bersifat edukatif bagi pengunjung. Untuk menyusun program yang bersifat edukatif, pihak museum sebaiknya memiliki dasar teoretis tentang tahapan yang akan dicapai untuk tujuan pembelajaran. Misalnya, teori Benyamin Bloom yang menyebutkan tentang tiga ranah atau tahapan dalam pendidikan. *Pertama*, ranah kognitif, yaitu untuk mendapatkan pengetahuan. *Kedua*, ranah

afektif, cara belajar yang melibatkan emosional dengan apa yang akan dipelajari. *Ketiga*, ranah motorik, yang lebih diarahkan kepada kemampuan melatih keterampilan seseorang.

Museum memberikan kemungkinan belajar dalam ranah-ranah tersebut. Untuk membuat program-program yang bersifat edukatif di museum memang sulit, tetapi harus dilakukan oleh pihak museum. Museum sangat berperan dalam pembelajaran kepada pengunjung, khususnya kalangan siswa karena akan mendapatkan pengalaman fisik, meliputi pengamatan, pendengaran, dan percobaan tentang dunia kebaharian. Hal yang demikian merupakan sumber pengayaan bagi bahan ajar.

Sebagai rujukan yang dapat memberikan inspirasi bagi penataan museum sebagai mitra pendidik dapat digunakan konsep Empat Tiang Pendidikan yang dirumuskan oleh UNESCO. Keempat pilar pendidikan, sebagai berikut. *Pertama*, belajar untuk mengetahui. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan pengetahuan atau alih pengetahuan sehingga orang yang sedang belajar dapat memperoleh pengetahuan baru yang lebih banyak. Museum yang terlibat dalam proses pembelajaran kognitif ini dituntut supaya lebih informatif. Pameran yang disajikan seharusnya mengandung informasi yang memadai dan disajikan dengan cara yang komunikatif sehingga pengunjung dengan mudah memahami dan mengerti informasi pengetahuan yang disampaikan oleh pihak museum.

Salah satu cara dalam mencapai tujuan tersebut, pihak museum memamerkan benda-benda koleksi bahari secara kontekstual. Koleksi bahari yang dipamerkan ditampilkan dalam konteks yang lebih luas dan tidak hanya terbatas pada informasi tentang koleksi itu sendiri. Misalnya, Bubu sebagai alat tangkap tradisional, koleksi tersebut dipamerkan atau diletakkan dalam situasi yang terkait dengan sesuatu yang lain atau informasi secara holistik. Dengan demikian, pengunjung dapat memahami secara menyeluruh tentang koleksi tersebut.

Kedua, belajar untuk melakukan. Pendidikan yang baik akan mengajarkan kepada orang bagaimana dia dapat melakukan sesuatu yang diinginkan. Keterampilan ini biasanya dicapai dengan berlatih, mencoba atau bereksperimen sehingga mendapatkan pengalaman untuk dapat melakukan sesuatu dengan baik. Untuk itu, dibutuhkan sarana-sarana pembelajaran yang mendorong aktivitas untuk mencoba, menjelajahi sesuatu yang baru, bersentuhan langsung, dan mengalami sendiri.

Museum dapat menjadi tempat belajar melakukan sesuatu dengan menyajikan tampilan koleksi yang interaktif. Pengunjung tidak saja dapat melihat, membaca ataupun menikmati sajian koleksi yang dipamerkan, tetapi juga ikut serta aktif mencari dan mendapatkan informasi. Mereka tidak hanya diberi pengetahuan, tetapi juga diberi kesempatan untuk mengalami dan menyimpulkan sendiri apa yang dialami tanpa harus

diberitahukan. Proses pembelajaran untuk mengetahui bagaimana harus berbuat akan semakin terbentuk apabila museum dapat menyediakan fasilitas untuk bereksperimen.

Ketiga, belajar untuk menjadi. Salah satu tujuan pendidikan adalah menjadikan orang sadar akan dirinya sekaligus membantu seseorang mewujudkan cita-citanya menjadi pribadi tertentu. Pendidikan harus mampu menjadikan manusia lebih manusiawi. Tujuan pendidikan ini lebih mengarah pada ranah pembentukan kepribadian. Dalam konteks ini, seseorang difasilitasi untuk menemukan dirinya sendiri. Orang harus tahu tentang asal usul dirinya sebagai manusia, hakikat kemanusiaan, dan ke mana manusia harus mengarahkan kehidupannya. Pada ranah ini, anak didik seharusnya diperkenalkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan ajaran moral, etos, etika, dan tata cara kehidupan yang lebih baik.

Sebagai mitra sekolah, museum dituntut dapat berperan membentuk kepribadian siswa. Banyak potensi di museum yang dapat mendukung pelaksanaan tugas ini. Museum dirancang untuk tidak hanya sekedar memamerkan koleksi, tetapi juga menyajikan makna atau ajaran moral yang terkandung dalam koleksi. Aspek lain dari ranah pendidikan kepribadian adalah pembentukan jati diri. Museum dapat membantu siswa menemukan siapa dirinya, terutama dalam konteks lingkungan alam dan sosialnya. Museum dapat menyajikan pesan-pesan bagaimana masa lalu telah ikut menentukan keadaan masa kini serta bagaimana lingkungan sosial menyebabkan orang menjadi apa yang ada saat ini. Pesan-pesan ini dapat diarahkan lebih luas lagi untuk menumbuhkan rasa kebangsaan atau berbudaya. Museum bahari dapat menumbuhkan kesadaran akan lingkungan alam bahari di tanah air, sifat-sifat kebaharian bangsa sejak dulu hingga sekarang, dan potensi-potensi yang masih perlu dikembangkan.

Dengan cara demikian, siswa akan mendapatkan setidaknya tiga kesadaran jati diri, yaitu tentang keadaan lingkungan alam tempat dia hidup, keadaan dan kemampuan bangsa yang menjadi bagian sosialnya, dan menumbuhkan minat untuk mengembangkan potensi tersebut. Melalui tampilan informasi koleksi di museum, siswa terinspirasi atau mendapatkan gambaran cita-citanya untuk menjadi seseorang dengan jati diri tertentu, seperti menjadi pengusaha di bidang kebaharian.

Keempat, belajar untuk hidup bersama. Salah satu pilar utama pendidikan adalah belajar untuk hidup bersama. Ranah pendidikan ini merupakan kebutuhan nyata yang dirasakan dan museum dianggap salah satu sarana penting untuk menyadarkan tentang hal tersebut. Dalam konteks globalisasi, aktivitas berwisata, melihat atau melawat ke “negeri lain” merupakan suatu kebutuhan karena dapat meneguhkan jati diri. Orang yang memahami atau pernah berkunjung ke tempat lain atau budaya lain, merasa berbeda dengan orang lain.

Dengan masuk atau hidup dalam budaya lain, manusia mendapatkan hal-hal baru yang masih asli yang tidak mereka temui dalam kehidupan kesehariannya sehingga dapat memperkaya diri secara rohaniah.

Museum sebagai tempat pelestarian dan penyajian masa lampau kebaharian dapat menjadi “cermin” ke masa lampau atau ke negeri lain. Hal itu dimaksudkan untuk mengenali seluk beluk keadaan di tempat lain, lingkungan lain, komunitas lain, dan budaya lain. Melalui museum, siswa dapat berinteraksi dengan budaya dan komunitas kebaharian yang dipresentasikan di museum. Kunjungan ke museum mempunyai peran yang sama dengan berwisata, yaitu sebagai upaya melepaskan diri dari kejenuhan kehidupan lama dan mencoba menjejaki dan mencari makna hidup yang baru. Untuk itu, museum yang mendidik untuk belajar hidup bersama harus berusaha merancang materi pamerannya agar peristiwa, budaya, keadaan, dan hasil pencapaian di bidang kebaharian pada masa lampau dapat menjadi pelajaran bersama yang menggugah kesadaran untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk seperti dulu, tetapi justru mendorong siswa untuk melakukan hal-hal yang baik pada masa depan.

Selain peran aktif pihak museum dalam proses pembelajaran di museum, guru juga dituntut lebih berperan aktif, apalagi pembelajaran sejarah dan budaya bahari untuk semua tingkatan pendidikan sangat luas dan kompleks. Guru harus menguasai materi ajar kemudian dituntut untuk mampu melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan, metode, dan model mengajar yang bervariasi sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Dalam menggunakan media, guru sebaiknya mampu dan memanfaatkan berbagai media yang tersedia dan menyajikannya secara efektif. Guru dituntut untuk dapat mengemas bahan ajar dan menggunakan metode, model, dan media yang sesuai dengan tuntutan dari apa yang harus dicapai dan diketahui tentang kabaharian.

2) Metode Pembelajaran

Proses pembelajaran selain diawali dengan perencanaan yang bijak dan didukung oleh komunikasi yang baik, juga tidak terlepas dan didukung oleh pengembangan strategi yang mampu membelajarkan siswa. Perekayasa proses pembelajaran sejarah dan budaya bahari di museum dapat didesain oleh kurator, edukator museum, dan guru sedemikian rupa, sehingga penggunaan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran media tidak dapat diabaikan. Bagaimana dan apa media yang dapat digunakan dalam pembelajaran sejarah dan budaya bahari di museum. Beberapa cara dan media yang dapat dilakukan, sebagai berikut.

(1) *Hand on Activity*. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk dapat mengalami sendiri aneka ragam aktivitas kehidupan bahari melalui materi yang disajikan di museum. Misalnya, tentang kehidupan sehari-hari masyarakat nelayan pada masa lalu melalui tinggalan material. Dalam kegiatan ini pengunjung dapat meraba, mengangkat, atau mengamati koleksi secara lebih jelas dan lebih detail. Diperbolehkan juga untuk menyentuh dan bereksplorasi sepenuhnya terhadap benda-benda yang disajikan, dengan harapan mendapatkan gambaran yang jelas tentang koleksi yang dipamerkan.

(2) Museum Masuk Sekolah.

Museum masuk sekolah adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan mendatangi sekolah-sekolah dalam berbagai jenjang pendidikan yang jaraknya jauh dari museum. Program ini bertujuan untuk memberikan kepada peserta didik berbagai pengetahuan dan pengalaman kebaharian yang dimiliki oleh museum. Kegiatan ini dapat dilaksanakan, baik dalam bentuk ceramah atau sosialisasi maupun dalam bentuk pemutaran film dokumenter atau slide tentang dunia kebaharian. Kegiatan ini penting artinya dalam rangka memasyarakatkan museum kepada sekolah-sekolah. Dengan demikian, para siswa beserta guru dapat merasakan pemanfaatan museum sebagai sumber pembelajaran.

(3) Diorama

Maket dan model diorama dapat menjadi media dalam pembelajaran sejarah dan budaya bahari. Diorama yang bagus dapat dijumpai pada museum-museum tertentu, tetapi dalam skala kecil dapat diperoleh melalui kreasi dan dibuat sendiri oleh guru. Model ini merupakan suatu bentuk media pembelajaran sejarah secara khusus sebab yang diperagakan dan ditunjukkan bukan hanya bangunan atau peninggalan sejarah saja, tetapi kegiatan atau peristiwa yang penting tentang kebaharian dapat ditunjukkan dan diperagakan. Dalam model ini anak-anak dapat terlibat langsung sehingga dapat menumbuhkan keberanian anak dalam hal peran dan mengemukakan pendapat. Dengan demikian, selain dapat menciptakan empati sekaligus simpati, dapat pula menumbuhkembangkan nasionalisme pada anak didik.

(4) Media Gambar

Media yang banyak digunakan dalam pembelajaran adalah gambar sehingga dituntut kreatifitas guru untuk memilah gambar-gambar yang bermakna kebaharian untuk dijadikan media dalam pembelajaran. Misalnya, foto benda-benda peninggalan sejarah

bahari, pertumbuhan maupun kejayaan yang ada pada setiap peristiwa kebaharian. Anak atau siswa dapat dilibatkan dengan menugaskan, misalnya, kliping-kliping koran, majalah, jurnal pothography, slide, dan fotokopi atau sketsa. Pada saat materi yang disajikan maka dipilihlah gambar yang sesuai dengan materi, apa yang ingin disampaikan kepada siswa sehingga suasana menjadi hidup. Setelah itu, foto-foto tersebut dapat ditempelkan di depan kelas atau dinding kelas.

(5) Media Peta atau Globe.

Peta atau globe dapat digunakan dalam pembelajaran. Pihak museum seharusnya memetakan semua potensi kebaharian yang dimilikinya. Peta dapat membantu memberikan bahan tambahan atau bahan bantuan untuk menunjukkan peristiwa, arah, letak geografis suatu wilayah kebaharian, dan sebagainya. Walaupun diakui bahwa tidak ada peta yang dapat memuaskan setiap kebutuhan pembelajaran sejarah. Namun, dengan kemampuan pihak museum dan guru, peta dapat dikelola sedemikian rupa hingga akan banyak fungsinya. Globe, peta dinding, buku teks, atau buku yang berkaitan dengan kebaharian dapat dibuat guna merancang bahan pembelajaran dalam topik tertentu.

(6) *Overhead Projector*

Penggunaan tranparansi sudah semakin meluas di kalangan pendidik untuk mempresentasikan berbagai informasi. Untuk itu, pihak museum seharusnya mengemas semua koleksi bahari yang dimilikinya supaya dapat ditayangkan dalam bentuk *overhead projector*. Dalam penggunaan media ini, pihak museum dan pengajar dapat langsung berhadapan dengan siswa dan dapat digunakan berulang-ulang. Namun, harganya relative mahal dan penggunaannya memerlukan persiapan yang cukup matang agar informasi ataupun gambar yang disajikan dapat dipelajari, dimengerti, dan dipahami.

3. Penutup

Upaya memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan tidak pernah berhenti. Banyak agenda reformasi yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan dan beragam inovasi ikut serta memeriahkan reformasi pendidikan. Proses pembelajaran selain diawali dengan perencanaan yang bijak dan didukung oleh komunikasi yang baik, juga tidak terlepas dan didukung oleh pengembangan strategi pembelajaran. Perencanaan proses pembelajaran dapat didesain oleh guru sedemikian rupa, sehingga penggunaan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran suatu keniscayaan.

Museum salah satu sarana pembelajaran sejarah dan budaya bahari. Melalui museum diharapkan pembelajaran sejarah dalam kerangka menanamkan kesadaran sejarah dan budaya bahari kepada generasi muda dapat dilakukan. Oleh karena itu, adanya keterkaitan antara pembelajaran sejarah dengan sarana edukasi di museum. Pembelajaran sejarah dan budaya bahari melalui museum bermakna sebagai pembelajaran terhadap seluruh dinamika kehidupan bangsa. Museum hendaknya dimanfaatkan sebagai salah satu unsur pencerdasan generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Keberadaan museum diharapkan dapat membantu proses pembelajaran sejarah dan budaya bahari. Pembelajaran sejarah di museum dapat lebih konkrit karena ada bukti nyata yang dapat dilihat, diamati, dan dipelajari. Kunjungan ke museum dapat menjadi sumber inspirasi bagi pandangan masa kini dan yang akan datang. Oleh karena itu, hendaknya guru dapat memanfaatkan museum dalam proses pembelajaran sejarah. Demikian pula pihak museum hendaknya membenahi dan lebih siap dalam melayani dan memberikan edukasi kepada siswa.

Indonesia memiliki banyak potensi kebaharian sebagai bagian dari kekayaan bangsa yang penting untuk dipertahankan dan dilestarikan, di antaranya melalui pendirian museum bahari di setiap daerah. Kebutuhan mendirikan museum bahari sangat penting guna membangun kesadaran sejarah dan identitas budaya. Untuk itu, dibutuhkan kesungguhan atas maksud pendirinya dan dikelola secara profesional sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Sebagai lembaga pelestarian dan pemanfaatan warisan sejarah dan budaya, museum diharapkan dapat memelopori pelestarian sejarah dan budaya bahari.

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Rahman Hamid, *Pembelajaran Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014).

Agus Aris Munandar, "Kajian Pengunjung Museum". *Museografi*. Vol. II. No. 2. Oktober 2008. Hlm. 33--44, (Jakarta: Direktorat Museum. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2008).

Dadang Udansyah, *Pedoman Tata Pamer di Museum*, (Jakarta: Proyek Peningkatan dan Pengembangan Museum, 1978/1979).

Daud Aris Tanudirdo, "Museum sebagai Mitra Pendidik". *Museografi (Majalah Ilmu Permuseuman)*. Vol. 1 No. 1 September 2007. Hlm. 15--32, (Jakarta: Direktorat Museum. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2007).

Hamzuri (ed.), *Buku Pintar Tentang Permuseuman*, (Jakarta: Direktorat Permuseuman, 1994).

Himawan, Tata Pameran Museum Sebagai Daya Tarik Pengunjung. Dalam *Museum bagi Khazanah Bangsa*, hlm. 61--64, (Tanjung Pinang: Direktorat Permuseuman Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung Pinang, 2006).

Hooper-Greenhill, Eilean, *Museum and Interpretation of Visual Culture*, (London and New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2006).

Indonesia. Direktorat Museum. *Pedoman Pengelolaan Museum*, (Jakarta: Direktorat Museum. Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2007).

Langi, Mieke *et.al.*, *Kamus Peristilahan Permuseuman*, (Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala. Direktorat Permuseuman. Proyek Pembinaan Permuseuman, 2001).

- Luhtfi Asiarto dkk., *Pedoman Museum Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Museum. Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2008).
- Luthfi Asiarto, "Museum dan Pembelajaran." Dalam *Museografi*, Vol.I No.1 September 2007, (Jakarta: Direktorat Museum).
- Mieke Langi dkk. *Kamus Peristilahan Permuseuman*, (Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Direktorat Permuseuman, Proyek Pembinaan Permuseuman, 2001).
- Moh. Amir Sutarga, tanpa tahun, *Pedoman Penyelenggaraan dan Pengelolaan Museum*, (Jakarta: Proyek Peningkatan dan Pengembangan Permuseuman, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan).
- Muhammad Gade Ismail, "Museum sebagai Sumber Sejarah dalam Kaitannya dengan Metode Sejarah". *Bulletin Rumoh Aceh*, No. 3/1999, (Banda Aceh: Museum Aceh).
- Noerhadi Magetsari, "Filsafat Museologi". *Museografi*. Vol. II. No. 2. Oktober 2008. Hlm. 5--14, (Jakarta: Direktorat Museum. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2008).
- Rusdi Sufi, "Museum sebagai Tempat Penelitian Masa Lampau". *Bulletin Rumoh Aceh*, No. 1/1998, (Banda Aceh: Museum Negeri Aceh, 1998).
- Samsidar, "Media Pembelajaran dalam Pendidikan." *Makalah* disampaikan pada Workshop Guru-Guru Sejarah, Medan 28 Mei 2008.
- Tatik Sujati, *Metode Pengadaan dan Pengelolaan Koleksi*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Museum, 2000).
- Victor Chandrawinata, "Cinta Indonesia Lewat Kunjungan Museum". *Museografia*. Vol. 1. September 2007. Hlm. 103--119, (Jakarta: Direktorat Museum. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2007).



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Konferensi Nasional Sejarah X

Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta
7-10 November 2016

Wawasan Nusantara sebagai Strategi Pembangunan Maritim Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia

Rendy Suhardiman



Wawasan Nusantara Sebagai Strategi Pembagunan Maritim Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia

Rendy Suhardiman¹

Pendahuluan²

Sebelum lahirnya Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS* 1982) yang menetapkan lebar laut teritorial adalah 12 mil laut, Pemerintah Indonesia melalui Perdana Menteri Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 telah lebih dahulu menyuarakan perubahan. Pada konvensi hukum laut I dan II yang dilangsungkan di Jenewa, masalah kesepakatan tentang luas laut teritorial tidak dapat dicapai kesepakatan dan hanya menetapkan lebar laut teritorial seluas 3 mil laut berdasarkan konvensi saat itu. Hal tersebut dikuatkan dengan produk hukum *Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie 1939* yang dimuat dalam *Staatsblad 1939* No. 442 Pasal 1 (1) yang menetapkan lebar wilayah laut teritorial Indonesia adalah 3 mil. Kondisi di atas bagi negara kepulauan (*archipelagic state*) seperti Indonesia, sangat merugikan.³ Ordonansi ini dikeluarkan untuk mempersiapkan liberalisasi pelayaran dimana posisi laut dalam (3 mil dari garis pantai) merupakan laut bebas yang boleh digunakan oleh siapa saja tanpa harus meminta izin kemudian

¹ Peneliti Pada Institute For Defense And Strategic Research (Lembaga Riset Pertahanan Negara dan Strategi), Peneliti kajian- kajian Strategis termasuk diantaranya adalah militer dan bidang Intelijen.

² Penelitian ini disupervisi oleh Direktur IDSR Yohanes Sulaiman Ph.D dan Peneliti Utama IDSR Ian Montratama serta Laksda Untung Suropati

³<http://www.negarahukum.com/hukum/ahirnya-konsepsi-politik-wawasan-nusantara.html>
diunduh pada tanggal 19 November 2016

permasalahan muncul manakala Indonesia merdeka. Ordonansi yang masih berlaku itu menyulitkan Indonesia untuk mengelola lautnya.⁴

Kondisi yang tidak ideal tersebut juga dirasakan sejumlah negara lain. Ada negara-negara yang menetapkan wilayah lautnya secara sepihak. Negara-negara itu yaitu diantaranya negara-negara Skandinavia dengan menetapkan wilayah laut sejauh empat mil dan Spanyol dengan jarak enam mil dari pantai. Dengan dinamika di atas, pemerintah RI memiliki momentum dan gagasan baru untuk merombak total (masalah wilayah laut teritorial) dan kemudian mengembangkan pada aspek-aspek lain selanjutnya.

Perombakan yang dimaksudkan di atas untuk pertama kalinya dilaksanakan oleh pemerintah RI dengan mengeluarkan pengumuman pada 13 Desember 1957 yang disebut Deklarasi 13 Desember 1957 (atau dikemudian hari dikenal dengan nama Deklarasi Djuanda). Pada saat itu Indonesia masih memakai konstitusi RIS 1949 dengan Perdana Menteri Ir. Djuanda. Adapun pertimbangan suatu negara kepulauan sehingga mengeluarkan pernyataan mengenai wilayah perairan Indonesia, adalah sbb.:

- Bahwa bentuk geografis Indonesia yang berwujud negara kepulauan, yang terdiri atas tiga belas ribu lebih pulau-pulau, besar dan kecil yang tersebar dilautan.
- Demi untuk kesatuan wilayah NKRI, semua kepulauan dan perairan (selat) yang ada diantaranya merupakan satu kesatuan yang utuh, dan tidak dapat

⁴Susanto Zuhdi, 2014. Tradisi dan Masyarakat Maritim Pesisir Selatan Jawa dalam Perspektif Sejarah dan Pengembangan Wilayah dalam *Nasionalisme, Laut dan Sejarah*. Jakarta: Komunitas Bambu., hlm. 103

dipisahkan antara pulau yang satu dengan lainnya, atau antara pulau dengan perairannya.

- Bahwa penetapan batas perairan wilayah sebagaimana menurut *Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie 1939* yang dimuat dalam *Staatsblad* 1939 No. 442 Pasal 1 (1) sudah tidak sesuai lagi dengan kepentingan Indonesia setelah merdeka.
- Bahwa Indonesia setelah berdaulat sebagai suatu negara yang merdeka, mempunyai hak sepenuhnya dan berkewajiban untuk mengatur segala sesuatunya, demi untuk keamanan dan keselamatan negara serta bangsanya.

Deklarasi Djuanda 1957 tersebut merupakan titik pangkal lahirnya klaim **Wawasan Nusantara**, yang merupakan konsepsi wilayah kewilayahan (laut) pada 1966. Pemerintah RI bukanlah satu-satunya negara yang melakukan klaim atas wilayah pantainya sebab sebelumnya, Presiden AS S. Truman pada 25 Desember 1945 mengumumkan dua pernyataan, yaitu: proklamasi tentang landas kontinen dan proklamasi tentang perikanan. Hal tersebut membuat pernyataan sepihak atas klaim wilayah laut memang dianggap sudah lazim dalam politik internasional. Hanya saja yang lebih penting adalah pengakuan internasional atas klaim sepihak suatu negara.

Istilah **Wawasan Nusantara** sebenarnya baru dikenal pada seminar pertahanan keamanan tahun 1966. Pada waktu itu **Wawasan Nusantara** dipergunakan untuk mengembangkan kekuatan pertahanan dan keamanan yang terpadu, untuk menggantikan tiga wawasan yang pernah ada yang sifatnya sektoral, yaitu: Wawasan Benua (yang diprakarsai oleh TNI AD), Wawasan Bahari

(yang diprakarsai oleh TNI AL), dan Wawasan Dirgantara (yang diprakarsai oleh TNI AU). Ketiga wawasan tersebut diatas masing-masing merupakan perwujudan dari konsep kekuatan (*power concept*) yang menimbulkan adu kekuatan/rivalitas antar angkatan yang rentan untuk mengakibatkan gejolak atau ketegangan dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara. Rivalitas tersebut juga dapat menimbulkan terjadinya instabilitas nasional. Lain halnya dengan **Wawasan Nusantara** yang dikembangkan menjadi kebudayaan politik (*political culture*) dan merupakan milik bangsa dan negara RI (yang menyatukan juga ketiga angkatan bersenjata).

Dua tahun setelah keluarnya Deklarasi Djuanda 1957, tepatnya pada 18 Februari 1960, konsep negara kepulauan dikuatkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 4 tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (LN. 1960. No. 22) dengan maksud agar klaim tersebut memiliki kekuatan hukum dan mengikat. Berdasarkan Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966, Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang tersebut diatas, dikukuhkan (dituangkan) menjadi undang-undang No. 4 Prp. Tahun 1960. Adapun isi pokok UU No. 4. Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia adalah sebagai berikut :

- Perairan Indonesia ialah laut wilayah beserta perairan pedalaman Indonesia (perairan nusantara).
- Laut Wilayah Indonesia ialah jalur laut selebar dua belas mil laut dari pulau-pulau yang terluar atau bagian pulau-pulau yang terluar dengan dihubungkan garis lurus antara satu dengan lainnya.

- Apabila ada selat yang lebarnya tidak melebihi dua puluh empat mil laut dan negara Indonesia tidak merupakan satu-satunya negara tepi (artinya ada negara tetangga), maka garis batas Laut Wilayah Indonesia ditarik pada tengah selat.
- Perairan Pedalaman Indonesia (Perairan Nusantara) adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis besar.
- Hak Lintas Damai kendaraan air (kapal) asing, diakui dan dijamin sepanjang tidak mengganggu atau bertentangan dengan keamanan serta keselamatan negara dan bangsa.
- Tidak berlakunya lagi pasal 1 ayat (1) angka 1 sampai dengan 4 *Territoriale Zee Maritieme Kringen Ordonantie* 1939.

Implikasi positif klaim **Wawasan Nusantara** yang tercantum dalam UU No. 4/Prp 1960 adalah sebagai berikut :

1. Wilayah Indonesia berdasarkan TZMKO 1939 luasnya hanya 2.027.087 km², namun setelah berlakunya UU No. 4/Prp. 1960 tersebut, luas wilayah Indonesia menjadi 5.193.250. km² (daratan dan lautan). Berarti luas wilayah bertambah 3.166.163 km² (perairan) atau lebih kurang bertambah 145% dari luas sebelumnya. Meskipun pertambahan wilayah tersebut berwujud perairan, tetapi di perairan tersebut terdapat banyak sumber daya alam, seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan perikanan.
2. Konsep ‘tanah-air’ yang tercantum didalam alinea ke-4 pembukaan UUD 1945 dan Pasal 1 (1) UUD 1945 dapat benar-benar dimiliki oleh Indonesia.

Dalam usaha mewujudkan konsep **Wawasan Nusantara** ini, pemerintah RI telah dua kali berhasil mengklaim konsep **Wawasan Nusantara** itu di forum internasional, yaitu dalam konferensi hukum laut internasional pada tahun **1958** dan tahun **1960**; tetapi belum mendapatkan hasil sebagaimana diharapkan namun Deklarasi Djuanda 1957 telah dilegitimasi ke dalam bentuk undang-undang (UU no. 17/1985) yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam hal ini, ada dua macam jalur yang ditempuh pemerintah RI dalam memperjuangkan konsep **Wawasan Nusantara**. Kedua macam jalur tersebut adalah:

- a. Jalur internasional; yaitu seperti yang sudah dilakukan, dengan jalan memperjuangkan dalam pembicaraan-pembicaraan diforum internasional, konferensi hukum laut, dan forum-forum internasional lainnya.
- b. Jalur bilateral dan trilateral; yaitu dengan langsung mengadakan perundingan secara bilateral dan trilateral dengan negara-negara tetangga yang berkepentingan.

Diantara dua macam jalur cara memperjuangkan klaim **Wawasan Nusantara** tersebut, ternyata dalam jangka waktu pendek jalur bilateral lebih terlihat hasilnya (meskipun terbatas hanya negara-negara yang berkepentingan saja). Hal ini terbukti dengan adanya perundingan-perundingan antar negara yang menghasilkan perjanjian (*treaty*) atau persetujuan (*agreement*) mengenai perbatasan laut wilayahnya dengan wilayah RI. Perjanjian dan persetujuan yang dimaksudkan antara lain, termuat dalam:

1. **UU No. 22 tahun 1971 (LN. 1971 No. 16)** tentang perjanjian antara RI dan Malaysia tentang penetapan garis batas laut kedua negara di Selat Malaka

2. **Keputusan Presiden No. 66 Tahun 1972 (LN. 1972 No. 45)** tentang penetapan batas laut antara RI – Australia di Laut Timor dan Laut Arafuru.
3. **UU No. 6 Tahun 1973 (LN. 1973 No. 58)**, tentang perjanjian antara Indonesia dengan Australia mengenai garis-garis batas tertentu antara Indonesia dengan PNG
4. **UU No. 7 tahun 1973 (LN. 1973 No. 59)** tentang perjanjian antara Indonesia dengan Singapura mengenai penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di Selat Singapura.
5. **Keppres No 24 Tahun 1978 (LN. 1978 No 37)** mengesahkan persetujuan antara Pemerintah RI, Pemerintah Republik India dan Pemerintah Kerajaan Thailand, tentang penetapan titik pertemuan tiga garis batas dan penetapan garis batas Ketiga Negara di Laut Andaman.
6. **Keppres No. 6 Tahun 1980 (LN. 1980 No. 3)** tentang pengesahan persetujuan dasar antara RI dan PNG tentang pengaturan-pengaturan perbatasan kedua negara.

Walaupun pemerintah Indonesia telah mencapai sejumlah pengakuan atas batas wilayahnya, namun pada masa awal, Deklarasi Djuanda mendapatkan protes dari berbagai negara. Indonesia terus mempertegas posisinya dengan mengeluarkan Undang-undang No. 4 Prp Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1962 tentang lalu lintas damai kendaraan air asing. Selanjutnya, Indonesia kembali mempertegas mengenai landasan kontinen dan pada tanggal 17 Februari 1969 dan dikukuhkan melalui UU no. 1 tahun 1973 tentang landasan

kontinen.⁵Landas kontinen yang menurut pengertian hukum laut internasional mencakup seluruh pengertian tepian kontinen (*continental margin*) yang secara geografik meliputi: Landas atau Dataran Kontinen, Lereng Kontinen pada dasar laut dan tanah dibawahnya, sampai kedalaman 200 meter atau lebih, selama masih dapat dilakukan eksplorasi dan eksploitasi. Dalam Deklarasi Djuanda juga dibahas mengenai landas kontinen yang mengandung ketentuan sebagaimana dimaksudkan diatas adalah sebagai berikut:

- a. Segala sumber kekayaan-kekayaan alam yang terdapat dalam Landas Kontinen Indonesia adalah milik eksklusif negara Indonesia.
- b. Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan soal garis batas Landas Kontinen dengan negara-negara tetangga melalui perundingan.
- c. Jika tidak ada perjanjian garis batas, maka batas Landas Kontinen Indonesia adalah suatu garis yang ditarik ditengah-tengah antara pulau terluar Indonesia dengan titik luar wilayah negara tetangga.
- d. Klaim diatas tidak mempengaruhi sifat serta status dari perairan diatas Landas Kontinen Indonesia, maupun ruang udara diatasnya.

Wilayah ini mencakup dasar laut dan tanah dibawah dasar laut diluar laut teritorial dan merupakan kelanjutan dari wilayah daratan sampai tepi luar dari batas kontinen. Berdasarkan batasan ini negara pantai dapat menetapkan dua kriteria landas kontinen. *Pertama*, wilayah yang lebarnya dari zona landas kontinen dibatasi sampai jarak 200 mil laut dari garis dasar batas teritorial diukur. *Kedua*, tepi luar dari landas kontinen melebihi 200 mil dari garis dasar laut

⁵Syamsumar Dam, *Politik Kelautan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 20

teritorial diukur, sehingga negara pantai dapat menetapkan batas melebihi 200 mil laut tetapi tidak boleh melebihi 350 mil laut.

Regulasi konsepsi negara kepulauan (*archipelagic state*) telah mengakibatkan perubahan pada panjang garis pantai yang tadinya melebihi jarak jumlah total sepanjang 33.972 mil menjadi 8.069,8 mil. Perlu diingat bahwa bukan hanya negara RI saja yang mengeluarkan Deklarasi tentang Landas Kontinennya, tetapi Presiden Truman dari Amerika Serikat pada 28 September 1945 juga telah mengumandangkan Proklamasi tentang Landas Kontinen (*Continental Shelf*) negara Amerika Serikat

Terkait konsepsi negara kepulauan, konsepsi tersebut telah diterima oleh masyarakat internasional dan dimasukkan kedalam UNCLOS III 1982, utamanya pada pasal 46. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa, “*Negara Kepulauan*” berarti suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Sedangkan pengertian kepulauan disebutkan sebagai suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, dimana perairan diantaranya merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian. Di dalam sejarah hukum laut Indonesia sudah dijelaskan dalam deklarasi Juanda 1957, yang merupakan pernyataan politik tentang **wilayah perairan Indonesia**. Isi pernyataan politik/deklarasi tersebut adalah sebagai berikut “Segala perairan di sekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara RI dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan RI dan dengan demikian merupakan bagian

daripada perairan nasional yang berada dibawah kedaulatan mutlak daripada negara RI.”Sedangkan dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 6 Tahun 1996 tentang **Perairan Indonesia** disebutkan bahwa, “Negara Kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.”

Sementara itu, didalam Bab IV Konvensi Hukum Laut 1982 yang berisi 9 pasal, yang berisi antara lain tentang ketentuan-ketentuan tentang negara-negara kepulauan, garis-garis pangkal lurus kepulauan, status hukum dari perairan kepulauan, penetapan perairan pedalaman, dalam perairan kepulauan, hak lintas damai melalui perairan kepulauan, hak lintas alur-alur laut kepulauan, hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam pelaksanaan hak lintas alur-alur laut kepulauan.

Pengaturan dalam Bab IV Konvensi Hukum Laut 1982 dimulai dengan penggunaan istilah negara kepulauan (*archipelagic state*). Pada pasal 46 butir (a) disebutkan bahwa, “negara kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain” (pasal 46 butir (a). Maksud dari pasal 46 butir (a) tersebut adalah, secara yuridis, pengertian negara kepulauan akan berbeda artinya dengan definisi negara yang secara geografis wilayahnya berbentuk kepulauan. Hal ini dikarenakan, dalam pasal 46 butir (b) disebutkan bahwa kepulauan adalah suatu gugusan pulau-pulau, termasuk bagian pulau, perairan diantaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian erat sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografis, ekonomi dan

politik yang hakiki atau yang secara historis dianggap sebagai demikian. Dengan kata lain, pasal 46 ini membedakan pengertian yuridis antara negara kepulauan (*archipelagic state*) dengan kepulauan (*archipelago*) itu sendiri.

Perbedaan ini menimbulkan konsekuensi bahwa penarikan garis pangkal kepulauan (*archipelagic baseline*) tidak bisa dilakukan oleh semua negara yang mengatasnamakan dirinya sebagai negara kepulauan. Hal ini dikarenakan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bila ingin melakukan penarikan garis pangkal lurus kepulauan. Yaitu, satu kesatuan geografis, ekonomi, politik, dan historis. Adapun persyaratan obyektif yang harus dipenuhi oleh negara kepulauan dalam melakukan penarikan garis pangkal lurus kepulauan (pasal 47), yaitu:

- Rasio (perbandingan) antara luas wilayah perairan dengan daratan, yaitu suatu negara kepulauan minimal harus memiliki luas perairan yang sama besar atau maksimal hanya sembilan kali dengan luas daratannya.
- Panjang maksimum setiap segmen garis pangkal, yaitu panjang setiap garis lurus yang menghubungkan dua titik pangkal ditetapkan tidak boleh melebihi 100 mil laut, kecuali bila tiga persen dari jumlah seluruh garis pangkal yang mengelilingi setiap kepulauan dapat melebihi kepanjangan tersebut, maka dapat digunakan batas maksimum 125 mil laut.
- Penarikan garis pangkal demikian tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari konfigurasi umum kepulauan tersebut.
- Garis pangkal demikian tidak boleh ditarik ke dan dari elevasi surut, kecuali apabila di atasnya telah dibangun mercusuar atau instalasi serupa yang secara permanen berada di atas permukaan laut atau apabila elevasi surut tersebut

terletak seluruhnya atau sebagian pada suatu jarak yang tidak melebihi lebar laut teritorial dari pulau terdekat.

- Sistem garis pangkal demikian, tidak boleh diterapkan oleh suatu negara kepulauan dengan cara yang demikian rupa sehingga memotong laut teritorial negara lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif.
- Apabila suatu bagian perairan kepulauan suatu negara kepulauan, terletak diantara dua bagian suatu negara tetangga yang langsung berdampingan, hak-hak yang ada dan kepentingan-kepentingan sah lainnya yang dilaksanakan secara tradisional oleh negara tersebut terakhir diperairan mereka, serta segala hak yang ditetapkan dalam perjanjian antara negara-negara tersebut akan tetap berlaku dan harus dicermati.
- Untuk maksud menghitung perbandingan perairan dengan daratan, daerah daratan dapat mencakup didalamnya perairan yang terletak didalam tebaran karang pulau-pulau dan atol, termasuk bagian *plateau oceanic* yang bertebing curam yang tertutup atau hampir tertutup oleh serangkaian pulau batu gamping dan karang kering diatas permukaan laut yang terletak disekeliling *plateau* tersebut.
- Garis pangkal yang ditarik sesuai dengan ketentuan pasal ini, harus dicantumkan pada peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk menegaskan posisinya, dapat dibuat daftar koordinat geografis titiki-titik yang secara jelas memerinci datum geodetik.

- Negara kepulauan harus mengumumkan sebagaimana mestinya peta atau daftar koordinat geografis demikian dan harus mendepositkan satu salinan setiap peta atau daftar demikian ke Sekjen PBB.

Selanjutnya, diatur bahwa ketentuan yang tertuang dalam pasal 47 merupakan garis pangkal untuk pengukuran lebar laut teritorial, zona tambahan, ZEE dan landas kontinen bagi suatu negara kepulauan (pasal 48). Dengan kata lain, pasal 48 mengukuhkan bahwa untuk suatu negara kepulauan, garis-garis pangkal lurus kepulauan mempunyai fungsi yang sama dengan garis-garis pangkal lain yang diakui oleh Konvensi Hukum Laut 1982, seperti garis –garis pangkal biasa dan garis-garis pangkal lurus. Dari beberapa aturan yang telah diuraikan diatas, jelas bahwa Indonesia yang berstatus sebagai negara kepulauan akan diuntungkan, karena dapat menggunakan kelebihan-kelebihan yang dimiliki cara penarikan garis-garis pangkal kepulauan.

Dengan alasan di atas, Indonesia menuangkan konsepsi negara kepulauan dalam amandemen ke 2 UUD 1945 Bab IXA tentang wilayah negara. Pada pasal 25E berbunyi "Negara Kesatuan RI adalah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah-wilayah yang batas-batasnya dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang." Selain itu, dalam pasal 2 Undang-Undang No 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, pemerintah Indonesia secara tegas menyatakan bahwa negara RI adalah negara kepulauan.

Sebagaimana yang disyaratkan oleh pasal 46 Konvensi Hukum Laut PBB 1982, tidak semua negara yang wilayahnya terdiri dari kumpulan pulau-pulau dapat di anggap sebagai negara kepulauan. Dari peraturan peundang-undangan nasional

yang dikumpulkan oleh UN-DOALOS ada 19 negara yang menetapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan negara kepulauan, yaitu: **Antigua dan Barbados, Bahama, Komoro, Cape Verde, Fiji, Filipina, Indonesia, Jamaika, Kiribati, Maldives, Kepulauan Marshall, PNG, Kepulauan Solomon, Saint Vincent dan Grenadines, Sao Tome dan Principe, Seychelles, Trinidad dan Tobago, Tuvalu, dan Vanuatu**

Selanjutnya dalam peraturan pelaksanaannya, pemerintah RI mengeluarkan PP No 38 tahun 2002 tentang daftar koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia. Pada pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa pemerintah menarik garis pangkal kepulauan untuk menetapkan lebar laut teritorial sedangkan penarikan garis pangkal kepulauan dilakukan dengan menggunakan; garis pangkal lurus kepulauan, garis pangkal biasa garis pangkal lurus, garis penutup teluk, garis penutup muara sungai, terusan dan kuala, serta garis penutup pada pelabuhan.

Hanya saja kepemilikan Indonesia terhadap pulau-pulau kecil, khususnya pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga masih menyisakan permasalahan. Lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke pangkuan Kerajaan Malaysia telah memberikan pelajaran kepada Indonesia atas sengketa wilayah antar negara. Kekalahan Indonesia dalam sengketa tersebut telah memberi kesadaran bagi pemerintah RI untuk tidak sekedar memiliki tanpa memiliki kemampuan untuk menguasai dan memberdayakannya. Berkaca dari maraknya potensi konflik dipulau-pulau kecil terluar, pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan **Perpres No 78 Tahun 2005** tentang pengelolaan pulau-pulau kecil terluar. Perpres tersebut bertujuan untuk:

- Menjaga keutuhan wilayah NKRI, keamanan nasional, pertahanan negara dan bangsa serta menciptakan stabilitas kawasan
- Memanfaatkan sumberdaya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan
- Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar juga diharapkan dapat mengatasi ancaman keamanan yang meliputi kejahatan transnasional, penangkapan ikan ilegal, penebangan kayu ilegal, perdagangan anak-anak dan perempuan (*humantrafficking*), imigran gelap, penyelundupan manusia (*people smuggling*), penyelundupan senjata dan bahan peledak (*arms smuggling*), peredaran narkoba, pintu masuk terorisme, serta potensi konflik sosial dan politik. Hal ini penting agar kesadaran untuk menjaga pulau-pulau kecil di perbatasan tetap ada, dan pulau-pulau kecil diperbatasan tidak dianggap sekedar halaman belakang.

Selanjutnya, di era Presiden Joko Widodo, gagasan membangun Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia tidak terlepas dari tekad Presiden Joko Widodo untuk mengulang kembali kebesaran sejarah masa lalu bangsa ini karena status sebagai poros maritim, atau tepatnya poros penghubung antara Tiongkok - India, sebenarnya pernah disandang Imperium Sriwijaya dan Majapahit ketika dengan armada lautnya yang hebat mampu menguasai dan mengendalikan Selat Malaka dan Sunda. Sebagai konsepsi strategi yang bersifat holistik dan menjadi fokus pembangunan Indonesia abad ke-21, konsep Poros Maritim Dunia ditopang lima pilar yaitu:

- a. *Budaya Maritim*. Merevitalisasi budaya maritim sebagai akar budaya bangsa melalui redefinisi identitas nasional Indonesia sebagai bangsa maritim.
- b. *Ekonomi Maritim*. Mengelola sekaligus melestarikan sumber daya maritim yang begitu melimpah bagi kemajuan dan kemakmuran bangsa.
- c. *Konektivitas Maritim*. Membangun infrastruktur maritim dan sarana/prasarana perhubungan (tol laut) sehingga terjalin konektivitas antarpulau seluruh Indonesia.
- d. *Diplomasi Maritim*. Mengedepankan metode *smart diplomacy* dalam membangun kerja sama bilateral/multilateral, termasuk dalam penanganan konflik regional aspek maritim.
- e. *Pertahanan Maritim*. Peningkatan kerja sama seluruh pemangku kepentingan yang bergiat di laut dan penguatan alutsista beserta doktrin, taktik, dan strateginya guna memperkuat sistem pertahanan negara di laut.

Langkah Presiden Joko Widodo merupakan terobosan baru dalam sejarah politik di Indonesia. Dengan visi maritimnya, Presiden Joko Widodo bertekad merubah paradigma berpikir bangsa yang selama ini sangat kedaratan (*continental oriented*). Seperti kita saksikan, dalam beberapa dekade terakhir orientasi pembangunan lebih dititikberatkan pada sektor pertanian dan industri manufaktur. Akibatnya, potensi maritim yang begitu melimpah terabaikan. Oleh karena itu sejak awal masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo berusaha keras mengakselerasi pembangunan sektor maritim yang terlupakan selama ini. Sektor maritim perlu dikelola dengan optimal dan dengan cara yang lebih profesional

sehingga potensi maritim bukan saja sekadar untuk menambah, namun bahkan menjadi sumber utama pendapatan nasional.

Dengan visi maritimnya pula Presiden Joko Widodo tampak ingin membawa bangsa besar ini sejajar dengan bangsa-bangsa maju lain di dunia. Namun tentu semua harus diawali dengan kemampuan Indonesia sendiri mengelola potensi maritimnya. Sebagai negara maritim dengan luas laut 5,8 juta km², garis pantai sepanjang 95.181 km (terpanjang ke-2 di dunia), kandungan sumber daya alam yang melimpah, dan secara geografis berada pada posisi silang strategis dunia, Indonesia memiliki potensi luar biasa yang bisa ditawarkan atau dikerjasamakan dengan dunia internasional. Beberapa potensi yang bisa ditawarkan ke investor asing antara lain pembangunan *deep seaport*, galangan kapal, pasar grosir hasil laut, dan wisata bahari.

Untuk merealisasikan visinya, maka perlu keselarasan cara pandang sebagaimana dinarasikan dalam konsep **Wawasan Nusantara**. Sebagai konsep geopolitik, **Wawasan Nusantara** pada dasarnya merupakan cara pandang bangsa yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 dan sejarah yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai suatu cara pandang, **Wawasan Nusantara** memberikan panduan setidaknya dalam empat aspek. *Pertama*, aspek budaya. Keanekaragaman budaya dapat mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. *Kedua*, aspek filosofi. Proses terbentuknya NKRI menimbulkan kesadaran akan arti pentingnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa. *Ketiga*, aspek kewilayahan. Dengan disahkannya

UNCLOS 1982 di forum PBB, maka bertambah luaslah perairan yurisdiksi nasional Indonesia 3x lipat menjadi 5,8 juta km². Sungguh suatu prestasi anak bangsa di bidang diplomasi yang layak dicatat dalam lembar sejarah. Sebagaimana kita ketahui, UNCLOS 1982 adalah konsep **Wawasan Nusantara** yang telah diinternasionalisasi. UNCLOS 1982 akhirnya diratifikasi dengan UU Nomor 17 Tahun 1985, dan terhitung mulai tanggal 16 Nopember 1994⁶ berlaku sebagai hukum positif. *Keempat*, aspek historis. Eksistensi bangsa Indonesia saat ini tidak dapat terlepas dari keterkaitannya dengan bangsa pendahulunya yang hidup di bumi nusantara, termasuk diantaranya keterkaitan dengan kerajaan bahari besar, seperti Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, dan kerajaan-kerajaan lain di bumi nusantara. Bangsa Indonesia saat ini bukanlah bangsa yang terbentuk sejak proklamasi Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, melainkan bangsa yang peradabannya telah tercatat sejarah sejak abad kelima dalam wujud pemerintahan kerajaan-kerajaan di bumi nusantara.

Dalam upaya mewujudkan tujuan nasionalnya, pemerintah Indonesia menetapkan sejumlah strategi pembangunan. Strategi pembangunan ini harus selaras dengan konsep **Wawasan Nusantara**, yang pada hakikatnya meliputi tiga aspek. *Pertama*, sarana (*means*). Yaitu segenap sumber daya nasional baik yang bersifat statis maupun dinamis. *Kedua*, cara (*ways*). Yaitu pemilihan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan. *Ketiga*, tujuan (*ends*). Yaitu terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

⁶ Badan Geospasial Indonesia : <http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/big-serahkan-peta-nkri-kepada-kemenkokesradiunduh> pada tanggal 12 Juli 2016

Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara adalah sebuah konsep yang dipakai oleh bangsa Indonesia untuk mendefinisikan dirinya sebagai sebuah negara kepulauan yang dihubungkan dan dipersatukan oleh lautan yang berada diantara pulau-pulau tersebut. Konsep Wawasan Nusantara memiliki dua elemen utama. Elemen pertama adalah elemen identitas Bangsa Indonesia, yang didasari oleh corak budaya kemaritiman, keberagaman suku, agama, dan ras, dan sejarah Indonesia. Elemen kedua adalah elemen strategis, yang berdasarkan kepada kalkulasi posisi strategis Indonesia sendiri, yang mengakibatkan banyaknya peluang dan sekaligus ancaman yang memiliki potensi untuk merusak persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wawasan Nusantara Sebagai Konsep Identitas Bangsa Indonesia

Pemikiran konsep Wawasan Nusantara sebagai konsep identitas bangsa sebetulnya memiliki akar sejarah yang sangat panjang. Walaupun jaman dahulu, berabad-abad sebelum kedatangan Kerajaan Belanda dan sebelum adanya gerakan untuk mencari identitas nasional yang dikukuhkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, belum ada pemikiran bahwa seluruh wilayah yang sekarang ini merupakan wilayah Indonesia yang memiliki sebuah identitas bangsa dan negara yang sama namun kesadaran atas strategisnya posisi Asia Tenggara dalam perpolitikan global sudah ada.

Jika ditarik jauh ke belakang, semakin ditinggalkannya orientasi ke laut oleh masyarakat kita telah terjadi sejak VOC *Vereenigde Oost-Indische Compagnie*

yang telah menancapkan pengaruhnya terhadap kerajaan Mataram Jawa agar kita lebih berorientasi kontinental agraris. Keterlibatan VOC dalam suksesi kepemimpinan di Jawa dari abad ke-17 hingga ke- 18 memiliki konsekuensi jatuhnya wilayah Pantai Utara Jawa (Pantura) melalui kontrak-kontrak politik yang dipaksakan. Situasi ini memposisikan VOC menjadi raja baru yang menguasai ekonomi di Jawa terutama yang berbasis di Laut Jawa yang diikuti penguasaan politik lebih luas pada masa-masa setelahnya.

Aktivitas ini kemudian semakin mempersempit aktivitas pelaut-pelaut pribumi yang diperparah oleh kebijakan Raja Mataram pada waktu itu, Amangkurat I (1647-1677). Secara represif, Amangkurat I telah menjauhkan rakyat Mataram dari aktivitas kemaritiman. Daerah-daerah yang menjadi pusat perdagangan pesisir yang lepas dari kendalinya dihancurkan dan sejak tahun 1651 melarang rakyatnya berdagang ke seberang lautan. Pada tahun 1655 Amangkurat I menutup semua pelabuhan dan memerintahkan pasukannya untuk melakukan penghancuran seluruh kapal Jawa.⁷ Sementara, dalam waktu yang bersamaan, VOC memulai pembangunan kantor-kantor perdagangan di wilayah-wilayah pantai maupun pedalaman Mataram yang menjadi penanda Mataram sebagai kerajaan yang sepenuhnya bersifat agraris. Pada masa Amangkurat III, secara sah VOC mendapatkan semua bandar laut yang sebelumnya dimiliki Mataram.⁸

⁷Anthony Reid, *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680: Jaringan Perdagangan Global*, Terjemahan R. Z Leirissa dan P. Soemitro (Jakarta: Yayasan Obor Indonesi, 2011) dan *Sejarah Modern Awal Asia Tenggara: Sebuah Pemetaan*. Terjemahan Sori Siregar (Jakarta: LP3ES, 2004), hlm. 105.

⁸F. A Sutjipto Tjiptoatmojo, "Kota-kota Pantai di Sekitar Selat Madura Abad XIX sampai Medio Abad XIX" (Disertasi Doktoral Ilmu Sejarah pada Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, 1983), hlm. 190-191.

Sepanjang sejarahnya, laut Indonesia memiliki peran historis yang penting dan akan memiliki peran yang jauh lebih penting di masa kini dan masa yang akan datang. Oleh karenanya, kita perlu merubah paradigma lama yang masih menganggap kita hanya sebagai negara agraris besar, namun mengabaikan kehidupan kemaritiman. A.B. Lopian mengungkapkan situasi ini terjadi karena kita selama ini telah salah mengartikan gelar yang telah kita sandang sebagai *archipelagic state*. *Archipelagic state* selama ini selalu diartikan sebagai negara kepulauan yang dipisahkan oleh lautan namun sesungguhnya, *archipelagic* merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani terbentuk dari dua suku kata yaitu *arch* (besar atau utama) dan *pelagos* (laut) sehingga lebih tepat memiliki makna sebagai negara laut utama yang dihiasi oleh pulau-pulau bukan negara pulau-pulau yang dikelilingi laut.⁹

Lebih lanjut, A.B. Lopian menegaskan bahwa sejarah Nusantara adalah sejarah bahari. Sementara, kata bahari yang memiliki tiga makna yaitu zaman dahulu kala, elok sekali, dan berkaitan dengan laut. Dengan kata lain, kata bahari memiliki makna yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan laut yang elok pada dahulu kala. Oleh karenanya, sejarah Nusantara adalah sejarah yang berkaitan dengan laut yang elok pada zaman dahulu kala.

Hanya saja Wawasan Nusantara saat ini tidak cukup hanya dimaknai sebagai hukum laut Indonesia. Wawasan Nusantara sebaiknya dimaknai sebagai konsepsi identitas bangsa Indonesia. Identitas bangsa yang memiliki ikatan sejarah dengan Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Demak, Banten, Padjadjaran,

⁹A B Lopian, *Orang Laut, Bajak Laut dan Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2009), hlm. 2

Gowa, Ternate, Tidore, dan kerajaan-kerajaan lainnya yang telah menduduki wilayah nusantara secara silih berganti hingga akhirnya muncul bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak tanggal 17 Agustus 1945. NKRI harus dimaknai bukan sebagai negara baru, melainkan suatu negara yang dibentuk oleh bangsa Indonesia yang mewarisi peradaban nenek moyangnya termasuk dari jaman kerajaan-kerajaan terdahulu di atas.

Sriwijaya adalah kerajaan nusantara pertama dan terluas melebihi Majapahit, luas kekuasaan Sriwijaya membentang dari Philipina di timur (dibuktikan dengan ditemukan kota di di Philipina yang bernama Srivijay) hingga di barat Madagaskar (kemungkinan sebagian timur pantai Afrika (dibuktikan dengan ditemukan banyak sisa artefak berupa peralatan dapur terbuat dari tanah liat yang mirip dengan peralatan yang banyak digunakan semasa jaman kerajaan Sriwijaya). Kemungkinan besar para pelaut Sriwijaya sudah menambang hingga ke Afrika, jauh sebelum bangsa Eropa menemukan Tanjung Harapan di Selatan Afrika. Hal tersebut juga salah satu faktor yang mendukung pendapat yang menyatakan bahwa pulau Sumatra disebut Pulau Emas. Tidak lain dan tidak bukan karena sejak jaman dulu bangsa Sriwijaya telah menguasai teknik pertambangan, dan bahkan telah mengekspansi pertambangannya jauh hingga ke benua Afrika. Di selatan batas kekuasaan Sriwijaya adalah pulau Jawa dan kemungkinan sebagian pulau Bali dan Nusa (dibuktikan dengan situs dan Candi Borobudur itu sendiri, sebab bangsa Sriwijaya penganut ajaran Budha sementara kerajaan di Jawa penganut Hindu, sehingga kemungkinan kuat candi Borobudur adalah hasil bangunan kerajaan Sriwijaya). Di utara batas kerajaan ini adalah Sri

Lanka dan Selatan Thailand (Sri Lanka pernah menjadi jajahan Sriwijaya, begitu juga Selatan Thailand, bahkan Thailand mengklaim bahwa pusat Sriwijaya ada di Thailand).

Fakta kedua, Sriwijaya adalah negara maritim kuat dengan kekuatan militer *super power* di Laut Malaka, Samudra Hindia, Laut Jawa, Laut China Selatan, Laut Sulawesi, dan Laut Selatan Jawa. Fakta menarik adalah salah satu raja Sriwijaya pernah meyerang hingga ke Kamboja dan meraih kemenangan mutlak. Namun sang raja tidak menjadikan Kamboja sebagai wilayah kekuasaannya sebab yang diinginkannya hanya kepala Raja Kamboja yang telah menyinggungnya dengan berkata kepada para mentrinya bahwa ia menginginkan melihat kepala Raja Sriwijaya ada di piring makannya. Penyerbuan berlangsung singkat dan Raja Kamboja dihukum mati karena telah menyinggung Sang Raja Sriwijaya. Fakta lainnya, Sriwijaya juga pernah melancarkan invasi ke Selatan Tiongkok. Mongol yang saat itu menjadi negara *super power* (menguasai Persia, Cina, Rusia, sebagian Eropa terutama Polandia dan Hungaria) tidak pernah berani menyerbu ke Sriwijaya karena armada mereka dua kali dihancurkan di laut saat hendak menginvasi Jepang. Hal ini dimungkinkan karena memang Sriwijaya merupakan satu-satunya negara maritim terkuat di dunia saat itu tetapi dunia tidak mengakui hal ini, karena mereka lebih suka mengklaim armada Mongol tenggelam karena Badai Kamikaze.

Sriwijaya adalah kerajaan yang ditakuti oleh Mongol. Sejarah membuktikan bahwa tentara Mongol yang kuat di bawah kekuasaan Khubilai Khan gagal menguasai Myanmar karena saat itu hampir seluruh Asia Tenggara di

bawah pengaruh Kerajaan Sriwijaya sehingga tidak tertutup kemungkinan bahwa Mongol juga gagal menginvasi Myanmar karena adanya campur tangan pasukan Sriwijaya dalam pertempuran Myanmar melawan pasukan Mongol. Kegagalan di laut dan di darat membuat Mongol mengubah taktik dengan cara mencoba menyerang Sriwijaya dari belakang. Mongol berupaya bersekutu dengan Singasari. Kerajaan di timur Pulau Jawa ini memang terkenal musuh bebuyutan Sriwijaya namun sayang cara ini pun gagal. Raja Singasari malah memotong telinga utusan Mongol. Raja terakhir Sriwijaya adalah raja pertama Kerajaan Malaka di Malaysia. Saat kerajaan Sriwijaya di ambang kehancuran, raja terakhir Sriwijaya melarikan diri ke Malaka yang saat itu memang bagian dari Kerajaan Sriwijaya, disana ia mendirikan Kerajaan Malaka dan masuk Islam.

Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan besar di nusantara yang mencapai puncak kebesarannya pada abad ke XIV. Pada masa itu, pemerintahan dikuasai oleh Raja Hayam Wuruk. Pada masa itu, kekuasaan dan kebesaran Kerajaan Majapahit sangat luas. Kerajaan ini memiliki pengaruh di seluruh nusantara, bahkan terhadap negara tetangganya di Asia Tenggara. Akan tetapi setelah berada dibawah kekuasaan raja-raja penggantinya, kekuasaan Kerajaan Majapahit berangsur-angsur mulai hilang.

Keruntuhan kerajaan Majapahit dilanjutkan dengan munculnya kekuatan baru kerajaan di daerah pesisir. Pada tahun 2002, Nurhadi Rangkuti menyampaikan sebuah makalah hasil penelitiannya pada Pertemuan Ilmiah Arkeologi IX di Kediri. Dalam makalahnya dikemukakan pembahasan mengenai daerah pinggiran Kota Majapahit. Hal ini dilakukan untuk mengetahui batas-batas hunian Kota

Majapahit pada masa pemerintahan Hayam Wuruk yang berdasarkan fenomena pemekaran kota (Rangkuti, 2008). Wilayah Kota Majapahit tersebut luasnya diperkirakan sekitar 11 x 9 km. Luas tersebut didasarkan atas temuan tiga yoni besar yang berhias *nagaraja*. Yoni ini merupakan bagian dari bangunan keagamaan yang terletak di pinggiran kota di penjuru mata angin. Dengan menghubungkan temuan yoni berhias *nagaraja* tersebut dengan jaringan kanal-kanal dan danau-danau yang ada di bagian dalam Kota Majapahit. Rangkuti mengemukakan suatu kemungkinan bahwa tata letak bekas Kota Majapahit itu melambangkan kisah *amèrtamanthana* (Rangkuti, 2006). Dari *Sèrat Pararaton*, kita mengetahui bahwa *Râjasawardhana* pada *Šaka* 1373 menjadi Raja Majapahit tetapi berkedudukan di *Kèliñ-Kahuripan* (*Bhre Pamotan añjénéñ i Kèliñ, Kahuripan, abhisekanira śrī Râjasawardhana*) (Par²:40).

Pada tahun *Šaka* 1390 *Bhre Pandansalas* berkeraton di *Daha*. Hal ini disebabkan keratonnya di *Tumapel* direbut oleh *Bhre Kertabhumi*. Awalnya *Kèliñ, Kahuripan* dan *Daha* adalah negara daerah yang membentuk Kerajaan Majapahit. Karena ketidakstabilan politik maka ibukota kerajaan sering berpindah dari satu propinsi ke propinsi yang lain. Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk telah mencapai masa keemasan. Pemberitaan *Prapanca* dalam *Kakawin Nagarakartagama* menjelaskan bahwa daerah yang ada dibawah pengaruh kekuasaan Majapahit sangat luas, yaitu meliputi hampir seluruh negara Indonesia sekarang, dimulai dari daerah di Pulau Sumatera bagian Barat, sampai ke daerah di Maluku bagian Timur. Bahkan, pengaruh Majapahit meluas sampai ke negara tetangga di Asia Tenggara yang dijalin dalam bentuk

persahabatan yang setara (*mitra satata*). Luas daerah pengaruh kekuasaan Majapahit di nusantara dikuatkan oleh pernyataan yang dikemukakan oleh Tomé Pires dalam tulisannya *Suma Oriental* pada 1512-1515. Di dalam *Suma Oriental* tersebut, Tomé Pires menulis:

“.... that the island of Java used to rule as far as the Moluccas (Malucco) on the eastern side and (over) a great part of the west, and that it had almost all the island of Sumatra under its dominion and all the islands known to the Javanese, and that it had all this for a long time past until about hundred years ago, when its power began to diminish until it came to its present state,....” (Costesão I, 1944:174)¹⁰.

Dari pernyataan Tomé Pires tersebut kita dapat mengetahui bahwa sampai kira-kira awal abad XV pengaruh Majapahit masih hampir di seluruh nusantara. Diluar persoalan pro dan kontra, Majapahit diakui merupakan sebuah kerajaan besar dan basis ekonominya yang bersifat agraris semi komersial. Pengaruhnya, setidaknya pengaruh kultural, cukup luas tersebar. Pada waktu itu, penguasa Majapahit telah berhasil sepenuhnya menegakkan kesatuan politik dalam suatu wilayah yang luasnya belum pernah terjadi pada masa sebelumnya Seperti tercermin dalam Kakawin Nagarakartagama, hubungan yang terjalin dengan kerajaan lain di nusantara merupakan hubungan kerjasama regional yang saling menguntungkan. Majapahit sebagai kerajaan agraris yang semi komersial berkepentingan untuk memperoleh komoditas perdagangan dan daerah pemasaran produk agrarisnya. Dengan demikian, Majapahit sebagai negara adikuasa

¹⁰ Hasan Djafar, *Masa Akhir Majapahit, Girindrawarddhana Dan Masalahnya*, 2009, Komunitas Bambu, Maret, Jakarta, hlm 42-47.

berkewajiban untuk melindungi daerah di nusantara tersebut untuk menjaga kestabilan regional, khususnya di bidang sosial-ekonomi. Nagarakartagama menyebutkan daerah di nusantara tersebut merupakan daerah yang dilindungi oleh Sri Maharaja Majapahit (*deśântara kacaya de śrînarapatî*). Kakawin Nagarakartagama tidak mencerminkan adanya kesan bahwa wilayah nusantara dan kerajaan lain di kawasan Asia Tenggara, seperti Syañka, Ayodhyapura, Dharmmânâgarî, Marûtma, Râjapura, Sinha-nagari, Cämpa dan Kâ merupakan wilayah kekuasaan atau jajahan Majapahit. Hubungan dengan kerajaan atau daerah tersebut merupakan hubungan persahabat (*mitra-ika satatä*)(Näg, XV:1).

Dibawah Raja Majapahit kita menemukan adanya sejumlah penguasa yang masing-masing berkuasa di sebuah negara daerah atau propinsi dengan kedudukan sebagai Paduka Bhatara. Hal yang demikian ini dapat memberikan gambaran kepada kita bahwa Kerajaan Majapahit dilihat dari struktur perwilayahannya merupakan suatu kerajaan yang terdiri dari kesatuan negara daerah atau propinsi. Berdasarkan sumber sejarahnya, dapat diketahui jumlah negara daerah yang ada di Kerajaan Majapahit pada saat itu. Jumlah ini ternyata pada beberapa saat tidak selalu sama. Dari Prasasti Warininpintu (1447), Serat Pararaton (akhir abad XV) dan Kakawin Nagarakartagama (1365), kita dapat mengetahui sejumlah negara-negara daerah pada masa tertentu.¹¹

Paul Kennedy menulis buku yang berjudul *The Rise and Fall of the Great Powers*. Kennedy berargumen bahwa jatuh bangun suatu negara pada dasarnya merupakan suatu hal yang bersifat alamiah (*natural*) dan tak terhindarkan

¹¹ Hasan Djafar, *Masa Akhir Majapahit, Girindrawarddhana Dan Masalahnya*, 2009, Komunitas Bambu, Maret, Jakarta, hlm 48-49.

(*inevitable*). Dengan kata lain, jatuh bangun suatu negara adalah suatu hal yang alamiah. Sebagaimana sejarah mencatat, betapa suatu bangsa yang zaman dahulu begitu besar, akhirnya jatuh seiring berjalannya waktu. Bangsa yang pernah besar itu antara lain, Yunani Kuno, Romawi Kuno, Viking, Mongolia dan Turki Ottoman. Bangsa Viking saat ini tidak lebih dari sekedar legenda. Bangsa Yunani Kuno yang menurut para ahli sejarah merupakan pusat peradaban dan sumber ilmu pengetahuan umat manusia, kini menjadi negara yang ekonominya paling terpuruk di Eropa. Demikian pula kebesaran Kekaisaran Mongolia yang pada abad XIV tercatat pernah menjadi kekaisaran terbesar sepanjang sejarah, kini eksistensi dan pengaruhnya boleh dikata telah menghilang dalam percaturan dunia.

Pada titik inilah peran pentingnya sejarah. Melalui sejarah kita akan memahami siapa identitas kita, dari mana kita kemarin, di mana kita sekarang dan kemana kita akan menuju besok. Sebagai bangsa yang secara historis maupun biologis merupakan keturunan bangsa Sriwijaya, Majapahit, Gowa, Ternate, Tidore, dan lain sebagainya; semestinya kita paham mengapa sebagai bangsa besar dan digdaya, mereka runtuh juga. Yang menyedihkan, sampai sekarang belum ada akademisi yang meneliti sedikit pun tentang faktor penyebab keruntuhannya. Kita perlu khawatir, karena sebagaimana sejarawan Inggris, Arnold Toynbee berpendapat bahwa sejarah cenderung berulang. Sifat dasar manusia yang cenderung tidak berubah, menyebabkan peristiwa sejarah masa lalu, pada waktunya datang kembali.

Hingga saat ini masih terdapat silang pendapat tentang identitas bangsa Indonesia. Ada yang masih menganggap bahwa bangsa Indonesia lahir pada tanggal 17 Agustus 1945. Ketiadaan konsensus akan identitas bangsa Indonesia akan sangat berbahaya bagi keutuhan wilayah Indonesia. Semangat etnonasionalisme/kesukuan dapat mengiring Indonesia menuju perpecahan. Sehingga sudah sepantasnya jika ada penegasan bahwa asal muasal bangsa Indonesia adalah meliputi masa Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Gowa, Ternate, Tidore, dan lain sebagainya.

Sebagai sebuah konsep geopolitik, Wawasan Nusantara harus menjadi referensi tentang identitas bangsa Indonesia. Artinya, melalui Wawasan Nusantara kita dipandu untuk menyadari hakikat bangsa Indonesia adalah bukan sebagai bangsa yang dipersatukan karena persamaan nasib sebagai wilayah yang pernah menjadi wilayah jajahan kolonial Kerajaan Belanda. Bangsa Indonesia harus dipandang sebagai bangsa yang sudah ada jauh sebelum Kerajaan Belanda menjejakkan kakinya di bumi nusantara. Nenek moyang bangsa Indonesia sudah ada sejak jaman dahulu. Bahkan diantaranya sempat menjadi kerajaan besar, seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Bangsa Indonesia di dalam NKRI merupakan bangsa yang terlahirkan kembali, namun berasal dari keturunan kerajaan-kerajaan yang pernah mendiami bumi nusantara.

Wawasan Nusantara Sebagai Konsep Strategis

Bernard H. M. Vlekke, dalam analisisnya mengenai sejarah Indonesia, menjelaskan bahwa Kertanegara, yang pada waktu itu adalah raja Kerajaan Singasari yang terletak di Jawa, melakukan kebijakan luar negeri yang sangat

aktif, dalam arti bahwa ia mengerti dan mengantisipasi ancaman-ancaman besar yang dilihatnya akan datang dari Imperium Mongol-China. Pada saat itu, Imperium Mongol-China dipimpin oleh Kublai Khan, yang sedang melakukan ekspansi besar-besaran ke Jepang dan Asia Tenggara. Untuk menghadapi ancaman Mongol tersebut, Kertanegara melakukan persekutuan politik dan militer dengan kerajaan-kerajaan lain di Asia Tenggara, misalnya dengan mengawini putri Champa, sebuah kerajaan yang terletak di Vietnam bagian Selatan.¹² Ia pun melakukan ekspedisi *Pamalayu* yang memiliki tujuan untuk menguasai kerajaan Melayu di Sumatera (Sriwijaya) dan mendominasi jalur perdagangan di Selat Malaka.¹³ Walaupun Kertanegara kemudian tewas dan kerajaan Singasari runtuh akibat diserang oleh Kerajaan Kediri, ide Kertanegara diwarisi oleh kerajaan penerusnya, yakni Kerajaan Majapahit, yang dibawah pemerintahan Mahapatih Gajah Mada melakukan ekspansi besar-besaran ke seluruh Nusantara dan menguasai jalur-jalur perdagangan beras dan rempah-rempah di Asia Tenggara.

Pada saat yang hampir bersamaan, Kubilai Khan wafat. Imperium Mongol-China tak lagi melakukan ekspansi ke kawasan Asia Tenggara dan bahkan akhirnya hancur. Setelah hancurnya Imperium Mongol-China, tak ada lagi ancaman besar yang menimpa Asia Tenggara. Maka dari itu, setelah Majapahit runtuh, ide Nusantara perlahan-lahan menghilang, karena tak ada laginya ancaman strategis yang begitu besar. Selain itu juga, tak ada lagi kerajaan penerus yang kuat seperti Majapahit. Jawa terpecah ke kerajaan-kerajaan kecil yang baru

¹² Bernard H. V. Vlekke, *Nusantara: Sejarah Indonesia* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008) 69-71

¹³ Anthony Reid, "Understanding Melayu (Malay) as a Source of Diverse Modern Identities," *Journal of Southeast Asian Studies* Vol. 32, No. 3 (2001) 297

beberapa abad kemudian dipersatukan kembali oleh Sultan Agung dari Mataram, walau persatuan ini pun hanya bersifat sementara yang disebabkan Mataram sepeninggal Sultan Agung, kembali dididera oleh perang saudara, yang menyebabkan Belanda mampu memperbesar pengaruhnya di Jawa, dan kemudian berangsur menjadi penguasa wilayah Indonesia.

Belanda yang waktu itu berada di Indonesia melalui perusahaan perdagangannya yakni *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) pada awalnya tidak tertarik menguasai seluruh Indonesia, selain daerah-daerah yang dianggap penting untuk mendukung perdagangan rempah-rempahnya, seperti Maluku dan Jawa namun semakin lama, VOC dan kemudian digantikan oleh Pemerintah Hindia Belanda, semakin terlibat kepada perpolitikan kerajaan-kerajaan di Indonesia, dan semakin memperlebar pengaruhnya. Puncaknya adalah dengan semakin besar ancaman dari negara saingannya seperti Inggris, maka Belanda pada akhirnya melakukan ekspansi besar-besaran, yang berujung kepada wilayah Indonesia sekarang ini. Menariknya, Belanda tidak menganggap seluruh lautan diantara pulau-pulau Indonesia sebagai wilayahnya. Hal ini terlihat dalam konsep Ordonansi Belanda tahun 1939, yang menekankan bahwa perairan teritorial pulau-pulau Indonesia hanya berjarak tiga mil dari garis pantai dasar pada waktu air surut.

Pandangan ini sebagian disebabkan oleh norma internasional dan limitasi teknologi pada waktu itu, dimana tiga mil merupakan jarak efektif dari tembakan meriam dan akibat bentuk bumi yang berbentuk bulat, hampir tak mungkin

melihat objek yang berjarak lebih dari tiga mil dari pinggir pantai.¹⁴ Selain itu juga, pandangan ini dipengaruhi prinsip *mare liberium* (lautan bebas), asas perdagangan bebas dan kebebasan bernavigasi, yang dikembangkan oleh Hugo Grotius, yang dipengaruhi oleh posisi Belanda yang waktu itu merupakan bangsa pedagang dengan kekuatan laut yang sudah jauh lebih berkurang dari kekuatannya dulu di era keemasannya. Selain itu, negara-negara Eropa yang menyetujui batasan tersebut memiliki wilayah yang tak terpisah-pisah, tipe kontinental, yang membuat mereka tidak menyadari pentingnya lautan yang diantara pulau-pulau sebagai pemersatu identitas dan bahaya secara strategis terhadap keutuhan bangsa dan negaranya akibat pihak asing yang mampu dengan seenaknya memasuki perairan wilayah kepulauan. Tak heran kalau setelah Indonesia merdeka, para pemimpin Indonesia melihat Ordonansi Belanda tersebut, yang dibuat dengan cara pandang kontinental, sangat tidak cocok untuk negara yang berbentuk kepulauan seperti Indonesia. Cara pandang yang membatasi wilayah territorial hanya berjarak tiga mil ini sangat merugikan wilayah Indonesia yang berbentuk negara kepulauan karena ada kesan bahwa wilayah Indonesia itu terpisah-pisah oleh lautan sehingga kita merasa tidak mengenal diantara sesama warga negara Indonesia.

Pemerintah kemudian berusaha mengganti Ordonansi Belanda tersebut dengan menghidupkan kembali konsep strategis Nusantara, yang didasari oleh kesadaran bahwa wilayah Indonesia yang dipisahkan oleh laut, yang mana kapal-kapal asing pun dengan bebas berlayar diantara pulau-pulau Indonesia dan

¹⁴ H.S.K. Kent, "The Historical Origin of the Three-mile Limit," *The American Journal of International Law* Vol. 48, No. 4 (October 1954) 537-553

membantu menghidupi pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di Indonesia, yang merupakan ancaman besar bagi kesatuan dan persatuan bangsa. Akibatnya, pada tanggal 13 Desember 1957, Perdana Menteri Djuanda yang pada waktu itu memimpin pemerintahan Indonesia, mengumumkan konsep strategis yang tertuang dalam Deklarasi Djuanda yang berisi :

- 1) Semua perairan diantara dan yang menghubungkan pulau- pulau dengan tidak memandang luas/ lebar adalah wilayah kedaulatan mutlak negara Indonesia, merupakan perwujudan bentuk wilayah yang utuh dan bulat
- 2) Pengaturan lalu lintas damai pelayaran di perairan pedalaman bagi kapal asing
- 3) Penentuan batas wilayah sesuai dengan asas negara kepulauan (*archipelago State Concept*) laut teritorial dengan lebar 12 mil diukur dari garis pantai dasar yang menghubungkan pulau- pulau terluar NKRI pada waktu air surut.¹⁵

Deklarasi Djuanda secara jelas menekankan azas Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan, yang mana tertuang terutama pada poin pertama bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang disatukan, bukan dipisahkan, oleh perairan diantara pulau-pulau Indonesia. Deklarasi ini muncul pada kondisi yang secara internasional cukup bersahabat karena pada waktu itu pun banyak negara yang merasa batasan tiga mil territorial sudah tidak lagi cocok untuk era modern. Misalnya pada tahun 1945, Presiden Amerika Serikat Harry Truman mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan menguasai wilayah sampai batas

¹⁵Lihat Dalam Buku Anna Martina et.al, Kewarganegaraan, (Bandung : UPT Bidang Studi Universitas Padjadjaran, 2010) halaman 120

kontinentalnya. Pada akhirnya, di tahun 1958 Perserikatan Bangsa-bangsa meratifikasi *United Nations Conference on the Law of the Sea I* (UNCLOS I) yang mengatur batas wilayah dan batas kontinental, walaupun tidak menjawab permasalahan perairan territorial yang diangkat oleh Deklarasi Djuanda.

Di era Orde Baru, Deklarasi Djuanda terus diperjuangkan melalui Konsep Wawasan Nusantara. Pada tanggal 17 Februari 1969, mengikuti hasil yang disepakati UNCLOS I, pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Landas Kontinen Indonesia yang berisi antara lain :

- a. Segala sumber kekayaan yang terkandung dalam landas kontinen Indonesia merupakan hak mutlak bangsa dan negara Indonesia
- b. Melaksanakan perundingan penyelesaian soal garis batas dengan negara tetangga
- c. Bila tidak ada garis batas maka landas kontinen adalah garis yang ditarik ditengah (middle line) antara pulau terluar Indonesia dengan wilayah terluar tetangga.
- d. Klaim tersebut tidak mempengaruhi sifat serta status daripada perairan diatas landas kontinen Indonesia maupun ruang diatasnya.

Adanya peraturan mengenai landas kontinen Indonesia ini maka pemerintah Indonesia menyatakan dirinya berhak melakukan eksplorasi bahkan penelitian pada laut Indonesia beserta sumber daya alamnya. Pada 21 Maret 1980 Indonesia mengeluarkan pengumuman tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yaitu pengelolaan batas wilayah selebar 200 mil hal ini dilakukan karena beberapa

pertimbangan salah satunya adalah untuk mendukung kebutuhan pembangunan nasional.

Perjuangan untuk mewujudkan Deklarasi Djuanda pun mencapai puncaknya melalui kesepakatan UNCLOS III yang akhirnya mengakui Indonesia sebagai negara dengan asas kepulauan dan perairan diantara pulau-pulau dianggap sebagai wilayah Indonesia namun setelah reformasi, kini Indonesia kembali menghadapi tantangan internasional baru, yakni persaingan antara China dan Amerika Serikat, yang memiliki potensi mengganggu keamanan di Asia Tenggara dan posisi strategis Indonesia sendiri. Dalam hal ini Wawasan Nusantara harus mampu menjawab tantangan tersebut dimana Wawasan Nusantara berperan sebagai cara pandang bangsa Indonesia dalam melihat diri (identitas) dan lingkungannya (analisis lingkungan strategis atau geopolitik).

Strategi Pembangunan Maritim Indonesia

Strategi Pembangunan Maritim Indonesia akan didekati melalui 2 konsep yaitu pertama pandangan Parker.¹⁶ Parker menjelaskan bahwa strategi raya adalah serangkaian kebijakan tentang keamanan yang menyangkut ancaman, cara melawannya, dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan melalui integrasi dari segenap aspek politik, ekonomi dan militer suatu negara dalam mencapai tujuan jangka panjangnya. Sementara konsep kedua adalah pandangan Till¹⁷ menjelaskan bahwa dalam konteks Kekuatan Maritim (*Seapower*), kebijakan nasional suatu negara merupakan asal dari kebijakan lain seperti kebijakan luar negeri, ekonomi,

¹⁶ Geoffrey Parker. 2000 *The Grand Strategy of Philip II*. New Haven: Yale University Press. Hal.1

¹⁷ Geoffrey Till. 1998. *Seapower: A guide to the Twenty-First Century*. London: Frank Cass. Hal. 3

dan pertahanan yang akhirnya mengerucut menjadi kekuatan maritim, baik sipil maupun militer. Dari dua konsep yang dipaparkan diatas, ada 3 poin utama yang menjadi fokus dalam menetapkan strategi pembangunan maritim Indonesia yaitu pertama politik luar negeri atau kebijakan luar negeri, kedua adalah ekonomi dan yang ketiga adalah militer atau pertahanan. Berikut ini akan dijelaskan satu persatu

I. Kebijakan atau Politik Luar negeri

Kebijakan atau politik luar negeri Indonesia yang paling utama disini adalah Kerja sama internasional di bidang pertahanan. Kerja sama dibidang pertahanan pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan luar negeri Indonesia untuk membangun rasa saling percaya atau *confidence building measures* (CBMs) dengan bangsa-bangsa lain. Kerja sama pertahanan diprioritaskan pada kerja sama bilateral dengan negara-negara Asia Tenggara dan negara-negara sub kawasan Pasifik Barat Daya dalam rangka turut memelihara stabilitas regional. ASEAN dan ARF (ASEAN Regional Forum) dan Forum Dialog Pasifik Barat Daya merupakan wadah kerja sama antar negara anggota kawasan yang penting untuk dikembangkan di masa mendatang. Melalui forum-forum tersebut permasalahan-permasalahan kawasan akan dapat diselesaikan dengan mengedepankan semangat kebersamaan, perimbangan kepentingan yang dibangun berdasarkan prinsip persamaan hak, saling menghormati, dan tidak saling intervensi.

Kekuatan-kekuatan yang terlibat di Asia Tenggara dan Asia-Pasifik perlu untuk disikapi dengan baik. Indonesia perlu untuk dekat dengan Amerika Serikat, Tiongkok, dan negara-negara anggota ASEAN, juga Australia, India, Jepang, dan

Korea Selatan. Jika belajar dari Singapura, kemitraan strategis yang dibangun Singapura terhadap Amerika Serikat telah membuat kedua negara memiliki hubungan antar militer yang sangat erat. Padahal Singapura bukanlah negara sekutu AS seperti Filipina dan Thailand. Indonesia perlu belajar dari Singapura tentang bagaimana mengoptimalkan kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat yang telah ditandatangani sejak tahun 2005 namun demikian, hubungan militer Indonesia dengan Tiongkok juga tetap penting untuk dilakukan. Tiongkok juga memiliki teknologi pertahanan yang maju, terutama dalam hal rudal jarak jauh dan pesawat tempur, yang patut untuk diserap Indonesia. Untuk hal tersebut, Indonesia perlu belajar dari Thailand dan Pakistan. Sebagai negara sekutu AS, Thailand dan Pakistan telah menjalin kerjasama industri pertahanan yang sangat erat. Pakistan mengembangkan pesawat tempur generasi 4 bersama Tiongkok yang dinamakan JF-17 Thunder atau FC-1 Xiaolong. Upaya transfer teknologi memerlukan diplomasi politik yang terampil dan butuh waktu yang relatif lama. Pemerintah harus menetapkan sasaran teknologi dan negara mitra yang dipilih untuk dapat memulai kampanye diplomasi tersebut. Sementara Thailand telah mampu memproduksi Multi-Launchers Rocket Systems (MLRS) lisensi Tiongkok dengan nama DTI-1 (Lisensi teknologi WS-1B) dan DTI-1G (dengan teknologi WS-32) yang terus dikembangkan lebih lanjut.

II. Ekonomi

Letak geografis Indonesia yang strategis yang tepat berada di persimpangan dua samudera dan dua benua menyebabkan Indonesia memiliki nilai yang dianggap penting bagi sejumlah negara lain, terutama negara-negara maju. *Choke*

point yang diminati pelayaran asing selain Selat Malaka (yang jasa pelabuhannya didominasi Singapura) adalah Selat Sunda. Melalui Selat Sunda, kapal-kapal tonase besar dari Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan dapat melintas menuju ke Asia Timur tanpa melewati Selat Malaka. Kemudian kapal-kapal dari Asia Timur juga dapat melintasi Selat Sunda menuju Australia.

Sudah sepatutnya Indonesia mengembangkan jalur perlintasan di Selat Sunda yang hingga saat ini belum mampu dilintasi kapal lebih dari 100.000 DWT karena kedalamannya yang kurang dari 20 meter. Upaya pendalaman sangat vital untuk dilakukan (alih-alih pembuatan Jembatan Selat Sunda yang justru akan mematikan usaha jasa pelayaran ferry di Selat Sunda. Selain itu perlu dibangun pelabuhan kapal internasional yang melayani jasa bongkar muat kontainer dengan kapasitas besar sebagai *global transshipment port Indonesia*. Pelabuhan ini harus didukung dengan sumber daya listrik dan prasarana perhubungan yang memadai, seperti jalur kereta api, jalan raya dan jembatan.

Indonesia tidak dapat hanya melihat ke dalam (*inward looking*) untuk mengeksploitasi sumber daya yang ada tanpa berupaya mengembangkan kapabilitas baru yang lebih memberi nilai tambah untuk bangsa. Salah satu contoh adalah batu bara yang sejak abad ke-18 hingga 20 menjadi komoditas energi yang sangat tinggi namun di abad ke-21 ini, potensi ekonomi batubara semakin menurun, karena efek negatif terhadap pencemaran lingkungan yang relatif tinggi. Kalau kita belajar dari Korea Selatan, dari awal kemerdekaan, penguasa Korsel menyadari pentingnya mengembangkan sektor generatif.

Hal itu meliputi sektor-sektor ekonomi unggulan yang secara simultan bisa menjadi sumber akumulasi kapital dan memungkinkan terjadinya pertumbuhan berbagai industri turunan dan industri terkait, sekaligus sumber inovasi teknologi dan kelembagaan, seperti pada kasus industri baja dan industri pembuatan kapal. Industri baja yang kuat menjadi katalis bagi tumbuhnya industri otomotif, pembangunan kapal, peti kemas, jalan raya, konstruksi, dan industri perlengkapan rumah tangga, yang saling mendukung dan memperkuat. Sementara itu, industri pembuatan kapal melahirkan industri rekayasa elektrik, elektronik, kimia, material, dan mekanis.

Kemajuan perindustrian juga tidak lepas dari penguasaan bangsa Korea dalam industri manufaktur yang berkembang menjadi riset-pengembangan. Penguasaan industri ini lalu didukung penguasaan pasar lokal oleh bangsanya sendiri. Pemerintah Korea Selatan mendorong impor bahan-bahan baku mentah dan teknologi dengan mengorbankan barang konsumtif serta mendorong masyarakat untuk menabung dan melakukan investasi. Korea Selatan memang tidak memiliki sumber daya alam yang memadai oleh karena itu tingkat ketergantungan terhadap ekspor dan impor sangat tinggi, terbukti bahwa pada tahun 2010 ini ketergantungan perdagangan Korea mencapai kisaran 80 persen namun Korea Selatan bisa mengubah ketergantungannya menjadi ketergantungan yang dinamis yang dapat membantu menjalankan perekonomiannya dengan baik, diantaranya adalah dengan adanya *Export-Oriented Industri (EIO)* serta *Economic Planning Board (EPB)* yang diberlakukan oleh pemerintahnya.

Korea Selatan juga sangat pandai dengan pengelolaan ekonomi luar negeri yang baik, pemerintahan yang bersih, iklim perdagangan dunia yang liberal, makro ekonomi yang solid dan kondisi sosial politik yang bebas dari konflik itulah yang mengakibatkan Korea Selatan maju dalam berbagai hal terutama dalam bidang industrialisasinya.

Intinya adalah jika kita mampu belajar dari Korea Selatan maka Indonesia harus mampu membangun infrastruktur kemaritiman agar geliat ekonomi dan perdagangan bisa tumbuh dengan baik serta adanya kondisi politik yang stabil membuat ekonomi Indonesia membaik.

III. Pertahanan

Kemampuan Pertahanan perlu terus ditingkatkan sehingga minimal tidak terlalu jauh dan dapat menyelaraskan diri dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis yang terus berubah. Kemampuan pertahanan yang besar memberi sebarang jaminan akan kelangsungan kebijakan dan program pemerintah serta untuk mengamankan kepentingan dan tujuan maritim nasional dari segenap ancaman, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Peningkatan kemampuan kemampuan tersebut meliputi kemampuan TNI di bidang intelijen, bertempur untuk mempertahankan NKRI, operasi militer selain perang (OMSP) dan dukungan. Pemerintah Indonesia juga harus mengoptimalkan kemampuan Industri pertahanan Dalam negeri.

Contoh sederhana adalah dalam kasus pengembangan industri pertahanan nasional. Dua instansi yang paling dominan adalah militer (sebagai pengguna) dan industri pertahanan nasional (sebagai produsen). Kedua entitas di atas memiliki

grammar yang berbeda. Jika militer menuntut produk yang berkualitas tinggi, maka industri pertahanan yang belum matang (*infant industry*) tidak akan mampu memproduksinya namun sebaliknya, jika militer harus membeli produk yang baru mampu diproduksi lokal, maka dikhawatirkan kualitasnya tidak memenuhi standar yang diharapkan (militer). Sementara itu, jika ada kemampuan memproduksi produk yang berkualitas, namun produk yang dipesan militer jumlahnya di bawah *economies of scale*, maka industri pertahanan nasional akan kesulitan untuk menghasilkan produk dengan harga yang bersaing dengan produk impor sehingga perlu adanya kesepakatan antara pihak militer dan industri pertahanan nasional untuk menyamakan persepsi dan menetapkan tujuan yang selaras demi mencapai manfaat yang bersifat lintas sektoral, yaitu pertahanan, perdagangan, industri dan ekonomi. Artinya, dicapainya titik temu dimana pihak militer tetap mendapatkan produk yang sesuai ekspektasi (walau bukan yang ideal), namun masih mendatangkan laba yang signifikan bagi industri pertahanan nasional. Semangat untuk mencapai titik temu tersebut telah dituangkan di UU no.16/2012 tentang Industri Pertahanan namun dalam pelaksanaannya, masih saja ada kebijakan di masing-masing angkatan yang tidak sejalan dengan regulasi yang telah ditetapkan, dengan memaksakan pembelian alutsista import, padahal jenis alutsista tersebut telah mampu diproduksi di dalam negeri. Perilaku yang menyimpang tersebut umumnya dikemas dengan rapih dengan mengatasnamakan kebutuhan operasional militer namun pengadaan barang import tidak pernah dikaji secara objektif untuk membuktikan akuntabilitasnya

Kajian diatas telah menjelaskan Strategi Pembangunan Maritim Indonesia yang melihat dari sisi kebijakan luar negeri, pembangunan dalam bidang ekonomi serta kemampuan untuk membangun pertahanan atau militer yang kuat. Ketiga hal ini harus terintegrasi dan mendukung antar bidang satu dan yang lainnya.

Poros Maritim Dunia

Poros Maritim Dunia ialah visi Indonesia untuk menguasai jalur pelayaran maritim dunia. Lokasi geografis Indonesia yang strategis dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menguasai posisi strategis dalam bidang kelautan dunia dengan memanfaatkan hubungan diplomatik dengan kekuatan besar di kawasan (seperti Amerika Serikat dan Tiongkok). Dalam mencapai tujuan tersebut, Indonesia harus mampu memanfaatkan persaingan politik internasional di kawasan Asia- Pasifik, terutama persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Amerika Serikat sebagai hegemoni dunia dan Tiongkok sebagai hegemoni regional di Asia-Pasifik. Poros Maritim Dunia diposisikan menjadi strategi nasional Indonesia dalam menghadapi persaingan politik internasional di kawasan Asia- Pasifik.

Pada 2011 Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan dengan nama *Pivot to the Pacific* yang direvisi menjadi *Rebalancing toward Asia*¹⁸ sebagai respon atas kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan besar di Asia Pasifik. Wujud dari kebijakan ini adalah memprioritaskan kawasan Asia Pasifik dalam perencanaan militer AS, kebijakan luar negeri, dan kebijakan ekonomi. *Rebalance* dimaksudkan dengan penarikan pasukan AS di Irak dan juga di Afghanistan, serta

¹⁸ <http://www.theguardian.com/world/2011/nov/17/obama-asia-pacific-address-australia-parliament> diunduh pada tanggal 2 Agustus 2016

menambah perhatian ke Asia Pasifik untuk mengantisipasi tantangan dan peluang di masa depan. Mantan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton pada tahun 2011 menyatakan bahwa di Asia Tenggara *pivot*¹⁹ dimaksudkan untuk menjaga jalur laut dari Samudera Hindia melalui Selat Sunda ke Pasifik yang dilalui rute perdagangan dan energi yang paling dinamis.²⁰ Tow berpendapat bahwa kepentingan utama AS di Asia Tenggara adalah : pengamanan alur laut, pasar, dan sumber daya alam.

Dua tahun setelah itu, tepatnya pada tanggal 3 Oktober 2013, Presiden Tiongkok Xi Jinping mencanangkan visi Jalur Sutra Maritim (JSM)²¹ abad ke-21 di hadapan parlemen Indonesia yang dalam bahasa Inggris secara lengkap dinamakan *21st Century Maritime Silk Route Economic Belt* atau *Maritime Silk Road* (MSR). Inti dari visi ini adalah pembangunan prasarana transportasi laut dari Tiongkok melintasi Asia Tenggara ke Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa dan Afrika yang disponsori Tiongkok. Mirip dengan Marshall Plan setelah Perang Dunia ke-2, Tiongkok berkomitmen untuk menyediakan dana hingga \$ 40 Milyar untuk pembangunan pelabuhan laut dalam (*deep sea port*) di lokasi-lokasi strategis di rute Jalur Sutra Maritim (JSM) Tiongkok. Jalur Sutra Maritim dimaksudkan untuk mengamankan jalur maritim dari Tiongkok, ke Laut Cina Selatan, Selat Malaka, Selat Lombok dan Selat Sunda serta kemudian sepanjang

¹⁹ Lihat Dalam Buku Sukawarsini Djelantik, Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terkait Konflik Laut Cina Selatan Dalam Asia Pasifik Konflik, Kerja Sama dan Relasi Antarkawasan, (Jakarta : Universitas Katholik Parahyangan dan Yayasan Obor Indonesia, 2015) Halaman 146

²⁰ Tow, W. 2012. *The Eagle Returns: resurgent US strategy in Southeast Asia and its policy implications*. Policy Analysis. Barton : Australian Strategic Policy Institute (ASPI)

²¹ http://usa.chinadaily.com.cn/china/2013-10/04/content_17008940.htm diunduh pada tanggal 3 Agustus 2016

Samudera Hindia Utara ke Teluk Persia, Laut Merah dan Teluk Aden. Dengan kata lain, jalur maritim akan menghubungkan Asia ke Timur Tengah, Afrika Timur dan Eropa.

Dari ulasan geostrategi di atas, dapat ditarik kesamaan bahwa kedua kekuatan besar Amerika Serikat dan Tiongkok berupaya untuk mengamankan : (1) rute pelayaran; (2) akses ke pasar; (3) dan akses ke sumber daya di kawasan Asia-Pasifik dan Indonesia tepat berada di tengah-tengah Asia-Pasifik yang harus dapat memanfaatkan sebaik-baiknya demi kebesaran bangsa Indonesia. Tiongkok berhadapan dengan Amerika Serikat. Posisi Indonesia menghadapi persaingan antara kedua kekuatan besar ini tidak mudah. Di satu sisi, Indonesia ingin terus menjaga hubungan positif dengan Tiongkok, terutama karena Indonesia menginginkan investasi dari Tiongkok untuk memperbaiki infrastruktur dan juga memperkuat industri domestik yang bisa membuka lapangan kerja. Di sisi lain, Indonesia pun sadar bahwa Tiongkok bisa berpotensi besar untuk menciptakan instabilitas di Asia Tenggara, terutama sebagai pengancam persatuan ASEAN. Hal ini terlihat dalam KTT ASEAN di Kamboja di tahun 2012, di mana dalam pertemuan tersebut, Kamboja, atas desakan Tiongkok, menolak usul Filipina untuk memasukkan isu Laut China Selatan ke dalam Joint Communiqué ASEAN. Walaupun pada akhirnya kesatuan ASEAN bisa dipertahankan, namun terlihat bahwa pengaruh Tiongkok tak bisa dianggap remeh.

Informasi dari Stanford University menekankan satu hal penting, yakni sampai sekarang definisi “*poros*” masih belum jelas secara akademis, karena kata “*poros*” sendiri memiliki banyak sekali pengertian yang berbeda-beda. Misalnya,

sewaktu Kementerian Luar Negeri menterjemahkan kata “*poros*” sebagai “*fulcrum*,” di sana muncul implikasi bahwa penggunaan *fulcrum* itu artinya kebijakan luar negeri Indonesia justru sangatlah pasif dan reaktif terhadap kepada kebijakan negara-negara lain.

Misalnya, dua negara yang paling berpengaruh di dunia, yakni Amerika Serikat dan Tiongkok, di mana kebijakan luar negeri Indonesia hanyalah untuk menjaga agar Indonesia tetap netral, berada di antara dari kedua negara tersebut dan tidak memiliki kebijakan sendiri yang independen. Akhirnya, pusat kekuatan di kawasan Asia Tenggara berada di Beijing dan Washington, bukan Jakarta. Sedangkan konsep “*axis*” yang sering juga dipakai secara implisit juga menekankan bahwa Indonesia adalah salah satu dari kekuatan penting, tetapi bukan yang terpenting, dan tidak jelas siapa yang akan menjadi partner Indonesia dalam koalisi tersebut.

Pengertian lain lagi untuk poros adalah “*hub* atau *nexus*,” yakni pusat segala kegiatan, dimana apapun yang terjadi harus melalui posisi tersebut, dan mungkin ini yang paling mirip dengan apa yang dimaksud oleh Jokowi melalui konsep “Poros Maritim Dunia.” Tiga konsep ini pun pada dasarnya sangat berbeda dan memiliki dampak dan implikasi kebijakan yang berbeda pula. Intinya adalah selama pemerintah Indonesia masih belum jelas dalam mendefinisikan konsep poros tersebut, maka konsep Poros Maritim Dunia sendiri masih sangat sulit untuk dimengerti dan juga diaplikasikan. Ini merupakan masalah dari pemerintah yang lebih mementingkan soal jargon daripada bagaimana mencoba membuat garis besar kebijakan yang bisa diaplikasikan secara efektif.

Dari berbagai diskusi ilmiah, telah mengemuka 3 (tiga) kelompok konsep definisi Poros Maritim Dunia, terutama tentang definisi dari kata 'poros.' Kelompok pertama memaknai poros sebagai pusat atau sumbu, yang mengartikan PMD sebagai visi untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat dari aktivitas kelautan dunia. Bagi kelompok pertama, PMD lebih cenderung diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai ***Global Maritime Fulcrum*** atau **GMF**. Kelompok kedua memaknai poros sebagai *alignment* seperti dahulu ada poros Beijing-Pyongyang-Jakarta. Bagi kelompok kedua, PMD cenderung diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi ***Global Maritime Axis*** atau **GMA**. Bagi kelompok kedua, ada *alignment* yang ingin dibangun antara Indonesia dengan kekuatan lain di kawasan regional yang dapat menunjang posisi strategis dan kepentingan nasional Indonesia. Namun ada juga yang kelompok ketiga yang memaknai poros maritim sebagai jalur pelayaran maritim, sehingga PMD dimaksudkan adalah visi Indonesia untuk menguasai jalur pelayaran maritim dunia. Kelompok ini cenderung menerjemahkan PMD menjadi ***Global Maritime Nexus*** atau **GMN**.

Tim Peneliti cenderung untuk masuk dalam kelompok ketiga yang mana berasumsi bahwa lokasi geografis Indonesia yang strategis seharusnya dapat dimanfaatkan Indonesia untuk menguasai posisi strategis dalam bidang kelautan dunia dengan memanfaatkan hubungan diplomatik dengan kekuatan besar di kawasan (seperti Amerika Serikat dan Tiongkok). Dalam mencapai tujuan tersebut, Indonesia harus mampu memanfaatkan persaingan politik internasional di kawasan Asia-Pasifik, terutama persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Amerika Serikat sebagai hegemon dunia dan Tiongkok sebagai

hegemon regional di Asia Pasifik telah menetapkan perhatian khusus di kawasan Asia-Pasifik. Kedua kekuatan yang saling berkompetisi ini tidak mustahil untuk saling dirangkul oleh Indonesia, sesuai dengan kelebihan masing-masing. Hal tersebut telah dibuktikan oleh Thailand dan Pakistan, dimana kedua negara tersebut adalah sekutu Amerika Serikat, namun kedua negara juga membangun kemitraan strategis dengan Tiongkok di bidang ekonomi dan industri pertahanan.

Dalam konteks merangkul dua kekuatan yang saling bersaing, Kuik²² menawarkan konsep baru yang dinamakan *hedging*. *hedging* adalah dipeliharanya suatu kesempatan bagi suatu negara untuk memihak ke kekuatan mana saja manakala negara tersebut berada dalam posisi harus memihak ke kekuatan tertentu yang paling menguntungkan negaranya. Dengan mengadopsi konsepsi *hedging* dari Kuik, Tim Peneliti cenderung berpendapat bahwa makna Poros Maritim Dunia adalah suatu tindakan *hedging* Pemerintah Indonesia dengan membangun kerjasama dengan kekuatan-kekuatan besar di kawasan Asia-Pasifik, baik itu Amerika Serikat, Tiongkok, regionalisme (ASEAN) dan internasionalisme (PBB), atas aspek maritim demi mengamankan kepentingan nasional Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai hegemoni regional di Asia Tenggara bahkan dunia.

Poros Maritim Dunia harus disepakati dahulu apakah sebagai geostrategi atau doktrin atau visi atau *grand strategy* atau tujuan nasional. Pandangan Tim Peneliti, lebih cenderung menempatkan Poros Maritim Dunia sebagai tujuan maritim nasional karena PMD merupakan tujuan (*ends*) untuk mencapai sesuatu

²² Kuik Cheng-Chwee. 2010. *Smaller States' Alignment Choices: A Comparative Study Of Malaysia And Singapore's Hedging Behavior In The Face Of A Rising China*. Baltimore: Johns Hopkins University (dissertation)

pada dimensi geografis (dalam hal ini dimensi maritim). Poros Maritim Dunia dapat dianggap sebagai respon Indonesia dalam dinamika geopolitik di Asia-Pasifik, dimana posisi geografi Indonesia berada tepat di tengah-tengah Asia-Pasifik. Tujuan maritim nasional ini menjadi acuan geografi dari kebijakan luar negeri Indonesia. Lebih rinci lagi, Poros Maritim Dunia menjelaskan kemana sebuah Indonesia mengkonsentrasikan upayanya dengan memproyeksikan kekuatan militer dan mengarahkan aktivitas diplomasi. Seperti strategi pada umumnya, tujuan (ends) mengkaitkan antara cara (*means*) dengan strategi (*ways*), dalam hal ini sumber daya nasional dengan strategi pembangunan maritim nasional.

Setelah memahami pengertian dari definisi Poros Maritim Dunia, berikut ini akan dijelaskan mengenai 5 pilar Maritim Indonesia sebagai upaya mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

a. Budaya Maritim

Jika rakyat Indonesia secara umum ingin mendapat porsi lebih dari manfaat perekonomian berbasis maritim di Indonesia, maka budaya dan sikap mentalnya terhadap maritim harus berubah. Maritim merupakan bagian integral dari identitas dan potensi kemakmuran bagi masyarakat di Indonesia. Karakter maritim yang berciri dinamis, egaliter, dan pantang menyerah perlu terus ditumbuh-kembangkan. Apabila ini terus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan, bukan tidak mungkin bangsa Indonesia akan kembali menemukan jati dirinya dalam dua-tiga generasi ke depan sebagai bangsa

maritim. Perubahan sikap mental ini harus diprogramkan melalui pendidikan formal dan informal.

Jika belajar dari sejarah, terutama tentang keruntuhan kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan sejumlah kerajaan lain di bumi nusantara maka salah satu penyebabnya adalah tidak adanya proses regenerasi pemimpin negara yang baik. Untuk menghindari kesalahan yang sama di masa lalu, Indonesia perlu untuk memiliki program pengembangan kepemimpinan dan proses regenerasi kepemimpinan secara berkesinambungan. Para calon pemimpin bangsa kita tidak saja harus memahami pengetahuan pada tataran strategis, namun juga memiliki sikap mental yang cerdas, berani, arif dan bijaksana; serta mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok. Terlebih lagi dalam konteks ASEAN, pemimpin Indonesia harus juga mampu menjadi pemimpin yang diterima dan dihormati oleh negara-negara ASEAN dan juga memahami nilai strategis kemaritiman Indonesia.

Budaya lain yang turut mendukung visi Poros Maritim Dunia adalah merubah orientasi pembangunan dari Jawa-sentris menuju keluar Jawa. Perlu dibangun budaya baru dengan kecenderungan untuk memindahkan segala kegiatan sosial-budaya yang memungkinkan keluar Jawa. Kegiatan sosial-budaya tersebut dapat berupa pusat politik, pelayaran, perdagangan, industri, perikanan, pertanian, pendidikan, penelitian, kesehatan, kesenian, dan bahkan hankam keluar Jawa agar di daerah baru nanti akan menjadi penggerak roda perekonomian daerah. Sudah sejak kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, pusat sosial-budaya berada di Pulau Jawa. Rencana Presiden Soekarno untuk memindahkan ibukota ke

Palangkaraya merupakan pandangan visioner dengan nilai nasionalisme yang tinggi. Sudah saatnya pemerataan pembangunan ekonomi Indonesia dikondisikan untuk lebih menyebar ke luar Jawa. Perlu kemauan para elit politik untuk bergerak dari zona nyaman menuju kesejahteraan sosial yang lebih merata. Jika dikaitkan dengan visi Poros Maritim Dunia, maka perubahan budaya keluar Jawa harus diprioritaskan pada pembangunan sentra pertumbuhan ekonomi yang berada di pesisir pantai. Sentra-sentra ekonomi baru ini akan menjadi sentra-sentra kegiatan sosial-budaya baru di Indonesia yang dilengkapi dengan prasarana pelabuhan laut dalam (*deep sea port*) yang memadai agar proses transformasi pembangunan dapat terakselerasi lebih cepat.

Kalau zaman dahulu leluhur bangsa Indonesia dapat tampil sedemikian hebat, seharusnya bangsa Indonesia saat ini bisa mengulangi kehebatan leluhurnya. Harus diakui, masih banyak persoalan bangsa ini mulai dari yang kelas berat seperti pudarnya nilai-nilai Pancasila, sampai dengan yang kelas ringan seperti budaya mencari kesenangan secara instan. Di sinilah perlunya bangsa Indonesia melakukan revolusi mental dengan penuh kesadaran kembali ke jati diri Pancasila.

b. Ekonomi Maritim

Untuk menjadi Poros Maritim Dunia, maka infrastruktur tol laut seperti sarana prasarana pelabuhan, kapal angkut / penumpang, alat navigasi pelayaran, juga harus dibangun. Kita banyak sekali memiliki pulau / pelabuhan - **Pulau Sabang, Pulau Batam, Pulau Bintan, Cilacap, Bitung, Palu, Kupang, dan Sorong** - yang sebenarnya sangat cocok dikembangkan menjadi *deep sea port*

atau *global transshipment port* seperti Singapura. Pengembangan sistem transportasi yang bertumpu pada jalur darat, selain berpotensi mendegradasi kualitas lingkungan pada konsentrasi habitat hidup penduduk Indonesia, juga tidak banyak menjawab persoalan transportasi barang yang efektif. Di sinilah gagasan tol laut Presiden Jokowi menjadi sangat penting. Kelancaran distribusi logistik ke seluruh pelosok nusantara dipastikan akan mengurangi beban Pulau Jawa yang sudah sangat berat. Pada saat yang sama, geliat ekonomi di luar pulau yang paling padat penduduknya ini, akan terus tumbuh dan berkembang, sehingga kesenjangan antar wilayah dapat terus ditekan.

Abad ke-21 diwarnai dengan bergesernya pusat ekonomi dunia, dari Eropa menuju Asia-Pasifik. Banyak negara terpaksa merubah strategi nasionalnya. Peluncuran strategi baru Amerika Serikat, *Rebalancing* contohnya, adalah upaya negeri adidaya tersebut menyongsong era Asia-Pasifik. Selain itu, pada saat ini, forum Masyarakat Ekonomi ASEAN sudah mulai berlaku di mana setiap negara anggota bebas berkompetisi. Di sinilah Indonesia harus merubah paradigma berpikir dan pembangunannya, karena masa depan Indonesia berada di laut.

Motif dibalik fokus politik internasional di kawasan Asia-Pasifik juga tidak terlepas dari motif ekonomi, yaitu : *freedom of navigation*, akses kepada sumber daya alam, dan akses kepada pasar. Motivasi ekonomi tersebut sudah melebur kedalam kepentingan nasional masing-masing negara, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan. Motivasi tersebut berimbas ke urusan politik manakala hasil interaksi politik berujung pada blokade atau pengepungan atas aktivitas ekonomi seperti yang terjadi pada Korea Utara dan Iran (yang diblokade

oleh Amerika Serikat dan sekutunya). Korea Utara memiliki masalah dengan Amerika Serikat terkait perang dengan Korea Selatan yang didukung Amerika Serikat dan kepemilikan senjata nuklir. Sedangkan Iran bermasalah karena kepemilikan persenjataan nuklir yang mengancam kepentingan Amerika Serikat (dimana secara historis, rezim Shah Iran yang dijatuhkan pada tahun 1980-an adalah rezim yang didukung pemerintah AS).

c. Konektivitas Maritim

Jika melihat peta rute pelayaran internasional pada peta di bawah, ada satu rute gemuk yang melewati Selat Malaka; dan 2 (dua) rute sedang yang melewati Selat Sunda dan Laut Sulawesi. Indonesia harus mampu mengimbangi Singapura untuk memanfaatkan satu rute gemuk pelayaran dunia yang ada. Demikian pula di dua rute sedang yang melalui Selat Sunda dan Laut Sulawesi. Seluruh pelabuhan strategis di rute-rute tersebut tersebut perlu didukung oleh sumber listrik yang memadai agar kapal-kapal dapat bersandar di sejumlah pelabuhan tersebut. Perlu dikaji penggunaan pembangkit listrik tenaga nuklir yang sangat efisien untuk lokasi kepulauan seperti Indonesia.



Gambar. Lalu Lintas Perdagangan Dunia²³

Selain perspektif ke luar, perlu untuk dikaji rute-rute pelayaran yang ideal untuk melayani kebutuhan transportasi domestik. Rute-rute pelayaran tersebut hendaknya dibangun dengan mempertimbangkan komoditas unggulan yang dikapalkan dari daerah terdekat. Perlu perbaikan atas sistem *hub and spoke* yang ada, dengan mendapatkan masukan dari pelaku ekonomi yang terlibat dalam pelayaran domestik tersebut. Pelibatan investor swasta, baik lokal maupun asing sangat dibutuhkan untuk menyediakan kapal-kapal kargo berbagai jenis, menyesuaikan dengan jenis komoditas yang diangkut.

²³ <http://www.the-american-interest.com/2013/10/10/the-indo-pacific-whats-in-a-name/> diunduh pada tanggal 2 Agustus 2016



Gambar Peta Rute Pelayaran Domestik

Rute pelayaran domestik ini harus mengoptimalkan konektivitas orang dan barang di seluruh pusat perekonomian di Indonesia, baik yang sudah berkembang, maupun yang sedang dikembangkan. Jika melihat rencana pembangunan lima *deep sea port* di Kuala Tanjung, Jakarta, Surabaya, Makassar, Sorong; maka ada beberapa wilayah di Indonesia yang belum terjangkau dengan rute pelayaran pendukung (lihat peta di atas), seperti untuk wilayah Pontianak dan sekitarnya, wilayah Bengkulu, Sumatera Barat, bagian Barat Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Gorontalo.

Dalam kondisi di atas (manakala dukungan pemerintah pusat memiliki keterbatasan), maka peran paradiplomasi²⁴ pemerintah daerah diperlukan untuk mempromosikan pembangunan infrastruktur transportasi maritim di daerahnya.

²⁴ Menurut i <http://www.stefanwolff.com/working-papers/Paradiplomacy.pdf> (diunduh pada tanggal 5 Agustus 2016) paradiplomasi adalah kemampuan kebijakan luar negeri dari pemerintah daerah (*sub-state*) di arena internasional dalam mencapai kepentingan daerahnya

Pemerintah daerah dengan otoritas yang diberikan pemerintah pusat, dapat mengatur terwujudnya investasi asing ke daerahnya. Hal ini pun sejalan dengan adanya kebijakan sejumlah negara maju yang memiliki program bantuan luar negeri (*foreign aid*) kepada negara-negara berkembang.

Hal lain yang penting dalam konektivitas ini adalah adanya hubungan (interkoneksi) antara rute pelayaran laut dengan prasarana darat (seperti jalan raya dan jalur kereta) dan udara. Interkoneksi ini akan membuat lalu lintas orang dan barang menjadi semakin mudah, murah, dan menjangkau daerah-daerah yang lebih luas lagi.

d. Diplomasi Maritim

Dalam diplomasi maritim, ada tiga hal yang perlu dijadikan panduan, yaitu: (1) perlunya untuk selalu memprioritaskan kepentingan nasional Indonesia; (2) perlunya untuk memperjuangkan kepentingan ASEAN dimana Indonesia dianggap sebagai pemimpin alami ASEAN; (3) perlunya untuk selalu mengupayakan solusi *win-win* dari masalah sengketa antara negara anggota ASEAN dengan pihak lain di luar ASEAN, seperti dengan kekuatan besar (AS, Tiongkok, India, dan Jepang). Ketiga panduan ini dapat saja memiliki potensi konflik satu sama lain. Sehingga perlu adanya prioritas dari ketiganya dan prioritas yang paling rasional adalah dengan mengedepankan kepentingan Indonesia dahulu, kemudian ASEAN, dan baru kepentingan kekuatan-kekuatan besar.

Kepentingan nasional yang menonjol saat ini adalah penegakan hukum atas penangkapan ikan ilegal, penyelundupan dan sengketa wilayah. Pemerintah

telah melakukan tindakan yang cukup tegas dalam menangani *illegal fishing*. Kemudian yang perlu diatur lagi adalah perlunya Indonesia memiliki kebijakan bilateral dengan sejumlah negara tetangga menyangkut penangkapan ikan tradisional lintas batas. Penangkapan ikan tradisional ini memiliki kaitan sejarah dan budaya yang perlu untuk diakomodir negara-negara terkait, termasuk Indonesia.

Masalah penyelundupan masih merupakan ancaman serius bagi Indonesia dan negara-negara di sekitar Indonesia. Penyelundupan ini meliputi penyelundupan narkoba (*drug trafficking*), penyelundupan manusia (*people smuggling*), penyelundupan komoditi (seperti minyak, batu bara, ikan, dan lain sebagainya) yang merugikan negara dari segi ekonomi dan sosial namun dengan perairan dalam Indonesia yang sedemikian luas, perlu adanya suatu sistem pengawasan yang komprehensif agar mampu mendeteksi, mencegah, dan menindak potensi penyelundup dengan cepat.

Pada saat ini, masih terdapat beberapa permasalahan perbatasan antara Indonesia dengan 10 (sepuluh) negara tetangga yang belum terselesaikan secara tuntas dan jelas²⁵. Sengketa perbatasan ini akan selalu menjadi ganjalan bagi

²⁵ Sengketa wilayah RI dengan negara lain, antara lain : (1) dengan Singapura (walaupun sudah ada perjanjian perbatasan kedua negara, namun masih ada potensi perubahan batas negara sebagai dampak dari kegiatan reklamasi yang dilakukan Singapura yang menggunakan pasir laut dari Indonesia); (2) dengan Malaysia masih memiliki masalah perbedaan pemahaman batas laut di Bagian Utara Selat Malaka, Selat Singapura dan Laut Cina Selatan serta perairan Sebelah Timur Pulau Sebatik (termasuk perairan di Ambalat); (3) dengan Australia tentang garis batas laut perlu penataan ulang; (4) dengan Filipina yang diselesaikan tahun 2014; (5) dengan Vietnam tentang landas kontinen di perairan antara Pulau Sekatung di Kepulauan Natuna dan Pulau Kondor di Vietnam; (6) dengan RRC masih memiliki perbedaan pandangan tentang batas perairan khususnya di perairan Natuna; (7) dengan India juga menyimpan potensi konflik perbatasan perairan teritorial di pulau Rondo (NAD) yang termasuk di sekitar pulau Andaman dan Nicobar; (8) dengan Timor Lorosae, sampai saat ini masih belum mempunyai perjanjian batas wilayah laut; (9) dengan PNG, telah memiliki kesepakatan tentang batas-batas wilayah darat dan perairan. Walau demikian

ASEAN untuk dapat menyelesaikan masalah lain dengan pihak di luar ASEAN. Perlu adanya resolusi sengketa yang bersifat kreatif seperti pembentukan zona pembangunan bersama (*joint development zone*) di wilayah sengketa oleh negara-negara terkait agar semua pihak dapat memperoleh manfaat bersama secara adil. Peran Indonesia sebagai pemimpin alami ASEAN harus dipertahankan dengan membantu negara anggota yang mengalami kesulitan. Kasus sengketa antara Filipina dan Vietnam dengan Tiongkok di Laut China Selatan harus menjadi agenda politik Indonesia melalui forum ASEAN yang diprioritaskan. Vietnam dan Filipina sudah mengambil langkah untuk mempererat hubungan bilateral dengan Amerika Serikat. Hal ini secara tidak langsung telah menurunkan kredibilitas ASEAN pada umumnya dan Indonesia pada khususnya sebagai pihak yang seharusnya dapat membantu mencari solusi atas sengketa di Laut China Selatan.

Di lain pihak, kepentingan kekuatan besar di Asia-Pasifik harus disikapi sedemikian rupa agar Indonesia dapat memperoleh manfaat yang nyata. Pemerintah Tiongkok menyediakan dana untuk menunjang geostrategi Jalan Sutra Maritim senilai \$ 40 Milyar. Hal serupa juga dapat ditawarkan oleh Amerika Serikat, Jepang, dan India. Dituntut keterampilan diplomasi tingkat tinggi yang mampu membuat Indonesia memperoleh manfaat dari setiap peluang yang ada.

terdapat beberapa aspek kultural yang berpotensi menjadi konflik. Kesamaan budaya dan ikatan kekeluargaan antar desa yang berada di kedua sisi perbatasan menimbulkan adanya klaim terhadap hak-hak tradisional dan dapat berkembang menjadi lebih kompleks; (10) dengan negara Palau, masih belum sependapat mengenai batas ZEE kedua negara, terutama di pulau-pulau Asia dan pulau-pulau Mapia. Pemerintah Indonesia masih tetap melihat hubungan bilateral yang telah terjalin selama ini sebagai suatu hal yang sangat berharga dan perlu dipertahankan.

Kemudian perlu disadari bahwa situasi geopolitik di Asia-Pasifik masih didominasi oleh supremasi hegemoni Amerika Serikat dan sekutunya. Salah satu agenda dari aliansi AS adalah untuk melakukan *containment strategy*²⁶ terhadap Tiongkok di bidang politik dan keamanan. Posisi Indonesia yang berada tepat di tengah wilayah aliansi AS. Sehingga Indonesia perlu mengkaji dengan cermat langkah yang paling menguntungkan dalam menghadapi aliansi AS. Kebijakan politik luar negeri bebas aktif perlu dimaknai dengan lebih bijak. Bebas-aktif seharusnya diartikan juga sebagai kebebasan Indonesia untuk membangun *alignment* dengan negara mana pun atau memilih *non-align* namun pilihan akhir harus berdasarkan kajian seksama dari dinamika geopolitik regional dan global. Bukan pensakralan *non-alignment* sebagai politik bebas aktif Indonesia dalam situasi apapun (tidak peduli pada dinamika struktur keamanan yang terjadi). Pakistan dan Thailand merupakan contoh negara yang mendemonstrasikan politik luar negeri yang sangat dinamis. Di satu sisi, mereka adalah sekutu pertahanan AS, namun di sisi lain mereka juga membangun kemitraan strategis dengan Tiongkok untuk bidang ekonomi dan industri pertahanan.

e. Pertahanan Maritim

Sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim. Hal ini diperlukan bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim Indonesia, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. Jika mengkaji keamanan, maka

²⁶ E. Ratner. 2013. Rebalancing to Asia with an Insecure China. The Washington Quarterly. halaman. 21-38. Washinton D.C. : Center for Strategic and International Studies

secara otomatis harus mengkaji kerawanan (sebagai lawan dari keamanan). Ada 3 (tiga) faktor domestik yang menyebabkan kerawanan di laut, yakni: rendahnya pengawasan (atau dikenal dengan istilah *maritime domain awareness*),²⁷ rendahnya kemampuan penindakan terhadap oknum, dan tingginya potensi ekonomi di laut. Dengan kurangnya pengawasan, maka akan menyebabkan oknum memiliki kesempatan untuk melakukan aksi pelanggaran hukum. Tanpa adanya penindakan oknum yang tegas, akan menyebabkan oknum tidak jera untuk melakukan pelanggaran hukum lagi. Sedangkan, potensi ekonomi tinggi di laut akan menarik perhatian berbagai pihak untuk mengeksploitasinya.

Perairan Indonesia terdiri dari lautan di antara pulau-pulau besar yang sangat luas. Hal tersebut membutuhkan postur dan doktrin pertahanan maritim yang disesuaikan dengan karakter yang khas tersebut yang membedakan dengan doktrin pertahanan maritim negara lain pada umumnya. Untuk Indonesia, perairan dalam membutuhkan patroli kapal-kapal besar yang mampu mengarungi laut yang jauh dari pantai. Kalau angkatan laut negara lain membutuhkan *blue water navy* untuk keamanan negaranya serta menghadirkan Angkatan Laut sebagai bagian dari diplomasi, maka untuk Indonesia TNI- AL harus mencapai pada tingkat minimal *green water navy* yaitu kemampuan TNI- AL untuk menghadirkan kekuatan militernya sampai kepada wilayah perbatasan.

Sebagai negara kepulauan, doktrin militer perlu memberi perhatian lebih kepada operasi lintas udara dan amfibi. Menurut mantan Kepala Staf TNI- AL Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebianto Indonesia setidaknya harus mampu

²⁷http://www.navy.mil/navydata/cno/Navy_Maritime_Domain_Awareness_Concept_FINAL_2007.pdf diunduh pada tanggal 5 Agustus 2016

memiliki postur TNI- AL sampai kepada tingkat *green water navy*²⁸ dimana dalam kekuatan *green water navy* ini harus didukung oleh postur dan peralatan yang muktahir antara lain Kapal Kombatan, LST untuk operasi amfibi, Pesawat Udara Patroli Maritim, Kapal Ranjau dan Sistem Pertahanan Pantai yang kuat dengan dukungan radar yang mampu beroperasi selama 24 jam. Juga tidak kalah pentingnya adalah kekuatan TNI-AU yang terdiri atas pesawat buru sergap, Helikopter Serbu, Pesawat Pengangkut pasukan hingga memiliki radar- radar udara yang mampu beroperasi secara maksimal.

Dalam menanggulangi kerawanan di laut, diperlukan postur pertahanan yang memiliki daya tangkal. Letjen. TNI (Purn.) Kiki Syahnakri²⁹ berpendapat bahwa postur pertahanan yang memiliki daya penangkalan dapat dilihat dari 3 (tiga) hal, yaitu: kekuatan, kemampuan dan penggelaran. Kekuatan di sini diartikan sebagai kualitas dan kuantitas persenjataan. Seperti tipe pesawat tempur, kapal selam, kapal perang, tank, dan lain-lain beserta jumlahnya. Sedang kemampuan adalah kemampuan personil pertahanan dalam mengoperasikan kekuatannya. Seperti kemampuan penerbang dalam melakukan pertempuran udara, awak kapal selam dalam melakukan *submarine warfare*, awak MBT dalam pertempuran dengan tank, dan lain-lain.

²⁸ Ada 3 Jenis doktrin kekuatan Angkatan Laut pada berbagai negara yaitu 1. *Brown Water Navy* adalah kemampuan Angkatan laut suatu negara untuk menghadirkan kekuatan militernya sampai kepada wilayah laut dalam negaranya serta garis pantainya. 2. *Green Water Navy* adalah kemampuan Angkatan Laut suatu negara untuk menghadirkan kekuatan militernya sampai kepada wilayah perbatasan negaranya. 3. *Blue Water Navy* adalah kemampuan Angkatan Laut suatu negara untuk menghadirkan kekuatan militernya keberbagai penjuru dunia. Lihat Dalam buku Aris Priyono Wibowo, Kilas Balik TNI- Angkatan Laut 2005-2006, (Jakarta : Dinas Penerangan TNI- Angkatan Laut , 2007) halaman 86

²⁹ Ian Montratama. 2014. Analisis “Deterrence Perception” atas Kemampuan Alat Utama Sistem Senjata Malaysia Dihadapkan dengan Indonesia dalam Konteks Pengendalian Blok Laut Ambalat (2010-2014). Unhan: Tesis.

Kemampuan ini juga termasuk kemampuan memelihara dan merawat alutsista sehingga tingkat kesiapan alutsista dapat selalu optimal. Penggelaran adalah penempatan secara geografis dari kekuatan pertahanan yang dilengkapi dengan sistem pendukungnya. Seperti lokasi pangkalan udara, pangkalan kapal perang dan kapal selam, dan sebagainya. Penggelaran ini juga termasuk penempatan pangkalan untuk resuplai logistik dan fasilitas pemeliharaan dan perawatan. Lokasi geografis dari kekuatan pertahanan dan fasilitasnya akan menjadi faktor penting dalam pelaksanaan strategi tempur.

Untuk kekuatan Indonesia, gelar kekuatan laut masih belum optimal. Karena pangkalan ideal angkatan laut hanya satu, yaitu di Surabaya. Pangkalan laut lain belum memiliki fasilitas resuplai (untuk BBM, air, bahan makan dan suplai logistik lainnya), *docking*, pergudangan, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan yang ideal. Sehingga perlu adanya program pemerintah untuk menambah pangkalan angkatan laut (AL) yang setara dengan pangkalan AL di Surabaya di lokasi lain yang strategis.

Lokasi yang dipilih harus disesuaikan dengan lokasi ancaman (baik tradisional maupun non tradisional). Jika wilayah Indonesia akan dibagi menjadi 3 (tiga) Kogabwilhan, maka perlu dikaji lagi penempatan 3 pangkalan laut besar yang tidak harus berada di Jakarta dan Surabaya (dimana kegiatan di pelabuhan sipilnya sudah terlalu padat). Sebagai penopang utama operasional kapal-kapal perang Armada Barat, Lantamal III/Jakarta yang berkedudukan di Pondok Dayung sudah sangat tidak memenuhi syarat. Demikian juga Lantamal V/Surabaya. Dalam keterbatasan anggaran dibandingkan dengan ancaman yang

harus direspon, maka perlu adanya kajian untuk menemukan formula yang paling sesuai bagi negara tersebut untuk menetapkan lokasi yang terbaik untuk penempatan pangkalan besar TNI AL.

Dari uraian di atas, dalam konteks Poros Maritim Dunia, penekanan kekuatan pertahanan maritim akan mengarah pada pembangunan postur kekuatan matra laut dan udara. Sedangkan kekuatan matra darat akan mendapat tugas tambahan sebagai kekuatan pertahanan lapis dalam atas lokasi-lokasi strategis aspek kemaritim, seperti pelabuhan laut, pembangkit listrik, jalur utama transportasi darat, selain tugas pokoknya menjaga keutuhan wilayah daratan Indonesia secara umum.

Simpulan

Munculnya Wawasan Nusantara sebagai konsep pemersatu bangsa telah digunakan sejak masa setelah kemerdekaan. Hal itu diperlukan untuk mempertebal rasa nasionalisme masyarakat Indonesia yang baru merdeka. Nama raja besar digunakan untuk menunjukkan adanya masa keemasan yang pernah dialami oleh Indonesia sehingga membuat rasa masyarakat Indonesia semakin bangga.

Wawasan Nusantara pada masa Orde Baru mengalami pergeseran makna dengan adanya cara pandang Indonesia yang sama terhadap suatu masalah sehingga Orde Baru menyamakan segala sesuatunya dengan standar pemerintah yang akhirnya mematikan keanekaragaman masyarakat Indonesia. Wawasan Nusantara harus mampu menjawab tantangan dimasa kini yang penuh dengan keterbukaan dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Wawasan Nusantara harus bersifat dinamis bukan saja berasal dari Majapahit atau Sriwijaya tetapi pada masa kini Wawasan Nusantara harus mampu melihat daerah dengan keanekaragaman yang berwarna dan tetap terjaga kesatuan dan persatuan.

Status Indonesia sebagai negara kepulauan mendapat legalitas formal dengan lahirnya UNCLOS 1982. Sebagai konsekuensinya, Indonesia wajib menyediakan alur laut bagi pelayaran maupun penerbangan internasional. Penetapan ALKI I, II, dan III adalah dalam kerangka Indonesia memenuhi kewajiban itu. Hanya dengan ALKI, Indonesia akhirnya harus merelakan sebagian wilayahnya untuk kepentingan internasional, satu hal yang sebenarnya sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip negara berdaulat. Di sisi lain, sistem

pertahanan saat ini masih perlu penataan sehingga mampu menjamin tetap tegaknya NKRI.

Dalam makalah ini, Poros Maritim Dunia ditempatkan sebagai tujuan maritim nasional, yaitu suatu direksi geografi dari kebijakan luar negeri suatu negara yang menempatkan laut sebagai dimensi pentingnya. Sebagai satu direksi, Poros Maritim Dunia bukan menjadi suatu doktrin atau tujuan nasional tunggal bagi arah pembangunan Indonesia. Pemerintah Indonesia harus memiliki tujuan nasional berdimensi lain, seperti dimensi darat, udara, dan luar angkasa namun demikian, membangun Poros Maritim Dunia adalah sebuah proyek besar yang perlu dukungan semua elemen bangsa, sehingga perlu turunan geostrategi yang lebih operasional di satuan-satuan pelaksana pemerintah. makalah singkat ini merupakan sumbangan pemikiran untuk turut sedikit memperjelas konsep Poros Maritim Dunia sekaligus sebagai draf awal Strategi Pembangunan Maritim Indonesia yang perlu disusun lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A.B. Lopian. 2009.

Orang Laut Bajak Laut Raja Laut Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX. Jakarta : Komunitas Bambu

Anna Martiana et.al. 2010.

Kewarganegaraan. Bandung : UPT Bidang Studi Universitas Padjadjaran

Benhard Limbong. 2015.

Poros Maritim. Jakarta: Pustaka Margaretha

Bernard H. V. Vlekke. 2008

Nusantara: Sejarah Indonesia. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia

Djafar, Hasan.2009.

Masa Akhir Majapahit Girindrawarddhana dan Masalahnya. Jakarta : Komunitas Bambu

Djelantik, Sukawarsini (Ed). 2015.

Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terkait Konflik Laut China Selatan dalam Asia Pasifik Konflik, Kerja Sama dan Relasi Antarkawasan. Jakarta : Universitas Katholik Parahyangan dan Yayasan Obor Indonesia

E. Ratner. 2013.

Rebalancing to Asia with an Insecure Tiongkok. The Washington Quarterly. Washinton D.C. : Center for Strategic and International Studies

F. A Sutjipto Tjiptoatmojo. 1983.

*Kota-kota Pantai di Sekitar Selat Madura Abad XIX sampai Medio Abad XIX.*Yogyakarta. Disertasi Doktoral Ilmu Sejarah : Universitas Gajah Mada

Harry A. Poeze. 2008.

Di Negeri Penjajah Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600- 1950. Jakarta : Komunitas Populer Gramedia dan KITLV

Kartodirdjo,Sartono. 1988.

Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500- 1900 Dari Emporium sampai Imperium Jilid 1. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Kedutaan Besar Republik Indonesia. 2002.

VOC di Kepulauan Indonesia Berdagang dan Menjajah. Jakarta : Balai Pustaka

Kuik Cheng-Chwee. 2010.

Smaller States Alignment Choices: A Comparative Study Of Malaysia And Singapore's Hedging Behavior In The Face Of A Rising China. Baltimore.

Disertasi : John Hopkins University

Kusumaatmadja, Mochtar. 1978.

Bunga Rampai Hukum Laut. Bandung : Bina Cipta

M.C. Rikclefs. 2009.

Sejarah Indonesia Modern 1200- 2008. Jakarta : Serambi Ilmu Semesta

Mak J.N. 2008.

Sovereignty in ASEAN and the Problem of Maritime Cooperation in the South Tiongkok Sea. Singapore: S. Rajaratneam School of International Studies

Montratama, Ian. 2014.

Analisis Deterrence Perception atas Kemampuan Alat Utama Sistem Senjata Malaysia Dihadapkan dengan Indonesia dalam Konteks Pengendalian Blok Laut Ambalat 2010-2014. Jakarta. Tesis : Universitas Pertahanan

Parker, Geoffrey. 2000.

The Grand Strategy of Philip II. New Haven: Yale University Press.

Reid, Anthony. 2004.

Sejarah Modern Awal Asia Tenggara: Sebuah Pemetaan
diterjemahkan oleh Sori Siregar. Jakarta : LP3ES

Reid, Anthony. 2011.

Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680: Jaringan Perdagangan Global. diterjemahkan oleh R. Z Leirissa dan P. Soemitro. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

S.T. Munadjat Danusaputro. 1976.

Tata Lautan Nusantara Dalam Hukum dan Sejarahnya. Bandung : Bina Cipta

Suryadinata, Leo. 1998.

Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto. Jakarta : LP3ES

Syamsumar Dam. 2010.

Politik Kelautan. Jakarta : Bumi Aksara

Till, Geoffrey. 1998.

Seapower: A guide to the Twenty-First Century. London: Frank Cass.

Tow. W. 2012.

The Eagle Returns: resurgent US strategy in Southeast Asia and its policy implications. Policy Analysis. Barton : Australian Strategic Policy Institute (ASPI)

Wibowo, Aris Priyono. 2007.

Kilas Balik TNI- Angkatan Laut 2005- 2006. Jakarta : Dinas Penerangan TNI- Angkatan Laut

Zuhdi, Susanto. 2014.

Tradisi dan Masyarakat Maritim Pesisir Selatan Jawa dalam Perspektif Sejarah dan Pengembangan Wilayah dalam Nasionalisme, Laut dan Sejarah. Jakarta: Komunitas Bambu

Jurnal

H.S.K. Kent. 1954. "The Historical Origin of the Three-mile Limit". *The*

American Journal of International Law Vol. 48. No. 4

Reid, Anthony. 2001. "Understanding Melayu (Malay) as a Source of Diverse

Modern Identities". *Journal of Southeast Asian Studies* Vol. 32, No. 3

Retnowati, Endang. 2011. "Nelayan Indonesia dalam Pusaran Kemiskinan

Struktural: Perspektif Sosial, Ekonomi dan Hukum". *Jurnal PERSPEKTIF* Volume XVI No. 3

Website

Badan Geospasial Indonesia : <http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/big-serahkan-peta-nkri-kepada-kemenkokesra> diunduh pada tanggal 12 Juli 2016

http://www.navy.mil/navydata/cno/Navy_Maritime_Domain_Awareness_Concept_FNAL_2007.pdf diunduh pada tanggal 5 Agustus 2016

<http://www.negarahukum.com/hukum/lahirnya-konsepsi-politik-wawasan-nusantara.html> diunduh pada tanggal 19 November 2016

<http://www.stefanwolff.com/working-papers/Paradiplomacy.pdf> diunduh pada tanggal 5 Agustus 2016

<http://www.the-american-interest.com/2013/10/10/the-indo-pacific-whats-in-a-name/> diunduh pada tanggal 2 Agustus 2016

<http://www.theguardian.com/world/2011/nov/17/obama-asia-pacific-address-australia-parliament> diunduh pada tanggal 2 Agustus 2016

http://usa.chinadaily.com.cn/china/2013-10/04/content_17008940.htm diunduh pada tanggal 3 Agustus 2016



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Konferensi Nasional Sejarah X

Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta
7-10 November 2016

Persepsi Maritim dan Implikasinya Terhadap Kedaulatan Negara dalam Konteks Kesejarahan

Noor Fatia Lastika Sari, S.Hum



PERSEPSI MARITIM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEDAULATAN NEGARA DALAM KONTEKS KESEJARAHAAN

Noor Fatia Lastika Sari, S.Hum
Universitas Indonesia

ABSTRAK

Memasuki pertengahan dekade kedua di abad ke-21, Indonesia berada di tengah pergeseran geopolitik yang mulai mengarah ke Asia. Dengan adanya perkembangan di berbagai bidang melalui organisasi-organisasi regional dan internasional, Indonesia turut menghadapi ancaman-ancaman yang muncul sebagai konsekuensi dari berkembangnya kawasan Asia Tenggara, yang salah satunya adalah terhadap kedaulatan. Hal ini kemudian mengharuskan publik untuk memahami konteks negara maritim beserta dengan implikasinya. Untuk menumbuhkan kesadaran maritim, terdapat beberapa persepsi yang harus diubah mengenai laut itu sendiri. Laut tidak hanya sebatas perairan yang dimiliki oleh negara dan diakui oleh perjanjian internasional, tetapi juga berikutan dengan perairan yang bersinggungan dengan yurisdiksi negara lain. Seperti penguasaan wilayah darat, penguasaan terhadap laut pun dapat memunculkan konflik atau bahkan persengketaan. Selain itu, aktivitas di laut juga perlu diperhatikan karena adanya potensi-potensi kejahatan transnasional yang masuk dari jalur tersebut, juga pelintasan batas yang membawa pencari suaka dan nelayan tak berizin yang membahayakan ekosistem laut. Maka, permasalahan-permasalahan terkait wilayah laut tentunya menjadi semakin luas, mengingat laut tidak hanya sekedar yang ada di permukaan, tetapi juga apa yang ada di bawah dan sekelilingnya.

Kata kunci: negara maritim, persepsi maritim, perbatasan laut, pelintasan batas.

Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan dengan jumlah pulaunya yang hingga saat ini mencapai ±13,466 pulau.¹ Pemersatu dari pulau-pulau tersebut adalah laut yang kepemilikannya telah diperjuangkan sejak kurang lebih satu dekade pasca kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu melalui Deklarasi Djuanda di tahun 1957. Jika proklamasi adalah langkah yang diambil Indonesia untuk memerdekakan tanah airnya, maka deklarasi terkait penguasaan laut tersebut dapat dikatakan sebagai pelengkap dari proklamasi itu sendiri.

¹ M. Ambari, "Berapa Jumlah Pulau Yang Dimiliki Indonesia Sebenarnya?", diakses di <http://www.mongabay.co.id/2015/05/09/berapa-jumlah-pulau-yang-dimiliki-indonesia-sebenarnya/>, Sabtu, 4 Juli 2015 pukul 5:25 WIB berdasarkan jumlah pulau yang telah dibakukan dan didaftarkan dalam sidang *United Nation Conference on Standardization of Geographical Names* (UNCSGN) ke-10 tahun 2012 di New York, Amerika Serikat.

Implikasi besar dari deklarasi tersebut adalah diakuinya hak negara atas perairannya baik berupa perairan di sekitar dan di antara, maupun perairan yang menjadi penghubung antarpulau, serta perairan dalam. Sementara itu, untuk perairannya yang berbatasan dengan negara tetangga, Indonesia mengikuti hukum laut internasional yang menentukan bahwa terdapat Laut Teritorial sejauh 12 mil laut yang diukur dari batas-batas terluar, yaitu pulau-pulau terluar (*the outermost islands*) Republik Indonesia². Besaran Laut Teritorial yang baru tersebut kemudian menggantikan peraturan lama mengenai laut yang diwariskan oleh Pemerintah Hindia Belanda, yaitu *Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie* (Ordonansi tentang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim) tanggal 18 Agustus dan 5 September 1939 yang besarnya hanya sejauh 3 mil laut saja.³

Penguasaan suatu negara terhadap laut, baik perairan dalam maupun perairan luar seperti Laut Teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Batas Landas Kontinen, tidak hanya dilatarbelakangi oleh kebutuhan ekonomi, namun juga kepentingan geopolitik, serta pertahanan dan keamanan suatu negara. Kepentingan-kepentingan tersebut pada dasarnya berpusat pada prinsip persatuan dan kesatuan, yaitu integritas teritorial yang bulat meliputi unsur darat dan laut. Maka, dibuatlah cara pandang mengenai predikat “negara maritim” yang disandang Indonesia, yaitu Wawasan Nusantara.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, Indonesia kini menghadapi ancaman-ancaman kedaulatan yang muncul sebagai konsekuensi dari berkembangnya kawasan Asia Pasifik. Pemahaman publik terkait konteks negara maritim beserta dengan implikasinya menjadi penting, dan kesadaran tersebut harus ditumbuhkan dengan cara salah satunya melalui pengajaran sejarah.

Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini, tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penelitian adalah untuk menjabarkan peristiwa sejarah terkait konsep negara maritim dan budaya baharinya, sehingga dapat ditelusuri bagaimana konsep tersebut dapat diaplikasikan pada proses pembangunan karakter bangsa melalui media pendidikan. Fokus dalam penelitian adalah untuk memberikan konsep dan metode pembelajaran menggunakan sudut pandang kesejarahan, yaitu dengan merefleksikan dan menghadirkan makna masa lalu bagi masa kini, atau mengaktualisasi fakta

² Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional* (Bandung: Binacipta, 1986), hlm. 187

³ Prof. Dr. A.B. Lopian, dkk., *Indonesia dalam Arus Sejarah: Masa Pergerakan Kebangsaan* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2012), hlm. 33

sejarah dalam konteks kontemporer. Adapun tujuan penelitian dijabarkan dalam poin-poin, yaitu:

1. Mendorong munculnya kesadaran sejarah sebagai tahap awal pembelajaran.
2. Memberikan pemahaman terhadap konsep negara maritim dengan budaya bahari.
3. Memahami peristiwa pelintasan batas dalam sudut pandang pertahanan negara dan kedaulatan.
4. Mengembangkan penulisan sejarah maritim, khususnya di bidang perbatasan, untuk membentuk identitas dan karakter masyarakat Indonesia sebagai suatu negara maritim.

Metode Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penulisan sejarah atau historiografi dari Kuntowijoyo yang bertujuan untuk mencapai suatu konklusi atau solusi bagi perkembangan di masa depan melalui analisa fakta dan sumber sejarah dengan ruang lingkup tema, spasial, dan temporal yang spesifik. Metode penulisan ilmiah ini meliputi empat tahapan, yaitu tahap heuristik, tahap kritik sumber, tahap interpretasi, dan yang terakhir adalah tahap historiografi itu sendiri.

Tahap pertama adalah tahap heuristik yang merupakan tahap pencarian dan pengumpulan berbagai jenis dokumen. Sumber sejarah dapat berupa sumber primer maupun sekunder, dan pencarian serta pemilihan sumber bergantung pada relevansinya terhadap penulisan sejarah yang dilakukan. Pada tahap ini, penulis melakukan pengumpulan sumber-sumber sejarah berupa sumber primer yang terdiri dari arsip-arsip, koran sejaman, serta berbagai bentuk dokumentasi yang tersimpan di perpustakaan, yang tersedia dalam bentuk fisik maupun dalam jaringan (*online*). Sumber sekunder yang digunakan berupa buku-buku teks yang berkaitan dengan tema dan judul penelitian.

Tahap yang kedua adalah tahap kritik sumber yang dibagi menjadi dua macam kritik, yaitu kritik internal dan kritik eksternal. Kritik sumber dilakukan untuk memberikan penilaian serta menyeleksi sumber-sumber yang telah terkumpul pada tahap sebelumnya. Kritik internal memberikan penilaian terkait kredibilitas data yang terkandung dalam sumber, sementara kritik eksternal memberikan penilaian terkait seberapa akurat sumber tersebut. Pada tahap ini, penulis menguji data suatu sumber dengan membandingkan isi sumber tersebut dengan sumber-sumber lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan data yang paling akurat. Selain itu juga penulis memperhatikan edisi atau tahun cetakan suatu buku karena ada beberapa buku yang direvisi dan bisa saja berkurang atau bertambah isinya.

Tahap selanjutnya, yaitu tahap ketiga adalah tahap interpretasi. Di tahap ini, sumber-sumber yang lolos dari tahap kritik kemudian penulis dianalisa untuk menemukan fakta sejarah yang akurat dan objektif. Tahap ini adalah tahap terpenting bagi sejarawan karena menunjukkan seberapa baik sejarawan tersebut memaknai fakta sejarah yang ada. Interpretasi yang baik adalah interpretasi dengan menilai objek penelitian dari berbagai sudut pandang, sehingga muncul berbagai penilaian dan menghindari kesan subjektif dalam penulisan.

Tahap yang terakhir adalah tahap historiografi atau penulisan sejarah sesuai dengan urutan peristiwanya berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya. Pada tahap ini, dilakukan penggabungan fakta-fakta yang kemudian diuraikan secara kronologis, obyektif, dan ilmiah sehingga tersusun suatu penulisan sejarah yang sistematis.

Pentingnya Kesadaran Pembelajaran dan Pendidikan Sejarah

Pada dasarnya, manusia akan terus mengalami proses pembelajaran di sepanjang hidupnya karena adanya pendidikan meningkatkan kualitas diri manusia, yaitu dengan mendapatkan kemampuan di bidang yang spesifik, mengolah ilmu pengetahuan yang didapatkan, serta pertukaran informasi dalam proses belajar sendiri.⁴ Pendidikan selalu dipengaruhi oleh situasi yang ada di masyarakat, baik sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. Hal tersebutlah yang menjadi penyebab berubah dan berkembangnya pola pengajaran, termasuk sejarah, pada masyarakat mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

Di bidang ilmu sejarah sendiri, tujuan akhir dari pembelajaran dan pendidikan sejarah adalah untuk mengembangkan kemampuan intelektual individu berupa *historical insight*, yaitu pengetahuan terkait sebab-akibat dari suatu peristiwa di masa lampau, sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui atau memahami tetapi juga mengerti secara mendalam. Maka, pendidikan sejarah tidak hanya bersifat wajib (*compulsory*), tetapi juga hal-hal yang bermanfaat bagi perkembangan bangsa dan masyarakat luas.⁵

Selain itu, pendidikan juga menjadi penanda identitas bangsa. Terlebih di era globalisasi dan modernisasi seperti yang tengah berlangsung saat ini, bahwa adalah tepat rasanya jika perubahan yang ada di masyarakat harus dibarengi oleh pembinaan identitas bangsa yang tepat melalui pendidikan karena pendidikan memberikan kita wadah untuk

⁴ J.S. Bruner, *Toward a Theory of Instruction* (Cambridge: Harvard University Press, 1966), hlm. 72

⁵ Said Hamid Hasan, "25 Tahun Pendidikan Sejarah" dalam *Seminar Sejarah Nasional V: Subtema Pengajaran Sejarah* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1990), hlm. 72

berpikir dan mempelajari hal-hal baru. Hal tersebut kemudian dapat dimanfaatkan, salah satunya adalah dengan mempelajari sejarah bangsa untuk menemukan beberapa solusi untuk isu-isu yang muncul di masa kini atau bahkan masa mendatang, sesuai dengan tujuan dari ilmu sejarah sendiri.

Ilmu sejarah memerlukan pola berpikir yang reflektif agar mampu menghasilkan suatu penulisan sejarah yang komprehensif, yaitu mampu merelasikan dan memberikan penilaian, dan bukan hanya sekedar penulisan narasi berdasarkan kronologi peristiwanya.⁶

Lalu, muncul pertanyaan apa peranan sejarah dalam kehidupan manusia? Apakah sejarah benar-benar memegang peranan dan memberikan pengaruh yang signifikan bagi kehidupan manusia? Jawabannya dapat ditarik hingga ke awal penulisan sejarah oleh Herodotus yang menyebutkan bahwa sejarah adalah guru kehidupan (*historia magistra vitae*). Artinya, ilmu sejarah akan selalu memberi arti terhadap suatu peristiwa, sehingga manusia dapat menarik pengalaman berupa pembelajaran bagi kehidupan.

Dalam pendidikan, ilmu sejarah memiliki tiga fungsi utama, yaitu genesis, didaktis, dan sebagai mana mestinya (*new historicism*).⁷ Sejarah dengan fungsi genesis artinya adalah sejarah yang bersifat deskriptif, naratif, dan informatif. Penulisan sejarah hanya berlandaskan dari suatu hal yang menarik minat, dan dituliskan berdasarkan pertanyaan 5W1H, sehingga hasil akhirnya adalah penulisan sejarah sebagai kisah (*history as an art*). Yang kedua, yaitu sejarah dengan fungsi didaktis, adalah penulisan sejarah yang di dalamnya terdapat pemilihan fakta-fakta sejarah yang memberikan makna signifikan saja, sehingga penulisan bersifat ideal bagi penyampaian publik demi tercapainya tujuan tertentu. Lain dengan sejarah dengan fungsi didaktis, *New Historicism* menyajikan penulisan sejarah yang lebih obyektif dan lugas. Penulisan tidak ditujukan untuk sekedar mendidik, tetapi juga untuk mengedepankan proses kritis dengan menggunakan metode sejarah (*history as the part of science*).

Jika fungsi terakhir dari penulisan sejarah dapat tercapai, maka pembelajaran sejarah, serta pertukaran informasi dan ilmu pengetahuan pun turut berjalan. Pengaplikasian dari pembelajaran tersebut baru bisa dirasakan ketika subyek dan obyek pembelajaran mampu berpartisipasi aktif secara bertimbal balik (*reciprocal*).⁸

Menurut I Putu Gede Suwitha, sejarah dapat berfungsi layaknya dua obyek penting dalam hidup manusia, yaitu jembatan dan cermin. Sejarah bertindak sebagai jembatan dalam

⁶ Sri Jutmini Rahardjo, "Metode Penemuan sebagai Proses Untuk Mewarisi Nilai-nilai Bangsa" dalam *Seminar Sejarah Nasional V: Subtema Pengajaran Sejarah* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1990), hlm. 79-81

⁷ Abu Su'ud, "Pengajaran Sejarah" dalam *Seminar Sejarah Nasional V: Subtema Pengajaran Sejarah* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1990), hlm. 94-95

⁸ *Ibid.*, hlm. 106

konteks menghubungkan masa lalu dengan masa kini, sekaligus cermin dimana tiap individu berkaca atau merefleksikan diri sebelum melangkah ke tujuan berikutnya di masa depan. Hal ini sesuai dengan apa yang disebut Taufik Abdullah bahwa sejarah memberikan wawasan bagi hari depan, suatu wilayah yang tak punya peta.⁹

Masalah yang ada dalam pengajaran sejarah sebagai suatu ilmu sebenarnya jauh lebih kompleks dari apa yang bisa kita bayangkan. Sejarah bukan ilmu pasti yang dapat menghasilkan suatu dalil atau hukum yang mutlak karena walaupun obyek dari studinya adalah manusia, manusia sebagai makhluk sosial memiliki banyak variabel yang menentukan tindakan yang dilakukannya. Selain itu, sejarah memiliki aspek spasial dan temporal yang senantiasa dipengaruhi oleh perubahan sosial-budaya di masyarakat.

Namun, yang terpenting dari suatu pengajaran dan pendidikan sejarah adalah ketika tercapainya suatu hasil penelitian atau penulisan sejarah kepada masyarakat, sehingga tercipta pemahaman publik terhadap kajian-kajian sejarah yang ada. Masyarakat kemudian dapat melakukan evaluasi terhadap hasil penelitian atau penulisan sejarah tersebut, sehingga muncul tantangan bagi sejarawan untuk mempertajam metodenya untuk menghasilkan penulisan yang lebih baik, tanpa adanya anakronisme yang membingungkan, serta *historical fallacies* atau kekeliruan sejarah.¹⁰

Terakhir, perlu juga diperhatikan adanya tantangan baru di dunia pendidikan Indonesia yang bersifat multikultural. Kondisi sosial yang berbeda-beda dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor penentu, sehingga tidak dapat kita tentukan secara mutlak atau pasti. Salah satu contohnya, faktor geografis yang berbeda dapat mempengaruhi perilaku masyarakat, bahkan menjadi pemicu konflik yang disebabkan oleh prasangka (*prejudice*) dan kesenjangan sosial (*internal disparities*).¹¹

Penulisan sejarah sebagai bahan pengajaran pun dapat pula berasal dari hal-hal yang partikular atau unik, yaitu tema-tema yang seringkali dijadikan bahan penulisan oleh sejarawan akademis untuk skripsi dan tesis mereka. Penulisan sejarah berdasarkan metode yang menjembatani teori dan sumber dapat memberikan suatu perspektif baru dalam

⁹ I Putu Gede Suwitha, "Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa" dalam *Seminar Sejarah Nasional V: Subtema Pengajaran Sejarah* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1990), hlm. 112

¹⁰ Prof. Dr. Taufik Abdullah, "Pembinaan Kesadaran dan Penjernihan Sejarah" dalam *Pemikiran tentang Pembinaan Kesadaran Sejarah* (Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2012), hlm. 8-9

¹¹ Kamanto Sunarto, dkk., *Multicultural Education in Indonesia and Southeast Asia: Stepping into the Unfamiliar* (Depok: Jurnal Antropologi Indonesia, 2014), hlm. 51

wawasan historis, sehingga penulisan sejarah tak hanya bersifat sebagai cerita, tetapi juga menerangkan sebab dan akibat dari suatu peristiwa secara komprehensif dan terbuka.¹²

Lalu, bagaimana dengan kesadaran pembelajaran sejarah di bidang maritim? Hal tersebut tentu berkaitan dengan budaya bahari yang harus dimiliki oleh masyarakat karena Indonesia saat ini tengah bergerak ke arah konsep negara maritim. Agaknya pengajaran terkait sejarah maritim belum terlalu menjadi suatu subyek pengajaran yang *compulsory* di Indonesia. Pengenalan Indonesia sebagai bangsa berbudaya bahari mungkin telah dilaksanakan melalui berbagai media, tidak hanya via pendidikan, namun bagaimana menyikapi konsekuensi-konsekuensi yang hadir karenanya belum terlalu terlihat.

Kata ‘maritim’ selalu dikaitkan dengan laut, sebagaimana pengertian orang awam terhadap konsep maritim. Pemahaman sederhana ini bukan berarti mengesampingkan fakta bahwa terdapat banyak hal di laut. Maka, kata itu akan mengalai perluasan makna hingga mencakup definisi spesifik, seperti misalnya mencakup pelayaran dan pelabuhan. Namun, berkembang pula makna maritim sebagai pusat aktivitas perdagangan atau juga militer di laut, dan batas-batas wilayah (*maritime boundaries*).

Seiring dengan meningkatnya isu-isu perbatasan dan perebutan wilayah, khususnya di Asia Tenggara dengan berkembangnya masalah Laut Cina Selatan, nampaknya urgensi untuk mengenal tema maritim tak bisa berhenti pada pemaparan sejarah pelayaran, pelabuhan, dan aktivitas-aktivitas lain yang berpusat di laut, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat melihat laut sebagai bagian dari kebudayaan dan identitas diri mereka sebagai warga negara. Lebih dari itu, pengajaran tema maritim dan budaya bahari mulai dari periode awal hingga periode kontemporer dapat meningkatkan nilai atau rasa kepemilikan masyarakat terhadap negaranya yang komposisi mayoritasnya adalah laut.

Kedaulatan dan Yurisdiksi dalam Konsep Negara Maritim dan Budaya Bahari

Wawasan Nusantara adalah cara pandang Indonesia terhadap kondisi geopolitik dan geostrategis wilayahnya sebagai negara kepulauan yang dipersatukan oleh laut. Laut tidak dipandang sebagai pemisah atau *barrier* antarpulau atau propinsi, tetapi sebagai salah satu unsur yang dapat melindungi kepentingan nasional, yaitu persatuan dan kesatuan.¹³

Belakangan ini, berkembang konsep negara maritim dan budaya bahari sebagai suatu hal yang harus dipahami dan diterapkan karena adanya kesadaran terhadap kondisi geografis

¹² Susanto Zuhdi, “Metodologi Strukturalistik dalam Historiografi Indonesia: Sebuah Alternatif” dalam *Titik Balik Historiografi Indonesia* (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2008), hlm. 11-12

¹³ Dr. Chandra Motik Yusuf, S.H., M.Sc., *75 Tahun Prof. Dr. Hasjim Djalal, M.A: Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim* (Jakarta: IND HILL CO, 2010), hlm. 9

Indonesia sebagai negara yang luas lautnya lebih besar daripada daratannya. Penguasaan terhadap laut dan kekayaan di dalamnya menjadi penting, namun bagaimana dengan batas-batas dari laut itu sendiri? Penguasaan terhadap laut tidak akan terlepas dari kesadaran akan batas-batas wilayah. Selain itu, bagaimana cara masyarakat memandang laut sendiri masih perlu direkonstruksi.

Penguasaan terhadap laut juga berarti bahwa Indonesia memiliki perbatasan laut dengan negara tetangganya. Salah satu perbatasan laut tersebut adalah antara Indonesia dengan Australia, atau lebih tepatnya antara Laut Timor yang terletak di selatan Pulau Rote sebagai pulau terluar dari Republik Indonesia dengan perairan utara Australia. Perbatasan yang terletak di kawasan sebelah timur tersebut memiliki karakteristiknya sendiri, yaitu dengan wilayah lautnya yang luas, persebaran pulau yang jumlahnya lebih banyak, serta penduduknya yang tidak sepadat di bagian barat.¹⁴ Maka, laut dipandang sebagai penyambung di antara pulau-pulau tersebut sehingga tercipta jaringan transportasi yang kemudian membawa pertumbuhan ekonomi yang dalam perkembangannya harus dibarengi dengan pemahaman terhadap Wawasan Nusantara.

Mengenai kedaulatan sendiri menurut Etty R. Agoes dalam tulisannya di *Majalah Hukum Nasional*, kedaulatan adalah manifestasi kekuasaan tertinggi suatu negara dalam batas-batas wilayahnya agar dapat mengurus sendiri kepentingan-kepentingan nasionalnya tanpa tergantung pada negara lain, sementara batas-batas wilayah negara adalah manifestasi kedaulatan teritorial dari suatu negara, yang mana ditentukan oleh proses sejarah, politik, dan hubungan antarnegara. dan dikulminasikan ke dalam aturan atau ketentuan hukum nasional maupun internasional.¹⁵ Dengan begitu, maka mengetahui batas-batas wilayah dapat menjadi tahap awal dari penegakan kedaulatan negara dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab jika tidak, eksistensi dan harga diri bangsa akan terancam.

Muncul urgensi untuk mengetahui batas-batas yang pasti tentang wilayah dan yurisdiksi negara di laut karena maraknya persengketaan dan pelintasan batas ilegal. Pengamanan terhadap wilayah perbatasan menjadi penting, bukan hanya dalam arti untuk menangkal bahaya yang masuk, tetapi juga intervensi asing dalam penerapan kedaulatan

¹⁴ Lihat Noor Fatia Lastika Sari, "Ashmore Reef, Nelayan Rote, dan Masalah Pelintas Batas Perairan Indonesia-Australia 1974-2007", Skripsi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, 2015

¹⁵ Prof. Dr. Etty R. Agoes, S.H, LL.M, "Penetapan Batas Wilayah dan Yurisdiksi Negara di Laut Menurut Hukum Internasional dan Peraturan Perundang-undangan Nasional", dalam *Majalah Hukum Nasional No. 1 Tahun 2006* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2006), hlm. 32

negara tersebut. Yang berbahaya adalah yang kedua, yaitu ketika intervensi luar dapat melemahkan kuasa pemerintah terhadap yurisdiksi negara.¹⁶

Dalam hal ini, laut memiliki dua arti, yaitu keamanan (*security*) dan kesejahteraan (*prosperity*); dalam arti laut memiliki potensi luas, misalnya, pertahanan, perikanan, pelayaran, eksplorasi dan eksploitasi dasar laut, pariwisata, beserta dengan segala dinamika di dalamnya, sehingga perbatasan laut pun menjadi dibahas.¹⁷ Sama seperti perbatasan lainnya, perbatasan laut antara Indonesia dan Australia terdapat pula dinamika dalam pengelolaan daerah perbatasan yang seringkali bersinggungan dengan negara tetangga dalam berbagai aspek sehingga menimbulkan isu-isu kesejahteraan dan pertahanan, mulai dari ancaman terhadap perekonomian nelayan lokal hingga ancaman kedaulatan negara dengan adanya isu-isu pelintasan batas yang digolongkan Australia sebagai ancaman transnasional, yang setingkat dengan terorisme, penyelundupan, dan imigran ilegal.

Selain itu, tidak hanya nelayan yang melintas batas keluar, namun juga nelayan-nelayan yang melintas masuk ke perairan Indonesia secara ilegal. Keduanya memiliki bobot yang sama jika kita ingin melihat dampak yang mungkin muncul dari kegiatan lintas batas itu. Sebut saja misalnya beberapa kapal nelayan ilegal asal negara-negara Asia Tenggara lain, atau bahkan Asia Timur, yang ditindak belakangan ini. Tentunya hal tersebut bukannya tak berdasar dan mengapa tidak jika pemahaman tentang itu dipupuk pula sebagai bagian dari pemahaman masyarakat Indonesia sebagai masyarakat di negara maritim dan mengutamakan budaya bahari?

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan pemahaman sejarah yang tepat dan komprehensif, yaitu pemahaman bahwa peristiwa sejarah yang berlangsung melibatkan berbagai macam faktor (*multifactor*) karena daerah perbatasan itu sendiri dapat dikatakan sebagai daerah terdepan yang menjadi pertahanan Republik Indonesia. Mengutip pernyataan dari Prof. Dr. Susanto Zuhdi mengenai pemahaman konsep tersebut, yang selalu menyertai tulisan beliau mengenai daerah-daerah terluar dan terdepan.

Konsep daerah terdepan dan terluar sendiri memegang pengertiannya masing-masing. Daerah terdepan merupakan pulau garda depan yang memegang beranda atau halaman depan negara dan berhadapan langsung dengan beranda negara lain yang berbatasan dengannya. Sementara itu, daerah terluar seringkali dikonotasikan sebagai lapisan terluar yang menjadi

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 2

¹⁷ *Ibid.*

penanda batas wilayah atau daerah pinggiran (*periphery*), serta diposisikan sebagai bagian terluar, namun tetap tercakup pemeliharaan pemerintah pusat.¹⁸

Dalam hal tersebut, konsep perbatasan perlu dipahami dengan baik agar kemudian dapat diciptakan suatu penggabungan antara penegakkan kedaulatan wilayah negara untuk alasan pertahanan dan keamanan dengan pengembangan potensi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan melalui sarana pendidikan dan kemajuan teknologi sebagai media penyampaian kepada masyarakat.

Saat ini, upaya untuk mengembangkan kembali potensi perbatasan menjadi salah satu bagian dari visi misi pemerintahan yang baru, yaitu dengan diutamakannya pembangunan dan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan hingga daerah perbatasan yang pada dasarnya bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia. Sebelum hal tersebut dapat dilaksanakan oleh pemerintah, diperlukan pemahaman yang baik terhadap konsep negara kepulauan dan Wawasan Nusantara yang dimiliki Indonesia, sehingga hal tersebut dapat terimplikasi dengan baik sebagai identitas dan karakter masyarakat luas. Di bagian inilah pembelajaran dan pendidikan sejarah dapat berfungsi sebagai ‘perantara’ antara sejarawan dengan masyarakat untuk menyampaikan fakta-fakta sejarah yang direkonstruksi menggunakan metode, hingga dapat dimanfaatkan sebagai suatu refleksi yang membuka wawasan.

Contoh Kasus: Perlintasan Batas dan Kejahatan Transnasional

Secara harfiahnya, pelintas batas adalah sekelompok manusia atau perorangan yang kegiatannya berkaitan dengan pergerakan atau perpindahan melewati batas-batas wilayah antara dua negara.¹⁹ Pelintas batas juga dapat diartikan sebagai penduduk yang bertempat tinggal secara turun-temurun di wilayah kabupaten atau kota yang berbatasan dengan negara tetangga yang melakukan lintas batas antarnegara karena kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.²⁰ Namun, di kasus yang sudah-sudah, nelayan-nelayan yang melintas batas untuk keperluan perikanan ini seringkali tanpa izin, sehingga dianggap ilegal, berpotensi mencuri kekayaan negara, atau

¹⁸ Susanto Zuhdi, “Mengapa Bukan Pulau Terdepan?”, *Kompas*, 8 September 2006

¹⁹ Definisi kata *cross-borders* berdasarkan definisi *Oxford Dictionary of English 3rd Edition* (Inggris: Oxford University Press, 2012)

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (diakses dari http://hukum.unstrat.ac.id/uu/uu_23_2006.pdf, Kamis, 19 Maret 2015 pukul 09:53 WIB)

bahkan pelaku tindak kriminal lainnya seperti penyelundup imigran gelap, obat-obatan terlarang, atau tak jarang mengarah pada terorisme.²¹

Dalam penelitian yang lalu, kegiatan lintas batas nelayan asal Pulau Rote ke perairan utara Australia yang telah berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan turun-temurun menjadi pokok pembahasan utama. Berdasarkan penelitian P2P-LIPI, Australia telah menjadi salah satu negara tujuan bagi para pelintas batas asal Indonesia sejak ratusan tahun lalu, yang seringkali juga dimanfaatkan untuk penyelundupan imigran gelap dan perdagangan ilegal.²²

Walaupun di tahun 1974 telah ditandatangani suatu Nota Kesepakatan atau MoU antara dua negara yang berisikan regulasi terkait kegiatan nelayan tradisional Rote di perairan utara Australia, serta dipertegas pada tahun 1989 dengan menyepakati pelarangan perahu motor bentuk apapun karena menyalahi konsepsi tradisional yang diyakini Australia, masih terjadi pula pelanggaran oleh karena sebab pelayaran yang sifatnya mengeksploitasi dan non-tradisional.²³

Interpretasi terhadap konsep tradisional yang dipahami negara pun masih bertumpang tindih. Bukan hanya permasalahan nelayan seperti apa yang dikategorikan sebagai nelayan tradisional, tetapi juga subjek yang diberikan predikat tradisional tersebut. Dalam beberapa kasus penangkapan, terdapat nelayan-nelayan yang menggunakan cara-cara modern, sehingga dianggap melanggar MoU 1974 karena hak pelayaran yang diakui adalah hak tradisional nelayan.²⁴

Berdasarkan penegasan MoU 1974 di tahun 1989, definisi tradisional yang dituntut Pemerintah Australia terhadap Pemerintah Indonesia adalah pelayaran yang menggunakan perahu layar tanpa mesin, kompas sederhana, tidak ada radio, dan hasil tangkapannya hanya sebatas subsisten. Namun, hal tersebut ditentang oleh Pemerintah Indonesia karena semenjak April 1989 hingga 1991 terjadi kecelakaan-kecelakaan di perairan dekat Ashmore Reef akibat badai Siklon Orson yang tidak bisa dihadapi oleh kapal-kapal yang mutlak tradisional.²⁵

²¹ Kodam XVII Cenderawasih, "Tata Cara Lintas Batas Antara Negara", Senin, 24 Maret 2014 (diakses dari <http://www.kodam17cenderawasih.mil.id/tulisan/artikel/tata-cara-lintas-batas-antara-negara/>, Kamis, 19 Maret 2015 pukul 10:06 WIB)

²² Tri Nuke Pudjiastuti, "Dinamika Persoalan Perbatasan dan Hubungannya dengan Ekonomi Politik Indonesia-Australia", dalam *Isu-isu Strategis dalam Hubungan Australia-Asia Timur 1997-2005* (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2006), hlm. 123

²³ Department of the Environment and Heritage Commonwealth of Australia, *Ashmore Reef National Nature Reserve and Cartier Island Marine Reserve: Management Plans* (Canberra: Environment Australia, 2002), hlm. 40

²⁴ Noor Fatia Lastika Sari, "Ashmore Reef, Nelayan Rote, dan Masalah Pelintas Batas Perairan Indonesia-Australia 1974-2007", Skripsi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, 2015, hlm. 49

²⁵ Tri Nuke Pudjiastuti, *Op.Cit.*, hlm. 133-134

Berbagai kasus penangkapan nelayan tradisional Rote banyak diliput oleh media Indonesia dan Australia, namun kebanyakan nelayan tradisional Pulau Rote belum memahami peraturan tersebut dengan baik. Belum lagi tuntutan ekonomi yang terus mendesak mereka. Sosialisasi yang minim dan tidak adanya pembukaan lahan pekerjaan alternatif dari Pemerintah Indonesia turut menjadi salah satu penyebab sulitnya penertiban dan pencegahan pelintas batas ilegal ini. Selain itu, tidak menutup kemungkinan juga bahwa meningkatnya permintaan pasar akan komoditas laut tertentu mendorong para nelayan untuk menangkap lebih banyak sumber daya laut.²⁶

Kekhawatiran Pemerintah Australia terhadap para nelayan pelintas batas dari Indonesia diperkeruh dengan pelayaran-pelayaran ilegal yang bertujuan menyusupkan para pencari suaka, atau dianggap imigran gelap karena tidak memiliki dokumen resmi yang sesuai dengan standar peraturan Pemerintah Australia.²⁷ Pelayaran yang disertai imigran gelap asal Timur Tengah pertama kali dilakukan pada tahun 1995, juga di tahun 2001, lalu kemudian ini menjadi kebiasaan di daerah tersebut.²⁸

Kekhawatiran yang sama harusnya juga turut dirasakan Indonesia sebagai negara yang memiliki posisi strategis di region Asia Tenggara dengan kondisi geografis yang terbagi-bagi atas beberapa pulau. Kasus yang paling dekat terjadi adalah kasus nelayan Cina yang melintas batas dan melakukan praktik *illegal fishing* di perairan Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 18 Juni 2016.

Peristiwa tersebut adalah insiden pelanggaran batas negara yang ketiga kalinya dalam beberapa bulan terakhir di daerah yang sama, yaitu Kepulauan Natuna yang letaknya turut termasuk di dalam Kawasan Laut Cina Selatan. Terkait hal ini, Kementrian Luar Negeri Cina menyatakan bahwa daerah itu merupakan perairan tradisional bagi nelayan Cina untuk mengambil hasil laut, namun berdasarkan hukum laut internasionalnya, daerah tersebut merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Sebenarnya, telah ada kejelasan dari Indonesia bahwa tidak ada klaim Indonesia atas Laut Cina Selatan terkait memanasnya sengketa perairan di utara Indonesia tersebut, dan Cina telah memahami hal tersebut. Namun, Cina tidak menyertakan penjelasan bahwa Kepulauan Natuna termasuk dalam ‘*nine-dash line*’, dasar klaimnya terhadap hampir 90% wilayah Laut Cina Selatan. Nyatanya memang, Kepulauan Natuna berada di dalam ZEE

²⁶ Vinsensio Dugis, “Nelayan Tradisional dan Hubungan RI-Australia”, *Kompas*, 19 Januari 1995, hlm. 4

²⁷ “Trip Ilegal ke Pulau Pasir”, *Kompas*, 5 September 2001, hlm. 30

²⁸ Dan Dwyer, “Fishers of People: from Reef Fishing to Refugees. The Changing Role of Indonesian Sailors and Their *Perahus* at Ashmore Reef, North Australia”, dalam Clayton Frederickson dan Ian Walters (ed.), *Altered States: Material Culture Transformations in the Arafura Region* (Darwin: Northern Territory University Press, 2001)

Indonesia dan tidak bisa digugat berdasarkan UNCLOS 1982. Dalam UNCLOS 1982, tidak ada pengakuan terhadap perairan tradisional (*traditional fishing grounds*), tetapi hak nelayan tradisional (*traditional fishing rights*) seperti yang berlaku antara Indonesia dan Australia dalam kasus Ashmore Reef, diakui dan dijadikan dasar hukumnya.²⁹

Untuk melihat permasalahan ini, sebenarnya kita bisa menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan pertahanan keamanan (*security approach*) dan pendekatan pembangunan ekonomi (*prosperity approach*).³⁰ Dari segi ekonomi, masuknya nelayan Cina ke perairan Indonesia adalah suatu kerugian ekonomis bagi kemakmuran negara. Namun sayangnya, pandangan inilah yang lebih berkembang daripada melihat peristiwa ini sebagai suatu pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia. Bagaimana mungkin batas wilayah negara yang telah ditentukan melalui UNCLOS 1982 dapat dipersalahkan dengan adanya klaim sejarah dari negara lain?

Di era pemerintahan yang baru, penindakan terhadap pelanggaran kedaulatan ini menjadi lebih sering dan represif. Indonesia tidak lagi memainkan peran preventif seperti yang sudah-sudah. Perubahan Indonesia menjadi lebih tidak toleran dan membuka kasus-kasus seperti ini kepada publik mengundang reaksi dari Pemerintah Cina kemudian.

Memang kemudian, beberapa kasus ini terselesaikan dengan adanya beberapa pertemuan bilateral antara Presiden Indonesia dan Cina, serta didukung oleh upaya Cina merehabilitasi hubungan kedua negara yang disambut positif oleh Indonesia, seperti salah satunya diplomasi di bidang perdagangan dan investasi sebagai bagian diplomasinya terhadap ASEAN.³¹ Namun, jika kasus ini terus berulang, pendekatan yang digunakan negara untuk menyelesaikan kasus ini agaknya harus beralih kepada pendekatan pertahanan-keamanan, jika perlu dibawa ke Mahkamah Internasional.³²

Kesimpulan

Permasalahan mengenai perbatasan laut akan terus berlangsung dan bertambah jumlahnya di kemudian hari karena adanya upaya penguasaan sumber daya laut sebagai sumber daya alam terbarukan. Perhatian lebih terhadap permasalahan perbatasan menjadi

²⁹ Leo Suryadinata, "The Natunas Incident and Its Impact on Indonesia-China Relations", *the Jakarta Post*, 24 Juni 2016, hlm. 7

³⁰ Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S, "Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Perbatasan Laut Indonesia", dalam *Majalah Hukum Nasional No. 1 Tahun 2006* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2006), hlm. 65

³¹ Tama Salim, "China Eyes Closer Ties with Indonesia", *the Jakarta Post*, 27 September 2016, hlm. 12

³² Leo Suryadinata, *Op.Cit.*

relevan untuk diperbincangkan dan dipelajari untuk kemudian memupuk kesadaran bagi masa depan Indonesia sebagai negara maritim dengan budaya bahari.

Pendekatan yang dapat digunakan dalam melihat masalah-masalah perbatasan pun tergantung dari urgensi yang ada, baik pendekatan pertahanan dan keamanan maupun pendekatan ekonomi. Hal yang harus diperhatikan dalam permasalahan ini adalah ketika pelintasan batas yang ilegal dapat berujung pada kejahatan-kejahatan transnasional, seperti penyelundupan manusia dan barang, pencurian ikan (*illegal fishing*), *drug trafficking*, perompakan (*armed robbery*), pembajakan (*piracy*), dan lain-lain.

Maka, solusi yang ada adalah dengan berupaya untuk menyelesaikan berbagai macam persengketaan yang ada dengan cara damai ataupun melalui bantuan pihak ketiga (*external party*), dibarengi dengan penguatan pertahanan dan keamanan laut, pembangunan ekonomi yang efisien dan berkelanjutan, serta sosialisasi kepada masyarakat, salah satunya adalah melalui penanaman paham tersebut melalui pendidikan dan pengajaran sejarah.

Pendidikan dan pengajaran tersebut tentu dapat dimulai dari membangkitkan kesadaran terhadap konsep maritim dan budaya bahari itu sendiri, bahwa dua poin penting tersebut bukanlah sebatas pengertiannya saja, yaitu laut, namun bagaimana laut menjadi bagian dari masyarakat seperti budaya pada umumnya. Selain itu, perlu adanya pembenahan paham bahwa laut adalah penyambung dan bagian dari negara. Tidak semua negara memiliki perairan dalam (*internal waters*), maka hal penguasaan terhadap laut ke depannya akan menjadi sangat penting bagi suatu negara, termasuk bagaimana menjaga daerah-daerah perbatasan yang sebaiknya dilihat sebagai ‘beranda depan’ ketimbang ‘halaman belakang’.

Hal-hal tersebut di atas dapat diimplikasikan ke dalam kurikulum pengajaran, serta pembiasaan dalam kegiatan belajar-mengajar, atau di luar itu secara nonakademis misalnya, melalui kegiatan-kegiatan yang dalam arti dapat “mempromosikan” budaya bahari. Pengajaran dan pendidikan yang berkelanjutan secara berkala dapat memunculkan kognisi pada masyarakat bahwa konsep negara maritim dan budaya bahari adalah bagian dari kebudayaan yang dimiliki masyarakat Indonesia.

Indonesia adalah negara maritim dan kepulauan dengan penguasaan wilayah laut yang besar dan garis pantai yang luas. Tentunya, kekayaan alam yang dikandungnya pun akan terus menarik “minat” para pelintas batas, sekaligus juga meningkatkan tingkat kerawanan terhadap gangguan keamanan yang tinggi pula jika dibandingkan dengan negara-negara tetangganya. Maka, pantas rasanya jika pemahaman terhadap perbatasan ini menjadi penting dan tak terpisahkan dari identitas negara dan warganya.

DAFTAR ACUAN

Surat Kabar dan Majalah

- Dwyer, Dan. "Discover and Recovery: A Rotenese Discovery Tale for Ashmore Reef (Pulau Pasir)", *Bulletin of the Australian Institute for Maritime Archaeology Vol. 24 of 2000*, Darwin.
- Dugis, Vinsensio, "Nelayan Tradisional dan Hubungan RI-Australia", *Kompas*, 19 Januari 1995, Jakarta.
- Salim, Tama. "China Eyes Closer Ties with Indonesia", *The Jakarta Post*, 27 September 2016, Jakarta.
- Suryadinata, Leo. "The Natunas Incident and Its Impact on Indonesia-China Relations", *The Jakarta Post*, 24 Juni 2016, Jakarta.
- Zuhdi, Susanto. "Mengapa Bukan Pulau Terdepan?", *Kompas*, 8 September 2006, Jakarta.
- Kompas*, 5 September 2001, Jakarta.

Jurnal

- Isu-isu Strategis dalam Hubungan Australia-Asia Timur 1997-2005* (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2006).
- Majalah Hukum Nasional No. 1 Tahun 2006*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2006.

Buku

- Bruner, J.S. *Toward a Theory of Instruction*. Cambridge: Harvard University Press, 1966.
- Department of the Environment and Heritage Commonwealth of Australia. *Ashmore Reef National Nature Reserve and Cartier Island Marine Reserve: Management Plans*. Canberra: Environment Australia, 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Seminar Sejarah Nasional V: Subtema Pengajaran Sejarah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1990.
- Frederickson, Clayton, dan Ian Walters (peny.). *Altered States: Material Culture Transformations in the Arafura Region*. Darwin: Northern Territory University Press, 2001.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Pemikiran tentang Pembinaan Kesadaran Sejarah*. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2012.

Kusumaatmadja, Prof. Dr. Mochtar, *Hukum Laut Internasional*. Bandung: Binacipta, 1986.

Lapian, Prof. Dr. A.B., dkk., *Indonesia dalam Arus Sejarah: Masa Pergerakan Kebangsaan*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2012.

Marihandono, Djoko (peny.). *Titik Balik Historiografi Indonesia*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2008.

Sunarto, Kamanto, dkk. *Multicultural Education in Indonesia and Southeast Asia: Stepping into the Unfamiliar*. Depok: Jurnal Antropologi Indonesia, 2014.

Yusuf, Dr. Chandra Motik, S.H, M.Sc. *75 Tahun Prof. Dr. Hasjim Djalal, M.A: Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim*. Jakarta: IND HILL CO, 2010.

Karya Ilmiah

Sari, Noor Fatia Lastika. *Ashmore Reef, Nelayan Rote, dan Masalah Pelintas Batas Perairan Indonesia-Australia 1974-2007*. Skripsi. Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, 2015.

Internet

Kodam XVII Cenderawasih, “Tata Cara Lintas Batas Antara Negara”, Senin, 24 Maret 2014, diakses dari <http://www.kodam17cenderawasih.mil.id/tulisan/artikel/tata-cara-lintas-batas-antara-negara/>, Kamis, 19 Maret 2015 pukul 10:06 WIB.

M. Ambari, “Berapa Jumlah Pulau Yang Dimiliki Indonesia Sebenarnya?”, diakses di <http://www.mongabay.co.id/2015/05/09/berapa-jumlah-pulau-yang-dimiliki-indonesia-sebenarnya/>, Sabtu, 4 Juli 2015 pukul 5:25 WIB.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan”, diakses dari http://hukum.unstrat.ac.id/uu/uu_23_2006.pdf, Kamis, 19 Maret 2015 pukul 09:53 WIB.



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Konferensi Nasional Sejarah X

Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta
7-10 November 2016

Optimalisasi Fungsi Museum Maritim
Indonesia sebagai Upaya Membangkitkan
Budaya Maritim dan Wawasan Nusantara

Abdullah Faqih



Optimalisasi Fungsi Museum Maritim Indonesia sebagai Upaya Membangkitkan Budaya Maritim dan Wawasan Nusantara

Abdullah Faqih

Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada

Jalan Cik Ditiro, No. 22, Sagan, Yogyakarta

Telp: +62 856-4719-8527

e-mail: faqihism@gmail.com

ABSTRAK

Makalah ini ditulis untuk memberikan rekomendasi terkait langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka mengoptimalkan fungsi museum maritim di Indonesia. Hal itu didasari oleh data dan fakta bahwa bangsa Indonesia kini semakin jauh dari jati diri azalnya sebagai bangsa maritim. Indonesia kini diatur oleh paham kontinental dengan watak khasnya yang bukan saja tak kenal, tetapi juga meminggirkan budaya maritim.

Budaya maritim yang begitu kaya membutuhkan ruang untuk terus lestari dan berkembang. Kekayaan dan keberagaman budaya maritim akan hilang apabila tidak dikomunikasikan kepada khalayak dan diberi ruang untuk terus hidup. Argumentasi utama dalam makalah ini mengemukakan bahwa museum maritim memiliki peran penting sebagai lembaga pendidikan non-formal untuk memperkuat karakter bangsa dan pemahaman visi maritim. Ruang museum memiliki kemampuan dalam membentuk wacana dan merajut memori kolektif, mampu menjangkau segala lapisan masyarakat, dan berpotensi mengubah mindset atau pola pikir publik agar lebih berorientasi pada budaya maritim.

Akan tetapi, museum maritim di Indonesia belum mampu memengaruhi publik ke arah kesadaran maritim dengan baik (Sadzali, 2014). Hal itu disebabkan oleh unsur-unsur komunikasi yang diterapkan tergolong kurang efektif. Melihat pentingnya keberadaan museum maritim, upaya optimalisasi fungsi museum perlu dilakukan.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi museum maritim adalah 1) menciptakan inovasi museum maritim berupa “mall museum”, 2) menciptakan ekspedisi pelayaran museum maritim sepanjang Sumatera dan Jawa, 3) menghadirkan koleksi museum yang langka dan berciri khas, 4) menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam proses komunikasi museum, 5) menciptakan desain dan suasana museum sama persis dengan aslinya.

Kata Kunci: Museum, Maritim, Budaya

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Nenek moyangku orang pelaut

Gemar mengarung luas samudera

Menerjang ombak tiada takut

Menempuh badai sudah biasa

Harmoni melodi lagu *Pelaut* melantun indah di telinga. Penggalan lirik lagu di atas menyiratkan sebuah pesan: nenek moyang bangsa Indonesia adalah pelaut handal yang sanggup mengarungi lautan lepas. Sejak abad ke-9 Masehi, nenek moyang kita telah berlayar jauh dengan kapal bercadik. Ke Utara mengarungi laut Tiongkok, ke Barat memotong lautan Hindia hingga Madagaskar, ke Timur hingga Pulau Paskah. Kondisi itu membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa penjelajah samudera (Read, 2005). Kenyataan akan kejayaan maritim Indonesia di masa lampau memang bukan sekadar mitos yang dilebih-lebihkan catatan sejarah. Sejak dahulu, bangsa Indonesia telah menjadikan laut sebagai bagian penting dari kehidupan kesehariannya. Sebelum kedatangan bangsa penjajah, laut Indonesia juga telah digunakan sebagai “titik temu” berbagai suku bangsa yang saling berinteraksi dalam hal ekonomi, percaturan politik, hingga pertukaran bahasa dan budaya. Di seluruh penjuru Nusantara telah tersebar berbagai bandar dagang dan pelabuhan-pelabuhan besar. Sejarah pun telah menyebutkan bahwa bersatunya Nusantara adalah karena kebesaran armada maritimnya.

Cerita tentang kejayaan maritim Nusantara juga tercermin dalam kisah Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya merupakan negara maritim yang kuat, sehingga dapat menguasai seluruh Sumatera dan mengirimkan ekspedisinya ke Jawa serta menguasai Selat Malaka hingga Tanah Genting Kra (Yulianti, 2014). Di puncak kejayaannya, Sriwijaya menjadi tuan atas Selat Malaka dan menguasai rute perdagangan yang melalui selat ini. Di tahun 1178, seorang penulis Cina, Chou K’u-fei, melaporkan bahwa beberapa kapal asing yang lewat akan diserang jika tidak masuk pelabuhan Sriwijaya atau membayar tol (Kay, 1976 dalam Yulianti, 2014). Kapal-kapal Sriwijaya melakukan pelayaran sendiri antara Cina dan India. Ia juga mengirimkan utusan ke Cina dan diakui sebagai negara penguasa di Asia Tenggara.

Setelah Kerajaan Sriwijaya runtuh pada abad ke-14, kekuatan maritim Nusantara digantikan oleh Kerajaan Majapahit. Segala kemegahan kekuatan maritim Majapahit diceritakan Pramoedya Ananta Toer dalam Novel *Arus Balik*: di zaman Majapahit, *Arus Balik* peradaban berlangsung dari wilayah *Bawah Angin* di Selatan ke *Atas Angin* di Utara. Majapahit memang dikenal memiliki kehebatan sebagai kerajaan besar penguasa Arus Selatan hingga mampu menerjang penguasa kerajaan Utara. Majapahit menjadi kekuatan maritim terbesar pada abad itu (1350-1389 M) dan menguasai hampir seluruh wilayah Indonesia saat ini, hingga Singapura (Tumasik), Malaysia (Malaka), dan beberapa negara ASEAN lainnya.

Namun, masih menurut Pram¹, kini arus telah berubah ke arah sebaliknya: dari Utara ke Selatan. Arus zaman telah membalik, segalanya berubah: kekuasaan laut menjadi mengerut ke pedalaman, kemuliaan menukik dalam kemerosotan, kejayaan berubah ke kekalahan, kecemerlangan cendekia menjadi kedunguan penalaran, persatuan berubah menjadi perpecahan yang memandulkan segala kegiatan. Penjajahan kolonial adalah penyebab malapetaka ini. *Mindset* masyarakat Indonesia yang semula berorientasi pada laut dialihkan perlahan-lahan ke darat. Bangsa Indonesia pun hidup semakin jauh dari jati diri azalnya sebagai bangsa maritim. Indonesia kini diatur oleh paham kontinental dengan watak khasnya yang bukan saja tak kenal, tetapi juga meminggirkan budaya maritim. Hal itu terus mengakar kuat hingga sekarang.

Bercermin pada sejarah kejayaan maritim masa lampau, bangsa Indonesia harus segera bangun dari tidur panjangnya. Kita *mesti* memutar kemudi ke arah kesadaran maritim yang baik dan meneguhkan kembali jati diri bangsa Indonesia sebagai penghuni negara maritim. Persoalan luntarnya budaya dan pola pikir maritim harus menjadi agenda *super* mendesak yang perlu diselesaikan; perlu membuat strategi yang cerdas dan kreatif untuk keluar dari paradigma agraris tradisional ke arah paradigma maritim yang rasional dan berwawasan Nusantara. Apabila tidak, kegemilangan maritim masa lalu hanya akan menjadi wacana tanpa makna.

Kehadiran museum bertema maritim di tengah persoalan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia –pudarnya budaya dan pola pikir maritim– diyakini sangat relevan. Budaya maritim yang begitu kaya membutuhkan ruang untuk terus lestari dan berkembang. Kekayaan dan keberagaman budaya maritim akan hilang apabila tidak dikomunikasikan kepada

¹ Sapaan akrab Pramoedya Ananta Toer

khalayak dan diberi ruang untuk terus hidup. Terlebih lagi, di tengah dinamika sosial dan budaya yang berkembang begitu cepat, museum bertema maritim dapat menjadi media alternatif pendidikan non-formal yang berfungsi untuk merekonstruksi pola pikir maritim dan wawasan Nusantara. Hal itu ditegaskan oleh Sutan Takdir Alisyahbana dalam tulisannya yang mengatakan bahwa museum sebagai alat pendidikan zaman modern akan senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan dunia modern itu sendiri (Alisyahbana, 1954 dalam Sadzali, 2014). Sama seperti museum-museum pada umumnya, museum bertema maritim di Indonesia juga memiliki tanggung jawab dan fungsi untuk melestarikan, membina, sekaligus mengembangkan budaya maritim baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Melalui pesan-pesan yang dirangkai lewat *display* dan ruang pameran, museum bertema maritim di Indonesia berfungsi sebagai sarana komunikasi dan jembatan penghubung yang dapat memicu kesadaran dan pengetahuan bagi masyarakat.

Dalam karya tulis ini, akan dibahas mengenai kemampuan museum bertema maritim di Indonesia dalam merekonstruksi pola pikir dan kesadaran maritim masyarakat. Hal itu diyakini relevan mengingat Indonesia, melalui gagasan Nawacita yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo, mulai menaruh perhatian lebih pada bidang maritim, salah satunya memperkuat basis pembangunan nasional dari *land based* menjadi *sea based*. Karya tulis ini juga akan memberikan beberapa rekomendasi terkait langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi museum maritim yang ada di Indonesia. Tujuan akhirnya adalah membangkitkan kembali budaya dan pola pikir maritim masyarakat Indonesia melalui media pendidikan non-formal yang bernama museum maritim.

1.2. Rumusan Masalah

Budaya maritim yang begitu kaya membutuhkan ruang untuk terus lestari dan berkembang. Kekayaan dan keberagaman budaya maritim harus dikomunikasikan kepada publik dan diberi ruang untuk terus hidup. Hal itu dimaksudkan juga sebagai upaya untuk merekonstruksi pola pikir masyarakat ke arah kesadaran maritim yang lebih baik. Museum bertema maritim di Indonesia memiliki fungsi strategis untuk mengupayakan kedua hal itu. Melihat pentingnya peran museum bertema maritim di Indonesia dalam upaya rekonstruksi budaya maritim, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kemampuan museum maritim di Indonesia dalam menjalankan peran dan fungsi azalnya sebagai media pendidikan non-formal?

- b. Bagaimana langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi museum maritim di Indonesia?

1.3. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan kemampuan museum maritim di Indonesia dalam menjalankan fungsinya sebagai media pendidikan non-formal untuk merekonstruksi pola pikir dan budaya maritim masyarakat. Dalam hal itu, akan dijelaskan beberapa kelemahan museum maritim di Indonesia dari berbagai aspek. Selain itu, tujuan lain dari disusunnya makalah ini adalah untuk menjelaskan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam rangka mengoptimalkan fungsi museum maritim di Indonesia. Kedua hal tersebut dinilai sangat penting karena belum banyak penelitian yang secara spesifik membahas tentang museum maritim, kebanyakan justru membahas museum dalam lingkup *general*. Oleh karena itu, selain untuk memperkaya referensi atau kajian yang berfokus pada museum maritim, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran pada pemerintah mengenai kelemahan-kelemahan museum bertema maritim di Indonesia. Sehingga, pemerintah akan memiliki referensi mengenai langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan untuk menganulir kelemahan tersebut dan mengoptimalkan kembali fungsi museum maritim.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

2.1. Jenis Penelitian

Makalah ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *descriptif analysis*. Penelitian kualitatif dipilih karena dianggap sesuai dengan kebutuhan penelitian dalam memahami serta menganalisis kelemahan dan peran museum maritim di Indonesia untuk merekonstruksi budaya dan pola pikir maritim masyarakat. Metode *descriptif analysis* dipilih peneliti dengan harapan mampu memberikan gambaran lengkap dan komprehensif dari seluruh sumber data penelitian (literatur) serta pencatatan yang riid dari berbagai fenomena yang ditemukan lewat studi pustaka dan hasilnya dapat dipaparkan melalui analisis yang mendalam. Metode *descriptif analysis* memanfaatkan berbagai sumber data primer dan sekunder untuk mendeskripsikan kelemahan-kelemahan museum maritim di Indonesia. Sementara itu, proses penelitian ini dilakukan dengan pengamatan dan penelaahan dokumen, jurnal, buku, serta data lain yang *compatible* guna menguraikan kemampuan museum maritim di Indonesia untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya.

2.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penelitian ini memerlukan pemahaman secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis data melalui studi pustaka (literatur) yang datanya dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui studi pustaka dirasa cukup untuk dijadikan bahan analisa mengingat banyaknya penelitian yang mengambil tema tentang museum, meskipun tidak terfokus pada museum maritim di Indonesia.

Sumber data primer diperoleh melalui dokumen-dokumen asli yang diterbitkan oleh Museum Maritim Nasional melalui portal website. Data sekunder meliputi arsip, dokumen, catatan dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Kelemahan Museum Maritim di Indonesia

Sejak merdeka pada tahun 1945, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang secara khusus menangani masalah kemaritiman di Indonesia baru terbentuk pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. Selain mengakibatkan terbengkalainya pengelolaan sektor maritim, hal itu juga berdampak pada eksistensi museum maritim di Indonesia. Sejauh ini, Indonesia hanya memiliki empat museum bertema maritim, yaitu Museum Kapal Selam Pasopati Surabaya, Museum Kapal Samudraraksa Jawa Tengah, Museum Bahari Yogyakarta, dan Museum Bahari Jakarta. Jumlah tersebut terbilang tidak sebanding mengingat Indonesia sebenarnya memiliki kekayaan budaya maritim yang melimpah.

Keberadaan museum bertema maritim di Indonesia menjadi sangat penting mengingat museum tidak hanya memiliki fungsi sebagai pelindung benda cagar budaya, melainkan juga sebagai tempat pembentukan ideologi, disiplin, dan pengembangan pengetahuan bagi publik. Hal itu juga ditegaskan dalam kode etik *ICOM*,

“Museum memiliki tugas penting untuk mengembangkan peran pendidikan dan menarik pengunjung lebih luas dari kalangan masyarakat, lokalitas, atau kelompok yang dilayaninya. Interaksi dengan masyarakat pendukung dan pembinaan serta promosi warisan yang diampunya merupakan bagian integral dari pendidikan yang harus dilaksanakan oleh museum (*ICOM*, 2007 dalam Sadzali, 2014).

Namun demikian, meskipun museum memiliki peran vital dalam merekonstruksi pola pikir dan kebudayaan masyarakat, museum maritim di Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan yang ada pada museum bertema maritim tersebut, dapat dilihat pada unsur dan model komunikasi yang diterapkan. Unsur dan model komunikasi dapat menjadi indikator seberapa efektif museum bertema maritim menjalankan fungsi dan perannya. Hal itu disebabkan karena unsur dan model komunikasi menjadi penghubung antara museum dengan publik secara langsung. Dalam bahasa sederhana, unsur dan model komunikasi museum menjadi ujung tombak keberhasilan museum dalam merekonstruksi pola pikir dan budaya masyarakat. Hal itu juga dibuktikan dalam sejarah perkembangan museum mengenai peran penting komunikasi museum dalam menciptakan daya tarik serta mempermudah pemahaman pesan yang disampaikan kepada publik (Sadzali, 2014).

Menurut literatur yang sama, unsur-unsur komunikasi museum adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Unsur-unsur Komunikasi Museum

No.	Unsur Komunikasi	Deskripsi
1.	Sumber (<i>Source</i>)	Dalam komunikasi museum, sumber (<i>source</i>) diartikan sebagai personel atau keseluruhan sumber daya manusia yang ada di dalam museum, seperti <i>director</i> , kurator, kelompok kerja, dan lain-lain.
2.	Pesan	Pesan diartikan sebagai simbol verbal maupun nonverbal yang berisi nilai, gagasan, atau informasi lain yang dikomunikasikan oleh unsur sumber kepada penerima.
3.	Media	Media disebut juga sebagai saluran atau alat atau wahana yang digunakan unsur sumber untuk menyampaikan pesan kepada penerima.
4.	Pengunjung	Pengunjung diartikan sebagai penerima pesan (<i>receiver</i>), yaitu mereka yang datang ke museum dan menafsirkan sendiri pesan-pesan yang disampaikan oleh unsur sumber menjadi gagasan atau informasi baru yang dia pahami.
5.	Gangguan	Gangguan atau disebut dengan hambatan diartikan sebagai rangsangan tambahan, baik berupa fisik maupun psikologis, yang tidak dikehendaki dan mengganggu pesan yang disampaikan oleh unsur sumber.
6.	Efek	Efek atau dampak diartikan sebagai sesuatu yang terjadi pada pengunjung setelah menerima pesan dari unsur sumber. Hal itu dapat dicontohkan seperti adanya perubahan mindest, pengetahuan, insirasi dan pola pikir

Sumber: (Sadzali, 2014)

Untuk melihat analisis kelemahan-kelemahan museum maritim di Indonesia, berikut ini pembahasan lebih jelasnya:

3.1.1. Museum Kapal Selam Pasopati

Museum Kapal Selam Pasopati berada di Surabaya, tepatnya di Jalan Pemuda, Embong Kaliasin, Genteng. Museum ini didirikan pada tahun 1995 atas inisiasi Gubernur Jawa Timur pada masa itu, Basofi Soedirman, dan pihak TNI Angkatan Laut. Di dalam Museum Kapal Selam Pasopati terdapat kapal selam asli bernomor lambung Pasopati 410 di bawah Korps Hiu Kencana TNI-AL. Pengelolaannya sendiri berada di bawah PUSKOPAL (Pusat Koperasi Angkatan Laut) yang merupakan bagian dari usaha Angkatan Laut dalam mengelola aset-asetnya. Adapun pendirian Museum Kapal Selam Pasopati selain sebagai objek wisata edukasi juga sebagai upaya untuk mengenang jasa Kapal Selam Pasopati pada masa baktinya.

Berikut ini penjabaran unsur-unsur komunikasi pada Museum Kapal Selam Pasopati:

Tabel 2: Unsur-unsur Komunikasi Museum Kapal Selam Pasopati

No.	Unsur Komunikasi	Deskripsi
1.	Sumber	Staff museum terdiri dari kepala museum, pelaksana operasional, pengelola keuangan, KAUR Tiket, sekretaris, KAUR lapangan, bidang administrasi, teknisi, keamanan, dan guide.
2.	Pesan	Secara umum, museum mengangkat tema Kapal Selam Pasopati dalam konteksnya sebagai kendaraan tempur TNI AL.
3.	Media	Media utama adalah kapal selam jenis Whiskey Class, sedangkan media pendukung terdiri dari pemandu dan ruang videorama.
4.	Pengunjung	Mayoritas adalah pelajar TK (Taman Kanak-Kanak), pelajar SD, SMP, dan SMA, kemudian mahasiswa dan terakhir masyarakat umum.
5.	Efek	Adanya kebingungan pengunjung terhadap informasi yang disampaikan dalam museum,

		namun di sisi lain pengunjung juga merasa terinspirasi dengan koleksi unik museum. Sementara efek penambahan pengetahuan tidak terlalu dirasakan oleh pengunjung.
6.	Gangguan	Gangguan fisik disebabkan oleh lingkungan museum seperti bangunan museum dan SDM, sedangkan gangguan psikologis adalah akibat dari bangunan fisik dan SDM museum yang kurang sesuai.

Sumber: Sadzali (2014)

Berdasarkan data Sadzali (2014), berikut ini dijabarkan analisis kelemahan unsur-unsur komunikasi Museum Kapal Selam Pasopati Surabaya:

a. Sumber

Sumber daya manusia dalam Museum Kapal Selam Pasopati Surabaya berperan sebagai pelaksana dan pengelola museum. Berdasarkan sumber penelitian sebelumnya, sumber daya manusia yang mengelola dan menjalankan fungsi di Museum Kapal Selam Pasopati termasuk dalam kategori kurang memadai. Hal itu disebabkan oleh banyaknya ketidaksesuaian antara peran yang diampu dengan latar belakang pendidikan. Sebagai contoh, di Museum Kapal Selam Senopati Surabaya, peran kurator, tata pameran, dan konservasi tidak memiliki *background* pendidikan formal. Padahal, standar minimal untuk menjadi kurator adalah S1 Permuseuman atau bidang lain yang sejenis; standar minimal untuk tata pameran adalah D3 seni rupa; sedangkan standar minimal untuk konservasi adalah SMA jurusan IPA.

b. Pesan

Secara garis besar, pesan yang dikomunikasikan dalam museum tergolong belum dikonsep dengan baik. Hal itu dapat dilihat pada banyaknya pengunjung yang merasa kebingungan, tidak terinspirasi, dan tidak mendapat pengetahuan baru yang signifikan. Salah satu pesan yang disampaikan berupa film dokumenter terkesan tidak sesuai dengan tema besar yang diangkat Museum Kapal Selam Pasopati. Museum ini tidak mengangkat pesan mengenai Kapal Selam Pasopati secara spesifik, tetapi kebanyakan mengangkat tentang

sejarah TNI-AL. Sementara itu, hal-hal penting seperti misi Kapal Selam Pasopati berikut sejarah dan pembuatannya justru tidak banyak diangkat.

c. Media

Media utama yang digunakan dalam Museum Kapal Selam Pasopati adalah Kapal Selam Pasopati itu sendiri. Kapal selam tersebut berpotensi menjadi media komunikasi pesan yang baik karena keunikan dan kelangkaannya. Bahkan, Kapal Selam Pasopati disebut-sebut sebagai satu-satunya di Indonesia dan Asia Tenggara. Oleh karena itu, media utama komunikasi Museum Kapal Selam Pasopati dapat digolongkan sebagai media komunikasi yang unik.

d. Pengunjung

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, 98% dari pengunjung museum menginginkan adanya pengetahuan baru mengenai perkembangan maritim dari museum. Pengunjung juga menginginkan adanya koleksi unik dan bernilai penting seperti kapal selam asli dan pelayaran yang maksimal. Di samping itu, pengunjung juga menginginkan penggunaan teknologi dalam komunikasi museum seperti audiovisual dan smart tablet.

e. Efek

Secara garis besar, efek atau dampak buruk masih banyak bermunculan sebagai akibat dari sumber daya manusia museum yang kurang kompeten, pesan museum yang tidak dirancang dengan baik, serta adanya potensi gangguan yang cukup tinggi. Hal-hal itu menyebabkan munculnya kebingungan pengunjung, tidak terinspirasi, dan pengunjung merasa tidak memperoleh tambahan pengetahuan yang signifikan.

f. Gangguan

Secara umum, masih banyak terdapat gangguan dalam unsur komunikasi Museum Kapal Selam pasopati. Gangguan itu dibagi menjadi gangguan fisik dan psikologis. Gangguan fisik terjadi akibat ukuran ruang kapal yang sempit, penuh, sesak, dan membuat pengunjung merasa tidak nyaman. Selain itu, panggung hiburan dan kolam renang yang berada di sekitar kapal selam juga menyebabkan ketidaknyamanan. Sementara gangguan psikologis muncul akibat adanya kebingungan pengunjung karena *storyline* yang ada tidak dikonsep dengan baik dan unsur sumber komunikasi museum tidak kompeten sehingga menimbulkan kebingungan pada pengunjung.

3.1.2. Museum Kapal Samudraraksa

Museum Kapal Samudraraksa berada di dalam Komplek Taman Wisata Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Museum ini baru dibangun pada tahun 2004 dan diresmikan pada tahun 2005 oleh Menkokesra. Sementara itu, pengelolaan Museum Kapal Samudraraksa dibawah langsung oleh PT Taman Wisata Candi Borobudur. Sedangkan tema utama yang diangkat dalam museum tersebut adalah pelayaran Kapal Samudraraksa ke Afrika dalam rangka ekspedisi kebudayaan maritim sekaligus rekonstruksi pelayaran dan perniagaan pada masa lampau.

Berikut ini penjabaran unsur-unsur komunikasi pada Museum Kapal Samudraraksa:

Tabel 3: Unsur Komunikasi Museum Kapal Samudraraksa

No.	Unsur Komunikasi Museum	Deskripsi
1.	Sumber	Staff museum terdiri dari penanggung jawab museum, juru penerang, resepsionis, perawatan, dan penjual souvenir.
2.	Pesan	Secara umum, Museum Kapal Samudraraksa mengangkat tema pelayaran kapal Borobudur dan kaitannya dengan sejarah maritim Nusantara.
3.	Media	Perahu asli Samudraraksa, peralatan kapal dan awak kapal, keramik China, label informasi, lemari kaca, gambar, poster, replika relief Candi Borobudur, lukisan dinding goa, dan diorama jalur perdagangan.
4.	Pengunjung	Mayoritas pengunjung adalah pelajar, kemudian mahasiswa, dan terakhir masyarakat umum.
5.	Gangguan	Gangguan fisik muncul sebagai akibat kerusakan pada bagian media pendukung museum, seperti LCD, diorama, informasi audiovisual. Sementara gangguan psikologis muncul akibat sumber (SDM) yang kurang komunikatif.
6.	Efek	Efek yang muncul adalah adanya suatu kebingungan

		yang memunculkan keraguan, tidak terinspirasi: penambahan pengetahuan tidak signifikan.
--	--	---

Sumber: Sadzali (2014)

Berdasarkan data unsur-unsur komunikasi Museum Kapal Samudraraksa di atas, kelemahan-kelemahan unsur komunikasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang ada dalam Museum Kapal Samudraraksa terdiri dari direktur, kurator, dan perencana pameran. Menurut data mengenai latar belakang pendidikan dan tugas fungsional di Museum Kapal Samudraraksa, dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia yang ada masih kurang memadai. Sebagai contoh adalah peran fungsional kurator, pustakawan, tata pameran, dan koleksi yang tidak memiliki *basic* pendidikan formal. Padahal, posisi fungsional tersebut memerlukan standar minimal kualifikasi pendidikan S1 bidang permuseuman atau bidang lain yang sejenis.

b. Pesan

Menurut evaluasi dan hasil penelitian yang ada, pesan yang dikomunikasikan dalam Museum Kapal Samudraraksa tergolong cukup baik. Hal itu dapat dilihat pada tingginya tingkat pemahaman pengunjung pada pesan yang dikomunikasikan oleh unsur sumber, besarnya prosentase pengunjung untuk kembali lagi mengunjungi museum, dan cukup tingginya prosentase pengunjung yang merasa terinspirasi serta memperoleh pengetahuan baru setelah mengunjungi Museum Kapal Samudraraksa.

c. Media

Media komunikasi utama yang digunakan oleh Museum Kapal Samudraraksa adalah Kapal Samudraraksa itu sendiri. Sementara media pendukungnya adalah poster, gambar, dan informasi koleksi. Menurut hasil penelitian Sadzali (2014), media komunikasi museum yang diterapkan tergolong cukup baik. Hal itu dapat dilihat pada warna-warni poster dan gambar yang edukatif serta penjelasan pada informasi koleksi yang jelas. Namun demikian, dalam media komunikasi tersebut masih terdapat beberapa kerusakan sehingga mengakibatkan pola komunikasi yang diterapkan kurang komunikatif.

d. Pengunjung

Pengunjung Museum Kapal Samudraraksa didominasi oleh pelajar (SMP dan SMA), mahasiswa, kalangan umum (guru dan orang tua). Berdasarkan hasil penelitian yang ada, 95% pengunjung menginginkan sebuah pengetahuan baru, misalnya pengetahuan tentang perkembangan maritim di Indonesia. Pengunjung juga menginginkan adanya pelayanan yang maksimal dari pegawai museum, salah satunya melalui partisipasi aktif pengunjung dan pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, pengunjung juga menyukai koleksi museum yang unik dan langka.

e. Efek

Dalam hal efek, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pengunjung yang mengalami keragu-raguan apakah pesan yang disampaikan museum cukup menginspirasi atau tidak. Selain itu, pengunjung kategori pelajar (SMP dan SMA) sebagian besar merasa tidak memperoleh tambahan pengetahuan yang signifikan setelah mengunjungi museum.

f. Gangguan

Gangguan fisik pada Museum Kapal Samudraraksa diakibatkan oleh penempatan lokasi museum pada jalur keluar Candi Borobudur yang mengakibatkan rendahnya minat pengunjung. Gangguan fisik juga disebabkan oleh beberapa media pendukung yang mengalami kerusakan sehingga menghambat proses komunikasi museum. Sementara itu, gangguan psikologis Museum Kapal Samudraraksa diakibatkan oleh kurang komunikatif-nya staff museum dalam mengkomunikasikan pesan-pesan museum dan perasaan lelah pengunjung setelah mengunjungi Candi Borobudur yang menyebabkan rasa malas mengunjungi museum.

3.1.3. Museum Bahari Yogyakarta

Museum Bahari Yogyakarta berada di Jalan R.E. Martadinata, Kota Yogyakarta dan baru diresmikan pada tahun 2005 atas prakarsa Paguyubaban Tri Sekar Lestari yang dibentuk dan dibina oleh Laksamana Madya (Purn) Didik Heru Purnomo. Ada pun tujuan utama dibangunnya Museum Bahari Yogyakarta adalah untuk membangkitkan cita-cita maritim Indonesia khususnya masyarakat Yogyakarta. Selain itu, Museum Bahari Yogyakarta memiliki desain bangunan yang terbilang unik: menampilkan anjungan kapal perang yang lengkap dengan meriam berkaliber 85 milimeter. Desain bangunan tersebut membuat kesan kuat pada citra angkatan laut dan kapal perang.

Berikut ini penjabaran unsur-unsur komunikasi pada Museum Bahari Yogyakarta:

Tabel 4: Unsur-unsur Komunikasi Museum Bahari Yogyakarta

No.	Unsur Komunikasi	Deskripsi
1.	Sumber/SDM	Sumber museum terdiri dari pembina, koordinator museum, dan anggota.
2.	Pesan	Secara umum, tema besar yang ingin diangkat Museum Bahari Yogyakarta adalah perjalanan karier Laksamana Didik Heru Purnomo dalam TNI AL
3.	Media	Media dalam Museum Bahari Yogyakarta antara lain cinderamata; buku dan peta laut; peralatan TNI AL; replika kapal; dan foto pribadi
4.	Pengunjung	Mayroitas adalah romongan TK (Taman Kanak-kanak), kategori umum, kategori pelajar dan mahasiswa.
5.	Gangguan	Terdapat gangguan fisik yang diakibatkan penataan ruang yang kurang sesuai dan gangguan psikologis akibat kesan militer yang cukup kuat sehingga pengunjung merasa kurang nyaman.
6.	Efek	Adanya kebingungan yang memunculkan keraguan, tidak terinspirasi, kebosanan, serta tidak adanya penambahan unsur pengetahuan yang signifikan.

Sumber: Sadzali (2014)

Menurut hasil penelitian di atas, berikut ini dijabarkan kelemahan tiap-tiap unsur komunikasi Museum Bahari Yogyakarta:

a. Sumber

Sumber daya museum yang terlibat dalam Museum Bahari Yogyakarta terdiri dari pembina, administrasi, dan staff museum. Berdasarkan hasil penelitian yang sama, keterkaitan antara latar belakang pendidikan dengan tugas fungsional museum masih tergolong kurang memadai. Selain itu, masih adanya jabatan fungsional yang belum dimiliki

oleh Museum Bahari Yogyakarta, seperti kurator, perancang pameran, bidang komunikasi dan edukasi.

b. Pesan

Pada dasarnya, pesan yang dikonsep oleh Museum Bahari Yogyakarta belum sesuai dengan tema besar yang ingin diangkat. Visi utama Museum Bahari Yogyakarta adalah menanamkan semangat kemaritiman khususnya pada masyarakat Yogyakarta, sementara pesan yang disampaikan sebagian besar mengutip biografi tokoh Laksda (purn) Didik Heru Purnomo. Selain itu, konsep pesan yang ditampilkan tersebut juga tidak terarah sehingga bagi pengunjung yang awam merasa bahwa pesan tidak tersampaikan dengan baik.

c. Media

Media utama dalam Museum Bahari Yogyakarta adalah cinderamata, alat navigasi amunisi, dan seragam militer. Sementara media pendukungnya adalah gambar, poster, replika, patung peraga, ruang videorama, dan ruang simulasi anjungan kapal. Secara keseluruhan, media-media komunikasi tersebut tergolong kurang baik. Hal itu disebabkan karena banyak media komunikasi utama yang tidak disertai dengan label informasi sehingga menyebabkan berkurang nilai kemanfaatannya.

d. Pengunjung

Pengunjung utama Museum Bahari Yogyakarta adalah anak-anak (PAUD, TK, SD), mahasiswa, dan masyarakat umum (orang tua dan guru). Hasil penelitian yang sama mengungkapkan bahwa ruang-ruang museum banyak yang tidak sesuai dengan kategori pengunjung yang didominasi oleh anak-anak dan pelajar. Selain itu, seluruh pengunjung juga menginginkan adanya media komunikasi yang menggunakan teknologi informasi seperti audiovisual dan smart tablet serta menginginkan ditampilkannya pengetahuan-pengetahuan baru tentang kemaritiman. Namun demikian, ruang videorama dan anjungan kapal cukup diminati oleh pengunjung dan sesuai dengan minat pengunjung.

e. Efek

Efek yang diberikan museum kepada pengunjung masih dikategorikan kurang baik. Hal itu didasari oleh hasil penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa 97% kunjungan hanya bersifat satu kali kunjungan, 47% pengunjung masih ragu-ragu, dan tidak ada penambahan pengetahuan baru yang signifikan pada pengunjung.

3.1.4. Museum Bahari Jakarta

Museum Bahari Jakarta terletak di Jalan Pasar Ikan, Jakarta Barat dan menempati sebuah gedung tua berukuran sangat luas. Gedung tua tersebut adalah hasil dari pembangunan yang dilakukan Belanda sejak tahun 1965 sampai 1759. Gedung tersebut semula digunakan untuk menyimpan rempah-rempah oleh VOC dan kini digunakan oleh Museum Bahari Jakarta untuk menyimpan berbagai koleksi benda laut dan kemaritiman. Museum Bahari Jakarta secara resmi dibuka oleh Gubernur Jakarta saat itu, Ali Sadikin, pada tahun 1977 dan berada di bawah Unit Pelaksanaan Teknis atau UPT Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Provinsi DKI Jakarta. Sebagai salah satu institusi resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Museum Bahari Jakarta memiliki tugas untuk melayani masyarakat, merawat, menyimpan, meneliti, dan memperagakan koleksi museum untuk kepentingan sejarah, pendidikan, sosial, dan rekreasi.

Dalam penelitian Sadzali (2014), unsur-unsur komunikasi Museum Bahari Jakarta terdiri dari tujuh unsur sebagai berikut:

Tabel 5: Unsur-unsur Komunikasi Musuem Bahari Jakarta

No.	Unsur Komunikasi	Deskripsi
1.	Sumber/SDM	Staff museum terdiri dari kepala museum, KASI koleksi, administrasi, edukasi dan pameran, staff umum, pemandu, dan preparasi.
2.	Pesan	Secara umum, pesan yang disampaikan mengangkat kebaharian Indonesia dari masa ke masa yang sesuai dengan visi museum, yaitu mengangkat tema kemaritiman.
3.	Media	Perahu asli, alat navigasi, replika, lemari kaca, standing banner, poster, gambar, label informasi, patung peraga, dan pemandu museum.
4.	Pengunjung	Mayoritas pengunjung adalah pelajar, lalu mahasiswa, dan terakhir masyarakat umum.
5.	Gangguan	Terdapat gangguan secara fisik yang diakibatkan oleh ruang-ruang museum, maupun konsep tata pamer,

		sedangkan gangguan psikologis diakibatkan oleh staff museum.
6.	Efek	Pada umumnya, efek adalah suatu kebingungan yang memunculkan keraguan. Efek lain berupa rasa bosan yang kemudian mengakibatkan sikap tidak tertarik pada bidang kemaritiman serta penambahan pengetahuan yang bersifat statis.

Sumber: Sadzali (2014)

Dari hasil penelitian tersebut, berikut ini diuraikan kelemahan pada tiap-tiap unsur komunikasi Museum Bahari Jakarta.

a. Sumber

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan Museum Bahari Jakarta adalah kepala museum, koleksi, administrasi, pustakawan, dan lain-lain. Ditinjau dari latar belakang pendidikannya, SDM dalam Museum Bahari Jakarta sangat beragam: SMA, D3, Keguruan, S1, dan S2. Namun, apabila ditinjau dari tugas fungsionalnya, latar belakang SDM Museum Bahari Jakarta masih banyak yang tidak sesuai. Sebagai contoh, Museum Bahari Jakarta tidak memiliki kurator, konservasi, dan bidang komunikasi museum. Dengan demikian, SDM yang ada pada Museum Bahari Jakarta masih tergolong kurang memadai.

b. Pesan

Secara umum, masih terdapat ketidaksesuaian dan ketidakseimbangan pesan antara tema besar yang diangkat dengan isi serta perbandingan antara objek dengan informasi. Sebagai contoh, tema museum tentang kebaharian Indonesia yang seharusnya mengangkat sejarah kemaritiman kerajaan-kerajaan Nusantara justru malah mengangkat kejayaan VOC. Selain itu, pesan museum yang akan lebih sesuai jika mengangkat kemaritiman pada abad pra-sejarah justru mengangkat pelayaran VOC dan pelayaran Kapal Phinisi ke Kanada. Selain contoh tersebut, masih ada beberapa contoh mengenai ketidaksesuaian pesan museum dengan tema utama yang disampaikan Museum Bahari Jakarta.

c. Media

Media utama yang digunakan dalam Museum Bahari Jakarta adalah koleksi asli, sementara media pendukungnya adalah gambar, poster, replika, dan pemandu museum.

Secara garis besar, koleksi asli yang ada di Museum Bahari Jakarta tergolong belum sesuai dengan prosedur yang dikeluarkan Dirjen Permuseuman. Ada beberapa koleksi yang memiliki nilai penting, tetapi tidak disertai label informasi pendukung sehingga membuat koleksi tersebut tidak bernilai penting.

d. Pengunjung

Pengunjung Museum Bahari Jakarta didominasi oleh pelajar (SD, SMP, SMA), mahasiswa, dan umum. Penelitian lapangan yang dilakukan oleh Sadzali (2014) menunjukkan bahwa 96% pengunjung menginginkan suatu pengetahuan baru, seperti perkembangan maritim dari masa ke masa. Pengunjung juga menginginkan adanya komunikasi menggunakan teknologi seperti audiovisual, pelayanan maksimal dari staff museum, dan adanya koleksi unik dan langka.

e. Gangguan

Gangguan fisik pada Museum Bahari Jakarta disebabkan oleh banyaknya ruang kosong, adanya genangan air di pintu masuk ketika musim penghujan, minimnya koleksi asli yang menyebabkan kebosanan pengunjung, dan minimnya label informasi pada replika koleksi. Sementara gangguan psikologis disebabkan karena adanya proses komunikasi yang tidak dikonsept dengan baik oleh unsur komunikasi (sumber, pesan, media), munculnya ketakutan pada pengunjung akibat minimnya pencahayaan, dan *storyline* yang tidak dikonsept dengan baik sehingga menimbulkan kebosanan dan kebingungan.

3.1.5. Evaluasi

Menurut penelitian Sadzali (2014) tersebut, dapat disimpulkan bahwa keempat museum maritim yang ada di Indonesia belum mampu mempengaruhi publik ke arah kesadaran maritim dengan baik. Hal itu disebabkan oleh unsur-unsur komunikasi yang diterapkan tergolong kurang efektif. Efektifitas komunikasi tersebut juga dipengaruhi oleh unsur sumber daya manusia yang kurang kompeten, pesan museum yang tidak dikonsept dengan baik, media penyampai pesan yang tergolong kurang baik, dan efek pada pengunjung yang jarang memperoleh inspirasi atau tambahan pengetahuan baru yang signifikan, serta gangguan-gangguan baik fisik maupun psikologis yang masih sering muncul dalam proses komunikasi museum.

3.2. Optimalisasi Fungsi Museum Maritim

Unsur utama yang harus dioptimalkan dari museum maritim Indonesia adalah unsur komunikasi. Komunikasi memegang peran penting untuk mencapai visi dan misi museum. Hal itu disebabkan oleh fungsinya sebagai pendekonstruksi cara pandang publik terhadap wawasan kemaritiman. Melalui komunikasi, museum dapat melakukan kegiatan edukasi dan pembentukan wacananya kepada pengunjung.

Berdasarkan hasil penelitian Sadzali, keempat museum maritim yang ada di Indonesia masih tergolong memiliki model komunikasi yang buruk. Tercapai atau tidaknya visi dan misi museum sangat bergantung pada model komunikasi yang diterapkan. Unsur-unsur model komunikasi tersebut tidak hanya mencakup kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), melainkan juga mencakup cara museum dalam menata dan mendesain ruang museum serta menarik tidaknya museum dalam men-*display* benda di dalamnya. Hal itu akan berpengaruh pada tinggi rendahnya minat pengunjung untuk menangkap pesan yang disampaikan oleh museum maritim. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya optimalisasi fungsi museum maritim Indonesia.

Upaya optimalisasi museum maritim dijabarkan sebagai berikut:

a. Mall Museum

Ide optimalisasi fungsi museum maritim di Indonesia dapat dimulai dari meminimalisir gangguan fisik berupa lokasi museum. Hal itu dapat diawali dengan penggabungan konsep museum dengan mall (pusat perbelanjaan) yang kemudian disebut dengan istilah “Mall Museum”. Sejauh ini, lokasi museum yang berada cukup jauh dari pusat-pusat aktivitas warga menjadi salah satu faktor rendahnya minat masyarakat mengunjungi museum. Membangun museum “portabel” di pusat-pusat perbelanjaan bisa menjadi alternatif bagi pemerintah untuk “jemput bola” dan lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Terlebih lagi, pusat perbelanjaan juga menjadi *meeting point* bagi ratusan hingga ribuan orang setiap harinya. Mereka berasal dari berbagai lapisan masyarakat dan usia yang beragam. Dengan menggabungkan konsep museum dengan mall, pengelola museum tidak perlu khawatir akan kekurangan pengunjung.

Saat ini, telah ada beberapa contoh museum yang sedang dikembangkan di dalam pusat perbelanjaan. Salah satu contohnya adalah Museum Affandi di Lippo Mall Yogyakarta. Museum ini menyimpan beberapa karya lukis seniman Affandi. Pengunjungnya mayoritas

adalah anak-anak muda yang sedang mengunjungi pusat perbelanjaan tersebut. Selain itu, di Plaza Ambarrukmo Yogyakarta juga sedang dikembangkan museum yang menyimpan benda-benda kuno khas peninggalan Keraton Yogyakarta. Apabila pemilihan lokasi telah tepat, pengelola museum hanya perlu memikirkan bagaimana proses komunikasi antara museum dengan pengunjung dapat berjalan optimal. Hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan itu adalah teknik *display* benda-benda di dalam museum, pencahayaan, label informasi, kurator, suasana museum, penerapan teknologi informasi dan komunikasi, serta pelibatan pengunjung dalam aktivitas museum. Penggabungan konsep museum maritim dengan mall akan mampu memunculkan *tren* baru, khususnya bagi kalangan anak muda, bahwa mengunjungi museum tidak kalah ‘*keren*’ dengan mengunjungi pusat perbelanjaan.

b. Ekspedisi Museum Maritim

Adalah rahasia umum bahwa kekuatan armada maritim Nusantara pernah tersohor ke seantero dunia. Beberapa puing bukti kejayaan maritim Nusantara khususnya oleh Kerajaan Sriwijaya berada di Sumatera Selatan. Namun demikian, bekas-bekas pelayaran armada maritim Sriwijaya juga tersebar di sepanjang pantai Aceh hingga Jawa. Ekspedisi Museum Maritim yang dilakukan di sepanjang pantai Aceh hingga Jawa bisa menjadi alternatif untuk merekonstruksi kembali sisa-sisa kejayaan maritim Nusantara.

Kapal yang digunakan untuk ekspedisi memuat benda-benda maritim. Jika tidak memungkinkan, dapat ditampilkan media audiovisual, gambar, maupun poster yang tidak mudah rusak. Tim ekspedisi menyusuri pesisir Aceh hingga Jawa sambil menggali sisa-sisa kejayaan maritim Kerajaan Sriwijaya. Di setiap pelabuhan pemberhentian, tim ekspedisi dapat mengundang masyarakat lokal, termasuk pelajar SD hingga SMA, untuk mendatangi kapal ekspedisi museum maritim. Pengelola museum perlu memikirkan teknik atau cara yang inovatif untuk membuat pengunjung memperoleh pengetahuan baru dan terinspirasi oleh pesan-pesan kemaritiman yang ditampilkan. Langkah ini dapat menjadi alternatif yang kreatif untuk meminimalisir gangguan fisik museum berupa pemilihan lokasi. Selain untuk menggali sisa-sisa kejayaan maritim Nusantara, ekspedisi museum maritim juga dapat menjadi wahana edukasi kepada masyarakat tentang kekayaan budaya maritim Indonesia.

c. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dalam penelitiannya, Sadzali (2014) mengungkapkan bahwa sebagian besar museum maritim di Indonesia belum menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung proses komunikasi museum. Padahal, masyarakat saat ini telah memasuki era

digital dimana teknologi komunikasi seperti handphone atau tablet begitu akrab dengan kehidupan keseharian masyarakat. Memperbanyak media audiovisual di dalam museum dapat menjadi alternatif yang baik dibandingkan membuat pengunjung hanya berkeliling ruang museum sambil mengamati benda-benda yang dipamerkan sambil membaca label informasi. Hal-hal penting lainnya yang perlu diterapkan yaitu, menciptakan interaksi aktif pengunjung melalui *games* digital di dalam museum, menggunakan perangkat *touch screen* untuk melihat katalog peninggalan kerajaan-kerajaan maritim, pencahayaan yang baik, memanfaatkan kecanggihan perangkat komputer dan internet untuk mendukung proses komunikasi museum, dan lain-lain. Contoh museum di dunia yang paling baik dalam hal penerapan teknologi informasi dan komunikasi adalah Museum Nasional Singapura.

Untuk mendukung penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten. Pengelola museum harus mampu mengoperasikan perangkat IT tersebut dan mengajak pengunjung untuk berinteraksi dengan aktif. Dalam hal ini, kemampuan komunikasi sangat perlu dimiliki oleh pengelola museum agar tercipta nuansa yang aktif dan komunikatif selama proses penyampaian pesan-pesan kemaritiman kepada pengunjung.

d. Pemilihan Benda Museum yang Unik

Meskipun di beberapa museum maritim telah ditampilkan benda-benda khas maritim yang unik seperti Kapal Selam Pasopati dan Kapal Samudraraksa, hal itu dirasa masih belum cukup mengingat peninggalan kebudayaan maritim Indonesia sebenarnya sangat beragam. Pengelola museum perlu lebih cermat dan kreatif dalam memilih benda-benda maritim yang akan di-*display*. Jangan sampai, pengelola museum men-*display* benda-benda yang tidak memiliki ciri khas dan justru mengesampingkan benda-benda yang memiliki nilai unik dan langka. Sebab, kekhasan benda-benda maritim tersebut sedikit banyak mampu mempengaruhi minat masyarakat untuk mengunjungi museum maritim. Hal itu terjadi pada Museum Louvre di Eropa yang menampilkan lukisan Monalisa karya Leonardo da Vinci. Lukisan tersebut menjadi ikon Museum Louvre dan menjadi daya tarik bagi masyarakat di seluruh dunia untuk berkunjung.

e. Desain Museum seperti Aslinya

Untuk memunculkan kesan kemaritiman yang kuat, pengelola museum tidak boleh setengah-setengah dalam mendesain museum. Membuat desain museum yang sama seperti aslinya adalah gagasan yang inovatif untuk menciptakan kesan kemaritiman yang kuat

kepada pengunjung. Hal itu akan memudahkan pengunjung untuk menerima pesan-pesan kemaritiman karena nuansa maritim yang dirasakannya begitu kuat. Untuk membuat desain museum seperti aslinya, pengelola dapat merenovasi museum dengan menambahkan benda-benda “berbau” maritim asli, seperti pasir pantai, batu-batuan, dan lain-lain. Pengelola juga dapat menambahkan efek-efek suara ombak atau kicauan burung serta menambahkan aroma-laut. Pengecatan ulang bangunan yang bernuansa maritim dan warna-warni laut, tata pencahayaan, para pegawai museum maritim, seperti resepsionis atau kurator, yang mengenakan pakaian khas maritim layaknya nelayan juga perlu dilakukan.

Sebagai contoh adalah museum terbuka Buena Park di Los Angeles. Museum ini berupaya menampilkan suasana Kota Cowboy lengkap dengan kantor sheriff, kandang kuda, agen telegram, penjara, bar dalam ukuran sesungguhnya. Bahkan, pramuniaganya juga berpakaian layaknya di abad ke-19. Barang dan makanan yang dijual seperti permen, kacang-kacangan, kerajinan tangan Indian adalah barang-barang nyata dan dijual dengan gaya abad ke-19. Pendekatan ini bertujuan untuk menguatkan pesan dan memberikan pengalaman menarik bagi pengunjung (Sadzali, 2014).

BAB IV

4.1. Kesimpulan

Budaya maritim Indonesia yang begitu beragam memerlukan ruang untuk terus hidup dan berkembang. Keberadaan museum maritim dapat menjadi alternatif untuk merajut memori kolektif kekayaan budaya maritim di Indonesia. Sebagai lembaga pendidikan non-formal yang bertanggung jawab mengomunikasikan pesan-pesan kemaritiman kepada publik, museum maritim di Indonesia masih menemui sejumlah permasalahan. Permasalahan tersebut adalah tidak efektifnya unsur-unsur komunikasi yang diterapkan sehingga belum mampu memengaruhi publik ke arah kesadaran maritim yang baik. Upaya-upaya optimalisasi perlu dilakukan terhadap unsur-unsur komunikasi tersebut. Hal itu mencakup upaya merealisasikan gagasan “Mall Museum” dan Ekspedisi Museum Maritim, upaya penyediaan benda-benda museum yang unik, penerapan teknologi informasi dan komunikasi, serta membuat desain museum sama seperti aslinya.

Adanya upaya optimalisasi tersebut diharapkan mampu membuat museum maritim di Indonesia berbenah, sehingga fungsi azalnya sebagai lembaga pendidikan non-formal yang mampu merekonstruksi pola pikir dan budaya maritim masyarakat dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Bettarini, Yulia. 1991. *Dari Hidup Mengembara Menjadi Menetap: Orang Laut di Pulau Bertam, Kotamadya Batam Provinsi Riau*. Naskah tesis sarjana Antropologi tidak dipublikasikan, Jurusan Antropologi Budaya, Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Pramoedya Ananta Toer, Arus Balik: Sebuah Epos Pasca Kejayaan Nusantara di Awal Abad 16, Hasta Mitra, 2002.
- Sadzali, Asyhad Mufsi. 2014. *Museum untuk Kebangkitan Maritim Indonesia Kajian Kritis Komunikasi Museum Bertema Maritim di Indonesia*. Tesis Sarjana S-2 Program Studi Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.
- Suhardi, Gaudensius. 2011. "Laut Indonesia si Anak Haram". Dalam *Tahun 1511: Lima Ratus Tahun Kemudian*. Ed. Purnomo. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Yuliati. 2014. Kejayaan Indonesia sebagai Negara Maritim (Jalesveva Jayamahe). Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Universitas Negeri Malang melalui journal.um.ac.id